



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT

ASSET REVALUATION

CAPTURING REAL VALUE,
ENHANCING STATE ASSET MANAGEMENT



ANNUAL
REPORT **2017**

Daftar Isi
Table of Content

Kilas Kinerja
Performance at A Glance

Profil DJKN
DJKN Profile

Perkembangan
Pengelolaan Kekayaan
Negara
Developments in
State Asset Management

ASSET REVALUATION

CAPTURING REAL VALUE
ENHANCING STATE ASSET MANAGEMENT



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

3 DAFTAR ISI

Table of Content

10 KILAS KINERJA

Performance at A Glance

12 PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN
Awards & acknowledgements

20 PERISTIWA PENTING 2017
Event Highlights 2017

30 PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL
Director General Forewords

36 PROFIL DJKN

DJKN Profile

38 VISA DAN MISI DJKN
Our Vision and Missions

39 NILAI - NILAI ORGANISASI
Corporate Values

40 STRUKTUR ORGANISASI DJKN
The Organizational Structure

46 PROFIL PEJABAT
The Officials Profile

54 PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

Developments In State Asset Management

56 BARANG MILIK NEGARA
State-Owned Assets

72 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
Separated State Assets

88 PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN
State Claims and Other State Assets

106 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
State Asset Management and Information System

122 PENILAIAN
Valuation

134 LELANG
Auction

152 HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Legal Affairs and Public Relation

174 PERKEMBANGAN INTERNAL

Internal Developments

192 DAFTAR KANTOR PELAYANAN DJKN

Our Offices

200 LAPORAN KEUANGAN DJKN 2017 (AUDITED)

Financial Report DJKN 2017 (AUDITED)

REVALUASI BARANG MILIK NEGARA

REVALUATION OF STATE-OWNED ASSET



Seiring dengan perkembangan pada tiap aspek perekonomian bangsa selama satu dasawarsa terakhir, nilai tercatat untuk aset-aset pemerintah yang tersaji di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pun dirasa kurang dapat mencerminkan kondisi nilai yang sebenarnya. Sebagai gambaran di tahun 2007 nilai aset tetap yang tersaji pada neraca LKPP adalah sebesar Rp 229,07 triliun, selanjutnya berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) tahun 2007-2010, nilai aset tetap yang tersaji pada neraca LKPP tahun 2010 meningkat signifikan menjadi Rp1.184,3 Triliun dan pada tahun 2016 nilainya naik menjadi Rp1.921,79 Triliun. Untuk memperoleh nilai aset tetap terkini dalam LKPP sesuai nilai wajarnya dan untuk membangun database aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari, pemerintah memandang perlu untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tahun 2017 dan 2018 dengan tujuan antara lain untuk:

- 1) memperoleh nilai aset tetap yang *update* dalam laporan keuangan;
- 2) membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari;
- 3) mengidentifikasi BMN *idle*; dan
- 4) meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pelaksanaan revaluasi yang dimulai pada tahun 2017 tidak terlepas dari adanya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Surat DPR Nomor: PW/09793/DPR RI/VI/2016 yang memuat Hasil Keputusan Raker Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI tanggal 23 Mei 2016 pada tanggal 9 Juni 2016, tertulis bahwa Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan untuk melakukan revaluasi aset terhadap BMN yang akan digunakan kembali (*roll over*) sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) SBSN. Dengan demikian, pemerintah tertantang untuk menambah sumber pembiayaan yang berasal dari SBSN. Melalui SBSN, masyarakat terakomodasi untuk berperan dalam pembangunan. Dana yang berhasil dihimpun dalam SBSN telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi pelayanan masyarakat.

Berawal dari hal itu, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah. Selanjutnya, keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMN dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

The developments in each aspect of the nation's economy over the past decade have a part in causing the carrying value of state asset presented in the Balance Sheet of the Financial Reports of the Central Government (LKPP) to distance from its actual value. In 2007, for example, the value of fixed asset presented in the LKPP's balance sheet was Rp.229.07 trillion, while the results of the Inventory and Valuation (IP) in 2007-2010 showed that value of fixed assets presented in the LKPP's balance sheet in 2010 had increased significantly to Rp 1,184.3 trillion, and it soared to Rp1,921.79 trillion in 2016. To obtain the latest fixed asset value in LKPP that is in accordance with its fair value, and to build a better asset database for BMN management in the future, the government considers it necessary to undertake fixed assets revaluation in 2017 and 2018. The revaluation would aim at:

- 1) obtaining the updated value of fixed assets in financial statements;
- 2) building a better BMN database for BMN management in the future;
- 3) identifying idle BMN; and
- 4) increasing the leverage of BMN as an underlying asset for the issuance of Sharia Government Bond (SBSN).

Revaluation that began in 2017 is inseparable from the recommendations of the House of Representatives (DPR) through their letter number: PW/09793/DPR RI/VI/2016 citing the results of the meeting of the Commission XI of the House of Representatives with the Minister of Finance dated 23 May 2016 on June 9, 2016. It was stated that Commission XI of the House Representatives asked the Minister of Finance to revalue BMN to be rolled over as SBSN's underlying assets, posing a challenge for the government to raise funding sources from SBSN. SBSN accommodates people to take a role in the country's development. Funds originated from SBSN have been allocated to infrastructure development for public services.

With that as a background and referring to Government Regulation (PP) Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and PP No. 27 of 2014 concerning Management of State/Regional-Owned Asset (BMN/D), which state that under certain conditions, the Asset Manager may reassess the value of BMN/D that has been determined in the balance sheet of the Central/Regional Government. Eventually, the decision regarding the revaluation of the BMN is carried out nationally based on the provisions of the government.

Dalam rangka revaluasi BMN yang dilakukan tahun 2017-2018, pemerintah telah meminta pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait rencana Penilaian Kembali atas BMN oleh Pemerintah Pusat. Pada intinya, KSAP dan BPK berpendapat bahwa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan tentang pengelolaan BMN saat ini, revaluasi BMN dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan kebijakan/ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Adapun objek pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 berbeda dengan objek IP pada tahun 2007. Objek IP tahun 2007 adalah seluruh aset tetap Pemerintah Pusat, sedangkan objek revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 hanya berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Untuk BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang dilakukan revaluasi hanya berupa jalan dan jembatan serta bangunan air. Revaluasi BMN 2017-2018 tidak dilakukan terhadap seluruh aset tetap. Aset yang dijadikan objek adalah tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jembatan serta bangunan air didasarkan pada pertimbangan:

- a) aset-aset tersebut memiliki potensi kenaikan (perubahan nilai wajar) yang tinggi;
- b) nilai aset tetap yang dijadikan objek revaluasi tersebut memiliki bobot nilai/persentase yang signifikan dari keseluruhan nilai total aset tetap, yaitu senilai 79,9% dari total aset tetap.

Sejalan dengan hasil konsultasi dengan KSAP dan BPK, serta sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014, sebagai dasar hukum pelaksanaan Penilaian Kembali BMN/D, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah. Dengan demikian, kegiatan revaluasi telah berlandaskan hukum yang kuat. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, regulasi pelaksanaan revaluasi BMN diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, serta beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali. Pelaksanaan revaluasi BMN secara resmi telah dicanangkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 29 Agustus 2017. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kegiatan revaluasi BMN merupakan suatu momentum besar berskala nasional yang harus disambut baik dan didukung oleh semua pihak, baik oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Aparat Pengawas Internal Pemerintah K/L, serta Penilai DJKN.

For BMN revaluation carried out in 2017-2018, the government has asked for opinions from the Public Sector Accounting Standards Committee (KSAP) and the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) regarding Central Government's BMN revaluation plan. In essence, KSAP and BPK are of the opinion that in accordance with Government Accounting Standards (SAP) and current regulations on BMN management, it is possible for the government to conduct BMN revaluation based on government provisions that apply nationally.

The object of BMN revaluation in 2017 differed from that of in 2018. The 2007's IP was targeted at all fixed assets of the Central Government, while the object of BMN revaluation in 2017 and 2018 were land, house and buildings, as well as roads, irrigation, and networks acquired up to December 31, 2015. Revaluation of BMN in the form of roads, irrigation, and networks was performed only on roads, bridges, and water building. The 2017-2018's BMN revaluation is not carried out on all fixed assets, but only to land, house and buildings, roads, bridges, and water building, based on the following considerations:

- a) these assets have a high potential to experience an increase in value (changes in fair value);;
- b) the value of fixed assets used as objects of revaluation constitutes a significant value/percentage of the total value of fixed assets, namely 79.9% of the total fixed assets.

In line with the results of consultations with KSAP and BPK, and in accordance with Government Regulation No. 27 of 2014, as the legal basis for the BMN/D Revaluation, the government has issued a Presidential Regulation (Perpres) Number 75 of 2017 concerning Revaluation of State/Regional-Owned Asset. This regulation grants a strong legal basis for revaluation activities. As a follow-up to the presidential regulation, the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 118/PMK.06/2017 concerning Guidelines for the Implementation of State-Owned Asset Revaluation was issued, coupled with several technical guidelines related to the revaluation. The BMN revaluation was officially launched by the Minister of Finance on August 29, 2017. The Minister of Finance remarked that BMN revaluation activities are a great momentum on a national scale that must be welcomed and supported by all parties, both by Asset Managers, Asset Users/Proxy of Asset User, Government Internal Supervisory Apparatus in the Ministries/Agencies, and DJKN Appraiser.

Revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 meliputi tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jembatan, dan bangunan air yang berada pada seluruh K/L baik di dalam maupun di luar negeri yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Target pelaksanaan revaluasi BMN pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 934.409 nomor urut pendaftaran (NUP). Adapun target (setelah perubahan) pelaksanaan revaluasi BMN pada tahun 2017 adalah sejumlah 356.887 NUP dengan rincian sebagai berikut:

- a) tanah sejumlah 42.433 NUP;
- b) bangunan sejumlah 217.464 NUP;
- c) jalan, jembatan dan bangunan air sejumlah 96.990 NUP.

Revaluasi BMN dilakukan oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada 82 (delapan puluh dua) K/L yang memiliki BMN yang menjadi objek revaluasi BMN. Revaluasi BMN dilaksanakan selama periode triwulan III Tahun 2017 sampai dengan triwulan III Tahun 2018. Pada periode triwulan IV 2018 diharapkan semua BMN sudah dikoreksi nilainya pada laporan keuangan K/L. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 dan 2018 merupakan serangkaian kegiatan yang menjadi kerja bersama dari DJKN selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, di mana masing-masing pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan pada Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah yaitu:

- 1) Kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang meliputi kegiatan perumusan kebijakan dan strategi revaluasi BMN, mengkoordinasikan pelaksanaan revaluasi BMN, melaksanakan penilaian BMN, melaksanakan monitoring dan evaluasi revaluasi BMN, serta menyusun dan menyampaikan laporan revaluasi kepada Presiden.
- 2) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang meliputi penyiapan data awal dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan revaluasi BMN, melaksanakan inventarisasi BMN, melaksanakan tindak lanjut hasil revaluasi BMN, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi BMN dalam lingkup Pengguna Barang bersangkutan.

Metode penilaian yang digunakan adalah *full valuation* dan *desktop valuation*. Metode *full valuation* yaitu penilaian dengan cara survei lapangan untuk objek revaluasi BMN berupa tanah, sedangkan *desktop valuation* yaitu penilaian tanpa survei lapangan untuk objek revaluasi BMN berupa bangunan, jalan, jembatan, dan bangunan air. Pemilihan metode

The object of BMN revaluation implementation in 2017 and 2018 includes land, house and buildings, as well as roads, bridges, and water building under all ministries and agencies both at home and abroad which were acquired up to 31 December 2015. BMN revaluation in 2017 and 2018 targeted 934,409 registration numbers (NUP). Meanwhile, the target of BMN revaluation in 2017 was 356,887 NUP with the following details:

- a) land totaling 42,433 NUP;
- b) buildings totaling 217,464 NUP;
- c) roads, bridges and water building totaling 96,990 NUP.

BMN revaluation is carried out by all DJKN Regional Offices and State Asset and Auction Service Office (KPKNL) at 82 (eighty-two) Ministries/Agencies with BMN that are the objects of BMN revaluation. BMN revaluation was carried out during the third quarter of 2017 to the third quarter of 2018. In the fourth quarter of 2018, it is expected that all BMN will have their value revised in the financial statements of Ministries/Agencies. BMN Revaluation in 2017 and 2018 constituted a series of joint work activities between DJKN as Asset Manager and Ministries/Agencies as Asset Users, where each party has the authority and responsibility as mandated in Presidential Decree Number 75 of 2017 concerning Revaluation of State/Regional-Owned Asset, namely:

- 1) Authority and responsibility of Asset Managers include activities to formulate BMN revaluation policies and strategies, coordinate BMN revaluation implementation, carry out BMN Valuation, carry out monitoring and evaluation of BMN revaluation, and prepare and submit revaluation reports to the President.
- 2) Authority and Responsibility of Asset Users which include preparing initial data and documents needed in order to carry out BMN revaluation, performing BMN inventORIZATION, carrying out a follow-up on the results of BMN revaluation, and performing monitoring and evaluation of BMN in relevant Asset Users.

Two valuation methods are put into use—full valuation method and desktop valuation method. Full valuation method, that is valuation through field survey, is applied for BMN in the form of land, while desktop valuation method, which is one without a field survey, is performed on BMN in the form of buildings, roads, bridges, and water building. The two methods are

untuk masing-masing objek revaluasi BMN tersebut dilakukan demi menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan revaluasi BMN itu sendiri. Adapun tahapan dalam pelaksanaan revaluasi BMN meliputi:

- 1) Penyediaan data awal; validitas data awal menentukan keberhasilan pelaksanaan penilaian kembali yang dilaksanakan dengan metode *full valuation* dan *desktop valuation*. Data awal tersebut antara lain berupa data dari SIMAK BMN dan formulir pendataan BMN.
- 2) Kegiatan inventarisasi; kegiatan ini dilaksanakan dengan cara opname fisik/sensus atas BMN untuk memastikan kebenaran dan kondisi BMN.
- 3) Kegiatan penilaian; penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar BMN yang dilaksanakan oleh Penilai.
- 4) Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian; berdasarkan hasil revaluasi, Kementerian/Lembaga melaksanakan tindak lanjut antara lain: koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Koreksi ini memegang peranan penting dalam keseluruhan kegiatan revaluasi BMN yang dapat diandalkan.
- 5) Monitoring dan evaluasi; tahapan ini meliputi sekurang-kurangnya mengenai capaian target, kendala yang dihadapi, dan usulan rekomendasi.
- 6) Pelaporan; laporan kegiatan revaluasi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN.

Sampai dengan 31 Desember 2017 telah dilakukan revaluasi BMN terhadap 365.242 NUP dari total target pada tahun 2017 sebesar 356.887 NUP (102,34%) pada 82 (delapan puluh dua) K/L dengan peningkatan nilai koreksi aset tetap Pemerintah Pusat sebesar Rp1.820.099.607.575.840,- yang sebelumnya berjumlah Rp678.940.608.761.204,- menjadi Rp2.499.040.216.337.040,- atau meningkat sebesar 268,08% dari nilai buku sebelum koreksi nilai wajar. Beberapa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan revaluasi BMN antara lain:

- 1) Rendahnya kemampuan/pengetahuan SDM satuan kerja (satker) mitra KPKNL yang antara lain masih terdapat SDM satker yang belum bisa mengisi form pendataan BMN dengan baik, satker belum memahami metode penilaian yang digunakan saat ini, satker belum memahami proses koreksi serta penyelesaian Laporan Hasil Inventarisasi Penilaian (LHIP) dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) IP yang lama.

employed in BMN revaluation in order to bring about effectiveness and efficiency to the BMN revaluation. BMN revaluation is carried out through six stages:

- 1) Provision of preliminary data; validity of preliminary data will determine the success of the revaluation carried out with full valuation and desktop valuation methods. The preliminary data include data from SIMAK BMN and BMN data collection forms.
- 2) Inventorization; this activity is carried out by means of physical data-checking/census on BMN to ascertain the asset's validity and condition.
- 3) Valuation; the valuation is carried by appraisers out to obtain the BMN's fair value.
- 4) Follow-ups on the results of inventory and valuation; based on the results of the revaluation, the Ministries/Agencies carry out follow-ups. They are, among others, correction of BMN's data and their values on the Financial Report of the Ministries/Agencies. This correction plays a pivotal role in the reliability of the overall BMN revaluation activities.
- 5) Monitoring and evaluation; this stage includes at least the target achievement, the obstacles faced, and the proposed recommendations.
- 6) Reporting; the revaluation activity report is prepared as a form of accountability for the implementation of BMN revaluation.

Up until December 31, 2017, of the total revaluation target of 356,887 registration numbers (NUP), as many as 365,242 NUP (102.34%) in eighty-two Ministries/Agencies have been appraised with an increase in the correction value of the Central Government fixed assets of Rp 1,820,099. 607,575,840—that is from previously Rp 678,940,608,761,204 to Rp 2,499,040,216,337,040, which is an increase of 268.08 % of the book value before correction. Some obstacles, however, surfaced in the implementation of BMN revaluation, such as:

- 1) Inadequate ability/knowledge of the personnel of KPKNL's working units partners. There are still working units' personnel unable to fill in the BMN data collection form properly. They do not understand the valuation method currently used. They have yet to understand the correction process, and it takes a long time for them to prepare the Inventory and Valuation Report (LHIP) and/or the Official Report of IP Reconciliation (BAR).

- 2) Masih lemahnya pengelolaan BMN oleh satker, antara lain satker tidak mengetahui bahwa aset yang dimaksud merupakan BMN, satker tidak dapat menunjukkan lokasi/fisik aset BMN objek revaluasi, tidak mengetahui penggunaan aplikasi SIMAK dan SIMAN, masih terdapatnya ketidaksesuaian antara pencatatan aset BMN dengan fakta di lapangan serta tidak ditemukannya dokumen pendukung terkait BMN terkait seperti sertifikat dan lain-lain.
- 3) Kendala pada pengembangan dan update aplikasi, yakni waktu pengembangan aplikasi bersamaan dengan penyusunan PMK untuk revaluasi, di mana seharusnya sistem aplikasi dikembangkan apabila peraturan sudah siap. Selain itu, proses *User Acceptance Test* (UAT) atau *Quality Assurance* (QA) dari Tim Penguji sistem dilakukan secara parsial dan proses QA yang berulang-ulang menjadikan implementasi update aplikasi selalu terkendala izin dari tim penguji aplikasi.
- 4) Masih terdapat satker yang tidak menyediakan SDM pendamping pada pelaksanaan revaluasi BMN, kendala jarak dan lokasi aset yang sulit untuk dijangkau oleh tim penilai.

Kenaikan nilai koreksi aset tetap pada neraca per 31 Desember 2017 sebesar 267,77% telah menunjukkan bahwa selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai aset tetap yang menjadi objek revaluasi BMN telah mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Nilai inilah yang perlu disajikan di neraca Pemerintah Pusat agar penyajian neraca dapat menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, rakyat mengetahui bahwa aset yang dimiliki oleh republik ini sangat besar dan seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping hal itu, kecermatan dan ketepatan dalam melakukan proses revaluasi BMN merupakan hal mutlak yang harus ada, sehingga pelaksanaan kegiatan ini tetap dapat mempertahankan opini BPK atas LKPP yang telah diraih dengan kerja keras semua pihak pada tahun 2016 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keberhasilan pelaksanaan revaluasi BMN pada tahun 2017 merupakan momen awal yang harus dilanjutkan sampai dengan terselesaikannya seluruh proses revaluasi BMN yang direncanakan rampung pada Triwulan III 2018. Keberhasilan proses ini diharapkan akan memberikan dasar bagi terwujudnya pengelolaan BMN yang jauh lebih modern, yang antara lain diwujudkan dalam penerapan konsep *Highest and Best Use* (HBU) yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terbaik bagi terselenggaranya pemerintahan dan perekonomian nasional.

- 2) The poor BMN management under the working units. Some of the working units did not aware that the assets in question were BMN. They could not spot the location/physical assets of the revaluation objects. They did not know how to use SIMAK and SIMAN applications. There were still discrepancies between BMN asset records and the factual data, and sometimes no supporting documents related to BMN such as certificates, were found.
- 3) Constraints in developing and updating the application, since application development time coincides with the preparation of PMK for revaluation. Ideally, the application system should be developed once the regulations are ready. Moreover, the User Acceptance Test (UAT) or Quality Assurance (QA) is done partially by the testing team, and QA process takes place repeatedly, hindering implementation of application updates due to the application testing team's permission.
- 4) There are still working units do not assign their personnel in the implementation of BMN revaluation. Some BMN locations are also difficult to reach by the revaluation team.

The increase in fixed asset correction value of 267.77% in the balance sheet as of December 31, 2017 has shown that during the last ten years, the value of fixed assets which are the object of BMN revaluation has experienced a significant increase in value. This value needs to be presented in the Central Government's balance sheet so that the presentation of the balance sheet mirrors its actual conditions. Thus, the people know that the assets owned by this country are very large and all can be accounted for.

In addition to that, cautiousness and accuracy in the BMN revaluation process is a must, so that through the implementation this activity, the BPK opinion on LKPP that has been achieved through the hard work of all parties in 2016, namely Unqualified (WTP), can be maintained.

The success of BMN revaluation in 2017 is an early moment that must be escorted until the completion of the entire BMN revaluation process that planned to be completed in the third quarter of 2018. The success of this process is expected to provide a basis for the realization of a much more modern BMN management, which among others is realized through the application of the concept of Highest and Best Use (HBU), which will ultimately provide the best contribution to the advancement of national governance and economy.



Daftar Isi
Table of Content

Kilas Kinerja
Performance at A Glance

Profil DJKN
DJKN Profile

Perkembangan
Pengelolaan Kekayaan
Negara
Developments in
State Asset Management

Kilas Kinerja

Performance at A Glance



Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Integrity

We think, speak, behave and act properly and uphold the code of ethics and moral principles.

Penghargaan & Pengakuan

Awards and Acknowledgements



CITRA PELAYANAN PRIMA TAHUN 2008 **2008 EXCELLENT SERVICE AWARD**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram pada tahun 2008.

In 2008, KPKNL (State Asset and Auction Service Office) Mataram received Citra Pelayanan Prima award from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform.



KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2009 **2009 MODEL SERVICE AWARD**

Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang sebagai Pemenang Keempat Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2009.

In 2009, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Serang for public service improvement. The service office stood as the fourth winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.



KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2010 **2010 MODEL SERVICE AWARD**

Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2010.

In 2010, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Palembang for public service improvement. The service office ranked as the second winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.



MUSEUM REKOR INDONESIA INDONESIAN RECORDS MUSEUM

Pada tahun 2010 DJKN memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Unit Organisasi Pertama yang Berhasil Melakukan Penilaian BMN di 22.619 Satuan Kerja dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan.

In 2010 DJKN received an award from the Indonesian Records Museum (MURI) as The First Organization Unit Successfully Conducting the Valuation of BMN Fair Value in 22,619 Working Units within 2 Years 8 Months.



SURVEY INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK KPK KPK's PUBLIC SECTOR INTEGRITY SURVEY

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menduduki peringkat ketiga dari hasil survei Integritas Sektor Publik di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 dengan skor 7,51.

With a score 7.51, KPKNL ranked third in the 2011's Indonesia public sector integrity survey conducted by Corruption Eradication Commision (KPK).



KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2011 2011 MODEL SERVICE AWARD

Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2011.

In 2011, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Denpasar for public service improvement. The service office stood as the second winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.

Penghargaan & Pengakuan

Awards and Acknowledgements



KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2012 2012 MODEL SERVICE AWARD

Menteri Keuangan memberikan Penghargaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh sebagai Peringkat Pertama Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tahun 2012.

In 2012, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Banda Aceh for public service improvement. The service office ranked as the winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.



SISTEM MANAJEMEN MUTU SNI ISO 9001:2008 SNI ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Pada tahun 2013, Sucofindo International Certification Services memberikan sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 kepada Direktorat Penilaian, DJKN, Kementerian Keuangan dalam lingkup Pelayanan Penilaian Dalam Rangka Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

In 2013, Sucofindo International Certification Services delivered certificate of SNI ISO 9001:2008 Quality Management System to Directorate of Valuation, DJKN, Ministry of Finance regarding valuation services for the purpose of asset transfers and utilizations within the Ministry of Finance.



KANTOR PELAYANAN DENGAN STATUS WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
SERVICE OFFICES WITH STATUS OF CLEAN AND SERVING BUREAUCRACY REGION

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V telah berhasil memperoleh Status Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2013 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3226/M. PAN-RB/10/2013.

KPKNL Jakarta V successfully obtained the status of Clean and Serving Bureaucracy Region (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/ WBBM) of Year 2013 from Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform based on Letter of Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. B/3226/M. PAN-RB/10/2013.



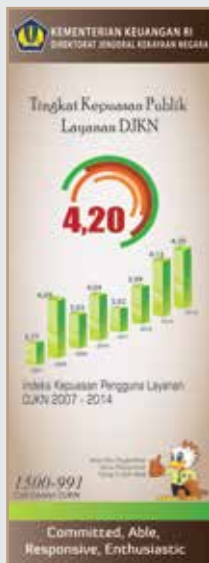
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2012 DENGAN CAPAIAN STANDAR TERTINGGI
2012 FINANCIAL STATEMENT WITH THE HIGHEST STANDARD ACHIEVEMENT

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada DJKN selaku Bendahara Umum Negara (BUN)-Investasi Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

On behalf of Indonesian Government, Minister of Finance gave an award to DJKN as State General Treasurer-Government Investment for Successfully compiling and presenting 2012 Financial Statement with the highest standard achievement in Government Accounting and Financial Reporting.

Penghargaan & Pengakuan

Awards and Acknowledgements



SURVEI OPINI PENGGUNA LAYANAN DJKN TAHUN 2014

2014 SURVEY ON USER'S OPINION

Hasil survei Institut Pertanian Bogor (IPB) 2014 menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan DJKN meningkat dari tahun lalu dengan indeks 4,20 menempati posisi ketiga diantara unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

The result of survey by Bogor Agricultural University (IPB) in 2014 showed the satisfaction level of DJKN service users increased from the prior year with index 4.20 to be on third position among other units of first echelon in Ministry of Finance environment.



LAYANAN DIKLAT DJKN

DJKN EDUCATION & TRAINING SERVICES

Pada tahun 2014, The British Standards Institution memberikan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 kepada Sekretariat DJKN, Kementerian Keuangan dalam lingkup Layanan Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

In 2014, The British Standards Institution conferred the Quality Management System certificate of ISO 9001:2008 to DJKN Secretariat, Ministry of Finance in Education and Training Services Directorate-General of State Asset Management.



UNIT KERJA YANG BERKATEGORI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI *WORK UNIT UNDER CATEGORY OF CORRUPTION-FREE PREMISE*

Pada tahun 2014, KPKNL Surabaya berhasil meraih penghargaan atas prestasinya memperoleh Predikat sebagai Unit Kerja yang berkategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

In 2014, KPKNL Surabaya won an award for its achievement, and is entitled as Work Unit with Corruption-Free Premise (WBK) from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform.



UNIT KERJA YANG BERKATEGORI WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI *WORK UNIT UNDER CATEGORY OF CLEAN BUREAUCRACY AND SERVICE-ORIENTED PREMISE*

Pada tahun 2014, KPKNL Banda Aceh berhasil meraih penghargaan atas prestasinya memperoleh Predikat sebagai Unit Kerja yang berkategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

In 2014, KPKNL Banda Aceh won an award for its achievement, and is entitled as Work Unit with Clean Bureaucracy and Service-Oriented Premise (WBBM) from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform.

Penghargaan & Pengakuan

Awards and Acknowledgements



KANTOR PELAYANAN DENGAN STATUS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM)

KPKNL SORONG FOLLOWED SUIT TO BECOME A CORRUPTION-FREE ZONE

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong telah berhasil memperoleh Status Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2016 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB.

In 2016, State Asset and Auction Service Office (KPKNL) Sorong succeeded in obtaining Corruption-Free Zone (WBK) and Clean and Serving Bureaucratic Zone (WBBM) status awarded by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (PAN and RB).



PENYELENGGARAAN LELANG DENGAN PENAWARAN MELALUI E-AUCTION

E-AUCTION AWARDED WITH TOP 99 PUBLIC SERVICE INNOVATIONS 2015

Pada tahun 2015, modernisasi lelang terus dikembangkan DJKN diantaranya sistem lelang dengan penawaran melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disebut *E-auction*. *E-auction* termasuk dalam kategori Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2015 yang merupakan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

In 2015, DJKN continued to develop auction services, among them by organizing auction bidding system through Information and Communication Technology (ICT) called *e-auction*. *E-Auction* was selected into the category of Top 99 Public Service Innovation 2015, an award from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucracy Reform.



KANTOR PELAYANAN DENGAN STATUS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM)
KPKNL SURABAYA OBTAINED WBK AND WBBM STATUS

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya telah berhasil memperoleh Status Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2016 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB.

The State Asset and Auction Service Office (KPKNL) Surabaya succeeded in obtaining the status of Corruption-Free Zone (WBK) and Clean and Serving Bureaucratic Zone (WBBM) from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (PAN and RB).

Peristiwa Penting 2017

2017 Event Highlights

10 Januari
January



Sinergi Untuk Negeri

Sinergy for the Country

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho beserta seluruh jajaran pejabat eselon II Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN menghadiri Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan dalam rangka menyatukan gerak dan langkah di tahun 2017 dengan tema Sinergi Untuk Negeri di Aula Mezanine Gedung Juanda I Jakarta (10/01).

Acara yang dikemas dalam format *Ministry of Finance Executive Gathering* tersebut dihadiri pejabat eselon I dan II lingkup Kementerian Keuangan seluruh Indonesia.

Director-General of State Asset Management Sonny Loho along with the entire echelon II officials in DJKN's Head Office and Regional Offices attended the National Working Meeting of the Ministry of Finance held to unify DJKN's personnel in facing the year of 2017.

Held in Mezanine Hall of Juanda I Building, Jakarta (10/01), the meeting, under the theme "Synergy for the Country", was also joined by echelon I and II officials in the Ministry of Finance throughout the country.

31 Januari
January



Penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II DJKN

Signing of Performance Contract for DJKN's Echelon II Officials

Sebanyak 27 Pejabat Eselon II di lingkungan DJKN baik Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two 2017 dan Piagam Manajemen Risiko 2017 di hadapan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho pada Selasa, 31 Januari 2017 di aula lantai 5 Kantor Pusat DJKN.

On Tuesday, January 31, in DJKN's Head Office, a total of 27 echelon II officials in DJKN both in Head Office and in Regional Offices signed Performance Contract of Ministry of Finance Two 2017 and Risk Management Charter 2017 in the presence of Director-General of State Asset Management Sonny Loho.

17 Februari
February



DJKN Hibahkan Barang Gratifikasi Ke Pemkab Dharmasraya

DJKN granted five cars to the Regency Government Dharmasraya

DJKN menghibahkan lima unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) merk Mitsubishi Strada Double Cabin kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya.

Kelima unit mobil dengan nilai total sebesar Rp492 juta tersebut merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari barang gratifikasi penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DJKN granted five Mitsubishi Strada Double Cabin cars as a grant to the Regency Government Dharmasraya.

The five vehicles with a total value of Rp 492 million are State Owned-Assets derived from gratification items seized by the Corruption Eradication Commission (KPK).

23 Februari February



Sosialisasi Pengurusan Piutang Negara

Dissemination of State Claims Management

Sosialisasi peraturan di bidang Pengurusan Piutang Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL) DJKN pada Kamis 23 Februari 2017 bertempat di Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Acara diikuti jajaran Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kanwil DJKN Banten, Kanwil DJKN Jawa Barat, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta unit vertikal dibawahnya.

On Thursday, February 23, 2017, at DJKN Regional Office DKI Jakarta, Directorate of State Claims and Other State Assets (PNKNL) DJKN held a socialization of regulation in the field of State Claims Management.

Officials in DJKN Regional Office DKI Jakarta, DJKN Regional Office Banten, DJKN Regional Office West Java, DJKN Regional Office Central Java, and DJKN Regional Office West Kalimantan, including their respective vertical units, participated in this event.

3 Maret March



Pelantikan Pejabat Eselon II DJKN

Swore-in of Echelon II Officials

Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (03/03/17).

Di lingkup DJKN tercatat 10 (sepuluh) orang pejabat eselon II - baik promosi, mutasi maupun pengukuhan - dilantik pada acara yang digelar di Aula Mezanine, Gedung Juanda I, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta tersebut.

Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati swore-in and took the oath of echelon II officials in the Ministry of Finance in the Directorate General of State Asset Management (DJKN), Directorate General of Treasury (DJPb) and Directorate General of Tax (DJP) (03/03/17).

As for DJKN, there were ten echelon II officials—due to promotions, rotation, and inaugurations—inaugurated at the event that held at Mezanine Hall, Juanda I Building, Jakarta.

15 Maret March



Rakertas Bidang Penilaian DJKN

DJKN's Limited Working Meeting on Valuation

Mengusung tema "Revaluasi Aset Untuk Negeri", Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Penilaian DJKN dibuka oleh Sekretaris DJKN Dodi Iskandar mewakili Dirjen Kekayaan Negara pada 15 Maret 2017, di Jakarta.

Rakertas tersebut dihadiri Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN serta Kepala Seksi Penilaian Kanwil DJKN dan KPKNL.

On March 15, 2017, in Jakarta, under the theme of "Asset Revaluation for the Country", Limited Working Meeting (Rakertas) on Valuation was kicked off by Secretary of DJKN Dodi Iskandar, representing the Director-General of State Asset Management.

The meeting was attended by Heads of Valuation Division and Heads of Valuation Section within the DJKN Regional Offices and Service Offices.

Peristiwa Penting 2017

2017 Event Highlights

4 April
April



Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Melalui Belanja Investasi

Land Procurement for National Strategic Projects through Investment Expenditures

Pada tanggal 4 April 2017 dilaksanakan peluncuran skema pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta 23 perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

On April 4, 2017, a funding scheme for national strategic project land procurement was launched.

The Memorandum of Understanding (MoU) was signed by the State Asset Management Agency (LMAN), the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), Toll Road Regulatory Agency (BPJT) and 23 companies incorporated in Toll Road Enterprises (BUJT).

13 April
April



Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN Hulu Migas

Coordinating Meeting on Asset Management of Upstream Oil and Gas

DJKN menyelenggarakan rapat koordinasi pengelolaan BMN yang berasal dari kegiatan hulu migas, pada Kamis (13/4/17) dengan tema "Penyempurnaan Database dan Pelaporan BMN Hulu Migas melalui Sistem Operasi Terpadu untuk Menunjang Pengelolaan BMN Hulu Migas yang Akurat, Tepat Waktu dan Akuntabel".

On Thursday (04/13), DJKN convened a coordination meeting on management of State-Owned Assets (BMN) deriving from upstream oil and gas activities. "Improving Database and Reporting of Upstream Oil and Gas through an Integrated Operating System to Support an Accurate, Timely, and Accountable Management of BMN deriving from upstream oil and gas," was the theme of the meeting.

2 Mei
May



Direktur PNKNL Melakukan On Site View KKKS Premier Oil Di Kepulauan Natuna

On-Site Visit to PSC Contractor in Natuna

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan on site visit ke salah satu platform pada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Premier Oil di Kepulauan Natuna pada 2-3 Mei 2017.

Director of State Claims and Other State Assets (PNKNL) of the Directorate-General of State Asset Management (DJKN) conducted an on-site visit to one of Premier Oil's (PSC Contractor) platforms in the Natuna Islands on May 2-3 2017.

15 Mei
May



Rakernas DJKN 2017

DJKN's 2017 National Working Meeting

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DJKN Semester I 2017 pada Senin, 15 Mei 2017 di Aula Mezzanine Gedung Juanda I, Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.

Acara dihadiri seluruh pimpinan Kantor Pusat DJKN dan pimpinan unit vertikal baik Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan dari seluruh penjuror negeri.

Mengusung tema "Peningkatan Produktivitas Aset Menuju Zero Idle Guna Meningkatkan Kapasitas Fiskal", Mardiasmo yang hadir didampingi beberapa pejabat eselon 1 Kemenkeu, menyampaikan beberapa hal yang juga berasal dari pemikiran Menteri Keuangan.

Vice Minister of Finance of the Republic of Indonesia Mardiasmo opened DJKN's National Working Meeting (Rakernas) of DJKN in the first semester of 2017 on Monday, May 15, 2017 at the Mezzanine Hall of the Juanda I Building, Ministry of Finance (Kemenkeu) Jakarta Complex.

The event was attended by DJKN's officials in its Head Office and all vertical units, both in Regional Offices and in Service Offices from all over the country.

Mardiasmo who was accompanied by several echelon 1 officials in the Ministry of Finance, conveyed several things including the Minister of Finance's thoughts in the meeting which themed with "Increasing Asset Productivity Towards Zero Idle to Increase Fiscal Capacity".

5 Juni
June



Waves Annual Partnership Meeting Ke-7

WAVES's 7th Annual Partnership Meeting

Program Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (WAVES) secara berkala menyelenggarakan Annual Partnership Meeting. Tahun ini, Rwanda menjadi tuan rumah Annual Partnership Meeting WAVES ke-7, mulai tanggal 5– 8 Juni 2017.

Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN diwakili oleh Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL), Purnama T. Sianturi bersama dengan Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas KND, Arik Hariyono.

The Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (WAVES) program regularly holds Annual Partnership Meetings. This year, Rwanda hosted the WAVES's 7th Annual Partnership Meeting, June 5–8, 2017.

The Ministry of Finance, in this case DJKN, was represented by the Director of State Claims and Other State Assets (PNKNL) Purnama T. Sianturi and Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and the Effectiveness of Restricted State Assets, Arik Hariyono.

Peristiwa Penting 2017

2017 Event Highlights

16 Juni
June



DJKN dan Bank Mandiri Berkomitmen Perkuat Kerja Sama Lelang

DJKN and Bank Mandiri are Committed to Strengthening their Cooperation on Auction

Dalam rangka optimalisasi lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan eksekusi Jaminan Fidusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sepakat melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan lelang agunan kredit pada Jumat, 16 Juni 2017 di Kantor Pusat DJKN Jakarta.

To optimize the execution auction under Article 6 of the Law on Security Rights (UUHT) and the execution of fiduciary, the Directorate General of State Asset Management (DJKN) and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed the cooperation agreement on the implementation of auction of fiduciary object. The signing was held on Friday, June 16th, 2017 at DJKN's Head Office, Jakarta.

3 Juli
July



Menteri Keuangan Lantik Direktur Jenderal Kekayaan Negara Yang Baru

Minister of Finance Assigned the new Director-General of State Asset Management

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik dan mengambil sumpah Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Isa Rachmatarwata sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara yang baru pada Senin, 3 Juli 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati swore in and took the oath of Expert Staff of the Minister of Finance on the Policy and Regulation of Financial Services and Capital Markets Isa Rachmatarwata as the new Director-General of State Asset Management on Monday, July 3rd, 2017 at the Mezzanine Hall, Juanda I Building, Jakarta.

11 Juli
July



Rapat Pimpinan Eselon II Perdana Bagi Dirjen Kekayaan Negara Yang Baru

The First Echelon II Leadership Meeting with New Director General of State Asset Management

Dalam rangka pengenalan kantor wilayah dan pemahaman mengenai isu-isu strategis yang terjadi pada lingkup eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) khususnya di tingkat daerah, DJKN menyelenggarakan rapat pimpinan tingkat eselon II pertama di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara baru, pada Selasa, 11 Juli 2017 bertempat di kantor pusat DJKN.

To grasp and share the knowledge of regional offices and strategic issues that occur in the echelon II scope of the Directorate General of State Asset Management (DJKN), especially at the regional level, on Tuesday, July 11th, 2017 at DJKN's head office, DJKN organized the first echelon II leadership meeting under the leadership of the new Director-General of State Asset Management.

5 Agustus

August



Kunjungan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ke PT. Badak NGL Bontang

Director-General of State Asset Management Made a Visit to Bontang

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata didampingi Sekretaris DJKN Dodi Iskandar, Kepala Kanwil DJKN Kaltimara Surya Hadi, Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Kaltimara Hermawan Sukma Jati, Kepala Subdivisi Optimalisasi Aset Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Asep Wawan Kurniawan dan Kepala KPKNL Bontang Suharno melakukan kunjungan dan peninjauan aset Barang Milik Negara (BMN) di PT Badak NGL Kota Bontang pada Sabtu, 5 Agustus 2017.

Director-General of State Asset Management Isa Rachmatarwata, accompanied by Secretary of DJKN Dodi Iskandar, Head of Regional Office of DJKN Kaltimara Surya Hadi, Head of General Division of DJKN Regional Office Kaltimara Hermawan Sukma Jati, Head of Subdivision of Asset Optimization State Asset Management Agency (LMAN) Asep Wawan Kurniawan, and Head of KPKNL Bontang Suharno made a visit and review of State-Owned Assets (BMN) at PT Badak NGL, in Bontang City, on Saturday, August 5th, 2017.

29 Agustus

August



Menteri Keuangan Canangkan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Minister of Finance Announced Revaluation of State-Owned Assets

Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati mencanangkan Penilaian Kembali BMN pada Selasa, 29 Agustus 2017 di Gedung Dhanapala, Jakarta.

Pencanangan itu sekaligus menandai dimulainya Penilaian Kembali BMN oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama-sama Kementerian/Lembaga.

The Minister of Finance of the Republic of Indonesia Sri Mulyani Indrawati announced the revaluation of State-Owned Assets (BMN) on Tuesday, August 29th, 2017 at Dhanapala Building, Jakarta.

The declaration marked the start of the revaluation of BMN by the Ministry of Finance through the Directorate General of State Asset Management (DJKN) along with the Ministries/ Agencies.

Peristiwa Penting 2017

2017 Event Highlights

4 September
September



Pelantikan Pejabat Eselon IV DJKN

Inauguration of DJKN's Echelon IV Officials

Kreativitas sangat dibutuhkan agar organisasi selalu berkembang. "Salah satu caranya adalah DJKN akan menerapkan pola mutasi yang terorganisasi. Penyegaran untuk organisasi sangat penting agar kreativitas terus berkembang," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata saat melantik 125 eselon IV/Pengawas, di Aula DJKN.

Along with its ever growing organization, DJKN is in need of creativity. "One way is that DJKN will implement organized job mutation patterns. It is very important to refresh the organization for creativity to grow," said Director-General of State Asset Management Isa Rachmatarwata when inaugurating 125 echelon IV / Supervisors, in DJKN Hall.

22 September
September



DJKN Lelang Barang Rampasan dan Gratifikasi KPK

Auction of Confiscated Goods and ex-Gratifications Items Handed over by KPK

DJKN melelang barang rampasan beberapa terpidana korupsi dan barang eks gratifikasi KPK. Barang rampasan dengan nilai limit total lebih dari Rp2 milyar dan barang eks gratifikasi dengan nilai limit total lebih dari Rp41 juta dilelang pada Lelang Expo 2017 hasil kolaborasi DJKN dengan Persatuan Balai Lelang Indonesia (Perbali).

DJKN auctioned off the confiscated objects and ex-gratifications items related to several corruption convicts and ex-gratification goods handed over by KPK. The confiscated goods with a total limit price of more than Rp 2 billion and ex-gratification goods with a total limit price of more than Rp 41 million were auctioned at Auction Expo 2017, a collaboration between DJKN and Indonesian Auction House Association (Perbali).

6 Oktober
October



Peringati HUT ke-11, DJKN Perkuat Peran Sebagai Manajer Aset

Hailing its 11th Anniversary, DJKN Strengthened Its Role as Asset Manager

"Saat ini DJKN telah bertransformasi dari sebelumnya sebagai *Asset Administrator* menjadi *Asset Manager* dengan penguatan regulasi bidang pengelolaan BMN dan implementasi *good governance* serta reformasi birokrasi dalam pengelolaan BMN," tegas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata pada Pembukaan Pekan Olahraga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-11 DJKN di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta (06/10).

30 Oktober October



KPKNL Serang Berhasil Jadi Pemenang Lomba Kantor Implementasi PUG 2017

KPKNL Serang Came out a Winner in Competition for Offices Implementing Gender Mainstreaming 2017

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang sebagai wakil DJKN kembali menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu pemenang dalam Lomba Kantor Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada upacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-71 yang dilaksanakan pada Senin, 30 Oktober 2017 di Jakarta.

Representing DJKN, State Asset Management and Auction Service Office (KPKNL) Serang, again received an award from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia as one of the winners of competition for offices implementing gender mainstreaming, at the 71st commemoration Hari Oeang Republic of Indonesia (Indonesian Banknote Day) held on Monday, 30 October 2017 in Jakarta.

"Currently DJKN has transformed into an asset manager from its previous role as asset administrator, thanks to the strengthening of regulation of BMN management and implementation of good governance and bureaucratic reform in BMN management," said Director-General of State Asset Management Isa Rachmatarwata at the Opening of Sports Week in commemoration of DJKN 11th Anniversary at the DJKN's Regional Office DKI Jakarta (06/10).

2 November November



BMN Awards 2017

BMN Award 2017

DJKN menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2016 atau dikenal dengan nama BMN Awards Tahun 2017 di Aula Gedung Dhanapala, Kamis, 2 November 2017.

BMN Awards merupakan pemberian apresiasi atau penghargaan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN atas kinerja pengelolaan BMN yang dilakukan oleh K/L dan pada tahun ini fokus penilaian kinerja meliputi utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN dan sertifikasi BMN.

In the Hall of Dhanapala Building, Thursday, November 2, 2017, DJKN held 2016's Reflection and Appreciation of Management of BMN (State-Owned Assets) in Ministries/Agencies, known as the 2017 BMN Awards.

BMN Awards is form of appreciation or award from the Minister of Finance as BMN Manager for the performance of BMN management carried out by Ministries/Agencies. This year's focus was performance assessment which comprised BMN utilization, BMN reporting, and BMN certification.

Peristiwa Penting 2017

2017 Event Highlights

7 November November



Pekan Transformasi DJKN 2017

DJKN Transformation Week

Gebyar Pekan Transformasi DJKN mulai digelar pada Selasa, 7 November 2017 di aula Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 5 Selatan, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata yang membuka kegiatan ini mengungkapkan bahwa dalam hidup tidak bisa dipungkiri akan penuh dengan perubahan, dan Kementerian Keuangan harus siap dengan adanya perubahan itu.

Gebyar DJKN Transformation Week started on Tuesday, November 7, 2017 in the hall Syafruddin Prawiranegara Building II 5th Floor South, Central Jakarta.

Director General of State Asset Management Isa Rachmatarwata who opened this activity revealed that life is undeniably full of changes, and the Ministry of Finance must be prepared for the changes.

5 Desember December



DJKN dan WAVES Menyusun Program Kegiatan Tahun 2018

DJKN and WAVES Prepared an Activity Program for 2018

Pada tanggal 5 Desember 2017 digelar acara *Focused Group Discussion* (FGD) Membangun *Work Plan, Roadmap, dan Capacity Planning* bagi Penyusunan Laporan Potensi Fiskal SDA bersama dengan WAVES *Task Team Leader* Juan Pablo Castaneda di Ruang Rapat Dit. PNKNL Lantai 5 Utara. Untuk menjaga kerja sama antara DJKN bersama dengan Program *Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services* (WAVES), terutama dalam pengarusutamaan (*mainstreaming*) pengakuntansian Sumber Daya Alam (SDA), diskusi dilakukan mengenai bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

On 5 December 2017, DJKN together with WAVES Task Team Leader Juan Pablo Castaneda held a Focused Group Discussion (FGD) to discuss the preparation of the Work Plan, Roadmap and Capacity Planning for Preparation of the Fiscal Potential Report of SDA. The discussion which took place in the Meeting Room of the Directorate PNKNL was aimed at maintaining the cooperation between DJKN and the Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (WAVES), especially in mainstreaming the Natural Resources Administration (SDA). It also discussed the form of cooperation to be implemented in 2018.

20 Desember

December



DJKN Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Mitra Pengelolaan Piutang PNB KOMINFO

DJKN Received Award from the Ministry of Communication and Information as Agency Partner in Receivable Management for Non-Tax Revenue

DJKN Kementerian Keuangan menerima penghargaan dalam acara Apresiasi Mitra Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kategori Lembaga Mitra Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio pada Rabu, 20 Desember 2017 di Gedung Menara Merdeka Kominfo, Jakarta.

Wednesday, December 20, 2017 at Menara Merdeka Building, Jakarta, DJKN received an award during the Appreciation of Partners hosted by the Ministry of Communication and Information for the category of Agency Partner in Receivable Management for Non-Tax State Revenue in the form Fee on Radio Frequency Usage Right.

Pengantar Direktur Jenderal

Director General's Forewords



Isa Rachmatarwata ►

Direktur Jenderal
Kekayaan Negara
Director-General of
State-Asset Management

“Pada tahun 2017, total realisasi pembiayaan investasi pemerintah melalui DJKN sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA-BUN) adalah sebesar Rp 60,76 triliun yang mencakup Penyertaan Modal Negara (PMN), Dana Bergulir, Pembiayaan BLU-LMAN, Kewajiban Penjaminan, dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.”

“In 2017, the total realization of government investment financing through DJKN as the Budget User Assistant of the State General Treasurer (PPA-BUN) amounted to Rp 60.76 trillion, which includes Government Equity Participation (PMN), Revolving Fund, BLU-LMAN Financing, and the National Education Development Fund.”

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, yang melalui rahmat dan karunia-Nya, DJKN, khususnya pada tahun 2017, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan dalam beberapa hal, melampaui target yang telah ditetapkan.

Berbagai momen, tantangan, peluang, dan keberhasilan telah tertoreh di sepanjang tahun 2017. Laporan Tahunan DJKN Tahun 2017 ini, disusun antara lain sebagai salah satu upaya kami untuk merekam dan menyajikan beragam tonggak penting upaya pengelolaan kekayaan negara sepanjang 2017, sekaligus sebagai upaya untuk mendokumentasikan berbagai pelajaran yang berguna bagi langkah DJKN di masa mendatang.

Telah lebih dari satu dekade DJKN menempuh aneka upaya dan langkah dalam menjalankan amanatnya sebagai unit organisasi yang mengelola kekayaan negara. DJKN terus berbenah dan berinovasi mengimbangi putaran zaman untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, serta pelayanan lelang senantiasa terlaksana secara optimal.

Praise God the Almighty, who through His mercy and grace, DJKN, especially in 2017, could perform its duties and functions well and, in some ways, could exceed the set targets.

Various moments, challenges, opportunities, and success have been recorded throughout 2017. This DJKN's 2017 Annual Report drawn up, among others, as one of our efforts to record and present a variety of important accounts in the management of state asset throughout 2017, as well as an effort to document useful lessons for DJKN's course in the future.

For more than a decade, DJKN has taken various efforts and steps in carrying out its mandate as an organizational unit managing state assets. DJKN continues to improve and innovate to keep pace with the time to ensure that the management of state asset, state claims, and auction services is always undertaken optimally.

Pengantar Direktur Jenderal

Director General's Forewords

Pertama-tama, berbagai upaya dan langkah yang ditempuh itu membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM). DJKN memerlukan personel yang menyokong tugasnya sebagai manajer aset yang andal dan profesional. Upaya pembenahan dari dalam organisasi dilakukan terutama dengan menekankan pada peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia di DJKN. Maka, *capacity building*, pelatihan, dan seminar, baik di dalam maupun di luar negeri, diselenggarakan dengan diiringi penyempurnaan peraturan dan sarana yang mewadahi meningkatnya dan kompetensi dan kapasitas SDM, termasuk terus mendorong terimplementasinya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yang pada 2016, telah mendapatkan nomenklatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Kekayaan negara memiliki potensi yang besar untuk mendukung penerimaan negara. DJKN menyadari betul hal ini. Maka, sebagai pengelola kekayaan negara, DJKN berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan aset negara, terutama melalui utilisasi aset. Alhamdulillah, hingga dengan tahun 2017, target utilisasi selalu berhasil diraih, dengan kenaikan nilai yang cukup signifikan.

Pengelolaan kekayaan negara berupa Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Di bidang penatausahaan BMN, DJKN telah menorehkan catatan penting antara lain melalui capaian kenaikan nilai aset tetap Pemerintah Pusat dalam LKPP Tahun 2017 sebesar Rp 1.821 triliun atau sebesar 271,3 persen, yakni dari nilai buku sebesar Rp 678 triliun menjadi nilai wajar sebesar Rp 2.499 triliun.

We realize that, first of all, those efforts and steps demand human resources readiness. DJKN requires personnel who support its duties as a reliable and professional asset manager. Improvement efforts from within the organization are done primarily by emphasizing on enhancing the capacity and integrity of human resources in DJKN. Thus, capacity building, training, and seminars, both at home and abroad, were organized, along with improvements to regulations and tools that accommodate the increased human resources' competency and capacity, including continuing to encourage the implementation of the Functional Position of Government Valuer which in 2016 had gained the nomenclature in Regulation of the Minister of PAN-RB Number 18 of 2016 concerning the Functional Position of Government Valuer.

State asset bears great potential to support state revenues. DJKN is fully aware of this. Thus, as a manager of state asset, DJKN is committed to optimizing the management of state asset, especially through asset utilization. Thank God, until 2017, the utilization target has always been achieved, with a significant increase in value.

The management of state assets in the form of State-Owned Assets (BMN) as regulated by Government Regulation Number 27 of 2014 covers planning of needs and budgeting, procurement, use, utilization, security and maintenance, appraisal, removal, transfer, administration, guidance, supervision, and control. In the field of administration of BMN, DJKN has recorded important records, among others, through achievement of central government fixed asset value in the LKPP (Central Government Financial Statements) 2017 amounted to Rp 1,821 trillion, or 271.3 percent, namely from the previously book value of Rp 678 trillion to fair value of Rp 2.499 trillion.

Perlu dicatat, nilai aset tetap terkini dalam LKPP yang sesuai nilai wajarnya di atas, diperoleh melalui program revaluasi. Namun, revaluasi juga memiliki tujuan lain termasuk membangun database aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di masa depan, mengidentifikasi BMN *idle*; dan meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Revaluasi BMN dilakukan oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada 82 K/L yang memiliki BMN yang menjadi objek revaluasi BMN.

Pada tahun 2017, total realisasi pembiayaan investasi pemerintah melalui DJKN sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA-BUN) adalah sebesar Rp 60,76 triliun yang mencakup Penyertaan Modal Negara (PMN), Dana Bergulir, Pembiayaan BLU-LMAN, Kewajiban Penjaminan, dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Selain itu, untuk mendukung giatnya pembangunan di bidang infrastruktur, pengembangan ekspor, perumahan, dan membantu pemenuhan kebutuhan listrik nasional, Kementerian Keuangan c.q. DJKN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemilik modal pada BUMN/Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan terus mendorong agar lima BUMN/Lembaga tersebut memberikan kontribusi masing-masing secara maksimal. Kelima BUMN/Lembaga itu adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Geodipa Energi (Persero).

It is worth noting that the current fixed asset value in the LKPP which is in fair value, was obtained through the revaluation program. However, the revaluation also has other objectives including to establish a better asset database for the interest of future BMN management, to identify idle BMN; and to rise BMN leverage as an underlying asset in the issuance of State Sharia Bonds (SBSN). Revaluation of BMN is performed by all DJKN Regional Offices and Service Offices at 82 Ministries/Agencies entrusting with BMN which become the object of BMN revaluation.

In 2017, the total realization of government investment financing through DJKN as the Budget User Assistant of the State General Treasurer (PPA-BUN) amounted to Rp 60.76 trillion, which includes Government Equity Participation (PMN), Revolving Fund, BLU-LMAN Financing, and the National Education Development Fund. In addition, to support the intensive development in infrastructure, export development, housing, and to help fulfilling the national electricity needs, Ministry of Finance in this case DJKN as the General Meeting of Shareholders (GMS) or owners of capital in SOEs/Institutions under the supervision of the Minister of Finance continues to encourage each of the five SOEs/Institutions to render their maximum contribution. The five SOEs/Institutions are PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), and PT Geodipa Energi (Persero).

Pengantar Direktur Jenderal

Director General's Forewords

Di bidang pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), yakni semua kekayaan negara yang berasal dari hibah/sumbangan atau sejenisnya, dan semua kekayaan negara yang bersumber dari pelaksanaan kontrak/perjanjian, perolehan berdasarkan ketentuan undang-undang, dan perolehan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, DJKN terus melakukan upaya yang diharapkan dapat mendukung paradigma DJKN sebagai *revenue center* melalui meningkatnya kontribusi DJKN terhadap penerimaan negara.

Tahun 2017, mengikuti kecenderungan sejak tahun 2013, realisasi pencapaian Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) adalah Rp 296 miliar—meski lebih baik ketimbang realisasi tahun 2016, yakni Rp 242 miliar. Realisasi PNDS diperoleh dari eksekusi (penjualan barang jaminan) maupun noneksekusi (angsuran/pelunasan hutang, restrukturisasi hutang, penebusan maupun pencairan barang jaminan). Namun, dilihat dari jumlah BKPN yang dapat diselesaikan, realisasi tahun 2017 telah melebihi target, yakni sebanyak 21.447 BKPN atau 129,26 persen dari jumlah yang ditargetkan 16.592 BKPN.

Sementara itu, kinerja pelayanan lelang juga menunjukkan hasil yang positif, dengan kontribusi yang selalu di atas target, baik sisi Bea Lelang, Frekuensi Lelang, maupun Pokok Lelang. Ini tentu menambah angin segar bagi pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tentu, pencapaian ini juga tak lepas dari berbagai pembinaan, kerja sama, dan terobosan di bidang lelang, dengan mengedepankan kemudahan, efisiensi, kepraktisan, dan keamanan transaksi.

Catatan dan capaian DJKN di tahun 2017 yang sebagian telah tersampaikan dalam uraian di atas mencerminkan tingginya semangat DJKN dalam mengelola kekayaan negara. Rasanya tepat jika tahun ini kami mengambil *"Asset Revaluation: Capturing Real Value, Enhancing State Asset Management"* sebagai tema Laporan Tahunan ini.

In the field of management of Other State Assets (KNL), namely all state assets deriving from grants/donations or the like, and all state assets derived from the exercise of contracts/agreements, acquisitions under the provisions of the law, and acquisition under a court decision that has obtained permanent legal force, DJKN continues to make efforts to support DJKN's paradigm as revenue center through increasing DJKN's contribution to state revenue.

By 2017, following the trend since 2013, the realization of achievement of Settled State Claims (PNDS) was Rp 296 billion—although still better than the realization in 2016, which was Rp 242 billion. PNDS realization is derived from execution (sale of collateral) and non-execution (installment/debt repayment, debt restructuring, redemption or disbursement of collateral). However, based on the number of BKPN (Case file of State Claims) that can be settled, the 2017's realization has exceeded the target of 21,447 case files, or 129.26 percent of the targeted amount of 16,592 case files.

Meanwhile, performance of auction service also shows encouraging results, with contribution always above the target, in terms of Auction Fee, Auction Frequency, and Auction Price. This certainly brings fresh air to non-tax state revenue (PNBP). Of course, this achievement also can not be separated from the various training and education, cooperation, and breakthroughs in the field of auction, which are directed to promote convenience, efficiency, practicality, and security of transactions.

The DJKN's records and achievements in 2017 that some have been highlighted in the above description reflect the high spirit of DJKN in managing state asset. So it is just appropriate that this year we take *"Asset Revaluation: Capturing Real Value, Enhancing State Asset Management"* as the theme of this Annual Report.

Seraya berharap agar keberhasilan di tahun ini dapat menjadi pijakan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang, penghargaan yang tinggi dan terima kasih saya berikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai DJKN. Sebab, semua keberhasilan dan catatan bagus adalah buah dari komitmen, kerja keras, dan loyalitas Anda semua.

Atas nama DJKN, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan DJKN atas kepercayaan dan dukungan mereka sepanjang 2017.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita untuk melanjutkan tugas dan fungsi DJKN di tahun-tahun mendatang.

While hoping that this year's success can be a foothold for future performance improvements, my high appreciation and gratitude goes to all DJKN officials and staff. For these all success and good records are the fruit of your commitment, hard work, and loyalty.

On behalf of DJKN, I would also like to extend my gratitude and thankfulness to all DJKN stakeholders for their trust and support throughout 2017.

May God Almighty always bestow His grace and guidance upon us to continue the duties and functions of DJKN in the coming years.



Isa Rachmatarwata

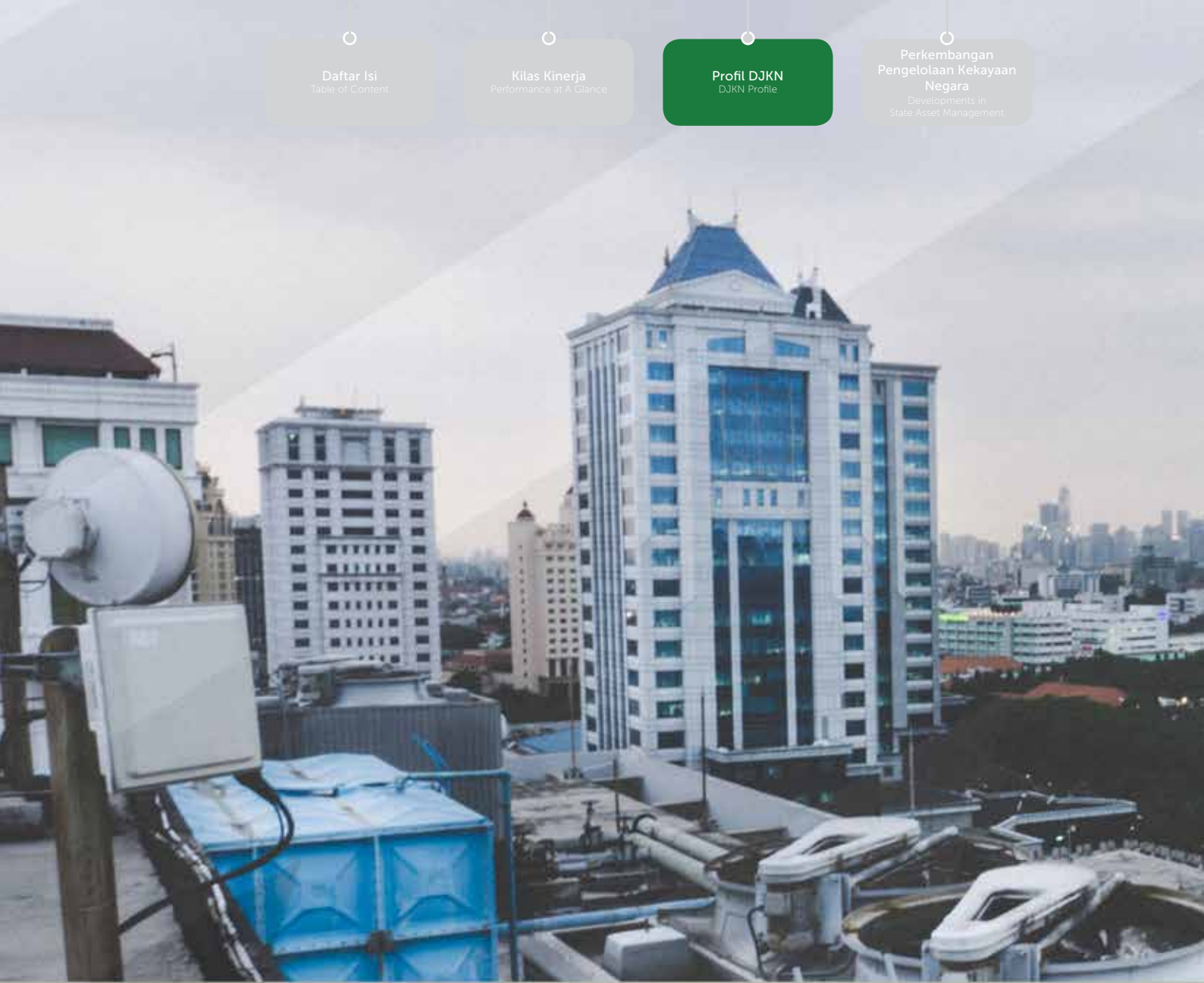
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Director-General of State-Asset Management

Daftar Isi
Table of Content

Kilas Kinerja
Performance at A Glance

Profil DJKN
DJKN Profile

Perkembangan
Pengelolaan Kekayaan
Negara
Developments in
State Asset Management



Profil DJKN

DJKN Profile



Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Professionalism

We work thoroughly and accurately on the best competence with full commitment and responsibility.

Visi dan Misi DJKN

Our Vision and Missions

Visi Vision

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.

To be a professional and accountable institution in charge of managing state asset for the greatest interest of the people.

Misi Mission

- 1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.**
1. Optimizing government revenue, advancing efficiency in the government expenditure, and improving effectiveness of state asset management.
- 2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.**
2. Safeguarding physical, administrative, and legal aspect of state asset.
- 3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.**
3. Increasing governance and added value of government investment management.
- 4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.**
4. Conducting state asset valuation to convey a value which is fair and dependable as a reference for various purposes of valuation.
- 5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.**
5. Managing state claims in effective, efficient, transparent, and accountable manner.
- 6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.**
6. Upholding auction in effective, efficient, transparent, accountable, fair and competitive manner as a trade instrument that accommodates the public's interest.

Nilai-nilai Organisasi

Corporate Values



INTEGRITAS INTEGRITY

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

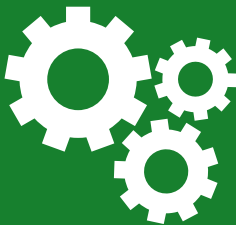
We think, speak, behave and act properly and uphold the code of ethics and moral principles.



PROFESIONALISME PROFESSIONALISM

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

We work thoroughly and accurately on the best competence with full commitment and responsibility.



SINERGI SYNERGY

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

We build a productive internal collaboration and ensure a harmonious partnership with stakeholders, to produce useful and quality works.



PELAYANAN SERVICE

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

We provide services that meet the satisfaction of stakeholders and we do it wholeheartedly, transparently, immediately, accurately and securely.



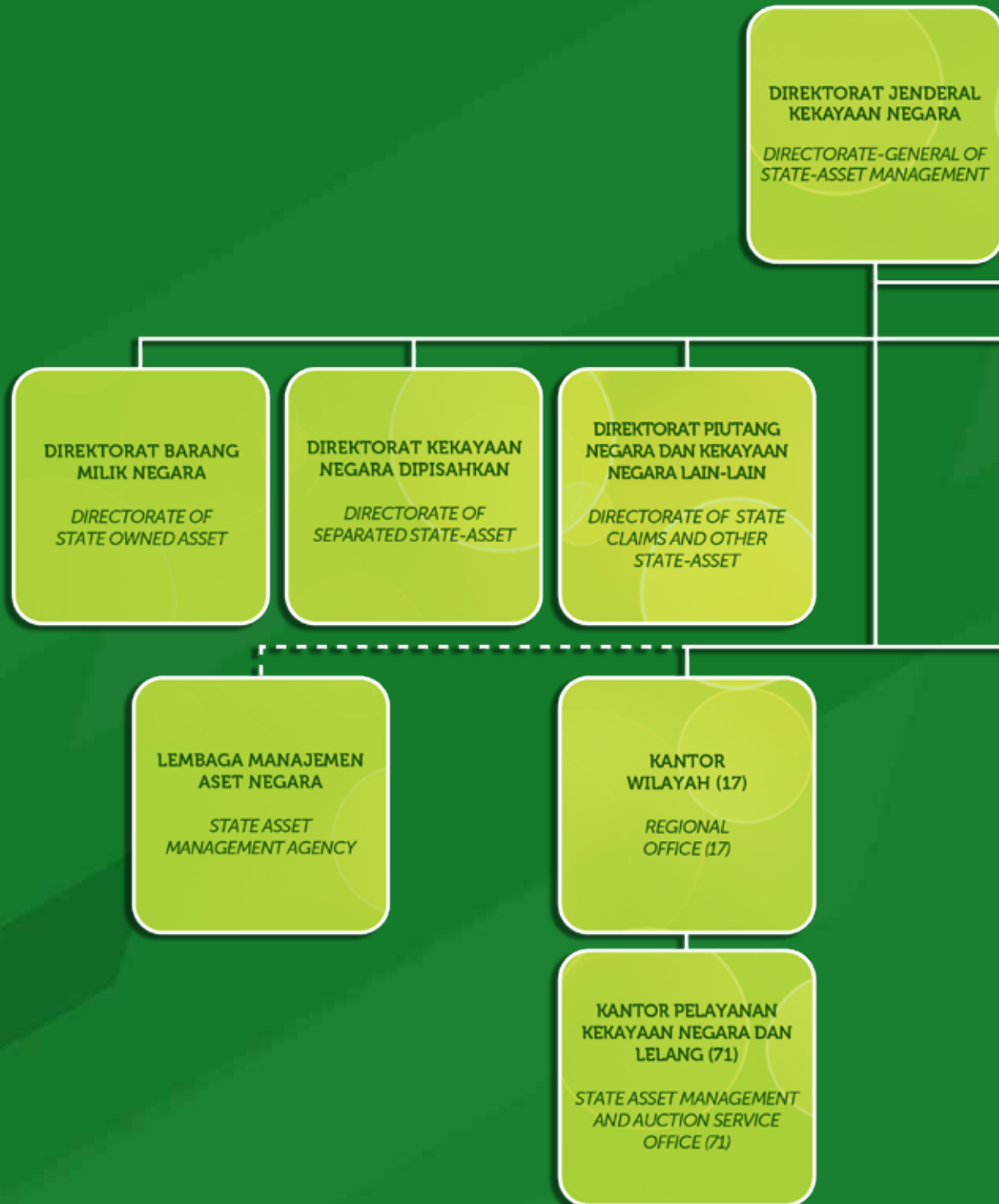
KESEMPURNAAN EXCELLENCE

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

We always make improvements in all areas to be and to give the best.

Struktur Organisasi DJKN

DJKN Organization Structure



**SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL**

*SECRETARIAT OF
DIRECTORATE-GENERAL*

**DIREKTORAT
PENGELOLAAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
SISTEM INFORMASI**

*DIRECTORATE OF STATE
ASSET MANAGEMENT AND
INFORMATION SYSTEM*

**DIREKTORAT
PENILAIAN**

*DIRECTORATE OF
VALUATION*

**DIREKTORAT
LELANG**

*DIRECTORATE OF
AUCTION*

**DIREKTORAT HUKUM &
HUBUNGAN
MASYARAKAT**

*DIRECTORATE OF LEGAL
AFFAIRS & PUBLIC
RELATIONS*

**TENAGA PENGKAJI
OPTIMALISASI
KEKAYAAN NEGARA**

*SENIOR ADVISOR FOR
STATE ASSET
OPTIMIZATION*

**TENAGA PENGKAJI
HARMONISASI
KEBIJAKAN**

*SENIOR ADVISOR FOR
POLICY HARMONIZATION*

**TENAGA PENGKAJI
RESTRUKTURISASI,
PRIVATISASI DAN
EFEKTIVITAS KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN**

*SENIOR ADVISOR FOR
RESTRUCTURING,
PRIVATIZATION AND
EFFECTIVENESS OF
SEPARATED STATE ASSET*

Organisasi DJKN

DJKN Organization

PERKEMBANGAN ORGANISASI DJKN

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENTS

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Struktur organisasi DJKN terdiri dari Direktur Jenderal sebagai pimpinan unit eselon I dan membawahi 8 (delapan) unit eselon II, yaitu 1 (satu) Sekretariat dan 7 (tujuh) Direktorat Teknis.

Adapun susunan organisasi DJKN terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Penilaian, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan pendayagunaan dan kerjasama operasional aset yang bertujuan untuk optimalisasi aset dibentuklah Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara sebagaimana telah diganti dengan PMK Nomor 57/PMK.01/2017.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DJKN didukung oleh kantor vertikal di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN. Instansi vertikal di lingkungan DJKN terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 85 (delapan puluh lima) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

The Directorate-General of State Asset Management (DJKN) has the task of formulating and implementing technical policies and standardization in the field of state assets, state claims, and auctions based on the Minister of Finance Regulation Number 234/PMK.01/2015 concerning the Organization and Working Procedure of the Ministry of Finance. Organizational structure of DJKN consists of the Director-General as the head of the echelon I unit in charge of eight echelon II units, namely a Secretariat and seven Technical Directorates.

DJKN comprises Secretariat of the Directorate-General, Directorate of State-Owned Assets, Directorate of Separated State Assets, Directorate of State Claims and Other State Assets, Directorate of State Asset Management and Information Systems, Directorate of Valuation, Directorate of Auction, and Directorate of Legal Affairs and Public Relations. In addition, in carrying out asset utilization and asset operational cooperation aimed at state asset optimization, a State Asset Management Agency was established as a Public Service Agency under and responsible to the Minister of Finance through the Directorate General of State Asset Management based on the Minister of Finance Regulation No. 219/PMK.01/2015 on the Organization and Working Procedures of the State Asset Management Agency as amended by PMK Number 57/PMK.01/2017.

In performing its duties and functions, according to Minister of Finance Regulation Number 263/PMK.01/2016 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No 170/PMK.01/2012 on Organization and Working Procedures of DJKN Vertical Units, DJKN is supported by vertical units spread across the country. The vertical unit of DJKN consists of 17 Regional Offices and 85 State Asset and Auction Service Offices (KPKNL).

Dari 85 KPKNL yang ada, sampai dengan saat ini telah efektif beroperasi adalah 71 KPKNL termasuk KPKNL Mamuju yang dibuka dan diresmikan pada tahun 2017, dimana sebelumnya peran operasionalnya dilaksanakan oleh KPKNL Pare-pare dan KPKNL Palopo. Berada di ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, KPKNL Mamuju memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. KPKNL Mamuju memiliki wilayah kerja yang meliputi Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara, Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, dan Kab. Mamasa.

Diharapkan dengan keberadaannya di Provinsi Sulawesi Tengah, KPKNL Mamuju dapat mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara dari pengelolaan aset, serta mampu mengakselerasi perekonomian masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun susunan organisasi Kantor Wilayah DJKN terdiri dari Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, Bidang Lelang, dan Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, sedangkan susunan organisasi KPKNL terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Hukum dan Informasi, dan Seksi Kepatuhan Internal.

Currently, of the existing 85 service offices, 71 service offices have been fully operated, with KPKNL Mamuju, having opened and inaugurated in 2017, becoming the most recent operational service office. Previously, its operational role was carried out by KPKNL Pare-pare and KPKNL Palopo. Located in the capital of Central Sulawesi Province, KPKNL Mamuju may play a strategic role in the management of state asset, state claims, valuation, and auctions of the scope of Central Sulawesi Province. With working area covering Mamuju Regency, North Mamuju Regency, Majene Regency, Polewali Mandar Regency, and Mamasa Regency.

KPKNL Mamuju is expected to participate in economic acceleration in Central Sulawesi Province by optimazing both state assets management and state revenues deriving from asset management.

The organizational structure of Regional Offices of DJKN consists of General Affair Division; State Assets Management Division; Valuation Division; State Claims Division; Auction Division; Internal Compliance, Legal, and Information Division. Meanwhile, each State Asset and Auction Service Office (KPKNL) comprises General Affairs Subdivision; State Owned Asset Management Section; Valuation Service Section; State Claims Section; Auction Service Section; Legal Affairs and Information Section; and Internal Compliance Section.



Profil Direktur Jenderal, Sekretaris, Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Direktur Utama LMAN

Profiles of Director General, Secretary, Directors, Senior Advisors, and President Director Of LMAN



1

Ir. Isa Rachmatarwata M.Math
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Director General of State-Asset Management

2

Dodi Iskandar Ak., M.A
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Secretary of Directorate General of State Asset Management

3

Encep Sudarwan S.E., M.A.
Direktur Barang Milik Negara
Director of State-Owned Assets

4

Drs. Dedi Syarif Usman, Ak., M.A
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
Director of Separated State Asset

5

Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum.
Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
Director of State Claims and Other State Assets

6

Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M.
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Director of State Asset Management and Information System

7

Meirijal Nur, S.E., M.B.A
Direktur Penilaian
Director of Valuation



8

Lukman Effendi, S.E., M.M.
Direktur Lelang
Director of Auction

9

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani S.H., M.Hum.
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Director of Legal Affairs and Public Relations

10

Eko Prasetyo S.E., MA.
Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara
Senior Advisor for State Asset Optimization

11

Sudarsono S.H., L.L.M.
Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
Senior Advisor for Policy Harmonization

12

Arik Hariyono, S.Pi., M.Si
Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan
Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset

13

Rahayu Puspasari, S.E., M.B.A., D.B.A.
Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara
President Director of the State Asset Management Agency

Profil Direktur Jenderal, Sekretaris, Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Direktur Utama LMAN

Profiles of Director General, Secretary, Directors,
Senior Advisors and President Director of LMAN



Ir. Isa Rachmatarwata M.Math

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Director General of State-Asset Management



Dodi Iskandar Ak., M.A

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Secretary of Directorate General of State Asset
Management

Mulai menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara sejak 3 Juli 2017. Beliau merupakan alumnus dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master of Math di University of Waterloo, Ontario, Canada pada tahun 1994.

Started to serve as Director-General of State Asset Management since July 3rd, 2017. He graduated from Bandung Institute of Technology in 1990. He obtained a Master of Math degree at the University of Waterloo, Ontario, Canada in 1994.

Mulai menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak 11 November 2013. Beliau merupakan alumnus dari Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master of Arts in Economics dari University Of Colorado, Denver, Amerika Serikat pada tahun 2002.

Assigned as Secretary of the Directorate General of State Assets Management since November 11th, 2013. He graduated from Diploma IV of State College of Accountancy (STAN) in 1990 and obtained his Master of Arts in Economics from University of Colorado At Denver, USA in 2002.



Encep Sudarwan S.E., M.A.

Direktur Barang Milik Negara

Director of State-Owned Assets



Drs. Dedi Syarif Usman, Ak., M.A

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan

Director of Separated State Asset

Mulai menjabat sebagai Direktur Barang Milik Negara DJKN sejak 21 Agustus 2017. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Master of Arts in Economics dari Claremont Graduate University, California, Amerika Serikat pada tahun 1998.

Assumed his position as Director of State-Owned Assets since August 21st, 2017. He graduated from the Faculty of Economics of Padjadjaran University in 1991 and obtained his Master of Arts in Economics degree from Claremont Graduate University, California, USA in 1998.

Mulai menjabat sebagai Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 17 Juni 2013. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Master of Arts in Economics dari University Of Colorado, Denver, Amerika Serikat pada tahun 1998.

Appointed as Director of Separated State Assets since June 17th, 2013. He graduated from the Faculty of Economics of Parahyangan University in 1991 and obtained his Master of Arts degree in Economics from University of Colorado at Denver, USA in 1998.

Profil Direktur Jenderal, Sekretaris, Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Direktur Utama LMAN

Profiles of Director General, Secretary, Directors,
Senior Advisors and President Director of LMAN



Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

Director of State Claims and Other State Assets



Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Director of State Asset Management and
Information System

Mulai menjabat sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain sejak 3 September 2015. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002. Beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2007.

Named as Director of State Claims and Other State Assets since September 3rd, 2015. He is an alumnus of the Faculty of Law, Padjajaran University of '90 and obtained his Master of Humanities degree from the University of North Sumatera in 2002. In 2007, he obtained his Doctor of Law from University of North Sumatera, Medan.

Mulai menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sejak 18 Februari 2016. Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master of Laws in International Legal Studies dari The American University pada tahun 1995 serta memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2010.

Serving as Director of State Asset Management and Information Systems since February 18th, 2016. He is an alumnus of the Faculty of Law at the University of Indonesia of '90 and obtained his Master of Laws from The American University in 1995 and obtained a Doctoral degree in Law at the University of Indonesia in 2010.



Meirijal Nur, S.E., M.B.A

Direktur Penilaian
Director of Valuation

Mulai menjabat sebagai Direktur Penilaian sejak 12 Agustus 2014. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas pada tahun 1993 dan memperoleh gelar Master of Business Administration (M.B.A) dari Nanzan University, Nagoya, Jepang pada tahun 2001.

Assuming his duty as Director of Valuation since 12 August 2014. He obtained his Bachelor of Economics at Andalas University in 1993 and obtained his Master of Business Administration (M.B.A) from Nanzan University, Nagoya, Japan in 2001.



Lukman Effendi, S.E., M.M.

Direktur Lelang
Director of Auction

Mulai menjabat sebagai Direktur Lelang sejak 18 Februari 2016. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Named as Director of Auctions since February 18th, 2016. He is an alumnus of the Faculty of Economics of Islamic University Jakarta Of '89 and obtained a Master of Management degree from the University of Indonesia in 1998.

Profil Direktur Jenderal, Sekretaris, Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Direktur Utama LMAN

Profiles of Director General, Secretary, Directors,
Senior Advisors and President Director of LMAN



Tri Wahyuningsih Retno Mulyani S.H., M.Hum.

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Director of Legal Affairs and Public Relations

Mulai menjabat sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat sejak 21 Agustus 2017. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2004.

Began serving as Director of Legal Affairs and Public Relations since February 18th, 2016. She is an alumnus of the Faculty of Law, Jenderal Soedirman University of '89 and obtained her Master of Humanities degree from Parahyangan Catholic University in 2004.



Eko Prasetyo S.E., MA.

Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara
Senior Advisor for State Asset Optimization

Mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara sejak 21 Agustus 2017. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka pada tahun 2003 dan memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia pada tahun 2016.

Appointed as as Senior Advisor for State Asset Optimization since August 21st, 2017. He graduated from the Faculty of Economics, Open University in 2003 and obtained his Master in Administrative Sciences from the University of Indonesia in 2016.



Sudarsono S.H., L.L.M.

Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

Senior Advisor for Policy Harmonization

Mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan sejak 18 Februari 2016. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada pada tahun 1995 dan memperoleh gelar Master of Laws dari The American University, Washington, Amerika Serikat pada tahun 1999.

Serving his terms as Senior Advisor for Policy Harmonization since February 18th, 2016. He graduated from the Faculty of Law, Gadjah Mada University in 1995 and obtained his Master of Laws degree from The American University, Washington, United States, in 1999.



Arik Hariyono, S.Pi., M.Si

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan

Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset

Mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 3 Maret 2017. Beliau merupakan alumnus dari Institut Teknologi MARA Shah Alam Selangor, Malaysia tahun 1994, dan mendapatkan gelar Master of Sains dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2001.

Has been serving as Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Restricted State Assets since 3 March 2017. He graduated from MARA University of Technology, Shah Alam, Malaysia in 1994; and obtained his Master of Science degree from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 2001.

Profil Direktur Jenderal, Sekretaris, Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Direktur Utama LMAN

Profiles of Director General, Secretary, Directors,
Senior Advisors and President Director of LMAN



Rahayu Puspasari, S.E., M.B.A., D.B.A.

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara

President Director of the State Asset Management
Agency

Mulai menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara sejak 3 Maret 2017. Beliau merupakan alumnus dari Diploma III Akuntansi STAN tahun 1994, memperoleh Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas Jakarta pada tahun 1998. Gelar Master of Business Administration diperoleh dari Monash University, Victoria, Australia pada tahun 2002, kemudian memperoleh gelar Doctor of Business Administration dari Curtin University, Australia pada tahun 2015.

Appointed as President Director of the State Asset Management Agency since March 3rd, 2017. She graduated from Diploma III State College of Accountancy (STAN) in 1994, and earned her Bachelor of Economics from STIE Perbanas Jakarta in 1997. She earned a Master of Business Administration degree from Monash University, Victoria, Australia in 2002, and later, in 2015, she obtained her doctoral degree in Business Administration from Curtin University, Australia.

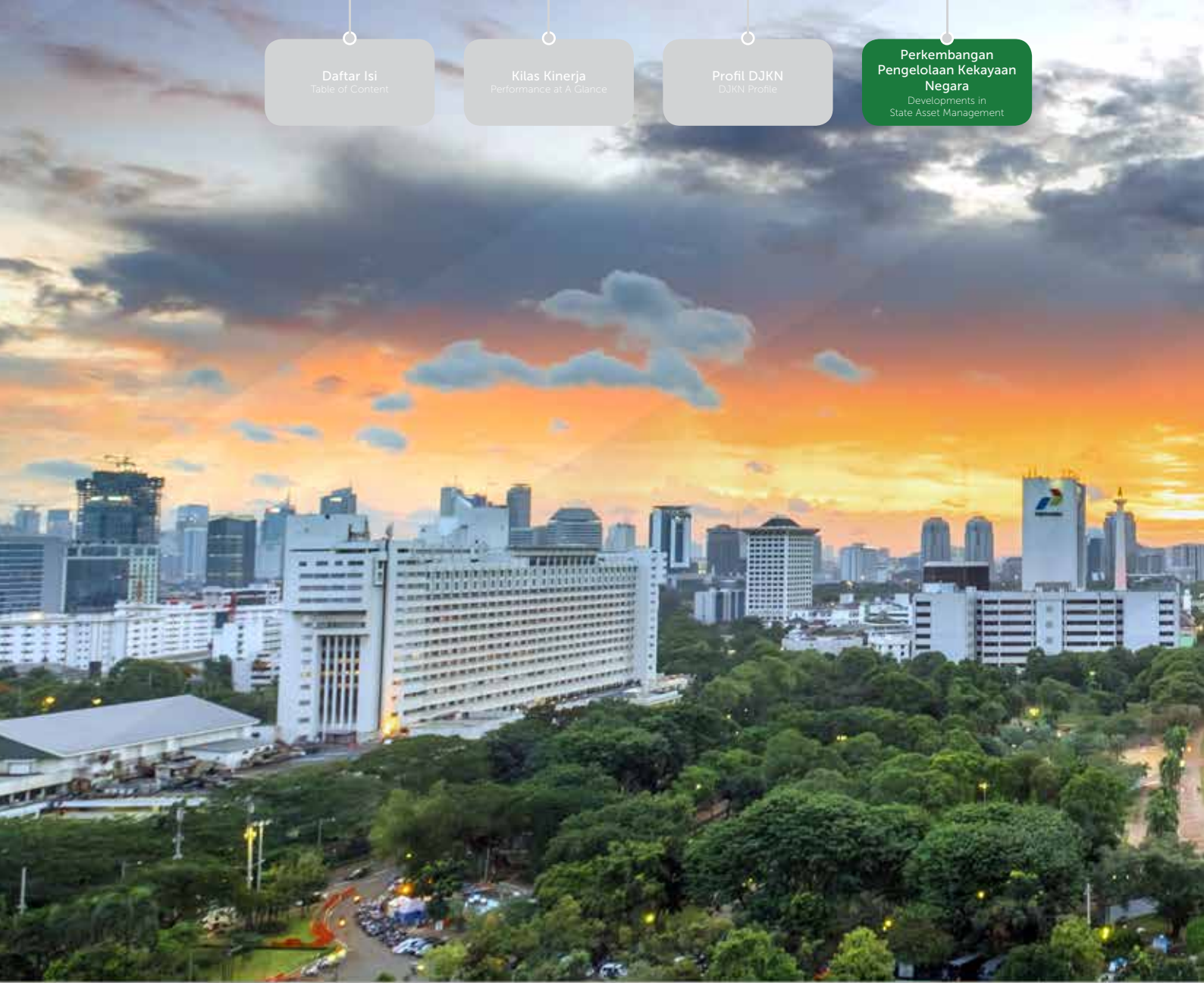


Daftar Isi
Table of Content

Kilas Kinerja
Performance at A Glance

Profil DJKN
DJKN Profile

Perkembangan
Pengelolaan Kekayaan
Negara
Developments in
State Asset Management



Perkembangan Pengelolaan Kekayaan Negara

Development in State Asset Management



Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Synergy

We build a productive internal collaboration and ensure a harmonious partnership with stakeholders, to produce useful and quality works.

Barang Milik Negara

The Management of State-Owned Assets

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya sebanyak 3.912 bidang tanah. Dengan demikian, capaian kinerja pensertifikatan BMN berupa tanah tahun 2017 sebesar 105% yaitu 3.912 bidang dari target sebanyak 3.729 bidang.

Until the end of 2017, the number of parcels of land the certificates of which have been issued was 3,912. Thus, the achievement of certification of State-Owned Assets in the form of land in 2017 reached 105%, namely 3,912 parcels of land, higher than the target of 3,729 parcels of land.



Program Pensertifikatan BMN Berupa Tanah

Certification Program for State-Owned Assets in the form of land

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa BMN/D berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertifikatan BMN berupa tanah maka diterbitkan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut salah satunya mengatur tentang BMN berupa tanah harus disertifikatkan dengan bukti sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. K/L yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut serta adanya temuan BPK atas LKPP tahun 2011, maka Pengelola Barang dalam hal ini DJKN bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2012 dan sampai dengan saat ini masih berjalan. Pengelola Barang mengoordinasikan pelaksanaan pensertifikatan BMN berupa tanah pada seluruh Kementerian/Lembaga dengan tujuan agar seluruh BMN berupa tanah segera dapat disertifikatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program percepatan pensertifikatan menggunakan alat bantu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2015 tentang Pelaksanaan Identifikasi dan Pendataan Serta Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/Lembaga. Adapun alur pelaksanaan pensertifikatan BMN berupa tanah adalah sebagai berikut:

As mandated by Article 43 Paragraph (1) Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional-Owned Assets that State/Regional-Owned Assets (BMN/D) in the form of land must be certified on behalf of the Government of the Republic of Indonesia or of the Regional Government concerned. In a bid to carry out certification, joint regulations between the Minister of Finance and the Head of the National Land Agency were issued in November 2009, namely Regulation Number 186/PMK.06/2009 and Number 24 of 2009 concerning the Certification of State-Owned Assets in the form of Land. The joint regulations stipulate, among others, that State-Owned Assets in the form of land must be certified with rights of use certificates on behalf of the Government of Indonesia, in this case, the relevant Ministries/Agencies.

Following up on the provisions of the Joint Regulation and the findings of the BPK on 2011 Financial Report of Central Government, Asset Manager, in this case, DJKN, together with the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency and Ministries/Agencies carried out the BMN certification acceleration program in the form of land from 2012 onward. With the aim that all BMNs in the form of land can immediately be certified in accordance with applicable regulations, the Asset Manager coordinates the implementation of BMN certification in the form of land in all Ministries/Institutions.

The acceleration of the certification program is carried out using the Government Land Data Management Information System application (SIMANTAP) in accordance with the provisions of the Circular of the Director-General of State Asset Management No. SE-3/KN/2015 concerning Implementation of Identification and Data Collection and Acceleration of Certification of State-Owned Assets in the Form of Land in the Ministry/Institution. The flow of the implementation is as reproduced below.

Barang Milik Negara

The Management of State-Owned Assets

- Satuan kerja K/L melakukan identifikasi BMN berupa tanah yang telah ditatausahakan baik yang sudah dan/atau belum bersertifikat atas nama pihak Pemerintah RI dan menyampaikan ke KPKNL;
- KPKNL melakukan verifikasi atas bidang tanah tersebut dengan mengklasifikasikan bidang tanah yang sudah dan/atau belum bersertifikat dengan alas hak tertentu atas perolehan tanah;
- Tanah yang telah dilakukan verifikasi dilakukan pembahasan bersama antara KPKNL, Satker, dan Kantor Pertanahan untuk menentukan bidang tanah yang belum bersertifikat sebagai target pensertifikatan ke dalam daftar indikatif dan daftar nominatif berdasarkan penganggaran dan alokasi anggaran pada tahun anggaran berjalan (menyesuaikan dengan alur penganggaran);
- Berdasarkan kesepakatan target pensertifikatan bidang tanah tersebut, satuan kerja mengajukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh tindak lanjut mulai dari kelengkapan dokumen alas hak perolehan tanah dan status free and clear, pengukuran sampai dengan penerbitan surat keputusan pemberian hak dan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan.
- Working units within the Ministries/Agencies identify BMN in the form of land that have been administered both those that have been certified and those that yet to be certified on behalf of the Indonesian Government, and conveyed them to KPKNL;
- KPKNL verifies the parcels of land by classifying them according to their basis of ownership rights;
- The verified lands are to be brought to joint discussions involving KPKNL, working units, and the National Lands Agency to determine the lands that have not been certified as a target for certification into the indicative list and nominative list of assets based on budgeting and budget allocation in the on-going fiscal year (attuned to the budgeting flow);
- Based on the agreement to certify the parcels of land, the working unit submits land registration to the National Land Agency to obtain follow-up, starting from the completeness of the documents on the land acquisition rights, status of free and clear, the measurement, up to the issuance of a decree on the rights to lands, and the issuance of land certificates by the National Land Agency.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh DJKN selama tahun 2017 dalam rangka percepatan pensertifikatan BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga antara lain sebagai berikut:

Activities carried out by DJKN during 2017 in order to accelerate the certification of BMN in the form of land in the Ministry/Agencies include the following.

1. Penyusunan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertifikatkan tahun 2018. Daftar indikatif tahun 2018 disampaikan kepada Kementerian ATR/ BPN melalui surat Nomor S-13/KN.2/2017 tanggal 20 Januari 2017.
2. Pembentukan Komite Kerja/Kelompok Kerja program percepatan pensertifikatan BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga tahun 2017 melalui Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 808/KM.1/2017 tentang Pembentukan Komite Kerja dan Kelompok Kerja Tingkat Pusat Program Percepatan Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017;
1. Preparation of indicative list of parcels of land to be certified in 2018. The list was then submitted to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through letter Number S-13/KN.2/2017 dated January 20, 2017.
2. Establishment of Working Committees/Working Groups to accelerate the certification of BMN in the form of land in the Ministries/Agencies in 2017 through the Decree of the Minister of Finance as follows.
 - a. Minister of Finance Decree Number 808/KM.1/2017 concerning the Establishment of a Working Committee and Working Group at the Central Level for the Acceleration of Certification Program for State-Owned Assets in the form of land in 2017, dated August 14, 2017;

- Paying attention to the input and problems that occurred in the second quarter of the SIMANTAP V5 application, improvements were made to SIMANTAP application and a number of activities were conducted as follows.

Barang Milik Negara

The Management of State-Owned Assets

4. *Video conference* bimbingan teknis aplikasi SIMANTAP kepada seluruh Kanwil DJKN dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2017 dengan agenda pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian sertifikasi serta pemberian bimbingan teknis operasional aplikasi SIMANTAP.
5. Rapat koordinasi percepatan pensertifikatan BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2017 bertempat di Auditorium A Gd. Frans Seda sesuai dengan undangan Direktur BMN Nomor S-293/KN.2/2017 tanggal 6 Desember 2017 dengan mengundang 59 Kementerian/Lembaga. Adapun agenda kegiatan ini adalah evaluasi capaian sertifikasi, upaya mempercepat penyelesaian pensertifikatan tanah BMN, dan diskusi penyelesaian permasalahan terkait penerbitan sertifikat dan penganggaran.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, jumlah bidang tanah yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan serta diinput ke dalam aplikasi SIMANTAP sebanyak 80.564 bidang tanah yang terdiri dari 42.699 bidang tanah sudah bersertifikat (53% bidang tanah bersertifikat) dan 37.865 bidang tanah belum bersertifikat (47% belum bersertifikat). Dari total bidang tanah yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMANTAP, bidang tanah yang telah dilakukan verifikasi sebanyak 69.558 atau sebesar 86,34% dari target kinerja sebesar 75%. Adapun jumlah bidang tanah yang telah direkomendasikan untuk disertifikatkan sebanyak 4.288 bidang atau sebesar 143% dari target 3.000 bidang.

Sesuai informasi dari Kementerian ATR/BPN, alokasi dana anggaran *on top* pada Kanwil BPN untuk pensertifikatan BMN berupa tanah tahun 2017 sebanyak 3.729 bidang. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya sebanyak 3.912 bidang tanah. Dengan demikian, capaian kinerja pensertifikatan BMN berupa tanah tahun 2017 sebesar 105% yaitu 3.912 bidang dari target sebanyak 3.729 bidang.

4. Video conference for SIMANTAP application technical guidance to all DJKN Regional Offices is held on October 10, 2017, signifying monitoring activities and evaluation of certification achievements as well as providing operational technical guidance for SIMANTAP application.
5. The coordination meeting for the acceleration of certification of BMN in the form of land in the Ministries/Agencies year 2017 was held on December 8, 2017 at the Auditorium A of Frans Seda Building in accordance with the letter of the Director of State-Owned Assets Number S-293/KN.2/2017 dated December 6, 2017 which invited 59 Ministries/Agencies. The meeting discussed the evaluation of certification achievements, efforts to speed up the completion of land certification, and problem-solving related to certificate issuance and budgeting.

As of December 31, 2017, the number of parcels of land that have been identified and collected and registered into SIMANTAP application was 80,564 consisting of 42,699 or 53 % parcels of land already certified and 37,865 or 47 % parcels of land that have not been certified yet (47%). Of the total of parcels of land that have been inputted into the SIMANTAP application, as many as 69,558 parcels of land (or 86.34%, while the performance target was 75%.) The number of parcels of land recommended for certification was 4,288 or 143% of the target of 3,000 parcels of land.

According to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) the allocation of budget funds on top of the Regional Office of BPN for certification of State-Owned Assets in the form of land in 2017 was 3,729. Until the end of 2017, the number of parcels of land the certificates of which have been issued was 3,912. Thus, the achievement of certification of State-Owned Assets in the form of land in 2017 reached 105%, namely 3,912 parcels of land, higher than the target of 3,729 parcels of land.



Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN (RKBMN)

Implementation of Planning of State-Owned Asset Need (RKBMN)

Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN (RKBMN) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang mengatur bahwa RKBMN merupakan bagian yang terintegrasi dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Selanjutnya, RKBMN merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Dalam konteks RKBMN yang merupakan siklus awal pengelolaan aset, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. Perencanaan Kebutuhan BMN tidak saja meliputi rencana pengadaan dan pemeliharaan, melainkan juga rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN. Pelaksanaan PMK ini diharapkan akan menghasilkan sinergi berupa peningkatan kualitas belanja modal

Implementation of Planning of State-Owned Asset Need is based on Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State-Owned Assets which stipulates that the RKBMN is an integrated part of the Work Plan and Budget of the Ministries/Agencies (RKAK/L) which is prepared by taking into account the availability of State-Owned Assets and guided by the standard for goods, needs, and price. Furthermore, the RKBMN constitutes one of the bases for Ministries/Agencies in proposing the provision of a budget for new initiatives, for baseline, as well as for the preparation of work plans and budgets.

As for RKBMN, which is the initial cycle of asset management, a Minister of Finance Regulation (PMK) Number 150/PMK.06/2014 concerning Planning of BMN Needs has been established. Planning of State-Owned Asset Need does not only include procurement and maintenance plans, but also cover the plans for the use, utilization, transfer, and write-off of BMN. The implementation of this PMK is expected to produce synergies in the form of improving the quality of capital expenditure from the perspective

Barang Milik Negara

The Management of State-Owned Assets

dari perspektif efektifitas dan efisiensi belanja modal dan belanja pemeliharaan BMN, dengan demikian akan berdampak pada postur APBN yang lebih sehat.

Berdasarkan surat Direktur Barang Milik Negara a.n Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-562/KN/2017 tanggal 4 Mei 2017 hal Pemberitahuan Jadwal Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2019, terdapat 86 Kementerian/Lembaga yang menyusun RKBMN Tahun Anggaran 2019 yang disusun pada tahun 2017 dengan jadwal penyampaian kepada DJKN sebagai berikut:

of effectiveness and efficiency of capital expenditure and BMN maintenance spending, thereby we will see a healthier APBN posture.

Based on the letter of the Director of State-Owned Assets on behalf of the Director-General of State Assets Management number S-562/KN/2017 dated May 4, 2017, the Notification of the Schedule for Submitting the Planning of State-Owned Asset Need (RKBMN) for Work Plan and Budget in the Ministries/Agencies (RKAK/L) Fiscal Year 2019, there are 86 Ministries/Agencies that compile the RKBMN for Fiscal Year 2019 which prepared in 2017 with the submission schedule to DJKN as follows.

Tabel 1 Jadwal Penyampaian RKBMN TA 2019

Table 1 Submission Schedule for RKBMN Fiscal Year 2019

No	Tanggal Penyampaian Date of Submission	Kementerian/Lembaga Ministries/Agencies
1	20 Oktober 2017 20 October 2017	21 K/L : KEMENKO EKUIN, KPK, MA, LKPP, KEMENKUMHAM, KESDM, LAN, KY, BPPT, BASARNAS, BKKBN, KOMNASHAM, Kemen PPA, BMKG, BPW Suramadu, BAWASLU, DPR, LEMHANAS, KEMEN BUMN, BPKP dan KEMENPAN & RB.
2	03 November 2017 03 November 2017	21 K/L: LAPAN, KEMENKES, KEMEN PPN/BAPPENAS, BPK, KEMENPORA, BPOM, BEKRAF, BATAN, KLHK, KEMENKOP&UKM, LEMSANEG, PPATK, KPPU, KEMENKO POLHUKAM, BNPT, KEMENTAN, BIG, BAPETEN, KKP, MK dan SETKAB.
3	10 November 2017 10 November 2017	10 K/L: LPP RRI, WANTANAS, KEMENSOS, BSN, KEMENPAR, BIN, BP BATAM, OMBUDSMAN, LIPI, dan KEMENDAG.
4	17 November 2017 17 November 2017	13 K/L : LPP TVRI, BNP2TKI, PERPUSNAS, BNPB, KPU, KEMENRISTEK, KEMENHUB, BP SABANG, MPR, KEMENLU, KEMENKO PM KEBUDAYAAN, DPD dan KEMENSEKNEG
5	24 November 2017 24 November 2017	4 K/L: BKN, BNN, BNP PERBATASAN, dan KEMENPERIN
6	30 November 2017 30 November 2017	12 K/L: KEMENHAN, BPS, BKPM, KEMENAKER, POLRI, KEMENDES PDT, KEMEN ATR BPN, KEMENDIKBUD, KEMENKO MARITIM, KEMENDAGRI, KEMENKOMINFO, dan KEJAKSAAN..
7	08 Desember 2017 08 December 2017	5 K/L: KEMENKEU, KEMENPUPERA, ANRI, KEMENAG, dan BAKAMLA.

Adapun capaian Kementerian/Lembaga dalam kepatuhan menyampaikan usulan RKBMN secara tepat waktu sebanyak 85 Kementerian/Lembaga dari 86 Kementerian/Lembaga yang wajib menyampaikan pada tahun 2017.

Untuk mendukung Kementerian/Lembaga dalam melakukan penyusunan Usulan RKBMN TA 2019, DJKN telah melaksanakan *Workshop* Penyusunan RKBMN pada tanggal 4 dan 5 September 2017 dengan mengundang para pejabat/pegawai yang bertanggung jawab dalam perencanaan keuangan dan perencanaan BMN serta operator SIMAN. Selanjutnya untuk menyamakan persepsi untuk pelaksanaan penelaahan RKBMN dimaksud, juga telah dilaksanakan In House Training pada tanggal 23 dan 25 Oktober 2017 bagi para Analis Penelaahan RKBMN Direktorat BMN.

Selain 2 kegiatan dimaksud, Direktorat BMN juga melaksanakan *Focuss Group Discussion* (FGD) pada tanggal 6 November 2017 di Aula DJKN Lantai 5 Selatan dengan peserta dari 20 Kementerian/Lembaga yang telah menyusun RKBMN Tahun 2017 guna melakukan evaluasi atas penyusunan dan penelaahan RKBMN. Pada pelaksanaan FGD dimaksud dilaksanakan dengan mengundang pembicara/narasumber dari BAPPENAS, DJA dan Itjen Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, DJKN melaksanakan kegiatan Penelaahan atas RKBMN TA 2019 yang telah disampaikan melalui kegiatan Substantif Analisis dan Validasi Data dan Kegiatan Forum Penelaahan RKBMN. Hasil dari kegiatan Penelaahan RKBMN ini berupa *Check List* Kelengkapan Dokumen RKBMN, Kertas Kerja Penelaahan, dan Catatan Hasil Forum Penelaahan RKBMN yang merupakan dokumen pendukung sebagai dasar pertimbangan ditetapkan Hasil Penelaahan RKBMN oleh Direktur BMN bersama dengan Pengguna Barang. Dokumen Hasil Penelaahan RKBMN disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran. Hasil Penelaahan RKBMN TA 2019 yang menjadi target penyelesaian dalam tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

As many as 85 Ministries/Agencies of 86 Ministries/Agencies required to submit the RKBMN in 2017, have submitted their report in a timely manner.

To support Ministries/Agencies in preparing the proposal for RKBMN for Fiscal Year 2019 Proposal, DJKN has conducted RKBMN Preparation Workshop on September 4 and 5, 2017, inviting officials/employees responsible for financial planning, BMN planning, and SIMAN operators. Furthermore, to share a common perception of the implementation of the RKBMN review, an In-House Training was held on 23 and 25 October 2017 for the analysts of RKBMN Study at the Directorate of State-Owned Assets.

In addition to these two activities, in order to evaluate the preparation and review of the RKBMN, on November 6, 2017, the Directorate of State-Owned Assets also conducted a Focus Group Discussion (FGD) in the DJKN Hall which was joined by participants from 20 Ministries/Agencies that have compiled the RKBMN 2017. This discussion was carried out by inviting speakers/source-persons from BAPPENAS (National Development Planning Agency), DJA (Directorate-General of Budget) and the Inspector General of the Ministry of Finance.

Furthermore, the DJKN conducted a review of the RKBMN Fiscal Year 2019 that was delivered through substantive analysis, data validation, and forum for RKBMN review activities. This RKBMN review resulted in a Check List of RKBMN Document Completeness, Review Working Paper, and Notes on the Results of the Forum for RKBMN Review which served as supporting documents as a basis for consideration of the determination of the RKBMN Review Results by the Director of State-Owned Assets and the Asset Users. Documents of RKBMN Review Results were then submitted by the Director-General of State Asset Management on behalf of the Minister of Finance to the Ministries/Agencies with copies to the Director-General of Budget. Based on the review of RKBMN Fiscal Year 2019, the RKBMN targeted for completion in 2017 are as follows.

Barang Milik Negara

The Management of State-Owned Assets

Tabel 2 Hasil Penelaahan RKBMN TA 2019

Table 2 Results of the RKBMN Review Fiscal Year 2019

No	Kementerian/Lembaga Ministries/Agencies	Surat Menteri Keuangan Minister of Finance Letter
1	MA (Supreme Court)	S-306/MK.6/2017 tanggal 29 November 2017
2	KPK (Corruption Eradication Commission)	S-320/MK.6/2017 tanggal 04 Desember 2017
3	DPR (House of Representatives)	S-321/MK.6/2017 tanggal 07 Desember 2017
4	BPW SURAMADU (Suramadu Development Board)	S-341/MK.6/2017 tanggal 11 Desember 2017
5	BPPT (Agency for the Assessment and Application of Technology)	S-343/MK.6/2017 tanggal 19 Desember 2017
6	BATAN (National Nuclear Agency)	S-344/MK.6/2017 tanggal 19 Desember 2017
7	LAN (Public Administration Institute)	S-345/MK.6/2017 tanggal 19 Desember 2017
8	KY (Judicial Commission)	S-346/MK.6/2017 tanggal 19 Desember 2017
9	KEMEN PP & PA (Ministry of Female Empowerment and Child Protection)	S-347/MK.6/2017 tanggal 19 Desember 2017
10	KOMNASHAM (National Commission on Human Rights)	S-348/MK.6/2017 tanggal 19 Desember 2017
11	WANTANAS (National Resilience Council)	S-349/MK.6/2017 tanggal 19 Desember 2017
12	KEMEN BUMN (Ministry of State-Owned Enterprises)	S-350/MK.6/2017 tanggal 19 Desember 2017
13	BPK (Audit Board of the Republic of Indonesia)	S-357/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
14	BAWASLU (General Election Supervisory Board)	S-358/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
15	LAPAN (National Institute of Aeronautics and Space)	S-359/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
16	KEMENKES (Ministry of Health)	S-360/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
17	KEMENPAR (Ministry of Tourism)	S-361/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
18	BIG (Geospatial Information Agency)	S-362/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
19	BMKG (Meteorology, Climatology and Geophysics Agency)	S-363/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
20	PERPUSNAS (National Library)	S-364/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
21	Menko Bidang Perekonomian (Coordinating Ministry for Economic Affairs)	S-365/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
22	BAPETEN (Nuclear Energy Regulatory Agency)	S-366/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
23	BASARNAS (National Search and Rescue Agency)	S-367/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
24	DPD (Regional Representative Council)	S-368/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
25	KEMENTAN (Ministry of Agriculture)	S-369/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
26	KEMENSOS (Ministry of Social Affairs)	S-370/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017

No	Kementerian/Lembaga Ministries/Agencies	Surat Menteri Keuangan Minister of Finance Letter
27	KEMENKO POLHUKAM (Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs)	S-371/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
28	BKKBN (National Family Planning Coordinating Board)	S-372/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
29	BIN (State Intelligence Agency)	S-373/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
30	LKPP (National Public Procurement Agency)	S-374/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
31	KESDM (Ministry of Energy and Mineral Resources)	S-375/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
32	OMBUDSMAN (Ombudsman of Republic of Indonesia)	S-376/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
33	KEMENKOP & UKM (Ministry of Cooperatives and Small & Medium Enterprises)	S-377/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
34	BSN (National Standardization Agency)	S-378/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
35	BPK SABANG (Management Board of Sabang Free Port and Free Trade Zone)	S-379/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
36	KEMENDAG (Ministry of Trade)	S-380/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
37	MPR (People's Consultative Assembly)	S-381/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
38	KEMENPORA (Ministry of Youth and Sports Affairs)	S-382/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
39	BNPT (National Agency for Combating Terrorism)	S-383/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
40	KPPU (Business Competition Supervisory Commission)	S-384/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
41	LIPI (Indonesian Institute of Sciences)	S-387/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
42	MK (Constitutional Court of the Republic of Indonesia)	S-388/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
43	KEMEN PPN/BAPPENAS (Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency)	S-389/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
44	LEMHANAS (National Resilience Institute)	S-390/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
45	KKP (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries)	S-391/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
46	KEMENPAN & RB (Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform)	S-392/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
47	LEMSANEG (National Crypto Agency)	S-393/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
48	KEMENKUMHAM (Ministry of Law and Human Rights)	S-394/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
49	LPP RRI (Public Service Broadcasting of Radio Republik Indonesia)	S-397/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
50	SETKAB (Secretariat of the Cabinet)	S-398/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
51	BPKP (Finance and Development Supervisory Agency)	S-400/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017
52	BPOM (National Agency of Drug and Food Control)	S-402/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017

Barang Milik Negara

The Management of State-Owned Assets

Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga Tahun 2016 (BMN Awards 2017)

Reflection and Appreciation of State-Owned Asset Management in the Ministries/Agencies in 2016 (BMN Awards 2017)

DJKN menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2016 atau dikenal dengan nama BMN Awards Tahun 2017 di Aula Gedung Dhanapala pada 2 November 2017. BMN Awards merupakan pemberian apresiasi atau penghargaan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN atas kinerja pengelolaan BMN yang dilakukan oleh K/L.

Sejalan dengan langkah pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan cq. DJKN, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, tren pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga telah menunjukkan perkembangan signifikan. Untuk itu, sebagai dasar penilaian kinerja pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga tersebut, fokus kajian dan analisis data kinerja pengelolaan BMN di tahun 2016 meliputi utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN, sertifikasi BMN, dan inovasi dan/atau kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan cq. DJKN di bidang pengelolaan BMN.

Kegiatan Refleksi dan Apresiasi Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016 diikuti oleh 87 (delapan puluh tujuh) Kementerian/Lembaga yang memenuhi persyaratan sebagai nominator penerima penghargaan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan perbedaan beban masing-masing K/L dalam melaksanakan pengelolaan BMN, Dewan Juri membagi Kementerian/Lembaga dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan jumlah satker, sebagai berikut:

- Kelompok I, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Kementerian/Lembaga dengan jumlah satker sampai dengan 10 unit;
- Kelompok II, terdiri dari 25 (dua puluh lima) Kementerian/Lembaga dengan jumlah satker lebih dari 10 unit dan tidak lebih dari 100 unit; dan

DJKN organized Reflection and Appreciation of State-Owned Asset Management in the Ministries/Agencies in 2016 or better known as BMN Awards 2017 in the Hall of Dhanapala Building on November 2, 2017. BMN Awards is an expression of acknowledgment or appreciation from the Minister of Finance as BMN Manager for the performance of State-Owned Assets management carried out by Ministries/Agencies.

In line with the fostering phases undertaken by the Ministry of Finance, in this case, DJKN, in the past few years, the trend of State-Owned Assets (BMN) management conducted by Ministries/Agencies have shown significant developments. For that reason, as a basis for evaluating the performance of BMN management in the Ministries/Agencies, the focus of studies and data analysis on BMN management performance in 2016 took into account BMN utilization, reporting compliance, certification, and innovation and/or collaboration between the Ministries/Agencies and the Ministry of Finance, in this case, DJKN in the field of BMN management.

The Reflection and Appreciation of State-Owned Asset Management in the Ministries/Agencies in 2016 joined by 87 (eighty-seven) Ministries/Agencies entitled to an award. So, taking into account the distinctive undertaking of each Ministries/Agencies in carrying out BMN management, the Jury divided the Ministries/Agencies into three groups based on their number of working units, as follows.

- Group I, consists of 34 (thirty-four) Ministries/Agencies with a number of working units of up to 10 units
- Group II, consists of 25 (twenty-five) Ministries/Agencies with working units ranging from 10 (ten) to 100 (one hundred)



- c. Kelompok III, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kementerian/Lembaga dengan jumlah satker lebih dari 100 unit.

Terdapat 33 Penghargaan dalam BMN Awards 2017 yang terbagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu 1) Utilisasi, 2) Kepatuhan Pelaporan, 3) Sertifikasi, 4) Tata Kelola Berkesinambungan, 5) Tata Kelola Antar K/L, dan 6) Kinerja Terbaik Pengelolaan BMN. Daftar pemenang secara lengkap adalah sebagai berikut:

Kategori Utilisasi Kelompok I:

1. Badan Standarisasi Nasional
2. Mahkamah Konstitusi
3. Kementerian BUMN

Kategori Utilisasi Kelompok II:

1. Kementerian Pariwisata
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kementerian Sekretariat Negara

Kategori Utilisasi Kelompok III:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Hukum dan HAM
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- c. Group III, consists of 28 (twenty-eight) Ministries/ Agencies with a hundred or more working units.

There were 33 Awards in the BMN Awards 2017, divided into 6 categories, namely 1) Utilization, 2) Reporting Compliance, 3) Certification, 4) Sustainable Governance, 5) Inter-Ministerial/Agencies Governance, and 6) Best Performance of BMN Management. The complete list of winners is as follows:

Group I, Utilization Category:

1. National Standardization Agency
2. Constitutional Court of the Republic of Indonesia
3. Ministry of State-Owned Enterprises

Group II, Utilization Category

1. Ministry of Tourism Pariwisata
2. Ministry of Energy and Mineral Resources
3. Ministry of State Secretariat

Group III, Utilization Category:

1. Ministry of Finance
2. Ministry of Law and Human Rights
3. Ministry of Public Works and Public Housing

Barang Milik Negara

The Management of State-Owned Assets

Kategori Kepatuhan Pelaporan Kelompok I:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
3. Dewan Ketahanan Nasional

Kategori Kepatuhan Pelaporan kelompok II:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Kategori Kepatuhan Pelaporan Kelompok III:

1. Mahkamah Agung
2. Kejaksaan Agung
3. Kementerian Keuangan

Kategori Sertifikasi Kelompok I:

1. Lembaga Sandi Negara
2. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Kategori Sertifikasi Kelompok II:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
2. Badan Tenaga Nuklir Nasional
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kategori Sertifikasi Kelompok III:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
3. Kejaksaan Republik Indonesia

Tata Kelola Berkesinambungan:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Keuangan

Tata Kelola Antar K/L:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Sekretariat Negara

Kinerja Terbaik Pengelolaan BMN:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Group I, Reporting Compliance Category:

1. Corruption Eradication Commission
2. National Agency for Combating Terrorism
3. National Resilience Council

Group II, Reporting Compliance Category:

1. National Institute of Aeronautics and Space
2. Audit Board of the Republic of Indonesia
3. Indonesian Institute of Sciences

Group III, Reporting Compliance Category:

1. Supreme Court
2. Attorney General
3. Ministry of Finance

Group I, Certification Category:

1. National Crypto Agency
2. Management Board of Sabang Free Port and Free Trade Zone

Group II, Certification Category:

1. National Institute of Aeronautics and Space
2. National Nuclear Agency
3. Ministry of Energy and Mineral Resources

Group III, Certification Category:

1. Ministry of Home Affairs
2. Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency
3. Attorney General

Sustainable Governance:

1. Ministry of Health
2. Ministry of Finance

Inter-Ministerial/Agencies Governance:

1. Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs
2. Ministry of State Secretariat

Best Performance of BMN Management:

1. National Institute of Aeronautics and Space
2. Ministry of Finance
3. Ministry of Energy and Mineral Resources

Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN (RKBMN)

Preparation of State-Owned Assets Report (LBMN)

Menteri Keuangan c.q DJKN selaku Pengelola Barang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Penyusunan LBMN, DJKN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), PMK Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua atas PMK 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

LBMN disusun berdasarkan Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disampaikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam rangka penyusunan LBMN tersebut, dilaksanakan rekonsiliasi antara DJKN cq. Direktorat BMN selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang serta antara DJKN cq. Direktorat BMN selaku penyusun LBMN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku penyusun LKPP. Tujuan rekonsiliasi adalah menyajikan nilai BMN yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Validitas dan keakuratan data BMN akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada tahun 2017, DJKN berhasil menyusun 3 LBMN secara tepat waktu, yaitu:

Minister of Finance, in this case, DJKN as Asset Manager carries out the authority and responsibility for compiling the State-Owned Assets Report (LBMN) in accordance with Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional-Owned Assets. In the preparation of the LBMN, DJKN is governed by the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 181/PMK.06/2016 concerning Administration of BMN, PMK Number 69/PMK.06/2016 concerning BMN Reconciliation Procedures in the course of Preparation of Financial Report of Central Government (LKPP), PMK Number 1/PMK.06/2013 as last amended by PMK 247/PMK.06/2014 concerning Second Amendment to PMK 1/PMK.06/2013 concerning Depreciation of BMN in the form of Fixed Assets in Central Government Entities, and PMK Number 251/PMK .06/2015 on Amortization Procedures for BMN in the form of Intangible Assets in Central Government Entities.

LBMN is prepared based on Asset User Report (LBP) delivered by all Ministries/Agencies. In order to compile the LBMN, a reconciliation was made between DJKN, in this case, Directorate of State-Owned Assets as the Asset Manager and the Ministries/Agencies as the Asset Users and between DJKN, in this case, the Directorate of State-Owned Assets as the compiler of LBMN and Directorate-General of State Treasury (DJPBN), in this case, Directorate of Accounting and Financial Reporting as the compiler of LKPP. The reconciliation was aimed to present a valid, accurate and accountable BMN value. The validity and accuracy of the BMN data will affect the quality of the Financial Report of the Central Government (LKPP) which is the Government's accountability report submitted to the House of Representatives (DPR).

In 2017, DJKN managed to arrange three LBMN in a timely manner. They are:

Barang Milik Negara

The Management of State-Owned Assets

- Laporan BMN Tahunan Tahun 2016 (*Unaudited*) pada bulan Maret 2017. LBMN ini menyajikan data nilai BMN per 31 Desember 2016 yang belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disusun berdasarkan data Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disampaikan oleh 88 Pengguna Barang (87 telah memiliki bagian anggaran definitif dan 1 selaku entitas yang diperlakukan seperti Kementerian/Lembaga). Nilai buku BMN gabungan per 31 Desember 2016 (*Unaudited*) sebesar Rp2.181,10 triliun yang terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp2.180,25 triliun dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0,85 triliun.
- Laporan BMN Tahunan Tahun 2016 (*Audited*) pada bulan Mei 2017. LBMN ini menyajikan data nilai BMN per 31 Desember 2016 yang telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disusun berdasarkan data Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disampaikan oleh 88 Pengguna Barang (87 telah memiliki bagian anggaran definitif dan 1 selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L). Nilai buku BMN gabungan per 31 Desember 2016 (*Audited*) sebesar Rp2.188,37 triliun yang terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp2.187,49 triliun dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0,87 triliun.
- Laporan BMN Semester I Tahun 2017 pada bulan Agustus 2017. LBMN ini menyajikan data nilai BMN per 30 Juni 2017 yang disusun berdasarkan data Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disampaikan oleh 89 Pengguna Barang (88 telah memiliki bagian anggaran definitif dan 1 selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L). Nilai buku BMN gabungan per 30 Juni 2017 sebesar Rp2.184,74 triliun yang terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp2.183,90 triliun dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0,83 triliun.
- Annual BMN Report for 2016 (*Unaudited*), in March 2017. This LBMN presents BMN value data as of December 31, 2016 which has not been audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) which is compiled based on Asset User Report (LBP) data submitted by 88 Asset Users (with 87 asset users having a definitive budget section and 1 asset user treated as a Ministry/Agency). The combined book value of BMN as of December 31, 2016 (*Unaudited*) amounted to Rp 2,181.10 trillion consisting of intracomptable BMN of Rp.2,180.25 trillion and extracomptable BMN of Rp. 0.85 trillion.
- Annual BMN Report for 2016 (*Audited*), in May 2017. The LBMN presents BMN value data as of December 31, 2016 which has been audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) which was compiled based on Asset User Report (LBP) data submitted by 88 Property Users (with 87 asset users having a definitive budget section and 1 asset user treated as a K/L). The combined book value of BMN as of December 31, 2016 (*Audited*) amounted to Rp 2,188.37 trillion consisting of intracomptable BMN amounting to Rp 2,187.49 trillion and extracomptable BMN amounting to Rp 0.87 trillion.
- BMN Report for the First Semester of 2017, in August 2017. This LBMN presents BMN value data as of June 30, 2017 which is compiled based on Asset User Report (LBP) data submitted by 89 Asset Users (with 88 asset users having a definitive budget section and 1 asset user treated as Ministry/Agency). The combined book value of BMN as of June 30, 2017 amounted to Rp 2,184.74 trillion consisting of intracomptable BMN amounting to Rp 2,183.90 trillion and extracomptable BMN amounting to Rp 0.83 trillion

Adapun perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama sepuluh tahun terakhir (dari TA 2009 s.d. Semester I TA 2017), dapat disajikan sebagai berikut:

As for the development of combined BMN values (intracomptable and extracomptable) over the last ten years (from Fiscal Year 2009 up to Semester I Fiscal Year 2017), we could observe the following table.

Tabel 3 Perkembangan Nilai BMN 10 Tahun Terakhir

Table 3 Development of State-Owned Assets Value in the Last 10 Years

No	Periode laporan Reporting Period	Nilai BMN State-Owned Assets Value	Perkembangan Developments	
			Rupiah Rupiah	Persen Percentage
1	31 Desember 2007 31 December 2007	440.626.562.826.326		
2	31 Desember 2008 (Audited) 31 December 2008 (Audited)	726.983.942.941.088	286.357.380.114.762	64,99
3	31 Desember 2009 (Audited) 31 December 2009 (Audited)	1.059.370.191.002.240	332.386.248.061.152	45,72
4	31 Desember 2010 (Audited) 31 December 2010 (Audited)	1.287.617.203.086.310	228.247.012.084.070	21,55
5	31 Desember 2011 (Audited) 31 December 2011 (Audited)	1.694.574.945.549.620	406.957.742.463.316	31,61
6	31 Desember 2012 (Audited) 31 December 2012 (Audited)	2.012.673.309.054.610	318.098.363.504.986	18,77
7	31 Desember 2013 (Audited) 31 December 2013 (Audited)	1.816.246.527.921.150	(196.426.781.133.456)	(9,76)
8	31 Desember 2014 (Audited) 31 December 2014 (Audited)	1.960.460.213.675.730	144.213.685.754.573	7,94
9	31 Desember 2015 (Audited) 31 December 2015 (Audited)	2.127.449.070.827.830	166.988.857.152.108	8,52
10	31 Desember 2016 (Audited) 31 December 2016 (Audited)	2.188.359.011.696.640	60.909.940.868.811	2,86
11	30 Juni 2017 30 June 2017	2.184.736.879.479.030	(3.622.132.217.618)	(0,17)

Kekayaan Negara Dipisahkan

The Management of Separated State Asset



Pada tahun 2017, total realisasi pembiayaan investasi pemerintah melalui PPA-BUN BA 999.03 adalah sebesar Rp60,76 triliun yang mencakup Penyertaan Modal Negara (PMN), Dana Bergulir, Pembiayaan BLU LMAN, Kewajiban Penjaminan, dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

the total realization of government investment financing through PPA-BUN BA 999.03 was Rp 60.76 trillion which included State Equity Participation (PMN), Revolving Fund, BLU LMAN Financing, Guarantee Liabilities, and National Education Development Fund.

Pelaksanaan Investasi Pemerintah dari PPA BUN BA 999.03 Dalam Mendukung Nawacita

Implementation of Government Investment from Budget User Assistant of the
State General Treasurer in Supporting Nawacita

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, DJKN ditetapkan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA-BUN) BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Direktorat KND adalah unit teknis yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi DJKN sebagai PPA BUN dimaksud.

Selaku PPA BUN, DJKN dhi. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) berperan menampung usulan alokasi anggaran dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melakukan penilaian (*assessment*) atas usulan alokasi yang masuk, serta meneruskan usulan yang disetujui kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kemudian dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku Legislatif. Jika usulan telah disetujui oleh DPR dan diundangkan menjadi UU APBN, PPA BUN sekali lagi berperan dalam proses penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan melaksanakan koordinasi terkait penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Besarnya tugas Direktorat KND terkait dengan perencanaan investasi pemerintah tergambar dalam alokasi anggaran investasi pemerintah yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBNP tahun 2017. Adapun rincian alokasi pembiayaan investasi pemerintah pada APBNP tahun 2017 sebagaimana pada tabel di bawah :

Based on the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 193/PMK.02/2017 concerning Procedures for Planning, Analysis, and Determination of Budget Allocation of the State General Treasurer Budget Section, and Ratification of the List of State General Treasurer Budget Implementation, DJKN is designated as Budget User Assistant of the State General Treasurer (PPA-BUN) of BA 999.03 Management of Government Investment. And within the DJKN, it is the Directorate of Restricted State Assets, that as a technical unit, is responsible for conducting the DJKN function as PPA BUN.

As PPA BUN, DJKN, in this case, the Directorate of Restricted State Assets (KND) bears the role of accommodating the budget allocations proposed by Proxy Budget User (KPA), conducting an assessment of the proposed allocation, and forwarding the approved proposals to the Directorate-General of Budget (DJA) to later be discussed with the House of Representatives (DPR) as the Legislature. Once the proposal has been approved by the DPR and been promulgated into the State Budget Law, PPA BUN once again plays a role in the process of issuing the Budget Execution Document (DIPA) and carrying out coordination related to the preparation of the Disbursement Plan (RPD).

The magnitude of the duties of the Directorate of KND in relation to government investment planning is reflected in the government investment budget allocation as stipulated in Law Number 15 of 2017 concerning Revised State Budget fiscal year 2017. The details of the allocation of government investment financing in the Revised State Budget are reflected in the table below:

Kekayaan Negara Dipisahkan

The Management of Separated State Asset

Alokasi Pembiayaan Investasi Pemerintah pada APBN dan RAPBN 2017

Allocation of Government Investment Financing in 2017 State Budget and 2017 Revised State Budget

Uraian Pengeluaran Pebiayaan Investasi Pemerintah Description of Government Investment Financing	APBN 2017 (miliar Rp) State Budget 2017 (billion Rp)	APBNP 2017 (miliar Rp) Revised State Budget 2017 (billion Rp)
A. Pembiayaan Investasi (1+2+3+4) Investment Financing (1+2+3+4)	47.483,93	59.733,76
1. Investasi Kepada BUMN Investment in State Owned Enterprise	4.000,00	6.379,32
i) Kementerian Keuangan Ministry of Finance	4.000,00	4.000,00
a. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	1.000,00	1.000,00
b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.000,00	1.000,00
c. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2.000,00	2.000,00
ii) Kementerian BUMN: Ministry of State Owned Enterprise:	-	2.379,32
a. PT KAI (Persero)		2.000,00
b. PT Djakarta Llyod (Persero) - Non Tunai		379,32
2. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya Investment in Other Institutions/Agencies	6.800,00	3.200,00
a) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	3.200,00	3.200,00
b) BPJS Kesehatan	3.600,00	-
3. Investasi Kepada BLU: Investment in Public Service Agency:	34.700,00	48.150,56
a) Dana Bergulir Revolving Fund	10.700,00	5.600,00
- BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (FLPP)	9.700,00	3.100,00
- BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian KUMKM	500,00	500,00
- BLU LPMUKP Kementerian KKP	500,00	500,00
- BLU PIP	-	1.500,00
b) BLU LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara)	20.000,00	32.050,56
c) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (BLU LPDP)*	2.500,00	10.500,00
d) BLU PIP	1.500,00	-
4. Investasi Kepada O/LKI/Badan Usaha Internasional	1.988,93	2.003,88
B. Dana Kewajiban Penjaminan Guarantee Liabilities Fund	924,12	1.005,37
TOTAL PEMBIAYAAN INVESTASI PEMERINTAH BA 999.03 (A+B) TOTAL OF GOVERNMENT INVESTMENT FINANCING BA 999.03 (A+B)	48.413,05	60.739,13

Pada tahun 2017, total realisasi pembiayaan investasi pemerintah melalui PPA-BUN BA 999.03 adalah sebesar Rp60,76 triliun yang mencakup Penyertaan Modal Negara (PMN), Dana Bergulir, Pembiayaan BLU LMAN, Kewajiban Penjaminan, dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Dari realisasi PMN sebesar Rp11,6 triliun tersebut, terbagi ke dalam PMN pada BUMN sebesar Rp6,38 triliun, PMN pada LKI sebesar Rp2,02 triliun serta PMN Lainnya pada LPEI sebesar Rp3,2 triliun. PMN kepada BUMN tersebut digunakan untuk mendukung agenda prioritas nasional, antara lain : (1) program pembangunan infrastruktur dan konektivitas dialokasikan kepada PT KAI, PT SMI, dan PT PII; (2) program pembangunan maritim dialokasikan kepada PT Jakarta Lloyd; (3) program kemandirian ekonomi kepada PT SMF.

Selain sebagai unit teknis pelaksana PPA BUN, Direktorat KND juga merupakan KPA untuk PMN pada BUMN/Lembaga Dibawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Pada tahun 2017, total PMN yang dicairkan melalui KPA Direktur KND adalah sebesar 5 Triliun dengan rincian: PMN pada PT SMI sebesar 2 Triliun, PMN pada PT PII sebesar 1 Triliun, PMN pada PT SMF sebesar 1 Triliun, dan PMN pada LPEI (selaku korporat) sebesar 1 Triliun.

In 2017, the total realization of government investment financing through PPA-BUN BA 999.03 was Rp 60.76 trillion which included State Equity Participation (PMN), Revolving Fund, BLU LMAN Financing, Guarantee Liabilities, and National Education Development Fund. The realized PMN amounting to Rp. 11.6 trillion comprised PMN in SOEs amounting to Rp. 6.38 trillion, PMN in International Financial Institutions at Rp. 2.02 trillion and Other PMN at LPEI at Rp. 3.2 trillion. The PMN in SOEs was used to support the national priority agenda, including: (1) infrastructure and connectivity development programs allocated to PT KAI, PT SMI, and PT PII; (2) the maritime development program allocated to PT Jakarta Lloyd; (3) economic independence program allocated to PT SMF.

Aside from being a technical unit implementing PPA BUN, the Directorate of KND also serves Proxy Budget User (KPA) for PMN in SOEs/Institutions under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance. In 2017, the total PMN disbursed through Director of KND as KPA was Rp 5 trillion, namely PTNI PMN of Rp. 2 trillion, PT PII PMN of 1 trillion, PT SMF PMN of Rp. 1 trillion, and PMN at LPEI (as a corporation) of Rp. 1 trillion.

Tabel Rincian Realisasi Pembiayaan Investasi Pemerintah melalui PPA BUN BA 999.03

Details of Realization of Government Investment Financing through PPA BUN BA 999.03

No	Uraian Description	Alokasi (Rp) Allocation	Realisasi (Rp) Realization
1	Penyertaan Modal Negara (PMN) State Equity Participation	11.583.201.381.000	11.603.494.561.382
2	Dana Bergulir Revolving Fund	5.600.000.000.000	5.600.000.000.000
3	Pembiayaan Investasi pada BLU LMAN Investment in Public Service Agency-LMAN	32.050.560.000.000	32.050.560.000.000
4	Kewajiban Penjaminan Guarantee Liabilities	1.005.374.000.000	1.005.374.000.000
5	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional National Education Development Fund	10.500.000.000.000	10.500.000.000.000
Total		60.739.135.381.000	60.759.428.561.382

Kekayaan Negara Dipisahkan

The Management of Separated State Asset

Tabel Rincian Realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN)

Details of Realization of State Equity Participation (PMN)

No	Uraian Description	Alokasi (Rp) Allocation	Realisasi (Rp) Realization
1	PMN pada BUMN State Equity Participation in SOEs	6.379.318.092.000	6.379.318.092.000
2	PMN pada Lembaga Keuangan Internasional State Equity Participation in International Financial Institutions	2.003.883.289.000	2.024.176.469.382
3	PMN Lainnya Other State Equity Participations	3.200.000.000.000	3.200.000.000.000
Total		11.583.201.381.000	11.603.494.561.382

Berdasarkan PMK Nomor 209/PMK.05/2015 tentang sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP), DJKN ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP-BUN). Selaku UAP-BUN, DJKN memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan menyusun Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (LKIP) sebagai upaya peningkatan akuntabilitas publik dalam hal penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah yang meliputi seluruh investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Negara, Badan Hukum lainnya (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTNBH, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan), Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional, Lembaga Sue Generis (Bank Indonesia/BI, Lembaga Penjamin Simpanan/LPS, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI), Dana Bergulir yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana, Dana Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), serta Dana Kelolaan dan Aset Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Based on PMK Number 209/PMK.05/2015 concerning the Accounting System for Government Investment (SAIP), DJKN is designated as the Accounting Unit of the State General Treasurer (UAP-BUN). As UAP-BUN, DJKN carries the obligation to undertake accounting and accountability for budget execution BA 999.03 Management of Government Investment by preparing Government Investment Financial Reports (LKIP) as an effort to increase public accountability in terms of administration and reporting of government investment which includes all long-term investments made by the Government in State-Owned Enterprises (SOEs), State Companies, Other Legal Entities (State Universities/PTNBH, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan), International Financial Organizations/Institutions, Sue Generis Institutions (Bank Indonesia/BI, Indonesia Deposit Insurance Corporation/LPS, Indonesian National Export Financing Institution/LPEI), Revolving Fund managed by Public Service Agencies (BLU) Fund Managers, Government Guarantee Liabilities Fund, National Education Development Fund (DPPN), as well as funds and assets under the management of State Asset Management Agency (LMAN).

Dukungan Pembiayaan Infrastruktur, Ekspor, Perumahan serta Kebutuhan Listrik Nasional

Support for Financing of Infrastructure, Exports, Housing and National Electricity Needs

Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang infrastruktur, pengembangan ekspor, perumahan serta membantu pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Kementerian Keuangan c.q. DJKN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ pemilik modal pada BUMN/Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan terus mendorong agar BUMN/Lembaga tersebut memberikan kontribusi dalam pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekspor nasional, penyediaan dana bagi sektor perumahan serta pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

Secara lebih khusus, terdapat 5 BUMN/Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Geodipa Energi (Persero). Sampai akhir 2017, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah menjadi katalis dalam pembiayaan infrastruktur dengan total komitmen pembiayaan sebesar Rp59 Triliun dengan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp32 Triliun dan total nilai proyek yang dibiayai sebesar Rp313 Triliun. Jumlah dana kumulatif penyaluran dana oleh PT SMF sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp34,093 Triliun terdiri dari fasilitasi sekuritisasi sebesar Rp8,155 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp25,938 triliun, dari penyaluran pinjaman tersebut secara kumulatif telah digunakan untuk me-*refinancing* KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,5 triliun. LPEI telah melakukan pembiayaan untuk mendorong ekspor sebesar Rp101 Triliun dengan *outstanding* penjaminan Rp10,55 triliun serta pertanggungan asuransi Rp9,43 triliun. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah menjamin proyek nilai sebesar Rp175 Triliun yang meliputi 3 (tiga) sektor yaitu ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi dan jalan tol. Pada tahun 2016, PT GDE telah membukukan nilai penjualan sebesar Rp742 Miliar dari hasil produksi listrik sebesar 763 GWh.

To support government programs in infrastructure, export development, housing and to help fulfilling the national electricity needs, Ministry of Finance in this case DJKN as the General Meeting of Shareholders (GMS)/equity owners in SOEs/Institutions under the guidance and supervision of the Minister of Finance continues to encourage SOEs/Institutions to contribute in the financing of infrastructure development, national export development, housing sector, and national electricity needs.

More specifically, there are five SOEs/Institutions under the guidance and supervision of the Minister of Finance, namely PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), and PT Geodipa Energi (Persero). Until the end of 2017, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) has become a catalyst in infrastructure financing with a total financing commitment of Rp 59 trillion with the outstanding financing of Rp 32 trillion and the total value of projects financed by Rp 313 trillion. Up until 2017, the cumulative amount of funds disbursed by PT SMF was Rp 34,093 trillion consisting of securitization facilitation of Rp 8,155 trillion and loan disbursement of Rp 25,938 trillion—of that cumulative loan disbursement, a total of Rp 13.5 trillion was used to refinance the Housing Finance Liquidity Facility (FLPP). To boost national export, LPEI has financed a total of Rp 101 trillion with the outstanding guarantee of Rp 10.55 trillion and insurance coverage of Rp 9.43 trillion. Meanwhile, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has guaranteed projects amounting to Rp. 175 trillion covering 3 (three) sectors namely electricity, information and communication technology, and toll roads. In 2016, PT GDE recorded a sales value of Rp.742 billion from electricity production of 763 GWh.

Kekayaan Negara Dipisahkan

The Management of Separated State Asset



Pelaksanaan Penetapan BPYBDS

Implementation of Determination of BPYBDS

Secara substansi Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada dasarnya merupakan Hasil Proyek Kementerian/Lembaga yang bersumber dari Daftar Isian Proyek (DIP) maupun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang kemudian dilakukan serah terima operasional melalui Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dari Kementerian/Lembaga kepada Badan Usaha Milik Negara. Atas dasar Berita Acara Serah terima Operasional tersebut Badan Usaha Milik Negara mencatat/membukukan aset yang diterima tersebut kedalam akun Ekuitas sub akun BPYBDS. Selain itu, BPYBDS yang diterima BUMN ada juga yang tidak dalam bentuk aset tetap namun dalam bentuk penerimaan penganggaran dari APBN.

Pengadaan dan pembangunan melalui DIPA K/L adalah untuk membantu pengadaan maupun pembangunan yang belum mampu dibiayai oleh BUMN serta sejak dari awal pengadaan memang diperuntukkan bagi BUMN. BMN yang dipergunakan-dioperasionalkan dan/atau dimanfaatkan oleh BUMN tersebut dikenal sebagai BPYBDS.

Undefined Status of Government Assistance (BPYBDS) is basically a Ministry/Institution Project Result sourced from the List of Approved Project (DIP) and the Budget Execution Document (DIPA) which is then operationally handed over through the Official Report of Operational Handover (BASTO) from Ministry/ Institution to a State-Owned Enterprise. On the basis of the BASTO, the State-Owned Enterprise records received assets into the Sub-account BPYBDS set under Equity account. In addition, BPYBDS received by SOEs are not always in the form of fixed assets, but also in the form of budgetary revenues from the APBN.

Procurement and development through DIPA Ministries/Agencies are designed to assist procurement and development that have not been able to be financed by SOEs and from the very beginning, they are intended for the SOEs. The State-Owned Assets used and operationalized and/or utilized by such SOEs are known as BPYBDS.

Sampai dengan saat ini, BPYBDS masih menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah BA 999.03. Penyelesaian BPYBDS dianggap berlarut-larut mengingat permasalahan BPYBDS cenderung berulang setiap tahunnya. Dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian BPYBDS, Direktorat KND telah berupaya untuk menyelesaikan BPYBDS melalui langkah penetapan nilai *outstanding* BPYBDS serta langkah himbauan agar setiap BMN yang akan diserahkan kepada BUMN dapat diselesaikan penetapannya menjadi penambahan PMN sesuai dengan mekanisme Pemindahtanganan BMN dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sesuai PP 27 Tahun 2014. Namun demikian, selama ini K/L lebih memilih menggunakan mekanisme BPYBDS untuk penyerahan BMN kepada BUMN dan cenderung mengabaikan mekanisme pengelolaan dan penatausahaan BMN sesuai PP 27/2014. Dalam rangka tertib administrasi penggunaan BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, K/L sebagai Pengguna Barang seyogyanya mengusulkan BMN yang telah diserahterimaoperasionalkan kepada BUMN melalui mekanisme PP 27/2014.

BPYBDS yang berasal dari hasil proyek Kementerian/Lembaga terdiri dari berbagai bentuk dan jenis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia dengan kondisi sebagai berikut: BPYBDS menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan; BPYBDS berupa BMN tersebut sudah cukup lama dimanfaatkan oleh BUMN, sehingga mengalami penurunan fungsi dan penurunan nilai ekonomis; BPK berharap agar ada kepastian Pemerintah terhadap penetapan BPYBDS menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara, mengingat BUMN sudah mencatat dalam ekuitas sesuai dengan prinsip *substance over form*; skema BPYBDS kurang optimal dalam membantu BUMN. Dengan memperhatikan fakta dan kondisi BPYBDS yang ada maka dapat dijumpai beberapa permasalahan mendasar yang terkait dengan penyelesaian BPYBDS, antara lain:

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali

Up until now, BPYBDS in the Financial Report of the Government Investment Accounting System BA 999.03 has been a concern of the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). The settlement of BPYBDS is considered to be protracted given the BPYBDS problem tends to be repeated every year. To address the matter, the Directorate of KND has attempted to resolve BPYBDS through the determination of the value of the outstanding BPYBD and to appeal so that each BMN to be submitted to the SOEs can be settled to become an additional PMN in accordance with the BMN Transfer mechanism by means of Central Government Equity Participation (PMPP) in accordance with Government Regulation Number 27 of 2014. However, so far the Ministries/Agencies prefer to use the BPYBDS mechanism intended for BMN transfer to SOEs and they tend to ignore the management and administration mechanism of BMN as stipulated by Government Regulation Number 27 of 2014. For an orderly administration of the use of BMN that is effective, efficient, optimal, and accountable, Ministries/Agencies as Asset User shall instead propose the BMNs through the mechanism of PP 27/2014.

BPYBDS originated from the results of the Ministries/Agencies project consist of various forms and types spread across several regions in the country with the following conditions. BPYBDS has been a finding of the BPK; BPYBDS in the form of BMN has been used by SOEs for a long time, thus experiencing a decline in function and a decrease in economic value; BPK hopes that the Government make certain that BPYBDS is to be assigned as an addition to the State Equity Participation, considering that SOEs have recorded them as equity in accordance with "substance over form principle"; BPYBDS scheme is not optimal in assisting SOEs. By taking heed of the facts and conditions of the existing BPYBDS, some fundamental problems related to the settlement of BPYBDS are found, including:

In accordance with Article 48 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional-Owned Asset, it is stated that the Appraisal of State/Regional-Owned Asset is carried out in the framework of preparing the Balance Sheet of Central/Regional Government,

Kekayaan Negara Dipisahkan

The Management of Separated State Asset

dalam hal untuk: Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. Mengingat penetapan BPYBDS menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara merupakan bagian dari pemindahtanganan, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, nilai BPYBDS yang akan ditetapkan menjadi PMN menggunakan nilai wajar. Dengan memperhatikan fakta dan kondisi bahwa BPYBDS diterima dalam kondisi baru dan baik oleh BUMN dan telah cukup lama digunakan BUMN tanpa kontribusi PNPB kepada Pemerintah, apabila menggunakan nilai wajar maka akan mengalami penurunan nilai.

Nilai BPYBDS yang diterima oleh BUMN relatif cukup besar sehingga apabila digunakan mekanisme selain PMN seperti sewa, maupun dijual kepada BUMN, akan menimbulkan krisis likuiditas bagi BUMN sehingga penyelesaian BPYBDS akan menimbulkan permasalahan baru bagi BUMN.

Dengan memperhatikan fakta dan kondisi BPYBDS tersebut, maka kebijakan yang dipakai Pemerintah sebagai landasan dalam penyelesaian BPYBDS adalah: 1) dalam rangka optimalisasi BMN maka BPYBDS perlu segera ditetapkan statusnya, 2) disamping itu penyelesaian BPYBDS pada BUMN diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru bagi BUMN sehingga diselesaikan dengan mekanisme penambahan PMN, sedangkan 3) nilai PMN menggunakan nilai hasil review BPKP atas BASTO.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah di atas, maka langkah yang ditempuh Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan BPYBDS antara lain :

- Penetapan status BPYBDS, hanya dengan menggunakan mekanisme penambahan PMN pada BUMN, bukan mekanisme lainnya.
- Nilai yang digunakan sebagai dasar penetapan BPYBDS menjadi penambahan PMN pada BUMN menggunakan nilai hasil review BPKP yang pada dasarnya merupakan nilai perolehan BPYBDS.
- Meminta kepada Kementerian/Lembaga atau BUMN yang menerima BPYBDS untuk mengajukan permintaan review BPYBDS kepada BPKP dan segera mengusulkan penetapan BPYBDS menjadi PMN.

Utilization, or Transfer, except in the case of: Utilization in the form of Lend-Use; or transfer in the form of Grants. Since the determination of BPYBDS as an addition to the State Equity Participation is part of the transfer, in accordance with the provisions of the legislation, the BPYBDS to be determined as PMN shall use fair value. However, considering that BPYBDS were admitted by the SOEs in their novel and fine conditions, and that they have long been utilized by SOEs without contributing non-tax revenues to the Government, using fair value will result in a decrease in their value.

The value of BPYBDS received by SOEs was relatively large, so if a mechanism other than PMN is used, such as rent, or sale to SOEs, it will cause a liquidity crisis for SOEs so that the settlement of BPYBDS will create another problem for SOEs.

Taking into consideration the facts and conditions above, the Government has set policies as the basis for the settlement of BPYBDS. They are: 1) to optimize BMN, the status of BPYBDS needs to immediately determined, 2) besides, the settlement of BPYBDS within the SOEs is expected not to create new problems for the SOEs so that it is to be resolved with the mechanism of additional PMN, while 3) the PMN shall use the value in the BPKP review results of BASTO.

Based on the Government policies above, the following steps were taken by the Government in resolving BPYBDS issues.

- Determination of the status of BPYBDS, shall only follow the mechanism of adding PMN to BUMN, and not any other mechanism.
- The value used as the basis for determining BPYBDS as an additional PMN to BUMN is the value stated in the BPKP review results which is basically the acquisition value of the BPYBDS.
- Calling on the Ministries/Agencies or SOEs receiving BPYBDS to submit a BPYBDS review request to BPKP and immediately propose the BPYBDS to become PMN.

Dalam rangka mempercepat proses penyelesaian BPYBDS untuk menjadi PMN pada BUMN penerima, sejak Tahun Anggaran 2010 penyelesaian BPYBDS telah diakomodir dalam UU APBN yang menyebutkan bahwa BMN yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut. Dengan telah ditetapkan dalam penetapan BPYBDS dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran, maka pada prinsipnya Undang-Undang tersebut merupakan persetujuan Presiden untuk pengalihan BMN menjadi PMN pada BUMN.

Agar data BPYBDS yang dicatat oleh K/L dengan yang dicatat pada BUMN sama, setiap tahun dilaksanakan rekonsiliasi nilai BPYBDS antara K/L dengan BUMN dengan pihak yang mengetahui yaitu Kementerian BUMN dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Upaya penyelesaian BPYBDS melalui penetapan BPYBDS menjadi penambahan PMN pada BUMN telah mencapai hasil yang signifikan. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2017, total nilai BPYBDS sebesar Rp57,61 Triliun telah ditetapkan menjadi PMN melalui 43 PP PMN. Namun demikian, sampai dengan 31 Desember 2017 masih terdapat nilai BPYBDS sebesar Rp23,07 Triliun yang terdapat pada 7 BUMN dengan rincian sebagai berikut:

To speed up the process of changing BPYBDS into PMN in the recipient SOEs, since the Fiscal Year of 2010 the settlement of BPYBDS has been accommodated in the State Budget Law which states that BMN originated from the Filled Activity List (DIK)/ Filled Project List (DIP)/Budget Execution Document (DIPA) of Ministries/Agencies that are used and/or operated by SOEs and have been recorded in the SOEs financial statements as BPYBDS or similar accounts, are set to be used as PMNs for the SOEs. Being stipulated in the State Budget Law, it carries the message that the President has approved the transfer of BMN into PMN in SOEs.

In order that BPYBDS data are recorded correspondingly by Ministries/Agencies and the SOEs, each year, a reconciliation of BPYBDS values between Ministries/Agencies and SOEs is conducted, involving parties acquainted with the issues, namely the Ministry of SOEs and the Directorate-General of State Asset Management.

Efforts to resolve BPYBDS by designating BPYBDS as an additional PMN to SOEs have achieved significant results. As of December 31, 2017, the total value of BPYBDS amounting to Rp 57.61 trillion has been determined as PMN through 43 Government Regulations. However, as of December 31, 2017 there was still a BPYBDS amounted to Rp23.07 trillion in seven SOEs with the following details.

Kekayaan Negara Dipisahkan

The Management of Separated State Asset

No	BUMN SOEs	NILAI BPYBDS per 31 Des 2017 (Rp) BPYDS Value	NILAI BPYBDS per 31 Des 2016 (Rp) BPYDS Value
1	Perum Damri	310.794.912.055,00	310.794.912.055,00
2	Perum PPD	0,00	103.869.300.016,00
3	PT PLN	19.571.104.786.206,00	19.020.567.880.378,00
4	PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	2.502.012.941.855,70
5	PT Pelindo I	525.884.662.252,50	422.533.281.925,00
6	PT ASDP	794.289.473.182,00	1.662.528.350.959,00
7	Perum PFN	0,00	14.903.777.061,00
8	PT Pertamina	12.452.878.178,53	12.452.878.178,53
9	Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	1.351.018.859.661,70
TOTAL		23.071.055.564.989,10	25.400.682.182.089,90

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2017 sebesar Rp23,07 Triliun, turun Rp2,33 Triliun (9,17%) dari nilai tahun lalu sebesar Rp25,40 Triliun. Namun demikian selama tahun 2017 masih terdapat penyerahan BPYBDS dari Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura II dan Kementerian ESDM kepada PT PLN senilai total Rp1,32 Triliun. Penurunan nilai BPYBDS salah satunya disebabkan penetapan BPYBDS menjadi penambahan PMN senilai total Rp3,60 Triliun melalui 5 (lima) Peraturan Pemerintah tentang penambahan Penyertaan Modal Negara pada Perum LPPNPI (PP15/2017), PT Angkasa Pura II (PP 16/2017), Perum PPD (PP 63/2017), PT ASDP (PP 64/2017), dan Perum PFN (PP 65/2017). Penetapan BPYBDS menjadi Penyertaan Modal Negara tersebut menyelesaikan BPYBDS pada Perum PPD dan Perum PFN, sehingga per 31 Desember 2017 seluruh BPYBDS pada Perum PPD dan Perum PFN dinyatakan selesai serta tidak terdapat lagi penambahan BPYBDS. Rincian PP PMN yang berasal dari BPYBDS adalah sebagai berikut:

Overall, the BPYBDS value as of December 31, 2017 was Rp 23.07 trillion, a drop of Rp 2.33 trillion (9.17%) from last year's value of Rp 25.40 trillion. However, in 2017 there were still submissions of BPYBDS from the Ministry of Transportation to PT Angkasa Pura II and the Ministry of Energy and Mineral Resources to PT PLN totaling Rp 1.32 trillion. The decrease in BPYBDS value is partly due to the establishment of BPYBDS to be additional PMN worth a total of Rp 3.60 trillion through 5 (five) Government Regulations concerning the addition of State Equity Participation in Perum LPPNPI (PP15/2017), PT Angkasa Pura II (PP 16/2017), Perum PPD (PP 63/2017), PT ASDP (PP 64/2017), and Perum PFN (PP 65/2017). The determination of BPYBDS to be the State Equity Participation has resolved BPYBDS in the Perum PPD and Perum PFN, so that as of 31 December 2017, all BPYBDS in both Perum PPD and Perum PFN were declared as settled and there were no more additional BPYBDS. Details of Government Regulations concerning PMN originating from BPYBDS are as follows:

No	BUMN SOE	Nilai PMN State Equity Participation Value	Nomor PP Government Regulation
1	Perum LPPNPI	375.512.760.000,00	PP Nomor 15 Tahun 2017 PP Nomor 15 Tahun 2017
2	PT Angkasa Pura II	2.245.622.588.577,17	PP Nomor 16 Tahun 2017 PP Nomor 16 Tahun 2017
3	Perum PPD	103.869.300.016,00	PP Nomor 63 Tahun 2017 PP Nomor 63 Tahun 2017
4	PT ASDP	868.238.877.777,00	PP Nomor 64 Tahun 2017 PP Nomor 64 Tahun 2017
5	Perum PFN	14.903.777.061,00	PP Nomor 65 Tahun 2017 PP Nomor 65 Tahun 2017

Pembentukan Holding Industri Pertambangan

Establishment of Mining Industry State-Owned Holding Company

Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan dilatarbelakangi beberapa fakta bahwa sumber daya yang dimiliki dan cadangan mineral maupun batubara yang besar belum diolah lebih lanjut secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah sebagai akibat keterbatasan kemampuan pendanaan untuk melakukan investasi. Hal ini turut didukung pula oleh skala perseroan yang relatif masih lebih rendah dibandingkan kompetitor (asing) dan terfokusnya pada komoditas tertentu sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Penambahan penyertaan modal negara dimaksud berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. serta pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Freeport Indonesia kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Nilai penambahan penyertaan modal negara dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara, dengan rincian nilai wajar per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

The establishment of the Mining Industry SOE Holding was motivated by the fact that, due to limited funding capacity to invest, the country's vast resources including mineral and coal reserves have not been processed optimally to increase added values. This is also attributable to the scale of the SOEs which is still relatively lower than their (foreign) competitors. Besides, they focused on certain commodities, making them more vulnerable to commodity price fluctuations.

Based on Government Regulation Number 47 of 2017 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation to the Share of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), the state has added equity in PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). The addition of state capital participation was derived from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia to PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., and PT Bukit Asam (Persero) Tbk. and the transfer of all shares owned by the Republic of Indonesia in Freeport Indonesia into PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). The value of the additional state equity participation was determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of State-Owned Enterprises, with details of fair value as of June 30, 2017 as follows.

Kekayaan Negara Dipisahkan

The Management of Separated State Asset

No	Nama Perseroan Terbatas SOEs	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Fair Values
1.	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	15.619.999.999	Rp16.902.338.000.000,00
2.	PT Timah (Persero) Tbk.	4.841.053.951	Rp6.241.547.115.597,00
3.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	1.498.087.499	Rp18.347.365.779.027,00
4.	PT Freeport Indonesia	21.300	Rp7.255.450.397.220,00
TOTAL			Rp48.746.701.291.844,00

Penambahan penyertaan modal negara tersebut mengakibatkan status PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk., berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadi Pemegang Saham PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., PT Bukit Asam Tbk., dan PT Freeport Indonesia.

Perubahan status tersebut bukan berarti bahwa negara akan kehilangan kendali terhadap PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk. Negara tetap dapat memiliki kontrol terhadap PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk. perusahaan tersebut melalui kepemilikan saham Seri A (Dwi Warna) sehingga kebijakan strategis yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk. tetap memerlukan persetujuan negara. Hal ini juga ditekankan dalam Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa perusahaan yang kehilangan statusnya sebagai BUMN karena dilaksanakannya proses holding harus tetap dimiliki sahamnya oleh pemerintah dalam bentuk saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

The addition of state equity participation resulted in the status of PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., and PT Bukit Asam (Persero) Tbk., changed into limited liability companies that were fully compliant with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) become a shareholder of PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., PT Bukit Asam Tbk., and PT Freeport Indonesia.

The status change does not indicate that the state will lose control of PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., and PT Bukit Asam Tbk. Rather, the state can still have control over PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., and PT Bukit Asam Tbk. through the Series A (Dwi Warna) shares so that the strategic policies undertaken by the three companies will still require state approval. This is also emphasized in Article 2A paragraph (2) of Government Regulation Number 72 of 2016 which elucidates that companies that lose their status as SOEs due to the holding process must still be owned by the government by means of shares with privileges as stipulated in the articles of association.

Pemilihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai induk holding BUMN Industri Pertambangan diprediksi akan mempercepat, mengoptimalkan, dan membuat proses pembentukan holding lebih *controllable* dikarenakan pelaksanaan *shareholder action* ini tidak banyak bersinggungan dengan ketentuan di bidang pasar modal. Adapun pemilihan Inbreng Saham (*share swap*) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Opsi ini dipilih karena Pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana atau tambahan pendanaan.

Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan diyakini memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan penggabungan usaha (Merger) BUMN Industri Pertambangan atau menjalankan BUMN Industri Pertambangan seperti saat ini. Keunggulan yang dapat diperoleh antara lain proses restrukturisasi BUMN Industri Pertambangan melalui pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan relatif lebih efektif dan optimal dibandingkan dengan penggabungan usaha dan juga terciptanya diversifikasi usaha sehingga dapat lebih kuat menghadapi siklus harga komoditas.

Secara umum tujuan lain pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan adalah peningkatan daya saing, efisiensi biaya, peningkatan kemampuan finansial dan akses pendanaan, diversifikasi produk, dan terciptanya *business scale* untuk bersaing di regional dan internasional. Dalam jangka menengah pembentukan holding industri pertambangan bertujuan untuk mengakuisisi sumber daya yang dimiliki asing dan mendorong terjadinya hilirisasi. Sementara itu, manfaat yang akan diperoleh antara lain peningkatan posisi keuangan dan perbaikan likuiditas perusahaan, peningkatan nilai tambah komoditas Indonesia melalui program hilirisasi, diversifikasi produk dan bisnis, pengendalian BUMN secara efektif dengan *span of control* yang tidak terlalu panjang, dan penciptaan lapangan kerja baru.

The appointment of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) as the holding company of the Mining Industry is predicted to accelerate, optimize, and make the holding formation process more controllable because the implementation of this shareholder action does not raise an issue with the capital market provisions. The share swap selection refers to Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participating and Administration of State Equity in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies. Through this chosen option, the Government does not need to disburse funds or make additional fundings.

The establishment of the Mining Industry State-Owned Holding Company is thought to have more advantages than the merger of the Mining Industry SOEs or running the Mining Industry SOEs as it was. Aside from that, this step creates business diversification, enabling the company to cope strongly with the commodity price cycle.

In general, other objectives of the establishment of a mining industry State-Owned Holding Company are to increase competitiveness, cost efficiency, financial capacity, and access to funding. And also to create product diversification and business scales to compete regionally and internationally. In the medium term, the establishment of a mining industry holding is aimed at acquiring foreign-owned resources and encourage the downstreaming (hilirisasi). Meanwhile, the benefits to be gained include increasing financial position and improving company liquidity, increasing Indonesia's added value through downstream programs, product and business diversification, effective control of SOEs with a not-too-long span of control, and the creation of new jobs.

Kekayaan Negara Dipisahkan

The Management of Separated State Asset

Selain manfaat tersebut, holding BUMN Industri Pertambangan juga akan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, antara lain berupa: pengendalian BUMN oleh negara yang lebih efektif; peningkatan pemasukan negara melalui dividen, pajak dan royalty; optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan BUMN; peningkatan nilai tambah komoditas Indonesia melalui pelaksanaan program hilirisasi; pengembangan ekonomi Indonesia; terciptanya lapangan kerja baru akibat berkembangnya usaha Holding; mendukung dan menciptakan industri kecil baru dan mendorong efisiensi harga produk yang dihasilkan dari barang tambang.

In addition to these benefits, the holding of the BUMN Mining Industry will also provide benefits to the state and the people in the form of, among others, a more effective control of SOEs by the state; an increase in state revenues through dividends, taxes and royalties; optimization of Indonesia's natural resource management by state-owned enterprises; an increase the added value of Indonesian commodities through the implementation of downstream programs; Indonesia's economic development; the creation of new jobs prompted by the development of the holding business; the support for and the creation of new small industries, and an increase in efficiency of the mining industry.



Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia

Implementation of PT Freeport Indonesia Divestment

Pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia dilaksanakan sesuai dengan komitmen Menteri Keuangan bahwa pengambilalihan PT Freeport dilakukan melalui mekanisme korporasi yang tidak membebani APBN maupun APBD. Kegiatan ini merupakan salah satu manfaat dari pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017.

Salah satu tugas dan fungsi DJKN cq Direktorat KND dalam proses penyusunan dan penetapan rencana holdingisasi, yakni melakukan pengkajian kelayakan holding, pengusulan kepada Presiden dan penetapan nilai inbreng saham dari PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Freeport Indonesia kepada PT Inalum selaku induk holdingnya.

PT Inalum sebagai induk holding BUMN industri pertambangan ditugaskan untuk melaksanakan pengambilan saham divestasi Freeport melalui mekanisme korporasi yang profesional dengan menjaga integritas sesuai prinsip *good corporate and governance* dan dilakukan secara transparan, bersih dari kepentingan pihak tertentu di setiap tahapan sehingga kepercayaan dalam negeri dan luar negeri terhadap iklim investasi di Indonesia meningkat.

Pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia juga melibatkan Pemerintah Daerah Papua saham sebesar 10% dan Pemerintah Pusat, dengan kepemilikan saham sebesar 41%. Porsi hak kepemilikan oleh Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Mimika tersebut telah mengakomodir hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak usaha.

Menteri Keuangan berharap dengan divestasi Freeport ini dapat meningkatkan kinerja PT Freeport sehingga bisa memberi manfaat untuk masyarakat Papua dan Indonesia, menopang hilirisasi industri tambang, meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong pembangunan di daerah, terutama di Papua.

The acquisition of PT Freeport Indonesia's divestment shares was carried out in accordance with the Minister of Finance's commitment that the takeover of PT Freeport shall be carried out through a corporate mechanism that does not burden the State Budget nor the Regional Budget. This activity is one of the benefits of the establishment of a Mining Industry State-Owned Holding Company stipulated by Government Regulation Number 47 of 2017.

Duties and functions of the DJKN, in this case, the Directorate of KND in the process of drafting and stipulating a holding plan are, among others, conducting a feasibility review of the holding, proposing to the President, and determining the share value of PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk and PT Freeport Indonesia to PT Inalum as the holding company.

PT Inalum as the mining industry State-Owned Holding Company is tasked with carrying out the Freeport divestment shares through a professional corporate mechanism by maintaining integrity in accordance with the principles of good corporate and governance and carried out transparently, free from any interests of certain parties at each stage so as to increase domestic and foreign trust in the investment climate in country.

The acquisition of 51% of PT Freeport Indonesia's shares also involves the Papua Regional Government with 10 % shares and the Central Government with 41 % of shares. The portion of ownership by the Regional Government of Papua and the Mimika Regency has accommodated the rights of the people who own customary rights and the communities impacted by the business.

The Minister of Finance hopes that the Freeport divestment may improve PT Freeport's performance so that it brings more benefit to the Papuans and Indonesians, supporting the downstream mining industry, increasing employment opportunities, and boosting development in the regions, especially in Papua.

Pengelolaan Piutang Negara

Developments in State Claims Management

Hasil pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh PUPN/DJKN selama tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut.

We could elucidate the developments in State Claims management carried out by the Committee of State Claims Management (PUPN)/DJKN in 2017 as follows.

Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS)

Settled State Claims (PNDS)

Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) merupakan jumlah Piutang Negara yang dapat diselesaikan pengurusannya oleh PUPN/DJKN yang berasal dari Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT), Penarikan, Angsuran/Penarikan/Lunas terhadap BKPN PSBDT, dan pelunasan BKPN aktif. Realisasi jumlah PNDS tahun 2017 dalam satuan rupiah sebesar Rp296,21 miliar dengan target sebesar Rp348 miliar, sehingga persentase pencapaian 85,12%. Realisasi PNDS diperoleh dari eksekusi (penjualan barang jaminan) maupun non eksekusi (angsuran/pelunasan hutang, restrukturisasi hutang, penebusan maupun pencairan barang jaminan) yang sumber datanya disampaikan oleh Kanwil dan KPKNL selama tahun 2017.

Settled State Claims (PNDS) represent the amount of State Claims that can be resolved by the PUPN/DJKN. PNDS are derived from Collectable State Claims (PNDT), Withdrawals, Installments/Withdrawals/Settlement of Case Files of Temporary Uncollectible State Claims, as well as from the settlement of active Case Files of State Claims (BKPN). As of 2017, the realization of Settled State Claims was Rp 296.21 billion, or 85.12% of the targeted Rp 348 billion. This realization was derived from execution (sale of collateral goods) and non-execution (installments/debt repayment, debt restructuring, redemption and disbursement of collateral goods) reported by Regional Offices and Service Offices during 2017.

Tabel Realisasi Pencapaian Piutang Negara Dapat Diselesaikan (dalam jutaan Rupiah)

Table of Realization of Settled State Claims (in million rupiah)

Tahun Year	PNDS PNDS		
	Target Target	Realisasi Realization	Persentase Percentage
2013	521.374,10	655.833,58	125,79%
2014	402.000,00	462.484,52	115,05%
2015	350.000,00	352.825,98	100,81%
2016	349.000,00	242.728,04	69,55%
2017	348.000,00	296.210,00	85,12%



Realisasi jumlah PNDS tahun 2017 dalam satuan rupiah sebesar Rp296,21 miliar dengan target sebesar Rp348 miliar, sehingga persentase pencapaian 85,12%.

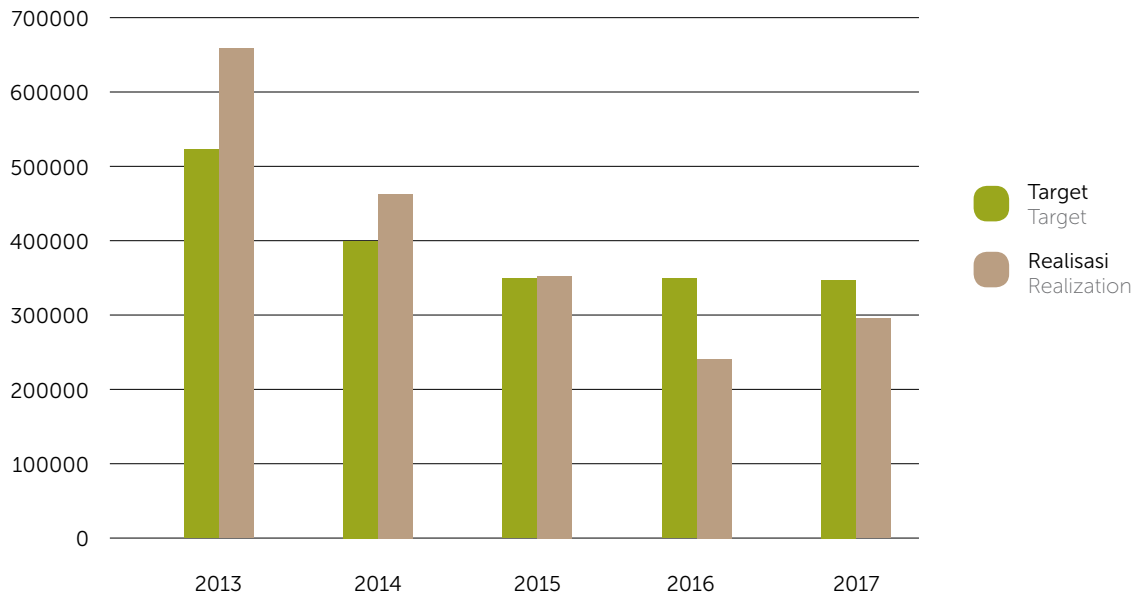
As of 2017, the realization of Settled State Claims was Rp 296.21 billion, or 85.12% of the targeted Rp 348 billion.

Pengelolaan Piutang Negara

Developments in State Claims Management

Grafik Realisasi PNDS Tahun 2017

Settled State Claims in 2017



Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang dapat diselesaikan

Settled Case File of State Claims Management

BKPN yang Dapat Diselesaikan meliputi BKPN yang telah melalui proses Pengembalian, Penarikan, Lunas/Selesai, dan PSBDT. Realisasi jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan tahun 2017 sebanyak 21.447 BKPN atau sebanyak 129,26% dari jumlah yang ditargetkan yaitu 16.592 BKPN.

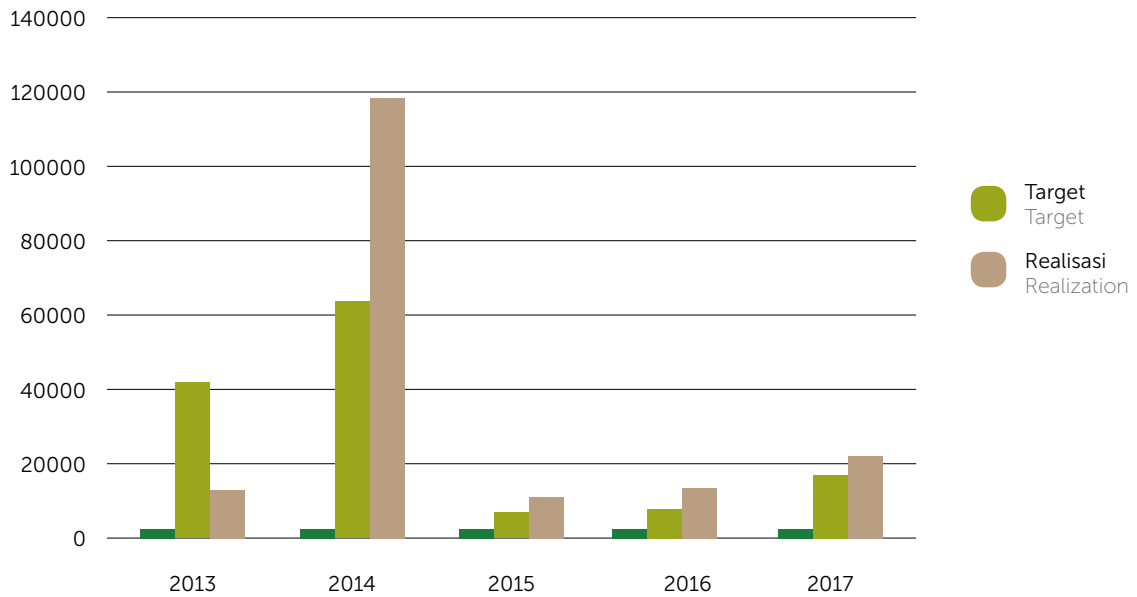
Settled State Claims (PNDS) comprise Case Files of State Claims which have gone through the stages of Handing back, Withdrawal, Settlement, and Temporary Uncollectible State Claims (PSBDT). The total amount of Settled Case Files in 2017 was 21,447, or 129.26% of the targeted amount of Settled Case Files of 16,592.

Tabel Realisasi BKPN yang Dapat Diselesaikan Tahun 2017

Realization of Settled Case File of State Claims Management in 2017

Tahun Year	Target Target	Realisasi Realization	Persentase Percentage
2013	41.242	12.619	30,60%
2014	62.625	116.869	118,62%
2015	6.634	10.740	161,89%
2016	7.500	13.225	176,33%
2017	16.592	21.447	129,26%

Grafik Realisasi BKPN yang Dapat Diselesaikan
Realization of Settled Case Files



Permasalahan Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2017 antara lain Piutang Negara K/L yang tidak didukung oleh dokumen sumber, pemahaman K/L terhadap proses penghapusan Piutang Negara dan Piutang Daerah yang kurang memadai, permintaan pengurusan Piutang Negara eks obligor memerlukan usaha lebih optimal dan harus dilaksanakan dengan *prudent/kehati-hatian*, barang jaminan yang masih bermasalah tidak dapat dilakukan penjualan karena rentan terhadap gugatan, dan lain sebagainya.

DJKN c.q. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengurusan piutang negara yang berdampak pada tercapainya PNDS dan Biad PPN. Monitoring dan evaluasi tersebut diwujudkan dengan:

There are a range of problems surrounding the achievement in Settled State Claims (PNDS). They are, among others, State Claims the management of which have been handed over to DJKN in 2017 were not supported by source documents, lack of understanding of Ministries/Agencies on the process of State Claims and Regional Claims, handling the management of State Claims deriving from ex-obligors requires more optimal and prudent attempts; sales of troubled collaterals could not be made since they are prone to lawsuits, and so forth.

DJKN, in this case, the Directorate of State Claims and Other State Assets (PNKNL) always conducts monitoring and evaluation to optimize the efforts that can be made in the management of state claims which in turn will boost the achievement of Settled State Claims (PNDS) and Administration Free. The monitoring and evaluation are realized through.

Pengelolaan Piutang Negara

Developments in State Claims Management

1. Melaksanakan rekonsiliasi Piutang Negara antara Direktorat PNKNL, KPKNL, dan K/L;
2. Menyurati seluruh K/L agar melakukan penyisihan piutang negara tak tertagih dan jenis piutang negara yang tak tertagih pada K/L;
3. Melakukan *update, input* dan *cleansing data focus* Piutang Negara (PN) guna validitas data *focus* PN, serta membuat peraturan tentang penggunaan aplikasi *focus* PN; dan
4. Melaksanakan sosialisasi kepada K/L tentang pengelolaan, penyisihan dan penghapusan piutang negara.

1. Reconciliation of State Claims, involving Directorate of PNKNL, KPKNL, and Ministries/Agencies;
2. Writing all Ministries/Agencies to make allowance for uncollectible state claim and the list of their uncollectible state claims;
3. Making an update, input, and cleansing onto the focus PN Application, and formulating regulations regarding the use of focus PN application; and
4. Conducting dissemination in the Ministries/Agencies regarding state claims management, allowance for uncollectible state claims and state claims write-off.



Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara kepada K/L

Development in State Claims Management Sozialitation

Langkah-langkah ataupun strategi yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara.
2. Menatausahakan pengelolaan piutang negara dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan kesadaran (*awareness*), kemitraan dengan *stakeholder*, dan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengurusan piutang negara.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan pengelolaan anggaran.

While a number of steps to be taken to improve performance and overcome future challenges, among others.

1. Formulating and refining regulations in the field of state claims management.
2. Accurately and accountably administering the management of state claims.
3. Enhancing awareness, partnerships with stakeholders, and quality of management of state claims and management of other state assets.
4. Better monitoring and evaluating of performance of state claims management.
5. Upgrading the quality of human resources, organization, information and communication technology (ICT), and budget management.

Penyusunan peraturan dan kebijakan Pengurusan Piutang Negara

Preparation of Regulations and Policies for the Management of State Claims

Penerapan simplifikasi yang menambah/mengubah pengaturan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan piutang negara, antara lain:]

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KMK.06/2017 tentang Format Nota Dinas dan Produk Hukum PUPN;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara;
5. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 096/KN/2017 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan DJKN; dan
6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 207/KN/2017 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara.

Implementation of simplification by changing/adding rules to improve the efficiency and effectiveness of state claims management was done through, among others:

1. Government Regulation Number 35 of 2017 concerning Second Amendment to Government Regulation Number 14 of 2005 concerning Procedures for Write-off of State/Regional Claims;
2. Minister of Finance Regulation Number 102/PMK.06/2017 concerning Membership and Working Procedure of the Committee of State Claims Management;
3. Minister of Finance Decree No. 724/KMK.06/2017 concerning Office Memo Forms and PUPN Legal Products;
4. Regulation of Director-General of State Assets Management (Perdirjan) Number 6/KN/2017 concerning Technical Guidelines for Managing State Claims;
5. Decree of Director-General of State Assets Management (Kepdirjen) Number 096/KN/2017 concerning Amendment to the Decree of the Director-General of State Claims Number 157/KN/2013 concerning Standardization of Performance Reports in the DJKN Circle; and
6. Decree of the Director General of State Asset Management Number 207/KN/2017 concerning the Use of Management Information System Applications for State Claims Management.

Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

Developments in Other State Assets Management

Selain mengelola BMN, DJKN juga berperan penting dalam pengelolaan BMN yang masuk dalam kategori Kekayaan Negara Lain-lain (KNL). BMN Kekayaan Negara Lain-lain berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan kontrak/perjanjian, perolehan berdasarkan ketentuan undang-undang, dan perolehan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekayaan Negara Lain-lain yang dikelola DJKN terdiri dari aset-aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi (KOBPB), serta kebijakan pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T), Tegahan Kepabeanaan dan Cukai, Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan Aset Lain-Lain Dan, Aset Eks BPPN, Aset Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Di samping pengelolaan BMN KNL, DJKN melakukan tugas-tugas yang menjadi bagian dari program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Sepanjang 2017, kegiatan yang dilakukan DJKN dalam rangka pengelolaan KNL adalah sebagai berikut.

In addition to managing State-Owned Assets (BMN), DJKN also plays a key role in the management of BMN which fall into the category of Other State Assets (KNL). Other State Assets originate from grants/donations or the like, implementation of contracts/agreements, acquisition under the provisions of the law, and acquisition based on court decisions that have obtained permanent legal force. Other State Assets managed by DJKN consist of assets deriving from Contractor of Oil and Gas Cooperation Contract (KKKS), Contractors of Coal Contract of Work (PKP2B), and Contractors of Geothermal Joint Operation Contracts (KOBPB). Also fall into this category are assets deriving from the management Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/T), Customs and Excise, Goods Confiscated by the State, and Gratification Goods, Shipwrecks and Sunken Treasures (BMKT), and other assets, and assets of Ex-IBRA (Indonesian Bank Restructuring Agency), assets formerly managed by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), and Assets of ex-BDL (Liquidated Banks). Aside from managing KNL, DJKN is also tasked with duties linked to Bureaucratic Reform and Institutional Transformation program in the Ministry of Finance.

Below are activities carried out by DJKN throughout 2017 in the framework of managing KNL.



Penandatanganan perjanjian perpanjangan sewa KKKS PT PHE ONWJ

Signing of PT PHE ONWJ (PSC Contractor) lease extension agreement

Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas

Management of BMN Deriving from Contractor of Oil and Gas Cooperation Contract (KKKS)

Di tahun 2017, DJKN membukukan pemanfaatan senilai USD7.292.688,00 atas kapasitas berlebih yang belum dimanfaatkan pada pipa penyalur gas bumi sepanjang 12,3 km yang terletak antara Muara Karang dan Tanjung Priok. Pipa yang dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE-ONWJ) didapati memiliki kapasitas berlebih yang belum dimanfaatkan, sehingga PT Nusantara Regas, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perniagaan gas bumi, memanfaatkan kapasitas BMN yang berlebih. Partisipasi PT Nusantara Regas dituangkan dalam sebuah perjanjian sewa BMN, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Nusantara Regas dan Menteri Keuangan, yang diwakili oleh Direktur PNKNL, pada tanggal 4 Agustus 2017. Dengan perjanjian tersebut, di satu sisi Pemerintah mendapatkan hasil pemanfaatan senilai USD7.292.688,00 untuk periode 2017 s.d. 2022. Di sisi lain, pipa penyalur gas bumi dapat dimanfaatkan maksimal sesuai dengan kapasitasnya.

Pada tahun yang sama, KKKS PHE-ONWJ memasuki masa terminasi. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor mengembalikan BMN yang dioperasikannya kepada Pemerintah. Setelah kontrak baru berlaku, ketentuan pengelolaan BMN Hulu Migas mengikat KKKS PHE-ONWJ untuk menyewa BMN yang ada di wilayah kerja North West Java. Dari perjanjian pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa ini, Pemerintah mendapatkan hasil sebesar Rp225.603.000.000,00 untuk jangka waktu 1 tahun (2017). Sepanjang tahun 2015, PNBPN yang diperoleh dari pengelolaan BMN Hulu Migas mencapai nilai sebesar Rp414.087.205.034,00.

In 2017, DJKN booked asset utilization of USD 7,292,688.00 for excess capacity had not been utilized in the 12.3 km-long natural gas distribution pipeline located between Muara Karang and Tanjung Priok. The pipeline operated by Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE-ONWJ, Contractor of Oil and Gas Cooperation Contract) was found to have excess capacity that had not been utilized, so that PT Nusantara Regas, a company engaged in natural gas trading, utilized the BMN capacity excess. Participation of PT Nusantara Regas was stated in a BMN lease agreement, signed by the President Director of PT Nusantara Regas and the Minister of Finance, represented by the Director of PNKNL, on August 4, 2017. With the agreement, not only did the Government receive proceed from the utilization of USD 7,292,688.00 for the period 2017 to 2022, but also the natural gas distribution pipes could be utilized to the maximum in accordance with their capacity.

During the year, the PHE-ONWJ entered the termination period. In accordance with the provisions of Government Regulation No. 35 of 2004 concerning Upstream Oil and Gas Activities, Contractors shall return the BMN they have operated to the Government. Once the new contract takes effect, under the provisions of the Management of Upstream Oil and Gas, the PHE-ONWJ was required to lease BMN in the working area of North West Java. From the agreement on the utilization of BMN in the form of this lease, the Government has secured a proceed of Rp.225,603,000,000.00 for a period of one year (2017). Throughout 2015, PNBPN obtained from the management of Upstream Oil and Gas reached a value of Rp 414,087,205,034.00.

Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

Developments in Other State Assets Management



Penandatanganan perjanjian sewa BMN KKKS PHE ONWJ antara Kementerian Keuangan dan PT Nusantara Regas, pada tanggal 4 Agustus 2017

The signing of the lease agreement of State-Owned Assets of PSC Contractor PHE ONWJ between the Ministry of Finance and PT Nusantara Regas, on August 4, 2017

Untuk meningkatkan optimalisasi BMN Hulu Migas, berbagai pembenahan telah dilakukan oleh DJKN guna memastikan pengelolaan BMN Hulu Migas dilaksanakan secara tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Salah satu pembenahan yang menjadi fokus DJKN adalah pembenahan aset BMN Hulu Migas berupa tanah. Sebagaimana aset lainnya, tanah yang dibeli/diperoleh KKKS merupakan BMN. Sesuai dengan ketentuan yang ada, tanah tersebut disertifikatkan a.n Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan.

Pembenahan tanah milik negara yang dipergunakan oleh KKKS dimulai dengan dua langkah penting yaitu pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan program sertifikasi nasional. Program IP terhadap BMN berupa tanah yang berada di bawah penguasaan KKKS dimulai sejak tahun 2015, yang dilaksanakan terhadap tanah-tanah yang diperoleh sebelum tahun 2011. Kegiatan IP menargetkan 12.051 line tanah seluas 3.768.896.312 m² dengan nilai perolehan Rp1.691.495.095.074,00 yang tersebar pada 80 KKKS.

DJKN has made numerous improvements so that the Upstream Oil and Gas can be managed optimally, among others, by ensuring the management of the Upstream Oil and Gas is carried out in an orderly manner from the administrative, physical, and legal points of view. One of the improvements that became the concern of DJKN was the improvement of BMN Upstream Oil and Gas in the form of land. As with other assets, land purchased/obtained by the KKKS constitutes BMN. And under the existing provisions, the land shall be certified on behalf of the Government of Indonesia, in this case, the Ministry of Finance.

The revamping of state-owned land used by the KKKS marked by two important steps, namely the implementation of the Inventory and Appraisal (IP) and a national certification program. The IP program for BMN in the form of land under KKKS control started in 2015, which was carried out on lands acquired before 2011. IP activities targeted 12,051 land lines covering 3,768,896,312 m² with acquisition value of Rp 1,691,495,095,074.00 spread over 80 KKKS.



Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN Hulu Migas tanggal 13 April 2017 bersama SKK Migas, PPBMN KESDM, KPK, dan KKKS, bertempat di Mezzanine, Gedung Juanda

Coordination Meeting on Management of BMN Upstream Oil and Gas on April 13, 2017. SKK Migas, PPBMN KESDM, KPK, and KKKS participated in the meeting held at Mezzanine, Juanda Building.

Dari target *line* BMN tanah, kegiatan IP berhasil menyelesaikan sejumlah 5.926 *line* dengan luas 3.573.481.359 m² dengan nilai perolehan Rp1.206.814.529.068,00. Pada tahun 2018, direncanakan untuk menyelesaikan sisanya sebanyak 6.125 *line* dengan luas 195.414.953 m² dan nilai perolehan nilai Rp484.680.566.006,00.

Melalui kegiatan IP, diharapkan seluruh tanah yang dipergunakan oleh KKKS dapat diidentifikasi dengan luasan dan nilai wajar yang akurat dan informasi yang lebih lengkap (kondisi, status pemakai (digunakan/tidak digunakan (*idle*), sertifikat). Penilaian tersebut juga akan berkontribusi pada kenaikan nilai aset pada laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dari aspek penggunaan, IP yang telah dan sedang dilakukan dibarengi dengan program sertifikasi, karena sebagian besar tanah-tanah tersebut belum bersertifikat. Untuk tanah-tanah yang telah bersertifikat pun, kondisi sertifikat belum sesuai ketentuan (belum di atas namakan Pemerintah RI c.q Kementerian Keuangan). Sejak tahun 2017, DJKN telah merencanakan program sertifikasi nasional, dengan berkoordinasi dengan Kementerian ATR, Kementerian ESDM, dan SKK Migas. Di tahun 2017,

From the target *line* of State-Owned Assets in the form of land (BMN tanah), IP activities successfully completed of 5,926 *lines* covering an area of 3,573,481,359 m² with an acquisition value of Rp1,206,814,529,068.00. It was planned, that in 2018, the remaining 6,125 *lines* which cover an area of 195,414,953 m² and constitute an acquisition value of Rp.484,680,566,006.00 would be completed.

It is expected that through IP all land used by KKKS can be identified, presenting an accurate area, fair value, and more complete information on conditions, user status (used/unused [*idle*], certificates). The appraisal will also contribute to the increase in the value of assets presented in the Financial Report of Central Government.

In terms of usage, IP has been carried out simultaneously with the certification program, considering that most of these lands have not been certified. Even for lands that have been certified, existing certificates do not comply with regulations that require them to be in the name of the Indonesian Government, in this case, the Ministry of Finance. In 2017, DJKN has planned a national certification program, in coordination with the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency, Ministry of Energy and Mineral

Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

Developments in Other State Assets Management

target yang dicanangkan adalah 50% dari seluruh bidang tanah telah dimohonkan sertifikatnya kepada kantor pertanahan. 50% sisanya menjadi target di tahun 2018.

Terkait dengan peningkatan kualitas pelaporan BMN KKKS, saat ini DJKN bersama-sama dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas sedang menyelesaikan pembangunan sistem pertukaran data BMN KKKS yang terdiri dari empat fase utama, yaitu: (a) pembangunan aplikasi (Modul KNL), pendaftaran domain (*hosting*) pada alamat <https://www.modulknk.kemenkeu.go.id/siknl-ui>, dan jalur komunikasi data (MPLS); (b) pembentukan basis data yang berkualitas; (c) pemutakhiran data; (d) penyusunan laporan BMN KKKS. Saat ini, pembangunan sistem pertukaran data BMN KKKS sedang memasuki fase kedua.

Resources, and SKK Migas. For 2017, it was set out that request for certificates of 50 percent of all plots of land has been submitted the National Land Agency, leaving the remaining 50% to be applied in 2018.

As for improvement of reporting quality of State-Owned Asset of Contractor of Oil and Gas Cooperation Contract (BMN KKKS), currently DJKN and the Ministry of Energy and Mineral Resources and SKK Migas are completing the establishment of BMN KKKS data exchange system which consists of four main phases, namely: (a) application development (KNL Module), domain registration (*hosting*) at <https://www.modulknk.kemenkeu.go.id/siknl-ui>, and data communication (MPLS); (b) the establishment of a quality database; (c) updating data; (d) preparation of the BMN KKKS report. Currently, the construction of the BMN KKKS data exchange system has entered its second phase.



Pengelolaan BMN yang Berasal dari Perjanjian Karya/Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Management of BMN Deriving from Coal Contract of Work (PKP2B)

Sepanjang tahun 2017, telah diterbitkan 8 (delapan) surat persetujuan Menteri Keuangan untuk pengelolaan BMN PKP2B, salah satunya berupa persetujuan pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk BMN pada kontraktor PKP2B PT Kaltim Prima Coal berupa kekosongan slot penerbangan pada Bandara Khusus Tanjung Bara. BMN obyek persetujuan tersebut bernilai sebesar Rp4.663.523.000.

As many as eight letters were issued by the Minister of Finance in 2017 approving the management of BMN deriving from Coal Contract of Work (BMN PKP2B), including a lend-use approval to the Regency Government of East Kutai for BMN on PT Kaltim Prima Coal (PKP2B contractor) in the form of flight slot at Tanjung Bara Special Airport worth Rp 4,663,523,000.



Penandatanganan Pinjam Pakai Slot Penerbangan Bandara Tanjung Bara PT Kaltim Prima Coal antara DJKN dengan Pemkab Kutai Timur

Signing of the Lend-Use Agreement for PT Kaltim Prima Coal's Tanjung Bara Airport Flight Slot between DJKN and Regency Government of East Kutai.

Di tahun yang sama, peraturan tentang tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN PKP2B yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.6/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I diterbitkan, yang dilanjutkan dengan sosialisasi pada tanggal 26 Juli

During the year, the regulation concerning follow-ups on the results of the Inventory and Valuation of BMN PKP2B was released, namely, the Decree of the Minister of Finance No. 376/KMK.6/2017 concerning Guidelines for the Follow-up on the Results of Inventory and Valuation of State-Owned Assets Deriving from a Coal Contract of Work (PKP2B) Generation I. This was followed by a dissemination program on July 26, 2017, which was attended by representatives from the

Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

Developments in Other State Assets Management

2017, yang dihadiri oleh Kementerian ESDM dan 7 (tujuh) Kontraktor PKP2B Generasi I.

Untuk kepentingan tertib administrasi, hukum dan fisik, dilaksanakan pula kegiatan IP BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan PKP2B berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Kontraktor PKP2B Generasi I kepada Kementerian ESDM, sebagai lanjutan kegiatan serupa yang belum tuntas dilaksanakan pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Oktober s.d. Nopember 2017, yang menghasilkan data tanah seluas 196,209 hektar untuk PT Multi Harapan Utama dan 38,919 hektar untuk PT Kideco Jaya Agung. Kegiatan IP tahun 2017 belum tuntas mencakup semua BMN tanah PKP2B, sehingga akan dilanjutkan kembali di tahun 2018.

Ministry of Energy and Mineral Resources and seven contractors of PKP2B Generation I.

To achieve administration, legal, and physical order, Inventory and Valuation (IP) of BMN in the form of land under PKP2B was also conducted—taking up where DJKN left off in 2014—based on data submitted by Contractors of PK2PB Generation I to the Ministry of Energy and Mineral Resources. Conducted from October to November 2017, this IP produced land data covering 196,209 hectares of PT Multi Harapan Utama and 38,919 hectares of PT Kideco Jaya Agung. Since the IP activities have not been able to cover all BMN PKN2B in the form of land, they will be resumed in 2018.

Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi (KOBPB)

Management of BMN Deriving from Geothermal Joint Operation Contracts (BMN KOBPB)

Pengelolaan BMN KOBPB tergolong masih baru, namun sepanjang tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan berupa penyusunan dan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 401/KN/2017 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi (Kepdirjen 401). Kepdirjen 401 menjadi dasar kegiatan selanjutnya, yaitu IP aset BMN yang berasal dari Pengelolaan Usaha Panas Bumi, yang dilaksanakan secara bertahap terhadap 5 (lima) Kontraktor KOB Panas Bumi berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada periode tahun 1982 s.d. 1995.

Di tahun 2017, IP dilaksanakan di 3 Kontraktor KOB Panas Bumi, yang menghasilkan penyelesaian IP terhadap 13,91% aset Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited sejumlah 110 aset dengan nilai wajar Rp157.269.437.000,00. Pelaksanaan IP di Star Energy Geothermal Salak, Ltd. merampungkan 211 aset dengan nilai wajar Rp1.020.430.285.542,10, atau setara 50,12% dari keseluruhan aset. Star Energy Geothermal Darajat II Limited menyelesaikan IP terhadap 94,64% aset sebanyak 106 buah dengan nilai wajar sebesar Rp697.139.844.000,00.

Management of BMN KOBPB is relatively new, yet throughout 2017, DJKN has formulated and issued the Decree of the Director-General of State Asset Management Number 401/KN/2017 concerning Guidelines for Inventory and Valuation of BMN Deriving from Geothermal Joint Operation Contracts. This decree became the basis of further activities, namely IP of BMN originating from the management of the geothermal business, which was carried out in stages for five KOBPB Contractors based on a contract signed between 1982 and 1995.

In 2017, IP was performed in three KOBPB Contractors, covering 13.91% of Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited's assets, namely 110 assets with a fair value of Rp 157,269,437,000.00. Meanwhile, IP in Star Energy Geothermal Salak, Ltd. has covered 211 assets with a fair value of Rp1,020,430,285,542.10, or equivalent to 50.12% of all its assets. Star Energy Geothermal Darajat II Limited has completed IP of 106 assets (94,64%) with a fair value of Rp 697,139,844.00.00.



Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian BMN Yang Berasal Dari KOB Panas Bumi
Inventory and Valuation of BMN Originating from KOBPB

Penyusunan Laporan Potensi Fiskal Sumber Daya Alam

Preparation of Report on Fiscal Potency of Natural Resources

Sebagai bagian dari program Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Inisiatif Strategis 14 (Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional) dan Inisiatif Strategis 21 (Inventarisasi dan Penilaian SDA), DJKN melakukan berbagai kegiatan untuk menyusun Laporan Potensi Fiskal SDA, yaitu laporan yang menyajikan SDA dalam satuan fisik (*physical term*) dan satuan nilai mata uang (*monetary term*), termasuk di dalamnya analisis indikator makroekonomi yang disesuaikan, analisis potensi fiskal SDA berupa potensi penerimaan dan pengeluaran SDA sebagai bahan masukan bagi penyusunan APBN yang kredibel. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa pelatihan-pelatihan dalam materi indikator ekonomi makro, statistik neraca lingkungan, analisis kebijakan fiskal, mengadakan *focus group discussion*, dan menghadiri pertemuan-pertemuan WAVES (*Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services*), baik di dalam maupun di luar negeri.

As part of the Ministry of Finance's Institutional Transformation and Bureaucratic Reform program as outlined in Strategic Initiative 14 (Asset Empowerment to Boost National Economy) and Strategic Initiative 21 (Inventory and Valuation of Natural Resources), DJKN conducts various activities to put together a Report of Fiscal Potency, a report that presents natural resources in physical term, and monetary term, including analysis of adjusted macroeconomic indicators, analysis of the fiscal potential of natural resources in the form of potential revenues and expenditures of natural resources as input for the preparation of a credible APBN. The activities consist of training on macroeconomic indicators, environmental balance statistics, fiscal policy analysis, focus group discussions; and also attending WAVES (*Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services*) meetings, both inside and outside country.

Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

Developments in Other State Assets Management



Public Hearing terkait Laporan Potensi Fiskal SDA

Public Hearing on the Report of Natural Resource Fiscal Potential

Pengelolaan BMN ABMA/T, Eks Kepabeanan dan Cukai, Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, BMKT, dan Aset Lain-Lain

Management of Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/T), Ex-Customs and Excise Assets, Assets Confiscated by the State, Gratification Items, Shipwrecks and Sunken Treasures (BMKT), and Other Assets

Dalam menjalankan tugas dan fungsi penyusunan kebijakan terkait BMN yang berasal dari ABMA/T, eks Kepabeanan dan Cukai, Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, BMKT, dan Aset Lain-Lain, DJKN melakukan rangkaian kegiatan perumusan kebijakan dan pembinaan kepada *stakeholder*, serta melakukan konsolidasi penyusunan laporan keuangan Transaksi Khusus tingkat UAP BUN TK Aset dalam Pengelolaan DJKN selaku Pengelola Barang untuk tahun anggaran 2016.

In carrying out its duties and function as formulator of policy related to BMN originating from ABMA/T, Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/T), Ex-Customs and Excise Assets, Assets Confiscated by the State, Gratification Items, Shipwrecks and Sunken Treasures (BMKT), and Other Asset, DJKN conducted a series of policy formulation and guidance activities for stakeholders, and consolidates preparation of Special Transaction financial statements at the level of the UAP BUN TK Asset in the Management of DJKN as Asset Manager.

Pengelolaan BMN eks BPPN, PPA, dan BDL

Management of BMN of Ex-IBRA, Ex-PPA, and Liquidated Banks

Guna mendukung tercapainya pengelolaan aset eks BPPN, eks kelolaan PT PPA (Persero) dan eks BDL yang optimal, DJKN selaku penyusun kebijakan terkait pengelolaan aset eks BPPN, eks Kelolaan PT PPA (Persero), dan eks BDL telah menerbitkan beberapa peraturan terkait pengelolaan aset eks BPPN, aset eks kelolaan PT PPA (Persero), dan eks BDL, diantaranya PMK Nomor 43/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan (PMK 43) dan PMK Nomor 138/PMK.06/2016 jo. PMK Nomor 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PMK 138/71).

Pada tahun 2017 telah diterbitkan PMK Nomor 110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN Oleh Menteri Keuangan (PMK 110). Peraturan dimaksud diterbitkan sebagai pedoman pengelolaan aset eks BPPN yang selama ini diatur melalui KMK Nomor 280/KMK.06/2009 (KMK 280). Pengaturan-pengaturan pengelolaan baru yang diatur dalam PMK 110 adalah sebagai berikut:

1. Penentuan ada dan besarnya Aset Kredit ATK dan Non-ATK, penambahan bunga untuk Aset Kredit Non-ATK, pembuatan Akta Pengakuan Utang (APU) untuk Aset Kredit yang dokumennya tidak lengkap, pengaturan Aset Kredit SPV dan *End User*, restrukturisasi Aset Kredit, penjualan Aset Kredit, Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Aset Kredit, dan penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).
2. Pengaturan mengenai pemeliharaan dan pengamanan Aset Properti dan pengaturan lebih rinci terkait penebusan Aset Properti.
3. Untuk memenuhi kebutuhan serta penyesuaian perkembangan dan dinamika pengelolaan aset, dibuka jenis pengelolaan baru atas Aset Properti berupa Pelepasan Aset Properti dengan kompensasi, hibah, izin menempati sementara, penambahan PMN atas Aset Properti, penyerahkelolaan Aset Properti kepada BLU LMAN, serta pemanfaatan dalam bentuk sewa, KSP, KSPI, Pinjam pakai, dan BGS/BSG.

To optimize the management of ex-IBRA assets, ex-PT PPA (Persero) asset, ex-Liquidated Banks (BDL) assets, DJKN as the policymaker regarding the management of the aforementioned assets, has issued a number of regulations to address the matter. They are, among others, Minister of Finance Regulation No. 43/PMK.06/2014 concerning Management of Ex-Liquidated Bank Assets by the Minister of Finance (PMK 43) and Minister of Finance Regulation Number 138/PMK.06/2016 in conjunction with Minister of Finance Regulation Number 71/PMK.06/2015 concerning Management of Asset formerly Managed by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PMK 138/71).

In 2017, Minister of Finance Regulation Number 110/PMK.06/2017 concerning Management of Ex-IBRA Assets by the Minister of Finance (PMK 110) was issued. The said regulation has served as a guideline for the management of assets of ex-IBRA which had been regulated through the Minister of Finance Decree Number 280/KMK.06/2009 (KMK 280). The new asset management rules set out in PMK 110 are as follows.

1. Determination of the existence and amount of credit assets of ATK (Asset Transfer Kit) and Non-ATK, additional interest for credit asset of Non-ATK, structuring Deed of Acknowledgement of Debt for Credit Assets with incomplete documents, rules in SPV Credit Assets and End User, credit asset restructuring, sales of credit asset, State Equity Participation (PMN) on Credit Assets, and Settlement of Shareholders Obligation (PKPS).
2. Rules in maintenance and security of Property Assets and more detailed rules related to the redemption of Property Assets.
3. To meet the needs and to adjust to the development and dynamics of asset management, new types of management of Property Assets are regulated in the form of Property Asset Disposal with compensation, grants, temporary occupancy permits, addition of PMN to Property Assets, hand-over of management of Property Assets to BLU LMAN; and utilization in the form of lease; Joint Use (KSP); Cooperation of Infrastructure Provision (KSPI); Lend-Use; and Build, Operate, Transfer (BOT)/ Build, Transfer, Operate (BTO).

Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

Developments in Other State Assets Management

4. Pengaturan mengenai pemeliharaan dan pengamanan Aset Inventaris, Lelang *scrap* Aset Inventaris, dan pengaturan mengenai pemusnahan Aset Inventaris.
5. Pengaturan mengenai pengelolaan Aset Saham, Aset Obligasi, Aset Reksadana, Aset Nostro, dan Aset *Transferable Member Club*.

Pada saat yang bersamaan, DJKN memulai proses penyusunan perubahan atas PMK 43, yang dilatarbelakangi adanya serah terima aset 3 (tiga) BDL eks Unit Pelaksana Program Penjaminan (UP3) dari Tim Likuidasi BDL kepada Pemerintah c.q. DJKN. Beberapa perbedaan perlakuan terkait jenis dan karakteristik aset BDL eks UP3 sebelumnya tidak diatur pada PMK 43, sehingga penyesuaian aturan perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset. Salah satu perbedaan mendasar BDL eks UP3 yaitu masih terdapatnya hak nasabah penyimpanan dana selain Pemerintah (hak DPK lainnya) atas hasil pengelolaan aset eks BDL. Dalam lingkup pengelolaan aset eks kelolaan PT PPA (Persero), terdapat kebutuhan pengelola aset terkait pembayaran Aset Kredit dengan properti milik debitur (*Asset Settlement*) yang sebelumnya tidak diatur pada PMK 138/71, yang menjadi pemicu proses penyusunan aturan mengenai perubahan kedua PMK 71/PMK.06 2015.

Aturan-aturan tersebut di atas disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelola aset sekaligus untuk mengikuti dinamika pengelolaan aset. Dengan adanya kebijakan-kebijakan dimaksud, diharapkan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung paradigma DJKN sebagai *Revenue Center* dengan meningkatkan kontribusi DJKN terhadap penerimaan negara.

4. Rules in maintenance and protection of Inventory Assets, Inventory Asset scrap Auctions, and rules regarding disposal of Inventory Assets.
5. Rules regarding the management of shares, bonds, Mutual Fund, Nostro Assets, and Transferable Member Club.

At the same time, DJKN has begun preparing amendments to PMK 43, which was prompted by the handover of assets of three liquidated banks under ex-Government Guarantee Implementation Unit (UP3), from the BDL Liquidation Team to the Government, in this case, DJKN. Some variances in treatment related to the type and characteristics of the assets of BDL of ex-UP3 were not previously regulated in PMK 43. Hence, in order to optimize asset management, adjustments were made to the rules. One of the fundamental differences in assets of BDL of ex-UP3 was that there were still rights of depositors other than the Government (that of the third-party fund) to the results of ex-BDL asset management. As for the management of assets previously managed by PT PPA (Persero), there was a need for asset managers to accommodate credit asset settlement with debtor property (asset settlement), which was not previously regulated in PMK 138 and PMK 71. This has triggered the preparation of the second amendment to PMK 71/PMK.06 2015.

All of the above rules are prepared to meet the needs of asset managers as well as to follow the dynamics of asset management. With those policies in place, it is hoped that asset management can be performed in a way that is more effective, efficient, and accountable. And in the end, it is hoped that all of the above policies will reinforce the DJKN paradigm as a Revenue Center by increasing DJKN's contribution to state revenues.



Pengelolaan Kekayaan Negara

Management of State Assets

Sampai dengan tahun 2017, target utilisasi selalu berhasil diraih. Selain itu perkembangan nilainya juga semakin mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Until 2017, the target of utilization has consistently been achieved. In addition, the utilization value has also always hiked remarkably.



Utilisasi Kekayaan Negara

State Assets Utilization

Utilisasi kekayaan negara merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan siklus pengelolaan aset negara yang tertib dan optimal. Nilai kekayaan negara yang diutilisasi diperoleh dari nilai kekayaan negara yang ditetapkan utilitasnya melalui:

- Pemanfaatan kekayaan negara yang diperoleh dari nilai BMN yang disewakan, nilai BMN atas Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), nilai BMN yang di-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna-kan (BGS/BSG), dan nilai BMN yang dipinjam-pakaikan;
- Penetapan status penggunaan yang diperoleh dari nilai BMN yang ditetapkan status penggunaannya, nilai BMN yang ditetapkan statusnya karena hibah masuk;
- Tukar menukar dari nilai aset baru hasil tukar menukar.

Sampai dengan tahun 2017, target utilisasi selalu berhasil diraih. Selain itu perkembangan nilainya juga semakin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Perbandingan nilai target dan realisasi utilisasi kekayaan negara dapat kita lihat dalam grafik di bawah ini:

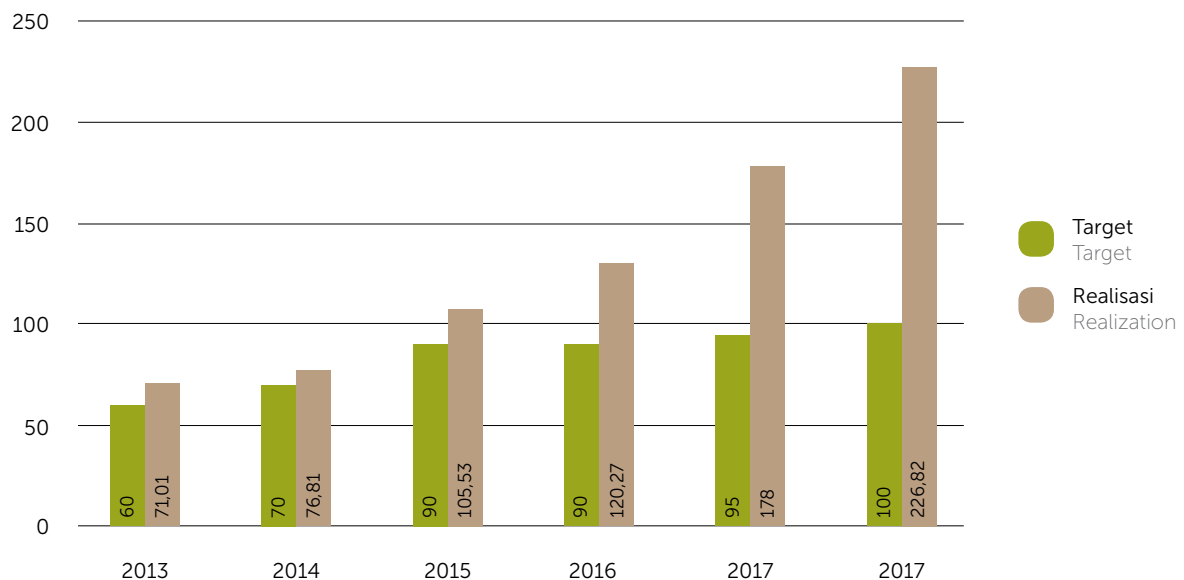
Utilization of state assets is one of the efforts to realize an orderly and optimal state asset management cycle. The value of the nation's assets that is utilized is obtained from the value of the country's assets which is determined by its utilization through:

- Utilization of state assets obtained from the value of leased BMN, the value of BMN on Utilization Cooperation (KSP), the value of BMN under Build, Operate, Transfer/Build, Transfer, Operate (BGS/BSG) arrangements, and the value of BMN in Lend-Use agreements;
- Determination of the status of use obtained from the value of BMN the status of use of which has been determined, and the value of BMN the status of use of which has been determined due to grant receipts;
- The value of new assets from the results of the exchange of assets.

Until 2017, the target of utilization has always been achieved, with a significant increase in value. We can see the comparison between the targeted value and realization value of state assets utilization in the graph below:

Perbandingan Total Target dan Realisasi Utilisasi Tahun 2012-2017 (trillion)

Comparison of Target and Realization of Utilization for 2012-2017 (trillion)



Pengelolaan Kekayaan Negara

Management of State Assets

Pencapaian target pada tahun 2017 didukung dengan adanya utilisasi aset dengan nilai yang signifikan antara lain:

Achievement of the target in 2017 was supported by asset utilization with notable value, among others:

No	K/L Ministries/Agencies	Nomor Number	Nilai (Rp) Value
1	TNI AD Indonesian Army	KMK-653/KM.6/2017	129.000.000.000.000
2	Kementerian PUPR Ministry of Public Works and Public Housing	KMK-690/KM.6/2017	5.108.438.235.916
3	Kementerian Ristek & Dikti Ministry of Research, Technology and Higher Education	KMK-623/KM.6/2017	4.842.786.518.643
4	TNI AL Indonesian Navy	KMK-636/KM.6/2017	4.412.984.645.780

Adapun utilisasi dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh dalam bentuk pemanfaatan BMN berupa Kerjasama Pemanfaatan pada Kementerian Pertahanan dengan rincian sebagai berikut:

The utilization with the potential of Non-Tax State Revenues (PNBP) was obtained from BMN utilization in the form of Joint Use at the Ministry of Defense with the following details:

No	K/L Ministries/Agencies	Nomor Number	Nilai BMN (Rp) Value	Kontribusi Tetap Fixed Contribution	Pembagian Keuntungan Revenue Sharing
1	Kementerian Pertahanan Ministry of Defense	S-40/MK.6/2017 tgl 21 Feb 2017	698.582.415.000	0,75% dari nilai wajar BMN dengan kenaikan 5,46% per tahun 0,75% dari nilai wajar BMN dengan kenaikan 5,46% per tahun	Sebesar 35,90% dari net cash flow Sebesar 35,90% dari net cash flow

Pengelolaan Aset eks BPPN, PPA, dan BDL

Management of Asset of Ex-IBRA, PPA, and BDL (Liquidated Banks)

DJKN dalam mengelola aset eks BPPN, PPA, dan BDL telah banyak mengalami perubahan sejak DJKN menerapkan sebagai revenue center. Saat ini potensi aset properti tidak harus dilakukan penjualan melalui lelang, akan tetapi dilakukan analisis *high best use* untuk mendapatkan penerimaan negara yang lebih optimal.

In managing assets of ex-IBRA, assets formerly managed by PPA, and assets of ex-BDL, DJKN has gone through many changes, conforming to DJKN's assignment as a revenue center. At present, the potential of property assets is not immediately valued from the assets's auction price, but rather on how to obtain a more optimal state revenue from the assets based on the result of analysis of highest and best use.

Penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran APBN merupakan salah satu upaya pengelolaan aset yang langsung menghasilkan kas kepada negara. Penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran APBN adalah jumlah uang yang dapat disetorkan kembali ke kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dalam negeri dari hasil pengelolaan aset yang berasal dari aset eks PT PPA, aset BDL eks dana talangan, aset eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), aset eks BPPN, hasil pengelolaan aset yang dilakukan oleh PT. PPA, termasuk penerimaan dividen yang berasal dari pengelolaan aset eks BPPN dan BDL.

Hasil *recovery* yang berasal dari pengeluaran APBN dalam rentang tahun 2012 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

The recovery of the State Budget expenditure is one of the asset management efforts that directly generates cash for the state. The recovery of State Budget expenditure is the amount of money that can be deposited back into the state treasury as revenue from domestic financing, that is from the management of assets of ex-PT PPA, bailout assets of ex-BDL, assets of ex-Government Guarantee Implementation Unit (UP3), assets of ex- IBRA, asset formerly under the management of PT. PPA, including the receipt of dividends derived from the management of assets of ex-IBRA and BDL.

Below is the table displaying the results of recovery derived from the State Budget expenditures in 2012-2017.

Tabel Perbandingan jumlah *recovery* yang berasal dari pengeluaran APBN tahun 2012 s.d 2017

Amount of recovery deriving from State Budget expenditure 2012 - 2017

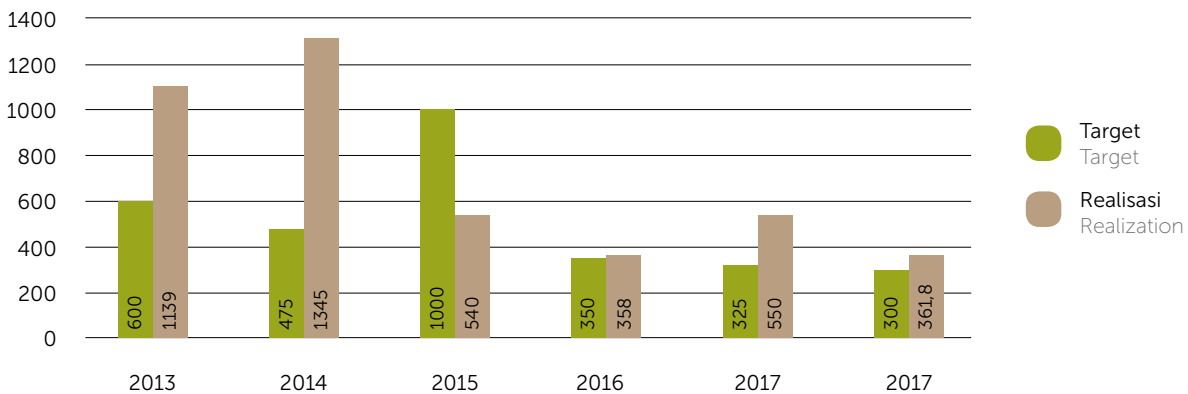
Tahun Year	Jumlah <i>recovery</i> yg berasal dari pengeluaran APBN Amount of Recovery	
	Target Target	Realisasi Realization
2012	Rp 600 M	Rp1.139,18 M
2013	Rp 475 M	Rp1.345 M
2014	Rp 1.000 M	Rp540 M
2015	Rp 350 M	Rp 357,9 M
2016	Rp 325 M	Rp 550,23 M
2017	Rp 300 M	Rp 361,8 M

Pengelolaan Kekayaan Negara

Management of State Assets

Perbandingan Total Jumlah *Recovery* yang Berasal dari Pengeluaran APBN Tahun 2012-2017 (miliar)

Comparison of Total Amount of Recovery of State Budget Expenditures 2012-2017 (billion)



Berdasarkan tabel diatas, dibandingkan dengan target pada Renstra 2015-2019 yaitu sebesar Rp300 miliar, realisasi indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 361,8 M atau dengan kata lain kinerjanya mencapai 120%.

Selain itu dari tabel di atas serta rencana strategis tahun 2015-2019 dimana target HPA Tahun 2017 sebesar Rp 325 M, tahun 2018 Rp 183M, dan tahun 2019 sebesar Rp 150M, maka dapat dilihat bahwa target *recovery* pengelolaan aset yang berasal dari pengeluaran APBN semakin mengalami penurunan. Hal tersebut karena:

- Adanya perubahan kebijakan pengelolaan aset dengan cara:
 - Pemanfaatan
 - Penetapan status penggunaan aset eks BPPN kepada K/L.
 - Serahkelola kepada PT PPA maupun BLU Lembaga Manajemen Aset Negara
- Dari aset potensial yang direncanakan akan dilakukan penjualan, masih terdapat kendala dokumen yang tidak lengkap dan/atau sudah habis masa berlaku hak atas tanahnya. Terhadap permasalahan ini, DJKN telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam rangka sertifikasi aset dimaksud dan permohonan kepastian hukum pengelolaan aset yang dokumennya tidak lengkap dan/atau sudah habis masa berlaku hak atas tanahnya.

Based on the chart above, compared to the 2015-2019 Strategic Plan target, which is Rp. 300 billion, the realization of this indicator, which was exceeded the target set by 20 %, which was Rp. 361.8 billion or 20 % above the target.

In addition, based on the chart above and from the 2015-2019 strategic plan, which sets the Proceed from Asset Management (HPA) target of Rp 325 billion; in 2018, Rp. 183 billion; and in 2019, Rp 150 billion; we can see that the target of proceed arising from recovery of State Budget expenditure is decreasing. This is because:

- There are changes in asset management policies by way of
 - Utilization
 - Determination of the status of use of assets of ex-IBRA to Ministries/Agencies.
 - Transfer of Management to PT PPA and State Asset Management Agency (LMAN)
- Of the potential assets that are planned to be sold, there are still assets with incomplete documents and/or assets having expired rights to land. To address this problem, DJKN has coordinated with the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in order to certify the assets and to request legal certainty to the management of assets with incomplete documents and/or with expired rights to land.

Tabel High Profile Pengelolaan Aset
High Profile of Asset Management

No	Jenis Pengelolaan Type of Asset Management	Unit Dok. Doc Unit	Nilai Value	Keterangan Description
1	Penjualan lelang Auctions	6	107.305.803.000	HPA (Proceed from Asset Management)
2	Penebusan Redemption	1	42.194.765.000	
3	Penetapan Status Penggunaan pada K/L Determination of Status of Use in Agencies/Ministries.	8	42.974.698.000	Cost Saving APBN Cost-Saving of State Budget
4	Penggunaan Sementara Temporary Use	20	62.185.902.346	
5	Pinjam Pakai Lend-Use	1	38.712.800.000	
6	Hibah Grants	1	2.505.400.000	
7	Pemanfaatan (Sewa) Utilization (Lease)	8	3.595.363.000	PNBP Non-tax State Revenue
8	Serah kelola kepada BLU LMAN Management hand-over to LMAN	110	149.554.270.000	

Tabel diatas merupakan besaran cost saving yang bisa ditekan oleh DJKN selaku pengelola aset dalam memenuhi kebutuhan aset yang mendukung tugas dan fungsi satker berkaitan.

The table above is the amount of cost savings that can be imposed on relevant working units by DJKN as the asset manager in meeting their asset needs.

Cost Saving APBN

State Budget-Cost Saving

Selama tahun 2017 telah dilakukan pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang ditetapkan status penggunaannya sebagai BMN sebagaimana berikut:

In 2017, management of the property assets of ex-IBRA and assets formerly managed by PT PPA (Persero) the status of which have been determined as BMN, has been performed as follows.

Pengelolaan Kekayaan Negara

Management of State Assets

Tabel Daftar Aset Properti eks BPPN/PT PPA yang Menjadi BMN

List of Assets of ex-IBRA/PT PPA Determined as State-Owned Assets

No	K/L K/L	Nomor Keputusan Nomor Keputusan	Nilai Nilai
1	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	KMK-22/KM.6/2017	3.331.660.000
2	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	KMK-273/KM.6/2017	907.000.000
3	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	KMK-496/KM.6/2017	16.557.900.000
4	BNN National Narcotics Agency	KMK-773/KM.6/2017	19,517,920,000
5	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	KMK-775/KM.6/2017	499,318,000
6	KPPU Business Competition Supervisory Commission	KMK-798/KM.6/2017	2,160,900,000
7	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	KMK-815/KM.6/2017	428,700,000
TOTAL			Rp 43.403.398.000

Penyelesaian Aset bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)

Settlement of Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets

Lingkup ABMA/T merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang, perkumpulan kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, dan perkumpulan eks PKI. Penyelesaian dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam status kepemilikan ABMA/T dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian ABMA/T sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011 dan Peraturan Dirjen KN Nomor Per-4/KN/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian ABMA/T, serta peraturan terbaru PMK Nomor 31/PMK.06/2015.

ABMA/T includes land and/or buildings belonging to the Chinese associations which were declared as prohibited, foreign trust associations that were not in accordance with Indonesia's personality, and association of ex-PKI (Indonesian Communist Party). The settlement was put in place to establish legal certainty regarding the ownership status of ABMA/T. And this was done by referring to Minister of Finance Regulation Number 188/PMK.06/2008 concerning Settlement of ABMA/T as amended by PMK 154/PMK.06/2011 and Regulation of Director-General of State Asset Management Number Per-4/KN/2012 concerning Technical Guidelines for ABMA/T Settlement, and by referring to the latest Minister of Finance Regulation, that is PMK Number 31/PMK.06/2015.

Atas peran tim penyelesaian ABMA/T tingkat pusat dan tim asistensi daerah, dari total ABMA/T sebanyak 1.010 dalam lampiran PMK 31/PMK.06/2015 dan 5 aset temuan baru, sampai dengan tahun 2017, 486 aset telah dimantapkan status hukumnya. Rincian pengelolaan ABMA/T dari tahun 2011 dapat digambarkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Thanks to the role of the central team of ABMA/T completion and the regional assistance team, out of a total of 1,010 ABMA/T listed in the PMK 31/PMK.06/2015 attachment and 5 newly founded assets, up until 2017, as many as 486 assets have received their legal status confirmation. Details of how ABMA/T has been managed since 2011 can be described in the following table.

Tabel Penyelesaian ABMA/T Selama Tahun 2011-2017

Settlement of ABMA/T, 2011-2017

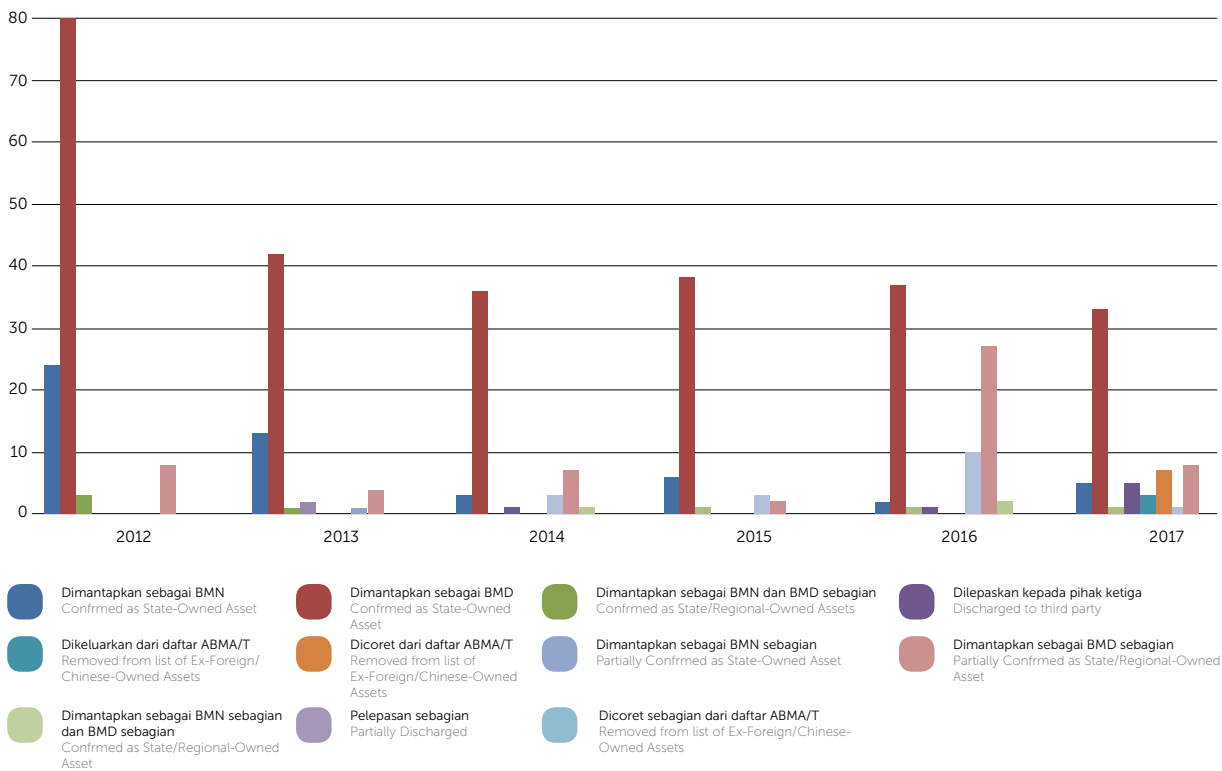
Penyelesaian ABMA/T Settlement of ABMA/T	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Dimantapkan sebagai BMN Confirmed as State-Owned Asset	8	24	13	3	6	2	5	
Dimantapkan sebagai BMD Confirmed as Regional-Owned Asset	28	80	42	36	38	37	33	
Dimantapkan sebagai BMN dan BMD sebagian Confirmed as State/Regional-Owned Assets	0	3	1	0	1	1	1	
Dilepaskan kepada pihak ketiga Discharged to third party	1	0	2	1	0	1	5	
Dikeluarkan dari daftar ABMA/T Removed from list of Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets	0	0	0	0	0	0	3	
Dicoret dari daftar ABMA/T Removed from list of Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets	0	0	0	0	0	0	7	
Pemantapan Selesai Status Hukum ABMA/T Confirmation that Legal Status of Ex-Foreign/ Chinese-Owned Assets has been resolved.	37	107	58	40	45	41	54	407
Dimantapkan sebagai BMN sebagian Confirmed as State/Regional-Owned Asset	0	0	1	3	3	10	1	
Dimantapkan sebagai BMD sebagian Partially Confirmed as State/Regional-Owned Asset	0	8	4	7	2	27	8	
Dimantapkan sebagai BMN sebagian dan BMD sebagian Partially Confirmed as State/Regional-Owned Asset	0	0	0	1	0	2	0	
Pelepasan sebagian Partially Discharged	0	0	0	0	0	0	1	
Dicoret sebagian dari daftar ABMA/T Removed from list of Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets	0	0	0	0	0	0	1	
Pemantapan Sebagian Status Hukum ABMA/T Confirmed as State-Owned Asset	0	8	5	11	5	39	11	79
Jumlah Penetapan Status Kepemilikan ABMA/T Total of Determination of ABMA/T Ownership Status	37	115	63	51	50	80	65	486

Pengelolaan Kekayaan Negara

Management of State Assets

Grafik Penyelesaian ABMA/T Selama Tahun 2012-2017

Graphic of Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets Settlement in the Year of 2012 - 2017



Pengelolaan Barang Gratifikasi

Management of Gratification Items

Barang gratifikasi merupakan barang yang telah ditetapkan status gratifikasinya menjadi milik negara oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Barang gratifikasi yang telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN akan dikelola sesuai dengan PMK 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa DJKN berwenang untuk melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang telah diserahkan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan batas kewenangannya berupa penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.

Gratification items are goods the gratification status of which have been determined to become a state asset the Corruption Eradication Commission (KPK). Gratification items that have been submitted to the Ministry of Finance, in this case, DJKN shall be managed in accordance with PMK 03/PMK.06/2011 concerning Management of State Asset Deriving from Goods Confiscated by the State and Gratification Items. The regulation stipulated that the DJKN holds the authority to manage the gratification items that have been submitted to the Minister of Finance within the scope of its authority, namely determining the status of use, utilization, transfer, and disposal.

Sejak tahun 2009 sampai dengan 2017, DJKN telah menerima penyerahan 4.650 unit/set/buah dan selanjutnya mengelola barang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku seperti penetapan status penggunaan pada Kementerian/Lembaga, hibah, dan penjualan melalui lelang.

Selama tahun 2017, DJKN menerima penyerahan barang gratifikasi sebanyak 6 (enam) kali, dengan jumlah barang 579 unit/buah/set/lembar dengan nilai Rp 10.257.455.118,00. Lelang barang gratifikasi dilaksanakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, dengan jumlah barang yang terjual lelang sebanyak atas 1.220 unit/buah/set/lembar dengan nilai pokok lelang Rp 612.598.152,00.

Pada tanggal 17 Februari 2017, DJKN menyerahkan hibah 5 unit mobil Mitsubishi Strada kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya senilai Rp 492.449.000,00 sebagaimana BAST Nomor 01/KM.6/KN.6/2017 tanggal 17 Februari 2017 berdasarkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352/KM.6/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Gratifikasi Kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

From 2009 to 2017, DJKN has received the submission of 4,650 units/set/pieces and subsequently managed the items in accordance with applicable regulations such as determining the status of use in Ministries/Agencies, grants, and auction sales.

In 2017, DJKN received six times the delivery of gratification items, with a total of 579 units/pieces/set/sheets with a value of Rp. 10,257,455,118.00. Meanwhile, the auction sales of the items were conducted twenty-three times, with the total number of items sold reaching as many as 1,220 units/piece/set/sheets, with the total auction price of Rp 612,598,152.

On February 17, 2017, DJKN handed over a grant of five Mitsubishi Strada cars valued at Rp. 492,449,000.00 to the Regency Government of Dharmasraya, as recorded in the official report of grants handover (BAST) Number 01/KM.6/KN.6/2017 dated February 17, 2017. The handover was in compliance with the Minister of Finance Decree Number 352 /KM.6/2016 dated 21 October 2016 concerning Grants of State-Owned Asset Originating from Gratification Items to the Regency Government of Dharmasraya.

Data Barang Gratifikasi

Data on Gratification Items

No	Tahun Year	Penyerahan Submission	Lelang Auction	PSP Determinastion of Status of Use	Hibah Grants	Musnah Disposal	Outstanding Outstanding
1	2009	39	38	0	0	1	0
2	2010	787	0	0	787	0	0
3	2011	60	55	5	0	0	0
4	2012	118	101	0	0	11	6
5	2013	154	133	7	0	8	6
6	2014	1076	434	7	0	0	635
7	2015	454	88	0	0	0	366
8	2016	1383	161	0	5	0	1222
9	2017	579	1.220	-	-	-	-
Total		4.650	2.230	19	792	20	1.591

Pengelolaan Kekayaan Negara

Management of State Assets

Penetapan Status Penggunaan BMN eks Kepabeanan dan Cukai

Determination of BMN Usage Status of Ex-Customs and Excise

Pada tahun 2017, terdapat 87 (delapan puluh tujuh) persetujuan pemusnahan dan penjualan lelang BMN eks Kepabeanan dan Cukai. Mengacu pada nilai limit persejutuan penjualan, potensi penerimaan negara melalui penjualan lelang seluruhnya sebesar Rp 18.324.380.500,00.

In 2017, as many as 87 (eighty-seven) approvals for the disposal and auction of BMN handed over by Customs and Excise. Referring to the limit price in the auction sale approval, the potential state revenue through auction sales was in the amount of Rp. 18,324,380,500.00.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain

Management of State-Owned Assets Deriving from Other Assets

Pengelolaan BMN yang Berasal dari Aset Lain-lain dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013, antara lain terhadap barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau negara asing.

Management of BMN Deriving from Other Assets is performed based on the Minister of Finance Regulation Number 123/PMK.06/2013, which includes among others, objects obtained from the implementation of cooperation agreements between the Government of the Republic of Indonesia and international agencies and/or foreign countries.

Pada awal tahun 2017, DJKN mengelola BMN yang Berasal dari Aset Lain-lain berupa 1 (satu) bidang tanah, 1 (satu) unit bangunan, 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda empat, dan 32 (tiga puluh dua) barang inventaris, dengan total nilai perolehan Rp1.050.358.000,00 (satu miliar lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Kemudian pada tahun 2017 BMN tersebut dikelola dengan rincian sebagai berikut:

In early 2017, DJKN has managed BMN deriving from other assets in the form of 1 (one) parcel of land, 1 (one) building unit, 5 (five) units of four-wheeled motorized vehicles, and 32 (thirty-two) inventory items, with a total acquisition value of Rp1,050,358,000.00 (one billion fifty million three hundred fifty-eight thousand rupiah). And in the same year, the BMN was managed in the following details.

Ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan Cq. DJKN atas 1 (satu) bidang tanah, 1 (satu) unit bangunan, dan 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat.

Determination of the status of use at the Ministry of Finance, in this case, DJKN was implemented for 1 (one) parcel of land, 1 (one) building unit, and 2 (two) four-wheeled motorized vehicles.

Dijual melalui lelang atas 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda empat dan 32 (tiga puluh dua) barang inventaris, dengan total nilai realisasi Rp78.986.565,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Auctions of 3 (three) four-wheeled motorized vehicles and 32 (thirty-two) inventory items, with a total realized value of Rp78,986,565.00 (seventy-eight million nine hundred eighty-six thousand five hundred sixty-five rupiahs).

Selanjutnya selama tahun 2017, DJKN juga menerima BMN yang Berasal dari Aset Lain-lain berupa 9 (sembilan) unit kendaraan bermotor roda empat

Furthermore, in 2017, DJKN also received BMN Originated from Other Assets in the form of 9 (nine) four-wheeled motorized vehicles and 18 (eighteen)

dan 18 (delapan belas) barang inventaris dengan total nilai perolehan Rp1.440.749.293,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Kemudian terhadap BMN tersebut, 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda empat telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan Cq. DJKN, dan lainnya masih dalam proses pengelolaan. Direncanakan terhadap 6 (enam) unit kendaraan bermotor roda empat akan ditetapkan status penggunaannya dan terhadap 18 (delapan belas) unit barang inventaris akan dijual lelang dan/atau ditetapkan status penggunaannya. Sehingga pada akhir tahun 2017 total nilai perolehan BMN yang Berasal dari Aset Lain-lain di DJKN sejumlah Rp1.031.349.293,00 (satu miliar tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Selaku Pengelola Barang, DJKN telah memproses persetujuan hibah BMN yang Berasal dari Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga selaku *counterpart*, untuk selanjutnya dihibahkan kepada beberapa Pemerintah Daerah. Selain hal tersebut, DJKN bersama Kementerian/Lembaga selaku counterpart juga melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut pelaksanaan hibah tersebut.

inventory items with a total acquisition value of Rp1,440,749,293.00 (one billion four hundred forty million seven hundred forty-nine thousand two hundred ninety-three rupiah). As for the BMN received, 3 (three) units of four-wheeled motorized vehicles have been determined to be used at the Ministry of Finance, in this case, DJKN, while the remaining objects were still in the management process. It was planned that the status of use of 6 (six) four-wheeled motorized vehicles will be determined; and that the auction would be conducted onto 18 (eighteen) units of inventory. That way, by the end of 2017 the total acquisition value of BMN derived from other assets in DJKN amounted to Rp1,031,349,293.00 (one billion thirty-one million three hundred forty-nine thousand two hundred ninety-three rupiahs).

As the Aset Manager, DJKN has processed grant approvals of BMN derived from Other Assets submitted to the Ministries/Agencies as the counterpart, to be subsequently granted to a number of Regional Governments. In addition to this, DJKN together with the counterpart Ministries/Agencies also performed monitoring of the follow-up on the implementation of the grant.

Penetapan Status Penggunaan dan Hibah BMN eks Barang Rampasan Negara

Determination of Status of Use and Grants of Seized State Asset

Pada tahun 2017, terdapat PSP BMN eks Barang Rampasan Negara pada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada 4 (empat) Kementerian Lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Arsip Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dengan Nilai BMN seluruhnya sebesar Rp 51.897.122.000,00. Di samping itu, terdapat pula hibah tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota senilai Rp 49.126.962.000,00.

Adapun terhadap BMN eks Barang Rampasan pada Kejaksaan, terdapat persetujuan PSP BMN kepada Kejaksaan RI dengan nilai BMN seluruhnya sebesar Rp 102.262.638.000,00.

In 2017, DJKN determined the status of use of BMN worth Rp. 51,897,122,000.00 which derived from assets confiscated by the Corruption Eradication Commission for four Ministries, namely the Ministry of Finance, BPS-Statistics Indonesia, the Indonesian National Archives, and the Indonesian National Police. In addition, there were also land and building grants to the City Governments worth Rp.49,126,962,000.00.

As for BMN in the form of goods confiscated by the Attorney General, DJKN has issued approval of the determination of the status of use of BMN worth Rp 102,262,638,000.00 to the Attorney General.

Perkembangan Sistem Informasi

Information System Development

Pada tahun 2017, Direktorat PKNSI telah melakukan pengembangan alat bantu monitoring revaluasi (MonReval) yang dapat memonitoring perkembangan pelaksanaan tahapan revaluasi di seluruh Indonesia.

In 2017, Directorate of State Asset Management and Informatin System has developed a monitoring revaluation tool (MonReval) which enable to monitor the progress of the implementation of revaluation stages throughout Indonesia



Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN)

Asset Management Information System (SIMAN)

Dalam rangka modernisasi pelayanan kepada seluruh satker di lingkungan Kementerian dan Lembaga, DJKN telah mengembangkan SIMAN. SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dimulai dari proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN. Fitur-fitur yang ada dalam SIMAN meliputi perencanaan kebutuhan BMN, pengelolaan BMN, penatausahaan BMN, pemeliharaan *master asset* dan data riwayat serta *asset analysis*, *asset tracking*, dan *building management*.

Sistem ini menghubungkan proses pengelolaan BMN yang semula menggunakan metode konvensional yaitu dengan cara manual, diubah dengan menggunakan komunikasi data melalui internet dengan mengubah berkas menjadi data elektronik mulai dari pengusulan pengelolaan BMN hingga keputusan pemberian ijin/penolakan usulan. SIMAN dapat diakses oleh K/L sebagai pengguna barang yang mengajukan usulan-usulan pengelolaan atas BMN yang mereka gunakan. Kementerian Keuangan c.q. DJKN yang berposisi sebagai pengelola barang yang memberikan keputusan pemberian ijin/penolakan usulan yang disampaikan oleh pengguna barang. SIMAN merupakan aplikasi dekstop dengan menggunakan jalur komunikasi internet dengan model messaging, yaitu data yang diakses dan dikirim dalam jalur komunikasi hanya dalam bentuk teks, sehingga komunikasi data dapat dilakukan dengan cepat.

Implementasi SIMAN telah dilaksanakan pada fitur perencanaan kebutuhan BMN, pemutakhiran data, master aset dan pengawasan dan pengendalian. Dari keempat fitur tersebut dua fitur yang digunakan untuk mengukur kinerja DJKN, yaitu implementasi SIMAN fitur perencanaan dan implementasi SIMAN fitur pemutakhiran data.

To modernize its services to all working units within the Ministry and Agencies, DJKN developed SIMAN. SIMAN is an application employed to assist the management of State-Owned Assets (BMN) starting from the planning process, status determination, administration, utilization, transfer, and the write-off of BMN. Features provided by SIMAN include planning of BMN need, BMN management, BMN administration, master asset maintenance, and historical data as well as asset analysis, asset tracking, and building management.

This system connects the BMN management process that originally used conventional methods, namely manual method, which then changed into data communication via the internet by firstly converting manual files into electronic data, starting from the phase of proposing BMN management to the phase of granting permission/rejection of the proposals. SIMAN can be accessed by Ministries/Agencies as asset users that have submitted their asset management proposals for the BMN they are using. The Ministry of Finance, in this case, the DJKN serves as the asset manager that comes up with the decision to grant or to refuse the submitted proposals. SIMAN is a desktop application using internet communication lines with messaging models, meaning its communication path only lets a user access and send texts, resulting in a fast data communication.

SIMAN's features have been implemented for the planning of BMN need, data updating, master assets, and supervising and controlling. Of the four SIMAN's features, two features are used to measure DJKN performance, namely the planning feature and the data update feature.

Perkembangan Sistem Informasi

Information System Development

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN) Fitur Perencanaan yang digunakan oleh pengguna (Kementerian dan Lembaga) dan pengelola (Direktorat BMN) merupakan alat bantu untuk menunjang percepatan dan otomatisasi penentuan perencanaan kebutuhan BMN di tiap Kementerian dan Lembaga. Fitur ini membantu mengkalkulasi kebutuhan RKBMN setelah mendapatkan input kebutuhan aset KL. BMN yang dapat dikalkulasi diantaranya kebutuhan atas tanah, bangunan gedung kantor, rumah dinas dan alat angkutan.

SIMAN's planning feature implemented by users (Ministries and Agencies) and manager (Directorate of State-Owned Asset) is a tool to support the acceleration and automation of planning of BMN need in each Ministry and Agency. This feature helps to calculate the need in the planning of BMN need once Ministries/Agencies in question input their asset needs. The need for land, office buildings, official residences, and transportation equipment are all calculable under SIMAN.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN) Fitur Pemutakhiran Data merupakan fitur yang digunakan oleh pengguna dan pengelola di seluruh level (kecuali pengelola tingkat pusat) dalam rangka melaksanakan proses sinkronisasi data dan rekonsiliasi BMN, mulai dari tingkat satker hingga tingkat korwil.

SIMAN's data updating feature is used by asset users and asset managers at all levels (except asset manager in the central level) in order to process data synchronization and BMN reconciliation, from within level of working units to that of regional coordinator.

Pendaftaran Hak Cipta Aplikasi/Program Komputer DJKN

Filing Copyright for DJKN's Computer Application

Pada tahun 2017, Direktorat PKNSI telah melakukan pendaftaran Hak Cipta atas Aplikasi – Aplikasi yang telah dikembangkan di DJKN ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu:

- Aplikasi Lelang Internet (E-Auction)
- Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)
- Aplikasi Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMART)
- Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara (FocusPN)
- Aplikasi Modul Kekayaan Negara Lain – Lain (Modul KNL)
- Aplikasi Modul Kekayaan Negara Dipisahkan (Modul KND)

Didaftarkannya aplikasi tersebut bertujuan untuk mengukuhkan bahwa aplikasi tersebut adalah produk asli Kementerian Keuangan cq. DJKN dengan demikian tidak ada pihak lain yang akan meniru atau mengimplementasikan produk sejenis.

In 2017, the Directorate of State Asset Management and Information Systems has filed a copyright for applications developed in DJKN to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. They are:

- E-Auction
- SIMAN (State Asset Management Information System)
- SMART (Routine Activity Monitoring System)
- FocusPN (State Claims Management Information System)
- KNL Module (Other State Assets Module)
- KND Module (Restricted State Assets Module)

The copyright registration was submitted to obtain confirmations that the applications are genuine products of the Ministry of Finance, in this case, DJKN, thus no other party will copy or implement similar applications.

Pengembangan Alat Bantu Monitoring Revaluasi (MonReval)

Development of Revaluation Monitoring Tools (MonReval)/

Pada tahun 2017, Direktorat PKNSI telah melakukan pengembangan alat bantu monitoring revaluasi (MonReval) yang dapat memonitoring perkembangan pelaksanaan tahapan revaluasi di seluruh Indonesia baik dari sisi DJKN selaku Pengelola Barang maupun dari sisi Satuan Kerja/ Kementerian Lembaga selaku Pengguna Barang.

Dengan adanya sistem monitoring ini memudahkan pimpinan untuk memberikan arahan dan tindak lanjut atas capaian atas proses pelaksanaan Revaluasi Barang Milik Negara.

In 2017, Directorate of State Asset Management and Information Systems has developed a monitoring revaluation tool (MonReval) which enable the directorate to monitor the progress of the implementation of revaluation stages throughout Indonesia both in terms of DJKN as Asset Manager and as a working unit (Ministry/Agency) as an asset user.

The monitoring system facilitates leaders in providing direction and follow-ups on the achievements of the implementation of revaluation of State-Owned Assets.

Pekembangan Penilaian

Developments in Valuation

....Direktorat Penilaian dengan Sekretariat DJKN telah merintis pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) sebagai bentuk pengembangan alternatif jalur karir PNS yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Penilai Pemerintah

....the Directorate of Valuation and the Secretariat of Directorate-General have pioneered the establishment of Functional Position of Government Valuer (JFPP) as a form of alternative development of civil servant career path that aims to enhance the professionalism of Government Valuers

Penyusunan Rancangan Undang Undang di Bidang Penilaian

Drafting of Bill on Valuation

Selama tahun 2017, DJKN c.q. Direktorat Penilaian sebagai inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai, membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan RUU tentang Penilai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-344/KM.06/2017. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan seluruh inisiator RUU di lingkungan Kementerian Keuangan, RUU tentang Penilai diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada BPHN masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018 dengan nomor urut 6 (enam).

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, meliputi:

- Rapat-rapat rutin di tingkat antar Kementerian (Panitia Antar Kementerian) dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan internal Kementerian Keuangan antara lain Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan Biro Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan DJKN.

During 2017, DJKN, in this case, the Directorate of Valuation as the initiator of the Bill on Valuers, established an Inter-Ministerial Committee on Drafting of Bill on Valuers. This interministerial committee has been determined based on Minister of Finance Decree Number KMK-344/KM.06/2017. In the wake of the coordination meeting involving all initiators of the Bill within the Ministry of Finance, the Minister of Finance then proposed to the BPHN (National Law Development Agency) to include the Bill into the 2018's Prolegnas (National Legislation Program) list of priorities.

The Bill currently sits at number six in the program list. A number of activities carried out in 2017, include:

- Regular meetings at the inter-ministerial level (Inter-ministerial Committee) involving the Ministry of Justice and Human Rights, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, as well as internal meetings within the Ministry of Finance which included, among others, the Secretariat General, in this case, Financial Professional Development Center and Legal Bureau, Directorate-General of Taxes, and DJKN.



- b. Rapat penyempurnaan Naskah Akademik RUU tentang Penilai dengan Narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Rapat penyempurnaan batang tubuh RUU tentang Penilai dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan internal Kementerian Keuangan antara lain Sekretariat Jenderal cq. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan Biro Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan DJKN.
- d. Melaporkan *progress* penyusunan RUU tentang Penilai kepada Menteri Keuangan agar Menteri Keuangan mendorong RUU tentang Penilai masuk Prolegnas Prioritas tahun 2018.
- b. Meeting to refine the Academic Text of the Bill on Valuers, inviting representatives from National Law Development Agency, and Ministry of Law and Human Rights as resource-persons.
- c. Meeting to improve the body of the Bill on Valuers by involving the Ministry of Justice and Human Rights, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, as well as internal meetings within the Ministry of Finance which included, among others, the Secretariat General, in this case, Financial Professional Development Center and Legal Bureau, Directorate-General of Taxes, and DJKN
- d. Reporting the progress of the bill drafting to the Minister of Finance so that the Minister of Finance encourages the Bill on Valuers to make it into the 2018's Prolegnas (National Legislation Program) list of priorities.

Perkembangan Penilaian

Developments in Valuation

Audit ISO 9001:2015 Bidang Penilaian Barang Milik Negara

ISO 9001: 2015 Audit for State-Owned Asset Valuation

Diterapkannya sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001:2015 pada Direktorat Penilaian, bertujuan pada pelayanan untuk para pengguna jasa dapat lebih ditingkatkan dengan mengadopsi standar mutu yang berlaku secara internasional sehingga meningkatnya kepuasan pengguna jasa layanan.

Proses pembaruan (*renewal*) Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Direktorat Penilaian memiliki beberapa tahapan, antara lain :

- Pelatihan Sistem Manajemen Mutu dan Audit Internal oleh PT *Superintending Company of Indonesia* (Sucofindo) yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 8 September 2016.
- Audit Internal yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 2016.
- Audit Pembaruan (*renewal*) tahap I oleh Auditor PT Sucofindo pada tanggal 26 Oktober 2016.
- Audit Pembaruan (*renewal*) tahap II oleh Auditor PT Sucofindo pada tanggal 2 sampai dengan 3 November 2016.
- Penyerahan sertifikat ISO 9001:2015 oleh pihak PT Sucofindo kepada Direktorat Penilaian pada tanggal 10 Januari 2017.

The implementation of a quality management system in accordance with ISO 9001: 2015 standards at the Directorate of Valuation, aims at providing service users with an enhanced service by adopting internationally accepted quality standards so as to increase service user satisfaction.

The renewal process of ISO 9001: 2015 Quality Management Standards at the Directorate of Valuation went through several stages, among others:

- Training of the Quality Management System and Internal Audit by PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) held on 5 to 8 September 2016.
- Internal Audit held on 19 to 20 October 2016.
- Stage I Renewal Audit by PT Sucofindo Auditor on October 26, 2016.
- Stage II Renewal Audit by PT Sucofindo Auditors on November 2 to 3, 2016.
- Handing over of ISO 9001: 2015 certificate by PT Sucofindo to the Directorate of Valuation, January 10, 2017.

Revaluasi Aset yang menjadi Proyek Strategis Nasional

Revaluation of Assets Listed in the National Strategic Projects

Dalam rangka mendukung kegiatan Revaluasi BMN khususnya terkait dengan kegiatan penilaian, Direktorat Penilaian sebagai salah satu *unit in charge* telah menyusun/menyempurnakan beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam kegiatan revaluasi BMN tersebut. Beberapa regulasi yang disusun antara lain:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian BMN, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 166/PMK.06/2016;

In supporting State-Owned Asset (BMN) Revaluation, especially in activities related to valuation, the Directorate of Valuation as one of the units in charge has refined a range of regulations needed in the BMN revaluation activities. Hence, a handful of regulations were prepared, among others: :

- Minister of Finance Regulation Number 111/PMK.06/2017 concerning BMN Revaluation, which is a refinement of the Minister of Finance Regulation number 166/PMK.06/2016;

- b. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-246/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Bangunan Air, Dan Penyusunan Laporan Penilaian Dalam Rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Dalam Juknis ini diatur mengenai metode, alat bantu, dan format laporan penilaian BMN yang digunakan dalam penilaian kembali Tahun 2017; dan
- c. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 398/KN/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 246/KN/2017.

Di samping menyusun/menyempurnaan regulasi yang dibutuhkan dalam kegiatan revaluasi BMN, Direktorat Penilaian bersama Direktorat PKNSI berkoordinasi dalam pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP). Direktorat Penilaian bersama Direktorat PKNSI mengeluarkan SIP fitur Revaluasi yang digunakan oleh seluruh Penilai untuk merekam seluruh hasil penilaian dalam rangka revaluasi BMN serta digunakan oleh Kanwil dan Kantor Pusat untuk menunjang kegiatan kendali mutu atas hasil penilaian.

- b. Decree of the Director-General of State Asset Management Number Kep-246/KN/2017 concerning Technical Guidelines for Appraisal of Land, Buildings, Roads, Bridges, Water Buildings, and Preparation of Appraisal Reports for BMN Revaluation. These Technical Guidelines regulate the methods, tools, and the composition of BMN valuation reports in 2017's Revaluation; and
- c. Decree of the Director General of State Asset Management Number 398/KN/2017 concerning Amendments to the Decree of the Director-General of State Asset Management Number 246/KN/2017.

In addition to drafting/refinement of the regulations needed in BMN revaluation activities, the Directorate of Valuation and the Directorate of PKNSI worked hand in hand to develop a Valuation Information System (SIP) application. Together, the two directorates issued Revaluation feature within the SIP to be used by Valuers to record all valuation results for BMN Revaluation and by Regional Offices and Head Office to enhance their quality control activities on assessment results.



Revaluasi BMN Tahun 2017
BMN Revaluation in 2017

Perkembangan Penilaian

Developments in Valuation

Kegiatan *Focus Group Discussion* Penilai DJKN Tahun 2017

2017's Focus Group Discussion with DJKN Valuers

Kegiatan *Focus Group Discussion* Penilai DJKN tahun 2017 ini bertemakan "Analisis Pasar Properti dan Akurasinya terhadap Penilaian". Analisis pasar diperlukan agar penilai pemerintah berkemampuan memahami objek penilaian dengan lebih baik terkait potensi, lokasi, penawaran dan permintaan pasar serta faktor lainnya.

Focus Group Discussion dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2017 bertempat di Ballroom Lantai 3 Hotel Novotel dengan mengundang Kabid Penilaian di lingkungan Kanwil DJKN seluruh Indonesia. Agenda kegiatan ini adalah diskusi panel/ *Focus Group Discussion* Penilai DJKN. Adapun Narasumbernya adalah pejabat dari Kanwil DJKN DKI Jakarta, praktisi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis, Hamid dan rekan serta dari Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai (MAPPI).

The 2017's DJKN Valuers' Focus Group Discussion themed "Analysis of Property Market and Its Accuracy toward Valuation". Market analysis is needed to enable government valuers to better understand the object of valuation in terms of its potential, location, supply and demand, and other factors.

The Focus Group Discussion was held on August 2 to 4, 2017 at the third floor's ballroom of Novotel Hotel, inviting the Head of Valuation Divisions in the Regional Office of DJKN throughout the country. As source-persons, officials from DJKN Regional Office Jakarta, practitioners from the Public Appraisal Services Office (KJPP) Rengganis, Hamid, and colleagues, as well as from the Indonesian Society of Appraisers (MAPPI) joined and shared their insight in the discussion.

Penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB)

Formulation of List of Components for Building Valuation (DKPB)

Daftar Komponen Penilaian Bangunan adalah suatu database yang berisikan daftar harga per meter setiap komponen bangunan berdasarkan perbedaan jenis struktur bangunan dan material bangunan. Perbedaan jenis struktur bangunan secara teknis akan mempengaruhi tata ruang bangunan yang pada akhirnya akan tercermin pada fungsi umum dari bangunan.

Harga Satuan Pekerjaan dalam DKPB untuk setiap daerah disusun berdasarkan hasil survei data yang meliputi data harga bahan bangunan, data upah pekerja dan data harga/sewa peralatan dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) terhadap seluruh Kota/Kabupaten dalam wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan.

List of Components for Building Valuation is a database containing a list of per-meter prices for each building component based on different types of building structures and building materials. Differences in the type of building structure will technically affect the layout of the building which will ultimately be reflected in the building's general function.

Work Unit Prices in DKPB for each region are prepared based on the results of a data survey conducted by each KPKNL. The survey would cover data on the price of building materials, data on workers' wages, and data on equipment prices in all cities/regencies in the working area of the KPKNL.

Diseminasi Peraturan Penilaian di bidang Sumber Daya Alam

Dissemination of Regulations on Natural Resources Valuation

Direktorat Penilaian sebagai salah satu bagian dari Tim Aset Manajemen I RBTK Kementerian Keuangan, memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penilaian.

Selama menjalankan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, Direktorat Penilaian sebagai bagian dari Bidang Inisiatif *Asset Management* I telah menghasilkan beberapa pedoman dan kebijakan penilaian sumber daya alam sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu pedoman penilaian SDA batubara, pedoman penilaian sda hutan produksi, pedoman penilaian SDA hutan lindung dan konservasi, pedoman penilaian sda mineral, pedoman penilaian SDA minyak bumi dan gas bumi, dan pedoman penilaian SDA kelautan perikanan.

The Directorate of Valuation as part of the Team for Asset Management I of Bureaucratic Reform and Institutional Transformation (RBTK) of the Ministry of Finance, is tasked with formulating and implementing technical policies and standardization for valuation.

Undertaking program and activities within the scope of the Bureaucratic Reform and Institutional Transformation in the Ministry of Finance, the Directorate of Valuation, as part of the Asset Management Initiative I has produced a number of guidelines and policies for natural resources appraisal in accordance with the targets set, namely guidelines for coal production valuation, guidelines for production forests valuation, guidelines for valuation of protection forest and conservation forests, guidelines for mineral resources valuation, guidelines for valuation of oil and natural gas, and guidelines for marine and fisheries valuation.

Kerjasama DJKN dengan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Kementerian Keuangan Malaysia

DJKN's Cooperation with Malaysia's Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (Valuation and Property Services Department—JPPH)

Kerjasama antara DJKN dengan JPPH telah dimulai sejak tahun 2005 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara DJKN dengan JPPH pada tahun 2014. Adapun bentuk kerjasama yang disepakati adalah *Training Programme, Joint Research Programme, Internship/Staff Exchange Programme, Conference/Seminar Programme, dan Experience Sharing Programme*.

Pada tahun 2017, DJKN bersama dengan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) telah melaksanakan beberapa kegiatan di bidang penilaian yang merupakan hasil kerjasama antara kedua organisasi pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kerjasama ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas penilai pemerintah pada kedua organisasi sehingga kerjasama ini diharapkan dapat terus terlaksana hingga tahun-tahun mendatang.

The cooperation between DJKN and JPPH has been started since 2005, which then followed by the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between DJKN and JPPH in 2014. The agreed forms of cooperation comprise training program, joint research program, internship/staff exchange program, conference/seminar program, and experience sharing program.

In 2017, the DJKN and the JPPH have carried out several activities in the field of valuation that were proved to be beneficial for improving the quality of government valuers in both organizations, so that this collaboration is expected to be sustained.

Perkembangan Penilaian

Developments in Valuation



Rapat Joint Research Tahun 2017 di Malaysia

2017 Joint Research Meeting in Malaysia

Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan di Bidang Penilaian

Preparation/Refinement of Regulations on Valuation

Terdiri dari 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan, 3 (tiga) Peraturan Dirjen Kekayaan Negara dan 7 (tujuh) Keputusan Dirjen Kekayaan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.06/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Penetapan oleh Menteri Keuangan dan pengundangan);
2. Peraturan Menteri Keuangan 132/PMK.06/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Penetapan oleh Menteri Keuangan dan pengundangan).

Selain menyusun Peraturan Menteri Keuangan, Direktorat Penilaian juga menyusun petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara maupun Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

Directorate of Valuation formulated two Minister of Finance Regulations, three Regulations of Director-General of State Asset Management and seven Decrees of Director-General of State Asset Management. They are:

1. Minister of Finance Regulation 111/PMK.06/2017 dated August 1, 2017 concerning State-Owned Asset Valuation;
2. Minister of Finance Regulation 132/PMK.06/2017 dated October 3, 2017 concerning Technical Guidelines for Functional Position of Government Valuer.

prepared technical guidelines in the form of the Regulation of the Director-General of State Asset Management and the Decree of the Director-General of State Asset Management, with the following details:

1. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara (Penetapan dan pengundangan);
2. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 10/KN/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Air (Penetapan dan pengundangan);
3. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 11/KN/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan Negara yang Dikuasai Negara Berupa sumber Daya Alam Energi Terbarukan (Penetapan dan pengundangan);
4. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 246/KN/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Bangunan Air, dan Penyusunan Laporan Penilaian dalam rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Penetapan dan pengundangan);
5. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 250/KN/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Pembagian Kewenangan Penilaian Barang Milik Negara oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Penetapan dan pengundangan);
6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 371/KN/2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemaparan Konsep Laporan Penilaian (Penetapan dan pengundangan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 377/KN/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (Penetapan dan pengundangan);
8. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 378/KN/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Menara Telekomunikasi dan/atau Penyiaran (Penetapan dan pengundangan);
1. Regulation of the Director-General of State Asset Management Number 7/KN/2017 dated 12 September 2017 concerning Guidelines for the State-Owned Asset Valuation;
2. Regulation of the Director-General of State Asset Management Number 10/KN/2017 dated December 19, 2017 concerning Technical Guidelines for Valuation of State Asset Claimed by State in the form of Water Resources (Determination and enactment);
3. Regulation of the Director-General of State Asset Management Number 11/KN/2017 dated December 19, 2017 concerning Technical Guidelines for Valuation of State Asset Claimed by State in the form of Natural Resources for Renewable Energy;
4. Decree of the Director General of State Asset Management Number 246/KN/2017 dated August 30, 2017 concerning Technical Guidelines for Valuation of Land, House and Buildings, Roads, Bridges, Water Buildings, and Preparation of Appraisal Reports for State-Owned Asset Revaluation;
5. Decree of the Director-General of State Asset Management Number 250/KN/2017 dated September 6, 2017 concerning the Division of Authority over State-Owned Asset Valuation Conducted by Government Valuers in the Directorate-General of State Asset Management;
6. Decree of the Director-General of State Asset Management Number 371/KN/2017 dated December 7, 2017 concerning Guidelines for Implementation of the Presentation of Concept of Valuation Reports;
7. Decree of the Director-General of State Asset Management Number 377/KN/2017 dated December 14, 2017 concerning Technical Guidelines for Valuation of Gas Station;
8. Decree of the Director-General of State Asset Management Number 378/KN/2017 dated December 19, 2017 concerning Technical Guidelines for Valuation of Telecommunication and/or Broadcasting Tower;

Perkembangan Penilaian

Developments in Valuation

9. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 388/KN/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Dalam Rangka Sewa Barang Milik Negara Berupa Fasilitas Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Penetapan dan pengundangan); dan
 10. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 398/KN/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 246/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Bangunan Air, dan Penyusunan Laporan Penilaian dalam rangka Penilaian Kembali BMN (Penetapan dan Pengundangan).
9. Decree of the Director-General of State Asset Management Number 388/KN/2017 dated December 19, 2017 concerning Technical Guidelines for Valuation for State-Owned Asset Lease in the Form of Oil and Gas Business Activity Facilities; and
 10. Decree of the Director-General of State Asset Management Number 398/KN/2017 dated 29 December 2017 concerning Amendments to the Decree of the Director-General of State Asset Management Number 246/KN/2017 concerning Technical Guidelines for Valuation of Land, House and Buildings, Roads, Bridges, Water Buildings, and Preparation of Appraisal Reports for State-Owned Asset Revaluation.

Capacity Building di Bidang Penilaian

Capacity Building on Valuation

- a. Kementerian Keuangan melalui DJKN bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Nuffic Neso Indonesia. Sebanyak 20 pegawai dan pejabat DJKN meraih beasiswa StuNed untuk mengikuti pelatihan "*Capacity Enhancement in Highest and Best Use (HBU) Analysis of Public Infrastructure Assets*" selama 2 minggu dari tanggal 1 sampai dengan 14 Oktober 2017. Pelatihan ini diselenggarakan di Nyenrode University dengan tujuan untuk mendalami pengalaman Belanda dalam mempraktikkan analisis HBU, baik dari sisi pemerintah maupun swasta dalam mengkaji pilihan-pilihan untuk pengembangan prasarana umum, yang paling memberikan nilai tertinggi. Selanjutnya setelah pelatihan, hasilnya akan diaplikasikan pada metodologi penilaian di DJKN.
- a. Facilitated by Nuffic Neso Indonesia, the Ministry of Finance, through DJKN, collaborates with the Netherlands. A total of 20 employees and officials of the DJKN won the StuNed scholarship for "Capacity Enhancement in Highest and Best Use (HBU) Analysis of Public Infrastructure Assets" training for two weeks, from 1 to 14 October 2017. Held at Nyenrode University, the training was aimed to learned the Netherlands's government and private sectors experience in practicing HBU analysis in reviewing best options for the development of public infrastructure. DJKN would then apply the training results for refinement of valuation methodology at DJKN.



Short Course di Nuffic Neso Belanda

Short Course in the Netherlands

- b. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan keahlian khusus dengan tema tertentu di DJKN dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas penilai DJKN agar memiliki daya saing global. Diklat tematik antara lain:
1. DTSS Penilaian Minyak dan Gas Bumi.
 2. DTSS Studi Kelayakan Bisnis Infrastruktur.
 3. DTSS Penilaian Tanah dengan Karakteristik Khusus.
 4. DTSS Studi Kelayakan Bisnis Properti.
 5. Valuasi Ekonomi Pesisir dan Kelautan.
- b. Implementing education and training for special expertise with certain themes in DJKN with the aim of increasing the ability and capacity of DJKN valuers, so they are endowed with global competitiveness. The thematic training include:
1. DTSS (Specialist Substantive Technical Training) on Oil and Gas Valuation.
 2. DTSS on Infrastructure Business Feasibility Study.
 3. DTSS on Valuation of Land with Special Characteristics.
 4. DTSS on Property Business Feasibility Study.
 5. Coastal and Marine Economic Valuation.

Perkembangan Penilaian

Developments in Valuation

**Pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah**

Establishment of Functional Position of Government Valuer

Sejak tahun 2015, Direktorat Penilaian bersama dengan Sekretariat DJKN telah merintis pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) sebagai bentuk pengembangan alternatif jalur karir PNS yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Penilai Pemerintah. Pembentukan JFPP ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu mewujudkan ASN yang profesional dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang memadai. Selanjutnya di tahun 2016 telah terbentuk nomenklatur JFPP melalui penetapan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Dalam rangka mendukung implementasi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, Direktorat Penilaian telah menindaklanjuti Permenpan dimaksud dengan:

1. menyusun peraturan petunjuk teknis jabatan fungsional Penilai Pemerintah bersama Sekretariat DJKN dan Biro Organta Setjen Kemenkeu serta Biro Hukum Setjen Kemenkeu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.06/2017 tanggal 3 Oktober 2017;

Since 2015, the Directorate of Valuation and the Secretariat of Directorate-General have pioneered the establishment of Functional Position of Government Valuer (JFPP) as a form of alternative development of civil servant career paths that aims to enhance the professionalism of Government Valuers. The formation of JFPP is in line with the mandate of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN), that is to realize a professional ASN with adequate qualifications, competencies, and performance. In 2016, JFPP nomenclature was formed through the stipulation of the regulation of Minister of Administrative and Bureaucratic Reform (Permenpan) Number 18 of 2016 concerning the Functional Position of Government Valuers.

In order to support the implementation of the Functional Position of Government Valuers, the Directorate of Valuation has undertaken a number of follow-ups on Permenpan, such as:

1. preparing regulations on technical guidelines for the Functional Position of Government Valuers. To this end, the Directorate of Valuation worked with Secretariat of the DJKN and the Ministry of Finance's Secretariat of the Bureau of Organization and Administration and Secretariat of the Legal Bureau, as stipulated in the Minister of Finance Regulation number 132/PMK.06/2017 dated October 3, 2017;



2. berkoordinasi dengan BKN dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pembinaan Jafung Penilai Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN nomor 13 Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017;
3. melaksanakan *ekspose* evaluasi jabatan untuk pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penilai Pemerintah di hadapan pejabat Kementerian PAN-RB pada tanggal 31 Oktober 2017 yang hasilnya telah disetujui melalui surat Menteri PAN RB nomor B/31/M.SM.04.00/2018 tanggal 31 Januari 2018;
4. menghitung jumlah formasi JFPP di lingkungan DJKN bersama Sekretariat DJKN dan hasilnya telah disampaikan secara berjenjang melalui Biro Organta Sekjen Kemenku ke Kementerian PAN-RB.

Selain empat tahapan di atas, masih diperlukan beberapa persyaratan dalam pengimplementasian jabatan fungsional penilai pemerintah, seperti *assessment* evaluasi jabatan di hadapan pejabat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, penyusunan standar dan uji kompetensi serta pendidikan dan pelatihan JFPP, dan persiapan penyelenggaraan uji kompetensi melalui penyesuaian (*inpassing*) yang semuanya ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang.

2. coordinating with BKN (National Civil Service Agency) in preparing guidelines for the implementation of Functional Position of Government Valuers that have been stipulated in the BKN Regulation Number 13 of 2017 dated August 28, 2017;
3. carrying out *exposé* of job evaluation for the proposition of JFPP allowances in the presence of Ministry of PAN-RB officials on October 31, 2017 the results of which have been approved by the Minister of PAN-RB through letter number B/31/M.SM.04.00/2018 dated January 31, 2018;
4. figuring out the number of JFPP formations within the DJKN, the results of which have been submitted in stages through the Secretariat of the Bureau of Organization and Administration of the Ministry of Finance and subsequently to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PAN-RB).

In addition to the four stages above, several requirements are still required to implement the JFPP, including job evaluation assessments in the presence of the Directorate-General of Budget, preparation of standards and competency evaluation, JFPP education and training, and preparation for conducting competency testing through *inpassing* (fitting), all of which are targeted for completion in 2018.

Pekembangan Lelang

Developments in Auction



“Dalam perkembangannya potensi penerimaan negara lelang semakin meningkat dari tahun ke tahun.”

“In its development, the potential for state revenue and auction increase every year.”

Wujud upaya optimalisasi dalam pelayanan lelang, Direktorat Lelang pada tahun 2017 telah melakukan beberapa kegiatan utama, antara lain penyusunan dan penyempurnaan regulasi lelang, meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan yang berkesinambungan, penandatanganan perjanjian kerjasama dengan *stakeholder*, modernisasi lelang antara lain pengembangan *e-Auction* dengan penambahan menu penggunaan *Virtual Account* (VA) pada Lelang dengan kehadiran, meningkatkan peran dan mutu profesionalisme Pejabat Lelang kelas I DJKN dengan pembentukan Jabatan Fungsional Pelelang dan *Quality Assurance*.

In effort to optimize auction services, the Directorate of Auction in 2017 has carried out a number of notable activities, including the preparation and improvement of auction regulations, enhancing the capacity of human resources through continuous coaching, signing of cooperation agreements with stakeholders, modernization of auctions through, among others, *e-Auction* development by adding the *Virtual Account* (VA) for the auction with attendees, enhancement of the role and professionalism of the DJKN's Auctioneer Class I with the establishment of the Functional Position of Auctioneers and *Quality Assurance*.

Perkembangan Hasil Lelang

Auction Results

Dalam perkembangannya, potensi penerimaan negara dari lelang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tren positif kontribusi lelang terhadap pendapatan negara melalui PNBP. Capaian hasil pelaksanaan lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata selalu di atas dan melampaui dari target yang telah ditetapkan baik Bea Lelang, Frekuensi Lelang, dan Pokok Lelang.

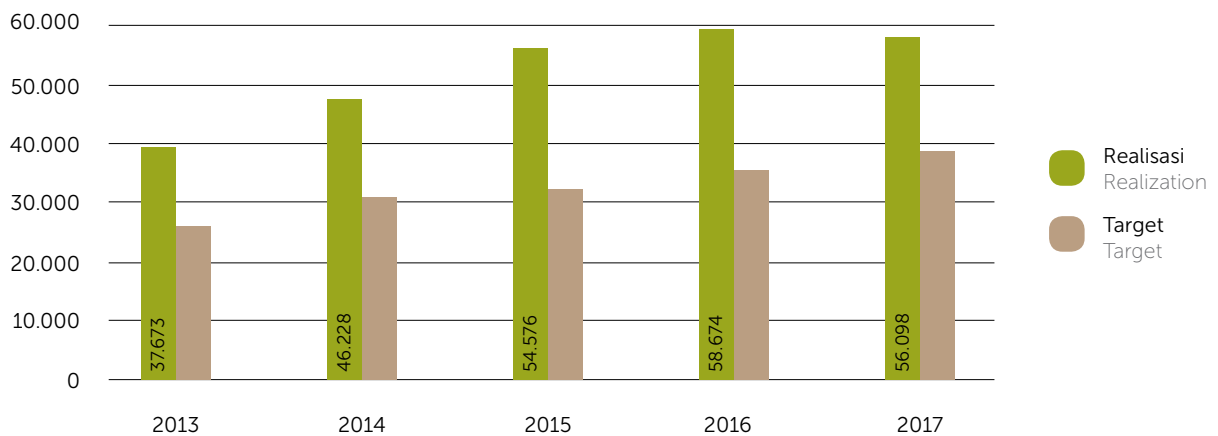
State revenues from auction results are increasing year by year—a positive trend regarding auction contributions to state revenues through Non-Tax State Revenues (PNBP). The results of the auction in the past five years, on average always exceeded the set targets, be it in terms of Auction Fee, Auction Frequency, and Auction Price.

Berikut ini gambaran capaian hasil lelang dalam grafik tren capaian 5 tahun terakhir (2013 s.d. 2017):

The following is an overview of the auction results in the graph of auction achievements in the last five years (2013 to 2017):

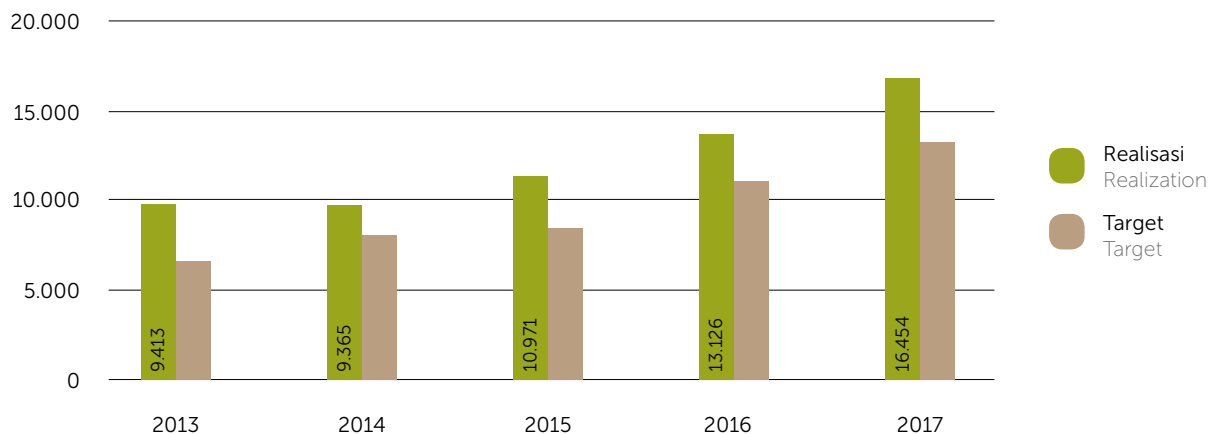
Gambar 1. Tren Capaian Frekuensi Lelang

The Trend of Auction Frequency



Gambar 2. Tren Capaian Pokok Lelang (dalam Milyar)

The Trend of Auction Price Achievement (in billion)

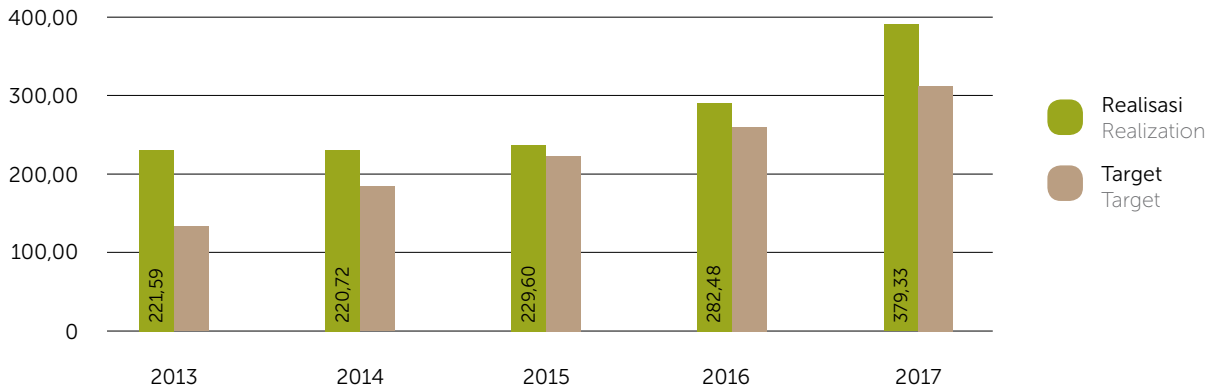


Perkembangan Lelang

Developments in Auction

Gambar 3. Tren Capaian Pokok Lelang (dalam Milyar)

The Trend of Auction Fee Achievement (in billion)



Success-factors yang mendukung capaian hasil lelang pada tahun 2017, baik Frekuensi Lelang, Pokok Lelang, dan Bea Lelang antara lain:

- Meningkatkan pelayanan lelang yang efisien, kompetitif dan adil melalui pelaksanaan *e-auction*.
- Penggalan potensi lelang kepada pemerintah kota/kabupaten, Kementerian/Lembaga, dan *stakeholder* lainnya secara intensif dan berkesinambungan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*.
- Pengangkatan Pejabat Lelang guna memenuhi peningkatan jumlah permintaan pelaksanaan lelang.
- Capacity building* SDM di bidang lelang.
- Menyusun/menyempurnakan peraturan di bidang lelang.

The auction results—be it in terms of Auction Frequency, Auction Price, and Auction Fee—can not be separated from the success-factors that have supported them, namely:

- E-Auction has produced auction services that are more efficient, competitive, and fair.
- Intensive and continuous effort to uncover auction potential in the city/district governments, Ministries/Agencies, and other stakeholders.
- Monitoring and evaluation, carried out both by the Head Office and Regional Office of DJKN for the implementation of auction services to support continuous improvement.
- Appointment of Auctioneers to meet the increasing number of auction request.
- Capacity building for human resources in the field of auction.
- Preparation and improvement of regulations in the field of auction.

Perkembangan Pejabat Lelang Kelas II

Class II Auctioneers

Pada tahun 2017, capaian hasil lelang kinerja Pejabat Lelang Kelas II memberikan sumbangsih yang cukup besar atas capaian hasil lelang nasional. Hal tersebut mengindikasikan tingginya minat masyarakat terhadap pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela.

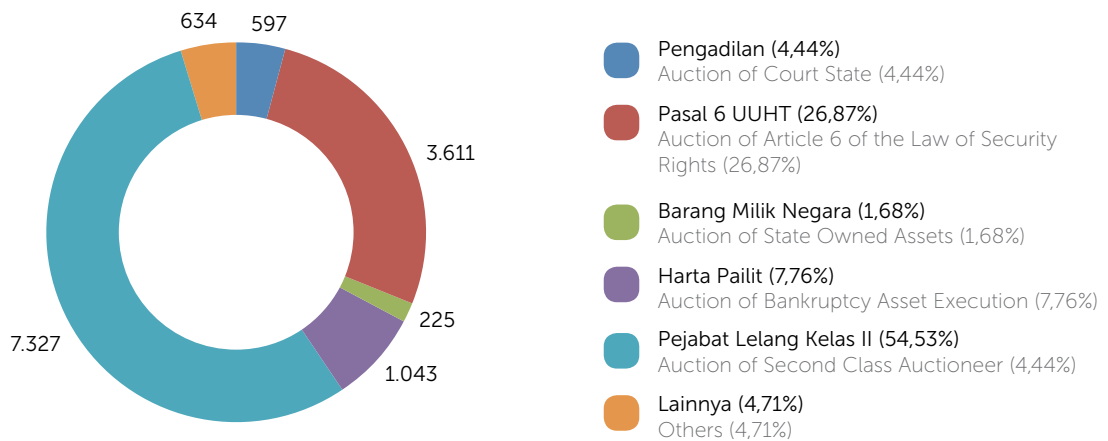
Berikut data kontribusi hasil lelang berdasarkan kategori jenis lelangnya.

The auction results originating from the performance of Class II Auctioneers contributed substantially to the achievements of the national auction results in 2017. It signifies the high public interest in the implementation of voluntary non-execution auctions.

Below is the contribution of the auction results by auction type.

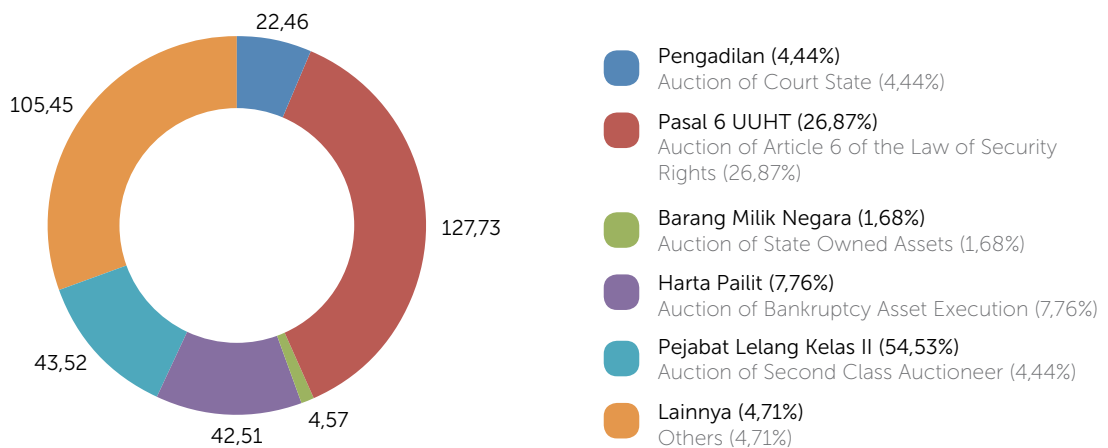
Capaian Pokok Lelang Per Jenis Lelang Tahun 2017 (dalam miliar rupiah)

Achievement of Auction Price by Auction Type, 2017 (in billion rupiahs)



Capaian Bea Lelang per Jenis Lelang Tahun 2017 (dalam miliar rupiah)

Achievement of Auction Fee by Auction Type, 2017 (in billion rupiahs)



Perkembangan Lelang

Developments in Auction

Sebagai upaya optimalisasi potensi lelang Noneksekusi Sukarela, pada tahun 2017 telah diterbitkan:

- a. SK Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II untuk 4 Pejabat Lelang Kelas II baru;
- b. 6 SK Perpanjangan Ijin Pejabat Lelang Kelas II;
- c. SK Pemberian Izin Operasional Balai Lelang untuk 2 Balai Lelang baru; dan
- d. 1 SK Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang.
- e. 1 SK Pindah Wilayah Operasional Balai Lelang

As an effort to optimize the potential of the voluntary non-execution auction, in 2017, DJKN issued:

- a. One decree on Appointment (SK) of four new Class II Auctioneers;
- b. Six decrees of renewal of Class II Auctioneers license;
- c. Decrees on the operational license for two new Auction Houses; dan
- d. One decree on branch office opening for Auction House.
- e. One decree on the change in the working area of Auction House.

Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi Lelang

Preparation and Refinement of Auction Regulations

Penyusunan dan penyempurnaan terhadap regulasi lelang dilakukan dalam rangka mengakomodasi perkembangan lelang, mendukung modernisasi lelang, penyesuaian terhadap perkembangan permasalahan, fakta, dan dinamika yang terjadi pada masyarakat serta memenuhi kebutuhan hukum. DJKN secara berkesinambungan melakukan evaluasi terhadap efektivitas peraturan-peraturan yang telah diberlakukan. Pada tahun 2017, terdapat 9 peraturan yang diselesaikan yaitu:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas II;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Balai Lelang;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.06/2017 tentang Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang

The preparation and refinement of auction regulations were carried out in order to accommodate the development in auctions, to support auction modernization, to adjust to developments and dynamics taking place in the community, as well as to meet legal requirements. The DJKN continuously evaluates the effectiveness of the regulations that have been enacted. In 2017, nine regulations were formulated, namely:

- a. Minister of Finance Regulation Number 38/PMK.06/2017 concerning Technical Guidance for Functional Position of Auctioneer;
- b. Minister of Finance Regulation Number 45/PMK.06/2017 concerning Procedures for Examining Class II Auction Officers;
- c. Minister of Finance Regulation Number 46/PMK.06/2017 concerning Procedures for Examining Auction House;
- d. Minister of Finance Regulation Number 156/PMK.06/2017 concerning Implementation of the Principle of Recognizing Service Users for Auction House;
- e. Minister of Finance Regulation Number 189/PMK.06/2017 concerning Class II Auctioneer;
- f. Minister of Finance Regulation Number 196/PMK.06/2017 concerning Competency Standards and Implementation of Competency Test of Functional Position of Auctioneers.

- | | |
|--|--|
| <p>g. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;</p> <p>h. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2017 tentang Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang;</p> <p>i. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang;</p> <p>j. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 8/KN/2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas I Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan, serta Penilaian Kinerja oleh Pengawas Lelang (superintenden);</p> | <p>g. Regulation of the Director-General of State Asset Management Number 2/KN/2017 concerning Technical Guidelines for Conducting an Auction;</p> <p>h. Regulation of the Director-General of State Asset Management Number 3/KN/2017 concerning Guidelines for Auction Administration and Auction Reporting;</p> <p>i. Regulation of the Director-General of State Asset Management Number 5/KN/2017 concerning Auction Report;</p> <p>j. Regulation of the Director-General of State Asset Management Number 8/KN/2017 concerning Procedures for Examination of Class I Auctioneer in the context of Guidance and Supervision, and Performance Evaluation by Auction Superintendents;</p> |
|--|--|

Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Barang Sitaan

Focus Group Discussion (FGD) on Optimization of Confiscated Goods

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) satu hati bersinergi mengamankan penerimaan negara melalui optimalisasi lelang Barang Sitaan Pajak. Untuk memulai langkah strategis tersebut diselenggarakan forum group discussion (FGD) terkait hal itu pada Rabu, 12 April 2017 yang dihadiri oleh perwakilan 70 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan 90 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agar ada kesamaan persepsi antara DJKN dan DJP sehingga pelaksanaan lelang barang sitaan pajak mampu menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

Lelang dilaksanakan bukan semata-mata untuk mencari penerimaan negara. Namun demikian, DJKN berkomitmen mendukung segala upaya dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Lelang dapat menjadi solusi bagi DJP dalam menurunkan piutang pajaknya. Ini jelas suatu bentuk sinergi DJKN dan DJP sebagai satu Kementerian Keuangan. Secara umum lelang mempunyai unsur efek jera bagi pihak-pihak yang tidak taat pada kewajibannya. Pelaksanaan lelang barang sitaan pajak sedikit banyak akan meningkatkan ketaatan wajib pajak membayar pajak. Terkait dengan lelang barang sitaan pajak, DJKN

The Directorate General of State Asset Management (DJKN) and the Directorate-General of Taxes (DJP) are determined to secure state revenues through optimizing the auction of Goods Seized by DJP. To initiate these strategic steps a focus group discussion (FGD) was held on Wednesday, April 12, 2017, which was attended by representatives of 70 State Asset and Auction Service Offices (KPKNL) and 90 Tax Service Offices (KPP) throughout the country. The discussion was aimed to foster a common perception between DJKN and DJP so that the auction of the seized goods would produce optimal state revenue.

Auctions are carried out not solely for seeking state revenue. However, the DJKN is committed to supporting all efforts to secure state revenues. Auctions can be a solution for DJP in reducing its tax receivables. This is obviously a form of synergy between DJKN and DJP as government units under the Ministry of Finance. The auction normally brings about an element of a deterrent effect for parties who do not comply with their obligations. The auction of goods confiscated the DJP will more or less raise taxpayers' compliance. In relation to the auction of goods seized of tax. DJKN and DJP play an important

Perkembangan Lelang

Developments in Auction

dan DJP berperan penting dalam membangun citra bahwa lelang barang sitaan pajak adalah aman dan mudah laku terjual, serta dapat menjaga aspek hukum barang yang dilelang. Jangan sampai barang yang dilelang masih terikat oleh hak lainnya misalnya hak tanggungan atau fidusia. Hal semacam ini dapat menyebabkan masyarakat enggan mengikuti lelang barang sitaan pajak karena berpotensi berurusan dengan hukum setelahnya.

role in creating the image that the auction of goods seized by DJP is safe and easy, and able to provide buyers with a secure legal aspect. In other words, the items being auctioned are not bound by other rights such as security rights or fiduciary rights, since such things will lead to public's reluctant to take part in a GDT-seized goods auction, fearing of its potential legal dispute.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan

Coordination Meeting on Evaluation of Execution Auction under Article 6 of the Law of Security Rights (UUHT)

Melihat kinerja lelang eksekusi hak tanggungan (HT) tahun 2016 yang dinilai kurang efektif, pada hari Kamis, 16 Februari 2017, Direktorat Lelang, DJKN mengundang kalangan Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas permasalahan tersebut.

Dari 41.141 permohonan lelang eksekusi HT yang berhasil laku 11,9%. Artinya 39.242 lelang eksekusi HT tidak laku, meskipun secara nasional mampu menyumbang 30% dari total pokok lelang atau sebesar Rp3,7 triliun dan menyumbang 47% dari total bea lelang atau sebesar Rp135 miliar. Ini menjadi perhatian khusus bagi DJKN. Titik berat lelang adalah pelayanan bukan sumber penerimaan. Keberhasilan pelaksanaan lelang tentu memberi efek domino pada perbankan dan perekonomian. Modal perbankan dapat naik, NPL turun dan bank mampu menyalurkan lebih banyak kredit yang akan menggerakkan roda ekonomi.

Senada dengan DJKN pihak OJK juga mengharapkan lelang eksekusi HT dapat berjalan efisien dan efektif. Terkait banyaknya gugatan OJK mengatakan pihak otoritas telah menghimbau pada perbankan untuk melakukan free and clear pada Aset yang Diambil Alih (AYDA). Jangan sampai terjadi penurunan reputasi baik di DJKN, pihak bank maupun OJK karena permasalahan ini.

Recognizant of the less-than-effective performance of security rights auction in 2016, the Directorate of Auction invited banking community and the Financial Services Authority (OJK) to discuss the issue on Thursday, February 16, 2017.

Of the 41,141 auction requests for security rights execution auction, only 1,899 (11.9 %) managed to sell, leaving 39,242 auctions of security rights execution failing to sell. Nationally, however, the auctions were able to contribute 30% of the total auction price (Rp.3.7 trillion) and they accounted for Rp135 billion (47%) of total auction fees. This becomes a special concern for DJKN. The auction should place a great emphasis on its service, rather than its role as a source of revenue. The successful implementation of the auction certainly gives a domino effect on banking and the economy. It helps raising banking capital, lowering NPL, and enabling banks to channel more credit that will drive the economy.

Siding with DJKN, the OJK also expects the auction of security right execution to run efficiently and effectively. Regarding the number of the lawsuit, the OJK said the authorities had appealed to banks to conduct a "free and clear" procedures on transferred assets (AYDA), preventing a reputational decline for DJKN, the banks, and the OJK.

Sementara itu, menurut Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan idealnya lelang berhasil membuat barang jadi laku dan membentuk harga pasar yang optimal. Lelang bukan mengejar pendapatan tapi sebagai pelayanan. Risiko yang ada adalah risiko reputasi pada Kementerian Keuangan. Untuk itu Inspektorat mengharuskan lelang dilakukan secara terbuka dan diunggah dalam Info Lelang pada website resmi DJKN.

Acara bertajuk Peningkatan Kinerja Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Antara DJKN, Perbankan dan Instansi terkait ini dihadiri 9 Bank dan PT Permodalan Nasional Madani. Kesepuluh institusi yang hadir ini merupakan pemohon lelang eksekusi HT dengan frekuensi yang besar. Jika ditotal porsinya sebesar 76% dari 130 institusi lainnya. Mereka sepakat akan lebih mengefektifkan lelang eksekusi HT dengan tetap mengutamakan asas kehati-hatian.

Meanwhile, according to the Inspectorate-General of the Ministry of Finance who also attended the meeting, ideally, the auction would succeed in making the goods sell well and would create an optimal market price. The auction is about service instead of about a pursuit of income. The inspectorate requires that the auction is conducted openly and be uploaded in the Auction Info on the official website of DJKN, since it comes with reputational risk for the Ministry of Finance.

Titled with "Improving Auction Performance of Execution Article 6 under the Law on Security Rights, among DJKN, Banking, and related Agencies" the meeting was attended by nine banks and PT Permodalan Nasional Madani. The attendees were high-frequency bidders for the execution of security rights. In total, they hold 76% of the overall 130 related institutions. They agreed to hold a more effective auction of Security Rights executions while still prioritizing the principle of prudence.



Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT

Coordination Meeting and Evaluation of Execution Auction Article 6 of the Law on Security Rights

Perkembangan Lelang

Developments in Auction

Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJKN dengan Bank Mandiri dalam rangka Optimalisasi Lelang Hak Tanggungan

Cooperation Agreement between DJKN and Bank Mandiri in Optimizing Security Rights Auctions

Dalam rangka optimalisasi lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan eksekusi Jaminan Fidusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sepakat melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan lelang agunan kredit pada Jumat, 16 Juni 2017 di Kantor Pusat DJKN Jakarta.

Selain dengan Bank Mandiri, langkah penandatanganan perjanjian kerja sama juga dilakukan dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 11 November 2017. Penandatanganan ini merupakan pembaruan dari perjanjian serupa yang dilaksanakan pada 28 November 2015 silam. Kedua belah pihak berkomitmen memperkuat kerja sama yang selama ini telah terjalin baik.

Lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia adalah bagian dari *law enforcement*. Di 2016, permohonan lelang jenis ini cukup tinggi, yaitu mencapai 75,2 % dari seluruh permohonan lelang yang diajukan ke DJKN. Hal ini menunjukkan masalah penyelesaian kredit macet masih menjadi tantangan besar bagi perbankan. Sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih keras dari seluruh unsur agar pelaksanaan lelang eksekusi dapat membuahkan hasil optimal. Selama ini DJKN terus *men-support* melalui berbagai inovasi dan simplifikasi proses bisnis. Salah satu bentuknya adalah penayangan objek lelang di *website* resmi DJKN agar tersosialisasikan baik kepada masyarakat luas.

Lebih lanjut, diharapkan ke depan sinergi kedua institusi makin baik. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah cukup lama menjalin hubungan dengan Bank Mandiri dan BRI. Dimulai sejak pembinaan BUMN masih berada di Kemenkeu hingga saat ini. Hubungan baik inilah yang perlu dijaga dan ditingkatkan supaya satu sama lain dapat saling mendukung potensi yang ada sehingga bisa mengakselerasi pelaksanaan dan *recovery* kredit bermasalah melalui lelang agunan

In order to optimize the auction for the execution of Article 6 of the Law on Security Rights (UUHT) and Fiduciary Rights execution, the Directorate-General of State Asset Management (DJKN) and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk on Friday, June 16 2017, at DJKN Head Office agreed to sign a cooperation agreement on the auction of credit collateral

Taking its cue from Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk also signed the similar cooperation agreement on November 11, 2017. This signing was an update of a similar agreement took place on November 28, 2015. Both parties were committed to strengthening the cooperation that has been well established.

The auction of execution of security rights and fiduciary right is a part of law enforcement. In 2016, this type of auction request was notably high, reaching 75.2% of all auction request submitted to DJKN. It indicates that resolving bad loans is still a big challenge for banks. Hence, it is necessary for all elements to make tireless efforts so that the execution auction can produce optimal results. So far, DJKN has been persisting in supporting the auction through various innovations and simplification of business processes. For instance, by displaying auction objects on the official website of DJKN, making them well-publicized to the public.

Furthermore, it is hoped that in the future the synergy between the two institutions will improve. The Ministry of Finance has long established relations with Bank Mandiri and BRI, from the period when the fostering of SOEs was still in the responsibility of the Ministry of Finance. This smooth relationship needs to be maintained and improved so that each party can support each other's existing potential, which in turn will accelerate the implementation and recovery of bad debts through auctions of collaterals.

Sebelumnya, Direktur Lelang melaporkan bahwa capaian hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia 2016 adalah sebesar Rp3,37 triliun, meningkat cukup tajam jika dibanding 2015 yaitu sebesar Rp2,58 triliun. Selain itu masih ada potensi capaian hasil lelang yang lebih besar di masa mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut Direktorat Lelang telah melakukan koordinasi dengan bank-bank pemohon lelang terbesar, Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Otoritas Jasa Keuangan agar pelaksanaan lelang makin baik.

Untuk menunjang agar proses lelang menjadi efektif, Bank Mandiri dan BRI akan menyiapkan database aset yang akan dilelang secara periodik serta dokumen lelang yang akurat dan komprehensif. Dengan semakin paham mengenai market dan membedakan kualitas portofolio aset yang akan dilelang, ke depan Bank Mandiri dan BRI akan lebih agresif dalam pelaksanaan lelang. Harga limit lelang pun akan dibuat lebih realistis sehingga peningkatan laku lelang menjadi lebih baik lagi. Bank Mandiri juga akan melakukan pemasaran objek lelang yang dikemas secara menarik dan mencoba memasarkannya kepada nasabah prioritas Bank Mandiri.

Previously, the Director of Auction reported that the achievement of the 2016's auction results of security rights and fiduciary rights was Rp 3.37 trillion, a noteworthy increase compared to that of 2015's, which amounted to Rp 2.58 trillion. Besides, there is still the potential for greater auction results in the future. To achieve this, the Directorate of Auction has coordinated with the largest auctioning banks, the State-Owned Bank Association (Himbara), the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Financial Services Authority (OJK) in improving the auction service.

In supporting an effective auction process, Bank Mandiri and BRI will periodically prepare a database of assets to be auctioned, while providing accurate and comprehensive auction documents. By becoming more aware of the market and differentiating the quality of the asset portfolio to be auctioned, the banks will be able to conduct more aggressive auctions in the future. The auction limit price will also be made more realistic, increasing assets sold through the auction. What's more, Bank Mandiri will also conduct finely packaged marketing of auction objects to attract its priority customers.



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJKN dengan Bank Mandiri

Signing Cooperation Agreement between DJKN and Bank Mandiri



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJKN dengan Bank BRI

Signing Cooperation Agreement between DJKN and Bank Mandiri

Perkembangan Lelang

Developments in Auction

Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJKN dengan PT Pegadaian (Persero) dalam rangka Penatausahaan dan Pelaporan Bea Lelang

Cooperation Agreement between DJKN and PT Pegadaian (Persero) in Administration and Reporting of Auction Fees

Saat ini terjadi inefisiensi dari proses penatausahaan dan pelaporan bea lelang PT Pegadaian yang tecermin dari perbedaan data antara DJKN dengan PT Pegadaian terkait bea lelang, bahkan hal ini sampai menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaporan bea lelang yang dilakukan setiap bulan oleh Pegadaian kepada DJKN secara tertulis dengan waktu *cut off* yang berbeda menjadi sumber masalah utama terjadinya perbedaan, sehingga perbedaan tersebut harus diklarifikasi oleh DJKN setiap bulannya.

Menindaklanjuti hal tersebut, DJKN dan PT. Pegadaian (Persero) sepakat melakukan penandatanganan kerja sama tentang penatausahaan dan pelaporan bea lelang pada Senin 10 Juli 2017 bertempat di Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero).

Seperti diketahui bahwa keterkaitan antara DJKN dan Pegadaian terletak pada bea lelang yang disetorkan sebagai penerimaan negara. Berdasarkan catatan Direktorat Lelang DJKN total penerimaan negara dari lelang pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 705 miliar, nilainya cenderung meningkat dan untuk tahun 2016 penerimaan negara dari lelang sendiri tercatat sebesar Rp 1,1 triliun.

Seiring dengan kecenderungan peningkatan nilai penerimaan negara dari lelang, penerimaan negara yang disetorkan oleh PT Pegadaian (Persero) pun mengalami kenaikan yang cukup besar. Pada tahun 2010 nilai penerimaan negara yang disetorkan oleh PT Pegadaian adalah sebesar Rp 13 miliar, tapi pada tahun 2016 nilainya sudah mencapai Rp 52 miliar. Untuk periode sampai dengan 20 Juni 2017 sendiri nilai yang sudah disetorkan sudah mencapai Rp 30 miliar sehingga nilainya cukup signifikan.

At present there is an inefficiency of the administration and reporting process of auction fees related to PT Pegadaian reflected in the unsynchronized data on auction fees between DJKN and PT Pegadaian, this even became an audit finding of the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). The main source of unsynchronized data was the monthly written reporting prepared by PT Pegadaian which used a different cut-off time, obliging DJKN to clarify the differences every month.

Following-up on this matter, DJKN and PT. Pegadaian (Persero) has agreed to sign a cooperation agreement on administration and report on auction fees on Monday, July 10, 2017 at the PT Pegadaian (Persero) Head Office.

As it is known, the interrelationship between DJKN and Pegadaian lies in the auction fees that are deposited as state revenue. Based on the records of the Directorate of Auction, the total state revenue from the auction in 2010 was Rp 705 billion, with a value that tends to increase, that in 2016, state revenue originating from the auction alone was recorded at Rp 1.1 trillion.

Along with the trend of increasing value of state revenues from the auction, state revenues deposited by PT Pegadaian (Persero) also substantially increased. In 2010, the value of state revenue deposited by PT Pegadaian was Rp. 13 billion, which later became Rp 52 billion in 2016. For the period up to June 20, 2017 alone, the value that had been deposited was quite meaningful, reaching Rp 30 billion.

Terkait inefisiensi yang terjadi, berdasarkan pertemuan antara DJKN dengan PT Pegadaian pada kesempatan sebelumnya diperoleh kesepahaman bahwa DJKN dan PT Pegadaian dapat melakukan penatausahaan dan pelaporan melalui aplikasi bersama sehingga data dari Pegadaian dapat secara *host to host* tersambung dengan DJKN. Hal ini tentu saja akan dapat memperbaiki kondisi pelaporan sebelumnya, karena DJKN dapat secara *real time* mengakses data bea lelang dari Pegadaian.

Selain pertukaran data, dalam perjanjian tersebut disepakati juga adanya *knowledge sharing* antara DJKN dengan PT Pegadaian. Praktik yang baik dari PT Pegadaian dapat dicontoh oleh DJKN, begitu pula sebaliknya apa yang telah baik dari DJKN dapat menjadi contoh bagi PT Pegadaian. Kerja sama pertukaran data ini sudah disimulasikan sebelumnya dan diharapkan akurasi data akan menjadi lebih baik dan dapat mengurangi beban administrasi baik dari DJKN maupun Pegadaian.

Regarding the inefficiencies that occur, based on a meeting between DJKN and PT Pegadaian on the previous occasion, it was agreed that DJKN and PT Pegadaian would administer and report through a joint application so that data sent by Pegadaian could be connected host-to-host to DJKN. This will of course improve the reporting quality, since DJKN can now in real time access Pegadaian's auction fee data.

In addition to data exchange, the agreement also made a deal to establish knowledge sharing between DJKN and PT Pegadaian, allowing PT Pegadaian good practices to be exemplified by DJKN, and vice versa. This data exchange collaboration has been simulated beforehand and it is hoped that the accuracy of the data will be better and can reduce the administrative burden on both parties.



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJKN dengan PT Pegadaian (Persero)
Signing Cooperation Agreement between DJKN and PT Pegadaian (Persero)

Perkembangan Lelang

Developments in Auction

Uji Coba *Virtual Account (VA)* pada Lelang dengan kehadiran (e-konvensional)

Test on Virtual Account (VA) for Auction with Attendees (e-konvensional)

DJKN menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan lelang yaitu e-konvensional. Pelaksanaan lelang dengan sistem e-konvensional adalah pelaksanaan lelang konvensional dengan kehadiran peserta, namun penyetoran dan pengembalian uang jaminan lelang menggunakan virtual account sebagaimana mekanisme *e-Auction*. Hal ini didasarkan pada kemudahan, efisiensi, kepraktisan, dan keamanan yang melekat pada transaksi elektronik.

Direktorat Lelang DJKN menggelar uji coba pelaksanaan lelang e-konvensional pada 3 (tiga) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yakni KPKNL Malang dan KPKNL Purwokerto pada tanggal 16 Maret 2017 dan KPKNL Bandung pada tanggal 20 Maret 2017. Acara ini dilaksanakan di KPKNL dan bekerja sama dengan Bank.

Pada saat pelaksanaan uji coba peserta lelang mengambil VA dengan dua cara. Melalui Aplikasi Lelang Internet di alamat www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id atau melalui Bendahara Penerimaan sebagai antisipasi apabila terjadi *down system*. Kelebihan sistem pembayaran uang jaminan lelang e-konvensional ini adalah peserta lelang dapat melakukan penyetoran uang jaminan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat jam operasional bank. Setelah pembayaran uang jaminan terverifikasi, peserta dapat mencetak tiket lelang yang di dalamnya tertera data peserta, informasi obyek lelang, dan kode QR yang nantinya dapat dipindai oleh Pejabat Lelang/ Bendahara Penerimaan.

Pada uji coba ini, dilakukan eksplorasi permasalahan dan kendala apa yang berpotensi timbul dari penerapan Lelang e-konvensional baik dari sisi hukum maupun sisi praktik di lapangan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan agar pelaksanaan Lelang e-konvensional, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harapan dari stakeholder adalah agar proses registrasi dapat dilakukan dengan lebih efektif agar waktu pelaksanaan lelang dapat lebih cepat. Hal ini sesuai dengan semangat pelaksanaan

DJKN presents a new breakthrough in auction services with its e-konvensional. The auction with an e-konvensional system is a conventional auction with live bidders (attendees), but the placement and refund of its auction deposit use a virtual account (VA) typically found in e-Auction mechanism. This is driven by the ease, efficiency, practicality and security, which are inherent in electronic transactions.

The Directorate of Auction held a trial of the implementation of e-konvensional auctions in three State Assets Management and Auction Service Offices (KPKNL) namely KPKNL Malang and KPKNL Purwokerto on March 16, 2017; and KPKNL Bandung on March 20, 2017.

During the test, bidders took VA in two ways—either through the Internet Auction Application at www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id or through the Receiving Treasurer in anticipation of a system down. The advantage of this e-konvensional auction deposit system is that bidders can place auction deposits whenever and wherever they are, regardless of bank operating hours. Once auction deposits are verified, participants can print an auction ticket which includes the participant data, auction object information, and QR codes which can later be scanned by the Auctioneer/Receiving Treasurer.

During the test, DJKN explored the problems and obstacles that could potentially arise from the implementation of e-konvensional auctions, in terms of both legal and practical aspects. Such steps are needed to anticipate and overcome undesirable problems in the implementation of e-konvensional auctions in the future. Stakeholders hope that the registration process can be carried out more effectively in order to save time on the auction. This is consistent with the spirit of implementing e-Auction

e-Auction maupun Lelang e-konvensional yang mengharapkan tingkat efektivitas dan efisiensi semakin optimal.

and e-konvensional Auction that expects optimal levels of effectiveness and efficiency.



Uji Coba VA pada lelang Konvensional di KPKNL Malang dan Purwokerto

Test on Virtual Account (VA) for Auction in KPKNL Malang dan Purwokerto

Pelaksanaan Rapat Kerja Terbatas di Bidang Lelang

Implementation of Limited Working Meeting on Auction

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata membuka Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Bidang Lelang, dalam sambutannya menginginkan lelang menjadi salah satu mekanisme jual beli yang terbaik di perekonomian Indonesia. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan penghargaan kepada mitra kerja, pejabat lelang kelas I, pejabat lelang kelas II dan balai lelang yang berprestasi. Selain itu juga dilakukan peluncuran aplikasi-aplikasi terkait lelang yaitu Modul Pengelolaan Data PNBPN Pegadaian, Modul Risalah Lelang, Modul Pengelolaan Uang Jaminan Secara Otomatis dan portal lelang.

Turut hadir dalam acara ini adalah perwakilan dari mitra kerja di bidang lelang diantaranya PT. BNI (Persero), PT. BRI (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero) dan PT Pegadaian (Persero), Pengurus dan anggota Ikatan Pejabat Lelang Indonesia, Pejabat Lelang Kelas I dan II serta balai lelang.

Opening the Limited Working Meeting (Rakertas) on Auction, the Director-General of State Asset Management Isa Rachmatarwata said that he wanted the auction to be one of the best buying and selling mechanisms in the country's economy. The Director-General of State Asset Management presented awards to working partners, class I auctioneers, class II auctioneers, and auction houses that had shown outstanding achievements. In the event, DJKN also launched auction related applications, namely the Pegadaian PNBPN Data Management Module, the Auction Report Module, the Automatic Auction Deposit Management Module, and the auction portal.

Also attended this event were representatives of working partners in the field of auctions including PT. BNI (Persero), PT. BRI (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero) and PT Pegadaian (Persero), the executive board and members of the Indonesian Auctioneers Association, Class I and II Auctioneers, and auction houses.

Perkembangan Lelang

Developments in Auction

Rangkaian Rakertas dibuka dengan presentasi dari Dr. Tengku Ezni Balqiah tentang Pemasaran dan Penciptaan Nilai. Adapun Hukum Perjanjian dan Lelang Hak Tanggungan yang dibawakan oleh Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Hamdi, SH., M.Hum. dan materi Kepailitan dan Lelang Harta Pailit yang dibawakan Alfin Sulaiman, SH., M.H selaku Partner Pada Kantor Hukum Sulaiman & Herling Attorneys at Law.

Hari Ketiga, 27 Juli 2017, dilakukan sidang komisi, dengan materi pembahasan yaitu Marketing Lelang, Efektivitas Dan Efisiensi Lelang Hak Tanggungan, Digitalisasi Proses Bisnis Lelang dan Lelang Tata Cara Khusus.

The Rakertas was started with a presentation from Dr. Tengku Ezni Balqiah on Marketing and Value Creation. The Supreme Judge of the Civil Chamber of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Hamdi gave a presentation on the Law on Agreement and Security Rights Auction, while Alfin Sulaiman, Partner at the Law Office of Sulaiman & Herling Attorneys at Law presented material on Bankruptcy and Bankruptcy Asset Sales.

On the third Day, July 27, 2017, a commission session was convened, with discussion comprising Marketing of Auction, Effectiveness and Efficiency of Security Rights Auction, Digitalization of Auction, and Auction with Special Procedures.



Rakertas Bidang Lelang

Limited Working Meeting on Auction

Standardisasi Lelang yang Berkualitas Melalui Pembentukan Jabatan Fungsional Pelelang dan *Quality Assurance* Bagi Pejabat Lelang Kelas I

Quality Auction Standardization through Establishment of Functional Position of Auctioneer and Quality Assurance for Class I Auctioneers

Penyusunan standardisasi di bidang lelang menjadi sangat penting sebagai jaminan atas kualitas dari jasa pelayanan lelang yang diberikan serta untuk meningkatkan kepercayaan pengguna jasa lelang/*stakeholders*. Standardisasi dimaksud ditempuh dengan pembentukan Jabatan Fungsional Pelelang dan pelaksanaan *Quality Assurance* bagi Pejabat Lelang Kelas I.

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Standardisasi jabatan fungsional pejabat lelang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Lelang pada Kementerian Keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pelelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.06/2017 tentang Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang, Pejabat lelang pada DJKN menjadi Jabatan Fungsional Pelelang dengan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Selain pembentukan Jabatan Fungsional bagi Pejabat Lelang, Direktorat Lelang bersama dengan Sekretariat DJKN juga mengadakan *Quality Assurance* Pejabat Lelang Kelas I yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari s.d. 5 Maret 2017 di 8 (delapan) tempat. Peserta yang mengikuti *Quality Assurance* sebanyak 269 Pejabat Lelang Kelas I dengan hasil sebagai berikut:

The formulation of standardization in the auction sector is very important to provide a guarantee for the quality of the auction services and to increase the trust of the auction services users and the stakeholders. The standardization was achieved by the formation of Functional Position of Auctioneer and Quality Assurance for Class I Auctioneers.

A functional position is a group of positions embodying functions and tasks related to functional services based on certain skills and expertise. The standardization of functional auctioneers was set down to develop career and professionalism of Civil Servants who perform their duties as Auctioneers at the Ministry of Finance.

With the enactment of the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 43 of 2014 concerning the Functional Position of Auctioneer, and the Minister of Finance Regulation Number 38/PMK.06/2017 concerning the Technical Guidelines for Functional Position of Auctioneer, and the Minister of Finance Regulation Number 196/PMK.06/2017 concerning Standards of Competency and Implementation of Competency Test of Functional Position of Auctioneer, the auctioneers at DJKN become the Functional Position of Auctioneer with the scope of duties, responsibilities, and authority to carry out the sale of goods through auction.

In addition to the establishment of a Functional Position of Auctioneers, the Directorate of Auction and the Secretariat of DJKN also conducted Quality Assurance for Class I Auctioneers on February 25 to March 5, 2017, in 8 places. There were 268 Class I Auctioneers involved in this Quality Assurance, with the following results:

Perkembangan Lelang

Developments in Auction

- a. kompetensi Sangat Baik dengan nilai lebih dari 80 sebanyak 24 Pejabat Lelang;
 - b. kompetensi Baik dengan nilai 70 s.d. 80 sebanyak 82 Pejabat Lelang;
 - c. kompetensi Cukup dengan nilai 60 s.d. 69.9 sebanyak 97 Pejabat Lelang;
 - d. kompetensi yang perlu ditingkatkan dan kurang dengan Nilai 60 sebanyak 66 Pejabat Lelang.
- a. 24 Auctioneers achieved "Excellence" competency with a score above 80;
 - b. 82 Auctioneers achieved "Good" competency with a score of 70–80;
 - c. 97 Auctioneers achieved "Fair" competency with a score of 60 to 69.9;
 - d. 66 Auctioneers came up with a score below 60, signaling they are required to improve their competency.



Kegiatan *Quality Assurance* Pejabat Lelang Kelas I

Quality Assurance for Class I



Pekembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations



DJKN melakukan kerjasama dengan *online mainstream* yaitu detik.com dalam menyebarkan informasi mengenai tugas dan fungsi DJKN sekaligus menginformasikan kepada khalayak terkait Revaluasi BMN

DJKN collaborated with mainstream online media, detik.com, in disseminating information about the duties and functions of DJKN as well as informing the public about the implementation of BMN Revaluation

PERATURAN PERUNDANGAN

LAW AND REGULATION

1. Penetapan Peraturan

Sampai dengan Desember 2017, total revisi dan peraturan baru yang telah diterbitkan DJKN mencapai 44 peraturan, yang terdiri dari:

- 1) **Peraturan Menteri Keuangan (PMK)** sebanyak **18 (delapan belas)** peraturan, terdiri dari 3 (tiga) PMK di bidang Pengelolaan BMN, 5 (empat) PMK di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan, 6 (enam) PMK di bidang Lelang, 2 (dua) PMK di bidang PN dan KNL, dan 2 (dua) PMK di bidang Penilaian;
- 2) **Keputusan Menteri Keuangan (KMK)** yang bersifat kebijakan sebanyak **8 (delapan)** peraturan, terdiri dari 1 (satu) KMK di bidang Sekretariat, 3 (tiga) KMK bidang KND, 1 (satu) KMK di bidang Lelang, dan 3 (tiga) KMK di bidang PN dan KNL;
- 3) **Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen)** sebanyak **11 (sebelas)** peraturan, terdiri dari 2 (dua) Perdirjen di bidang Sekretariat, 1 (satu) di bidang pengelolaan BMN, 4 (empat) di bidang Lelang, 1 (satu) di bidang PN dan KNL, dan 3 (tiga) Perdirjen di bidang Penilaian;
- 4) **Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen)** yang bersifat kebijakan yang telah ditetapkan sebanyak **7 (tujuh)** peraturan, terdiri dari 1 (satu) Kepdirjen di bidang PN dan KNL, dan 6 (enam) Kepdirjen di bidang Penilaian.

2. Pemberian Analisis Hukum

Sampai dengan Desember 2017, analisis hukum baik secara lisan yang disampaikan dalam rapat maupun secara tertulis, terkait pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, lelang, dan kesekretariatan DJKN yaitu sebanyak **113 (seratus tiga belas)** analisis.

1. Formulating Regulations

As of December 2017, the total of 44 amendments and new regulations were issued by DJKN. They are:

- 1) 18 (eighteen) Minister of Finance Regulations (PMK), consisting of three PMK on BMN (State-Owned Asset) Management, five PMK on Restricted State Asset, six PMK in the of Auction, two PMK concerning State Claims and Other State Asset, and two PMK on Valuation;
- 2) 8 (eight) Minister of Finance Decrees (KMK) containing policy, consisting of one KMK on secretarial matters, three KMK on Restricted State Asset, one KMK related to Auction, and three KMK regarding State Claims and Other State Asset;
- 3) 11 (eleven) Director-General Regulations (Perdirjen), consisting of two Perdirjen addressing secretarial matters, one on BMN management, four on Auction field, one on State Claims and Other State Asset, and three Perdirjen about Valuation;
- 4) 7 (seven) Director-General Decrees (Kepdirjen) containing policy, consisting of one Kepdirjen in the field of State Claims and Other State Asset, and six Kepdirjen regarding Valuation..

2. Legal Analysis

As of December 2017, as many as 113 legal analysis related to the management of state assets, valuation, state claims, auctions, and DJKN secretarial matters were made, delivered both orally at meetings and in written statements.

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations

3. Pelaksanaan Seminar Peraturan Perundangan

Sebagai pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan hubungan masyarakat, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mengadakan seminar dengan tema ***"Transformasi Pengurusan Piutang Negara Menjadi Pengelolaan Piutang Negara Untuk Mewujudkan Tata Kelola Piutang Negara Yang Lebih Baik"***. Seminar diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2017 bertempat di Hotel Lumire Jakarta dengan dihadiri 70 orang peserta meliputi Kanwil DJKN beserta KPKNL di bawahnya, antara lain Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kanwil DJKN Banten, dan Kanwil DJKN Jawa Barat.

3. Seminar on Legislation

As the implementation of one of DJKN's duties and functions in providing technical guidance and evaluation in the field of legal affairs and public relations, the Directorate of Legal Affairs and Public Relations held a seminar with the theme ***"Transforming Administration of State Claims into Management of State Claims to Realize a Better State Claims Management"***. The seminar was held from 11 to 12 October 2017 at the Lumire Jakarta Hotel, attended by 70 participants from the Regional Offices and their subordinate service offices (KPKNL) including the Regional Office Jakarta, Regional Office Banten, and Regional Office West Java.

Dokumentasi seminar

Seminar documentation



Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut antara lain:

Speakers at the seminar were listed below:

No	Narasumber Sourceperson	Materi Subject Matter
1.	Mediya (Kasubdit Investasi Direktorat SMI DJPb)	Pengelolaan Pemberian Pinjaman Kepada BUMN/Pemda Management of Loans to SOEs/Local Governments
2.	Aceng Mahmud (Kasubdit KNL III DJKN)	Pengelolaan Aset Eks BPPN Oleh Menteri Keuangan Management of Ex-IBRA Assets by the Minister of Finance
3.	Dwinanto (Kasubdit Sistem Akuntansi Dit. APK DJPb)	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga Accounting System and State Claims Financial Reporting at State Ministries/Agencies
4.	Gunawan Wijaya, S.H.,M.H.,M.M. (Akademisi)	Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan Piutang Negara Optimizing State Claims Management

Kesimpulan dan rekomendasi yang didapatkan dalam pelaksanaan seminar antara lain:

- Bahwa sejatinya Direktorat PNKNL telah memulai proses transformasi pengurusan piutang negara menjadi pengelolaan piutang negara, namun hal tersebut perlu didukung dengan perangkat hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan piutang negara akan menjadi lebih terstruktur dan akuntabel.
- Perlu kiranya melakukan kajian yang mendalam terkait pengelolaan piutang mulai dari penatausahaan sampai dengan penghapusan sehingga menjadi *role model* bagi pengelolaan piutang negara di masa yang akan datang.
- Perlu adanya masukan dari pihak luar terkait pengurusan piutang negara yang dilakukan DJKN selama ini sehingga dapat menjadi perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan piutang negara.

This seminar produced a number of recommendations, including:

- The process of transforming state claims administration into state claims management currently conducted by the Directorate of PNKNL needs to be supported by legal instruments to arrive at a more structured and accountable state claims management.
- It is necessary to conduct an in-depth study related to the management of state claims from their administration to their disposal so that it becomes a role model for the management of state claims in the future.
- Input from external parties regarding the management of state claims carried out by DJKNi required to bring about more improvement to the implementation of state claims management.

4. Evaluasi Peraturan Perundangan di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan Humas dalam melaksanakan evaluasi peraturan perundangan, sepanjang tahun 2017 telah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang telah ditetapkan, agar dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif serta memperoleh hasil yang optimal. Pelaksanaan evaluasi peraturan perundangan tahun 2017 dibagi dalam 4 kategori, yaitu:

4. Evaluation of Laws and Regulations Regarding the Directorate-General of State Asset Management

Carrying out its duties and functions, throughout 2017, the Directorate of Legal Affairs and Public Relations conducted an evaluation of the existing Minister of Finance Regulations, Decrees of the Minister of Finance, and Circulars of the Director-General of State Asset Management so that they can be implemented efficiently and effectively to obtain optimal results. The analysis took aim at four categories of issues relating to the regulations, namely:

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations

- a. Peraturan yang bertentangan dengan peraturan lain.
- b. Peraturan yang tidak dapat diimplementasikan/tidak efektif dilaksanakan.
- c. Hal-hal yang perlu diatur namun belum tertampung dalam Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal, ataupun Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara.
- d. Peraturan yang multitafsir.

Masukan evaluasi disampaikan oleh Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), baik melalui surat maupun pembahasan langsung di beberapa kantor vertikal bersama dengan perwakilan dari Tim Evaluasi. Masukan evaluasi yang disampaikan kemudian dibahas bersama dengan seluruh anggota tim evaluasi, untuk kemudian menghasilkan suatu rekomendasi Tim Evaluasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai Laporan Tim, serta kepada Sekretariat DJKN dan Direktorat Teknis, untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tindak lanjut dimaksud dapat berupa penyempurnaan peraturan, sosialisasi, atau surat petunjuk kepada kantor vertikal.

Beberapa poin pembahasan yang menjadi *highlight* hasil evaluasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan yang bertentangan dengan peraturan lain, seperti:
 - 1) Ketidakselarasan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan lelang BMN dalam Pasal 17 ayat (1) PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN, mengatur paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan, sedangkan lampiran format dan bentuk Keputusan atau Surat Persetujuan pengelolaan BMN dalam PMK Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang mengatur paling lama 2 (dua) bulan. Hal tersebut berakibat permohonan lelang yang sudah lewat waktu 2 (dua) bulan ditolak karena klausul di surat persetujuan penjualan mensyaratkan pengajuan permohonan atas

- a. Regulations that conflict with other regulations.
- b. Regulations that can not be applied effectively.
- c. Issues need to be regulated but have yet to be addressed by Minister of Finance Regulation, Director-General Regulation, and Circular of the Director-General of State Asset Management.
- d. Multi-interpretative regulations.

Regional Offices and Service Offices (KPKNL) submitted their inputs, either through written letters or through face-to-face discussions with representatives from the Evaluation Team. The evaluation inputs submitted were then talked through with all members of the Evaluation Team. The team then came out with a team report made up of recommendations for the Director-General, the Secretariat of the DJKN, and the Technical Directorates, to be taken up in accordance with their respective duties and functions. The follow-ups may take their form in improved regulations, dissemination of regulations, or instructions to vertical offices.

Some discussion points deserve to be highlighted in the evaluation results, including the following:

- a. Regulations that conflict with other regulations, such as:
 - 1) Inconsistency in the provisions regarding the period of submission of BMN auction request. Article 17 Paragraph (1) of PMK Number 111/PMK.06/2016 concerning Procedures for Implementation of BMN Transfer demands a period of no later than 6 (six) months from the date of approval of the sale, whereas in its appendix, the PMK Number 4/PMK.06/2015 concerning Delegation of Specific Authority and Responsibility from Asset Managers to Asset Users regulates a maximum of 2 (two) months period. This results in the rejection of every auction request that has exceeded 2 (two) months as the clause in the sales approval letter requires that an auction request shall be completed in no later than 2 (two) months since the date of the approval letter. Thus, PMK 4/PMK.06/2015

pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini diterbitkan. Rekomendasi atas ketidakselarasan dimaksud, PMK 4/PMK.06/2015 perlu direvisi disesuaikan dengan peraturan pengelolaan BMN;

- 2) Dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Perdirjen Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang terkait kelengkapan dokumen Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, bahwa pemberitahuan kepada debitur tidak disyaratkan dalam kelengkapan dokumen lelang. Hal dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata menyatakan bahwa formalitas yang harus dipenuhi untuk syarat sahnya cession adalah penyerahan piutang tersebut diberitahukan secara tertulis diakui dan disetujui oleh debitur.

b. Peraturan yang tidak dapat diimplementasikan/tidak efektif dilaksanakan, seperti:

- 1) Pasal 21 PMK Nomor: 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, terkait sanksi berupa penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN dan pengembalian Surat Perintah Membayar. Sanksi dimaksud tidak terlalu berpengaruh terhadap satuan kerja yang tidak mendapat DIPA di tahun berjalan dan tidak dalam proses pengusulan pemanfaatan atau pemindahtanganan terutama untuk satuan kerja DK/TP. Adapun usulan atas sanksi yang tidak efektif dimaksud adalah berupa penundaan Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN dan/atau rekomendasi yang ditembuskan ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Eselon I K/L terkait untuk tidak memberikan anggaran kepada satuan kerja yang tidak melaksanakan rekon.

needs to be revised in accordance with the regulations on BMN management;

- 2) PMK Number 27/PMK.06/2017 concerning Guidance on Auction Implementation and Perdirjen Number 2/KN/2017 concerning Technical Guidance for Auction Implementation related to the document completeness for Execution Auction under Article 6 of UUHT, states that notification to debtors is not required in the completeness of auction documents. This above-mentioned matter doesn't comply with Article 613 of the Civil Code which states to be deemed as legal, cession requires that debtors are notified with written communication and that they acknowledged and approved cession (transfer of receivable).

b. Regulations that cannot be (effectively) implemented, such as:

- 1) Article 21 PMK Number: 69/PMK.06/2016 concerning Procedures for Reconciliation of State-Owned Assets in Preparing the Financial Reports of Central Government, related to sanctions in the form of delays in the settlement of the proposed utilization or transfer of BMN and the return of Payment Orders. The sanction does not significantly affect working units not receiving DIPA in the current year and the ones that are not in the process of proposing the utilization or transfer, especially for the DK/TP working units. The proposed replacement for ineffective sanctions is the delay in granting approval of Planning of BMN Needs and/or recommendations the copy of which is sent to the Direktorat-General of Budget and Echelon I of Ministries/Agencies in concern for not allocating a budget to working units that did not carry out reconciliation.

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations

- 2) PMK Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMN tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena belum tersedia sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga perlu segera dianggarkan pengadaan untuk setiap KPKNL/Kanwil.
 - 2) PMK No. 218/PMK.06/2015 concerning Procedures for Storage of Asset Ownership Documents cannot be implemented effectively since there are no available supporting facilities and infrastructure, meaning the procurement for each service office/regional office needs to be immediately budgeted.
- c. Hal-hal yang perlu diatur namun belum tertampung dalam peraturan yang telah diterbitkan, seperti:
- 1) Bahwa alur prosedur SOP tindak lanjut atas pengaduan masyarakat melalui Sekretaris Direktorat Jenderal belum tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 Tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.
 - 1) The SOP for the follow-ups on the public complaints through the Secretary-General of the Directorate-General has not been set out in the Decree of the Director General of State Asset Management No. 145/KN/2013 concerning Standard Operating Procedures for State Asset and Auction Service Office (KPKNL).
 - 2) Dalam PMK 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN, mengatur tentang jangka waktu sewa dihitung berdasarkan periodesitas sewa, baik jam, hari, bulan, maupun tahun. Namun belum mengatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri terkait sewa dengan periodesitas harian dan jam serta lebih rinci terkait tata caranya, termasuk cara pembayaran/teknis kontrak. Adapun usulan terhadap permasalahan dimaksud adalah pembayaran cukup menggunakan kwitansi saja untuk periodesitas harian dan jam.
 - 2) PMK 57/PMK.06/2016 concerning Procedures for Implementing Leases of State-Owned Asset stipulates that the lease period is calculated based on the rental period (in hours, days, months and years). However, the regulation has not yet regulated further regarding leases with daily and hourly periods, and has not yet arranged the details of the procedure, including the method of payment. In response to this problem, the recommendation proposed is payment using only receipts for daily and hourly periods.
- d. Peraturan yang multitafsir, seperti terkait SOP Kaji Ulang Laporan Penilaian, dalam SOP Kanwil DJKN mengenai kaji ulang laporan penilaian (SOP-10) disebutkan bahwa norma waktunya adalah 9 (sembilan) hari, namun tidak terdapat penjelasan apakah norma waktu tersebut untuk setiap laporan penilaian atau setiap surat sebagai pengantar laporan penilaian.
- d. Multi-interpretative regulations, such as those related to SOP for Review of Appraisal Reports. SOP of Regional Office of DJKN regarding review of Appraisal Report (SOP-10) has set down the time norm is 9 (nine) days, but there is no explanation of whether the time norms are for each appraisal report or for each cover letter of appraisal reports.

PENANGANAN PERKARA

CASE HANDLING

Perkembangan penanganan perkara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 di lingkungan DJKN berdasarkan laporan yang kami terima dari masing-masing KPKNL dan Kanwil seluruh Indonesia, sebagai berikut:

Based on the reports submitted by each KPKNL and Regional Office throughout the country, the progress of case handled up to Quarter IV of 2017 in the DJKN environment is as follows:

1. Jumlah Perkara

Jumlah perkara yang ditangani oleh DJKN sampai dengan triwulan IV Tahun 2017 secara kumulatif berjumlah **3.770 perkara**, yang terdiri dari:

- Perkara Peradilan Umum sebanyak 3.575 perkara;
- Perkara Tata Usaha Negara (TUN), Perkara di Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga dan Komisi Informasi sebanyak 195 perkara;

1. Total Case

Cumulatively, the number of cases handled by DJKN up to the fourth quarter of 2017 was 3,770, consisting of:

- 3,575 cases in Civil Courts;
- 195 cases in State Administrative Courts (TUN), Religious Courts, Commercial Courts, and Central Information Commission of the Republic of Indonesia;

Posisi Aktif Penanganan Perkara Perdata dan TUN s.d. Triwulan IV Tahun 2017

Active Civil Cases and State Administrative Cases up to Fourth Quarter of 2017

No	Nama Kantor Units	Jenis Peradilan Type of Court					Jumlah Total	Persen Percentage
		Peradilan Umum Civil Court	PTUN Materi	PA Religious Court	Niaga Commere cial Court	KI Central Informati on Commis sion		
1	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	1024	9	9	2	0	1044	27.69%
2	Kanwil DJKN Jawa Barat	561	29	6	0	0	596	15.81%
3	Kanwil DJKN Jawa Timur	542	25	9	1	1	578	15.33%
4	Kanwil DJKN DKI Jakarta	449	52	0	0	0	501	13.29%
5	Kanwil DJKN Sumatera Utara	390	17	1	0	0	408	10.82%
6	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	111	1	3	0	0	115	3.05%
7	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat	91	1	1	0	0	93	2.47%
8	Kanwil DJKN Banten	65	2	1	0	1	69	1.83%

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations

No	Nama Kantor Units	Jenis Peradilan Type of Court					Jumlah Total	Persen Percentage
		Peradilan Umum Civil Court	PTUN Materi	PA Religious Court	Niaga Commerc ial Court	KI Central Informati on Commiss ion		
9	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	57	2	2	8	0	69	1.83%
10	Kantor Pusat DJKN	54	7	0	0	0	61	1.62%
11	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	61	0	0	0	0	61	1.62%
12	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	44	0	1	0	0	45	1.19%
13	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	37	2	0	0	0	39	1.03%
14	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	22	1	1	0	0	24	0.64%
15	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	23	0	0	0	0	23	0.61%
16	Kanwil DJKN Aceh	20	0	0	0	0	20	0.53%
17	Kanwil DJKN Papua dan Maluku	13	0	0	0	0	13	0.34%
18	Kanwil DJKN Kalimantan Timur	11	0	0	0	0	11	0.29%
Jumlah Total		3675	148	34	11	2	3770	100%

2. Perkara Aktif

Jumlah perkara yang masih aktif ditangani KPKNL dan Kanwil secara keseluruhan sebanyak 3.770 perkara, dengan posisi sebagai berikut:

1) Perkara perdata

Jumlah perkara perdata sebanyak **3.575 perkara** dengan posisi perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) sebanyak 1.741 perkara (48,7%), tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) sebanyak 821 perkara (23%), tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak 917 perkara (25,6%), dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 96 perkara (2,7%).

2) Perkara TUN, Perkara di Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga dan Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Jumlah perkara TUN, Perkara di Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga dan Komisi Informasi sebanyak **195 perkara**, dengan posisi perkara tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga dan Komisi Informasi sebanyak 85 perkara (43,59%), tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)/Pengadilan Tinggi sebanyak 40 perkara (20,51%), tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak 55 perkara (28,2%), dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 15 perkara (7,7%).

3. Jenis Pokok Perkara

Jenis pokok perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan sebagai berikut:

2. Active Cases

The number of active cases handled by the KPKNL and the Regional Office was 3,770, with the following positions:

1) Civil Cases

The number of civil cases is 3,575, comprising 1,741 cases (48.7 %) in District Court (PN), 821 cases (23%) in appeal level filed with High Court (PT), as many as 917 cases (25.6 %) in cassation level filed with the Supreme Court (MA), and as many as 96 cases (2.7 %) in Judicial Review (PK) level.

2) Cases in State Administrative Court, Religious Court, Commercial Court, and Central Information Commission of the Republic of Indonesia.

The total number of cases in State Administrative Court, Religious Court, Commercial Court, and Central Information Commission of the Republic of Indonesia was 195, with 85 cases (43.59%) in the first level filed with State Administrative Court (PTUN), Religious Court, Commercial Court, and Central Information Commission of the Republic of Indonesia; 40 cases (20.51%) in appeal level filed with State Administrative High Court (PTTUN)/High Court, 55 cases (28.2%) in cassation level filed with the Supreme Court (MA), and 15 cases (7.7 %) in Judicial Review (PK) level.

3. Type of Case Subjects

Types of case subjects used as a basis for filing a lawsuit in the court are as follows:

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations

Jenis Pokok Perkara Peradilan Umum dan TUN s.d Triwulan IV 2017

Type of Case Subjects in Civil Courts and State Administrative Courts up to Fourth Quarter 2017

No	Bidang Tugas Field of Works	Jenis Pengadilan Type of Court		Jumlah Total	Persen Percentage
		Peradilan Umum Civil Court	TUN, PA, Niaga & KI State Administrative Court, Religious Court, Commercial Court, and Central Information Commission		
1	BMN/State-Owned Assets	19	4	23	0.61%
2	Kepegawaian/Civil Service Employment	0	0	0	0.00%
3	KNL/Other State Asset	21	1	22	0.58%
4	Lelang Aset Eks PPA/Auction of Ex-PPA Assets	18	2	20	0.53%
5	Lelang Aset Eks BDL/Auction of Assets of Liquidated Banks	10	0	10	0.27%
6	Lelang Eksekusi Harta Pailit/Auction of Bankruptcy Assets	39	6	45	1.19%
7	Lelang Eksekusi HT/Execution Auction under the Law of Security Rights	2728	90	2818	74.75%
8	Lelang Eksekusi PN/Judicial Sales	267	13	280	7.43%
9	Lelang Aset Eks BPPN/Auction of Ex-IBRA Assets	17	1	18	0.48%
10	Lelang Rampasan Kejaksaan/Auction of Assets Seized by Public Prosecutor	21	0	21	0.56%
11	Lelang Eksekusi PUPN/ PUPN Execution Auction	237	25	262	6.95%
12	Pengurusan Piutang Negara/State Claims Management	198	53	251	6.66%
Jumlah Total		3575	195	3770	100.00%

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar perkara DJKN merupakan **perkara terkait lelang** dengan akumulasi presentase sebesar **92,15%**, yang didominasi perkara terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sebanyak 2.818 perkara (74,75%), lelang eksekusi PN 280 perkara (7,43%), dan lelang eksekusi PUPN 262 perkara (6,95%). Perkara mengenai lelang eksekusi hak tanggungan pada umumnya digunakan untuk mendapat putusan provisionil/sela yang menunda pelaksanaan lelang maupun untuk memperoleh putusan pembatalan atas lelang yang telah dilaksanakan.

As shown on the table above, auction cases dominated the case subjects with percentage accumulation reaching 92.15%, which was dominated by cases related to the execution auction of security rights of 2,818 cases (74.75%), district court execution auction of 280 cases (7.43%), and PUPN execution auction of 262 cases (6.95%). Cases related to security rights execution auction are generally used to obtain court's provisional decision that postpones the auction or to obtain a court's decision on cancellation of the auction that has been carried out.

4. Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU), pendampingan terhadap pejabat/pegawai DJKN, penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat serta analisis hukum

Jumlah Surat Kuasa Khusus (SKU) yang diterbitkan sampai dengan Triwulan IV tahun 2017 sebanyak **1.184 SKU**. Terdapat kenaikan jumlah SKU yang diterbitkan pada tahun 2017 sebanyak 113 SKU dibandingkan jumlah SKU yang terbit pada tahun 2016, atau terjadi kenaikan sebesar 10,55%.

Untuk pendampingan terhadap pejabat/pegawai DJKN yang dipanggil oleh penyidik/penyelidik sebanyak **35 pendampingan**. Selain itu, selama tahun 2017 permohonan **bantuan hukum** terkait pelaksanaan sidang, pembuatan jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kembali sebanyak **132 kali**. Pemberian **pendapat hukum serta analisis hukum** yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang sebanyak **314 kali**.

4. Issuance of Special Power of Attorney (SKU), assistance to DJKN officials/employees, settlement of requests for legal assistance, opinions, and legal analysis.

Up to the fourth quarter of 2017, as many as 1,184 Special Power of Attorney (SKU) were issued—an increase of 10.55 % (113 SKUs) compared to that of 2016.

As for officials or employees of DJKN summoned by investigators, in 2017 DJKN provided 35 assistance. In addition, DJKN also handled a total of 132 requests for legal assistance related to the court proceedings including filing an answer, making counterclaims, offering of proof, making closing argument, and preparing counter-appeals. Moreover, DJKN also delivered 314 opinions relating to the management of state assets, valuation, state claims, and auction service.

5. Gugatan Perlawanan (derden verzet) selaku pengelola BMN

1) Perkara Sengketa Lahan Kampus UNRI

Kemendiknas c.q. Universitas Riau digugat oleh PT. Hasrat Tata Jaya berkaitan dengan proses pengadaan tanah area Kampus Universitas Riau pada tahun 1980. Pihak Penggugat menyatakan belum mendapat ganti rugi atas tanah miliknya yang telah dibebaskan untuk menjadi area kampus sehingga menuntut pengembalian tanah atau ganti rugi senilai Rp.36.981.000.000,-. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr jo., Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/Pdt/2009/PTR jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014K/PDT/2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 320 PK/Pdt/2012 pihak Kemendiknas/Universitas Riau dihukum untuk mengembalikan tanah atau ganti rugi.

5. Third-Party Opposition (derden verzet) as BMN Manager

1) Land Dispute Between the Ministry of National Education and PT Hasrat Tata Jaya
The Ministry of National Education, in this case, the University of Riau was sued by PT. Hasrat Tata Jaya for the acquisition of lands in 1980, the land upon which Riau University Campus built. The Plaintiff stated that it had not been compensated for the acquired land that now has become a campus area, and demanded either the return of land or compensation amounting to Rp.36,981,000,000. In the Pekanbaru District Court ruling Number 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr in conjunction with the Decision of the Pekanbaru High Court Number 32/Pdt/2009/PTR in conjunction with the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3014K/PDT/2009 in conjunction with the Supreme Court's Ruling Number 320 PK/Pdt/2012, the Ministry of National Education/University of Riau was sentenced to either return the land or to pay compensation.

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations

Atas permohonan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Kemenkeu RI Cq. DJKN kemudian mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku Pengelola Barang yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register perkara Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr. Dalam perkara tersebut amar putusan Majelis Hakim PN Pekanbaru menolak perlawanan Kemenkeu RI Cq. DJKN dan menyatakan bahwa DJKN merupakan Pelawan/Pembantah yang tidak benar.

Atas putusan tersebut DJKN mengajukan peninjauan kembali. Saat ini telah terbit putusan peninjauan kembali Nomor 349 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang amarnya:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016.

MENGADILI KEMBALI:

- Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah,
- Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang benar,
- Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr., juncto Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr., tanggal 9 April 2015.
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I (PT. Hasrat Tata Jaya) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000.00,-.
- Dengan demikian Kemenkeu RI Cq DJKN berhasil melakukan upaya perlawanan pihak ketiga atas perkara sengket lahan UNRI.

At the request of the Secretary-General of the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, in this case, DJKN as the Asset Manager then proposed a third-party resistance to the Decision of the Pekanbaru District Court, filing with the Pekanbaru District Court with case register Number 159/Pdt. Bth/2015/PN.Pbr. In the case, the verdict was ruling that the Panel of Judges of the Pekanbaru District Court rejected the Ministry of Finance, in this case, DJKN's third-party opposition and stated that DJKN is an unlawful appellee.

In response to the decision, DJKN filed a review. At this time, a judicial review decision No. 349 PK/Pdt/2017 was issued on July 18, 2017, which stated:

ADJUDGE:

- Granting appellant—the Government of the Republic of Indonesia, in this case, Ministry of Finance, and in this case Directorate General of State Asset Management's—request for filing a review;
- Vacating the Pekanbaru District Court Decision Number 159/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr dated March 10, 2016.

RE-ADJUDGE:

- Granting the appellee (defendant)'s merit brief
- Stating that appellee is the rightful appellee/defendant
- Vacating the Decision of Pekanbaru District Court Number 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr., Juncto Number 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr., Dated April 9, 2015.
- Punishing the appellant/respondent to Judicial Review (then-defendant I PT. Hasrat Tata Jaya) to pay the filing fee set at Rp. 2,500,000.00.
- Thus the Ministry of Finance, in this case, DJKN has succeeded in filing a third-party opposition related to UNRI land dispute.

2) Perkara Sengketa Tanah dan Bangunan KP2KP Tanjungbalai

- 1) KP2KP Tanjungbalai telah digugat oleh Tengku Thamrin dan Tengku Jalil dengan objek perkara berupa tanah berikut bangunan milik KP2KP Tanjungbalai yang terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 49 Tanjungbalai, dengan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 400/Pdt/2010/PT.Mdn jo Mahkamah Agung RI Nomor 2081/Pdt/2011 jo Peninjauan Kembali Nomor 406 PK/Pdt/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar mengalahkan pihak KP2KP Tanjung Balai.
- 2) DJKN telah mengajukan gugatan perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) di PN Tanjungbalai pada tanggal 20 Januari 2017 dengan register perkara Nomor: 5/Pdt.G/Plw/2017/PN.Tjb.
- 3) Putusan Majelis Hakim PN Tanjungbalai Nomor: 5/Pdt.Plw/2017/PN.Tjb yang dibacakan pada tanggal 4 Oktober 2017, pada intinya menolak perlawanan yang diajukan oleh Kemenkeu Cq. DJKN dengan pertimbangan bahwa DJKN tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang menguatkan dalil perlawanan DJKN. Atas putusan tersebut, Kemenkeu Cq. DJKN telah mengajukan banding pada tanggal 9 November 2017. Saat ini atas perkara tersebut sedang menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

2) Dispute over KP2KP Tanjungbalai's Land and Building

- 1) KP2KP Tanjungbalai was sued by Tengku Thamrin and Tengku Jalil over land and buildings owned by KP2KP Tanjungbalai located at Jalan Cokroaminoto Number 49 Tanjungbalai. The ruling of Tanjungbalai District Court Number 13/Pdt.G/2009/PN.TB in conjunction with that of North Sumatra High Court Number 400/Pdt/2010/PT.Mdn in conjunction with that of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2081/Pdt/2011 in conjunction with Judicial Review Number 406 PK/Pdt/2014, which already come with permanent legal force, granted appellants a victory over KP2KP Tanjung Balai.
- 2) DJKN has filed a third-party opposition (derden verzet) with Tanjungbalai District Court on January 20, 2017, with a case number: 5/Pdt.G/Plw/2017/PN.Tjb.
- 3) The Judgment of the Panel of Judges at Tanjung Balai District Court Number: 5/Pdt. Plw/2017/PN.Tjb which was read on October 4, 2017, essentially rejected the resistance filed by the Ministry of Finance, in this case, DJKN on the consideration that DJKN failed to show proof of land ownership to strengthen its argument. In response to this, the Ministry of Finance, in this case, DJKN has filed an appeal on November 9, 2017 with North Sumatra High Court.

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations

HUBUNGAN MASYARAKAT DAN LAYANAN INFORMASI

PUBLIC RELATIONS AND INFORMATION SERVICES

1. Website DJKN

Website DJKN www.djkn.kemenkeu.go.id dikelola oleh Direktorat Hukum dan Humas sebagai pengelola content dibantu oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sebagai pengelola jaringan dan aplikasi. Selain dikelola secara struktural oleh kedua direktorat tersebut, terdapat juga Tim Pengelola Website DJKN untuk memantapkan tugas pengelolaan website. Pada tahun 2017, statistik kunjungan pada website DJKN adalah sebagai berikut:

- 868.675** kunjungan website
Meningkat 20% dibandingkan tahun 2016 (723.901), dengan kunjungan rata-rata perhari 2.440 kunjungan.
- 388.295** user/pengguna website
Meningkat 19,25% dibandingkan tahun 2016 (326.152).
- 2.594.709** laman Dikunjungi
Meningkat sebesar 16,44% dari tahun 2016 (2.228.391).
- Durasi
Durasi rata-rata tiap kunjungan pada website DJKN adalah **3 Menit 07 Detik** dengan rata-rata membuka 3 laman pada tiap kunjungan.

2. Majalah Internal DJKN (Media Kekayaan Negara)

Pada tahun 2017, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat menerbitkan 3 (tiga) edisi Media Kekayaan Negara, yaitu:

1. DJKN Website

The DJKN website, www.djkn.kemenkeu.go.id, is managed by the Directorate of Legal Affairs and Public Relations as content manager, assisted by the Directorate of State Asset Management and Information Systems as network and application managers. Aside from being structurally managed by the two directorates, the site is also managed by DJKN Website Management Team, for a stronger website management. In 2017, the website's visitors traffic is as follows:

- 868.675 website visit
Grew by 20% compared to that of 2016 (723,901), with an average visit of 2,440 visits per day
- 388.295 of website user
Up 19.25% compared to that of 2016 (326,152).
- 2,594,709 pages visited
An increase of 16.44% from that of 2016 (2,228,391).
- Duration
The average duration of each visit on the DJKN website is three minutes and seven seconds with visitors opening an average of three pages per visit.

2. DJKN Internal Magazine (Media Kekayaan Negara)

In 2017, the Directorate of Legal Affairs and Public Relations issued three editions of Media Kekayaan Negara, namely:

No	Edisi Edition	Tema Theme	Content dan Rubrikasi Contents	Waktu Penerbitan Date of Publication
1.	No. 25 Tahun VII/2017	Kontribusi Pelaksanaan Lelang Terhadap Perekonomian Indonesia Contribution of Auctions to the Indonesian Economy	Kontribusi pelaksanaan lelang terhadap perekonomian Indonesia dan <i>extended Auction</i> sebagai masa depan lelang DJKN The contribution of the auction to the country's economy and extended auction as the future of DJKN auction.	April 2017 April 2017
2.	No. 26 Tahun VII/2017	Revaluasi Barang Milik Negara: Nilai Untuk Negeri BMN Revaluation: Value for the Country	Penilaian Kembali BMN sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi BMN dalam pembangunan nasional dan rancangan penilaian kembali BMN BMN Revaluation as an effort to increase BMN's contribution to national development and the planning of BMN revaluation	September 2017 September 2017
3.	No. 27 Tahun VII/2017	Optimalisasi Pemanfaatan BMN: Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara Optimization of BMN Utilization: Contributions to State Revenues	Optimalisasi pengelolaan aset negara untuk kesejahteraan rakyat serta laporan utama mengenai optimalisasi pemanfaatan BMN, potensi dan kontribusinya terhadap penerimaan negara Optimizing the management of state assets for the welfare of the people, the main report on the optimization of BMN utilization, BMN potential, and its contribution to state revenues	Desember 2017 December 2017

3. Publikasi Media dan Iklan Layanan Masyarakat

Pada tahun 2017 DJKN melakukan kerjasama dengan media *online mainstream* yaitu detik.com dalam menyebarluaskan informasi mengenai tugas dan fungsi DJKN sekaligus menginformasikan kepada khalayak terkait pelaksanaan Revaluasi BMN yang disajikan dalam bentuk berita maupun video sebagai iklan layanan bagi masyarakat.

3. Media Publications and Public Service Ads

In 2017 DJKN collaborated with mainstream online media, detik.com, in disseminating information about the duties and functions of DJKN as well as informing the public about the implementation of BMN Revaluation, presented in the form of news and video as a service advertisement for the community.

4. Siaran Pers/Keterangan Pers

Publikasi tugas dan fungsi DJKN dilakukan juga melalui siaran/keterangan pers. Informasi dan kegiatan yang berdampak nasional disampaikan dalam isian siaran/keterangan pers dan selama tahun 2017 Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN menerbitkan sebanyak 9 (sembilan) buah siaran/keterangan pers.

4. Press Release

The publication of the duties and functions of the DJKN is carried out also through press release. Information and activities with a national impact are conveyed through press release. In 2017, the Directorate of Legal Affairs and Public Relations published nine press statements.

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations

5. Sosial Media

Untuk lebih mengoptimalkan publikasi organisasi DJKN telah memiliki 4 akun sosial media yaitu *facebook*, *twitter*, *youtube* dan *instagram*.

a. *Facebook*

Facebook resmi DJKN dengan alamat <https://www.facebook.com/DitjenKekayaanNegara> masih menjadi sosial media yang aktif di kalangan internal dan eksternal DJKN. Sampai dengan 31 Desember 2017, akun *Facebook* DJKN sudah mendapatkan follower sebanyak **7.412**, artinya pada tahun 2017 terjadi penambahan *follower* baru laman *Facebook* DJKN dengan total mencapai 1.626.

b. *Twitter*

Twitter DJKN (@DitjenKN) pada tanggal 31 Desember 2017 mempunyai follower sebanyak **7.187**, pada tahun 2017 terjadi penambahan follower sebanyak 3.087.

c. *YouTube*

Video merupakan media yang cocok untuk sarana publikasi karena mengandung audio dan visual. *YouTube* DJKN (@ditjenkn) telah memposting total 105 video sampai dengan 31 Desember 2017. Terjadi penambahan *subscriber* sebanyak 258, sehingga total *subscriber* DJKN pada 31 Desember 2017 sebanyak **281 subscriber**.

d. *Instagram*

Akun *instagram* DJKN (@ditjenkn) adalah media publikasi foto-foto terkait tugas dan fungsi DJKN. Tren generasi muda akan foto saat ini menjadikan *instagram* digemari. Hal ini dimaksimalkan oleh Direktorat Hukum dan Humas DJKN sehingga *follower instagram* meningkat pesat dari 1.882 menjadi **6.467 follower**.

5. Social Media

To further optimize the publication of the DJKN organization, four social media accounts—Facebook, Twitter, YouTube and Instagram—are deployed.

a. *Facebook*

DJKN's Official Facebook account, <https://www.facebook.com/DitjenKekayaanNews> is still an active social media account accessed by internal and external circles of DJKN. As of December 31, 2017, DJKN's Facebook account has received as many as 7,412 followers, which also means that in 2017 alone, there was an addition of 1,626 new followers.

b. *Twitter*

DJKN's Twitter (@DitjenKN), as of December 31, 2017, had a total of 7,187 followers, with 3,087 followers started to follow in 2017 alone.

c. *YouTube*

Video is a suitable medium for publication since it contains audio and visual. Up until December 31, 2017, DJKN's YouTube account, (@ditjenkn) has posted a total of 105 videos. With an addition of 258 new subscribers in 2017, the total DJKN subscribers on December 31, 2017 was 281.

d. *Instagram*

DJKN's Instagram account (@ditjenkn) is a publication media of photographs related to the duties and functions of DJKN. Maximizing Instagram popularity among the young generation, the Directorate of Legal Affairs and Public Relations has this year gained a rapid increase in the number of Instagram followers, from 1,882 to 6,467 followers.

6. Event Kehumasan

Penyuluhan dan Publikasi yang dilakukan Humas DJKN pada tahun 2017 yaitu:

a. DJKN Goes to Campus, Visit DJKN dan Pameran

Generasi muda perlu mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan kekayaan negara. Untuk itu, DJKN masih melaksanakan kegiatan kunjungan dan juga menerima kunjungan dari universitas atau perguruan tinggi. Selain itu, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat memeriahkan beberapa pameran yang dijadikan sebagai sarana untuk mengenalkan tugas dan fungsi dari DJKN.

6. Public Relation Events

In 2017, DJKN conducted dissemination and publication activities, among others:

a. DJKN Goes to Campus, Visit DJKN, and Exhibitions

The younger generations need to get informed of the management of state asset. Meeting the need, DJKN maintains to get closer to them and to welcome their visits with open arms. In addition, the Directorate of Legal Affairs and Public Relations actively joins and livens up exhibitions to instill the duties and functions of DJKN among the public.

No	Nama Event Event	Peserta Participants	Tempat Venue	Tanggal Date
1	Goes to Campus IAIN Bukittinggi	Mahasiswa Student	IAIN Bukittinggi	18/04/2017
2	Goes to Campus Universitas Mataram	Mahasiswa Student	Universitas Mataram	27/04/2017
3	Goes to Campus Universitas Brawijaya	Mahasiswa Student	Universitas Brawijaya	04/05/2017
4	Dies Natalis PKN STAN	Mahasiswa Student	PKN STAN	17/07/2017
5	Visit DJKN Universitas Ibnu Khaldun	Mahasiswa Student	Aula Kantor Pusat DJKN	27/07/2017
6	Visit DJKN Politeknik Negeri Bandung	Mahasiswa Student	Aula Kanwil DJKN DKI Jakarta	31/08/2017
7	Visit DJKN Politeknik Negeri Jakarta	Mahasiswa Student	Aula Kantor Pusat DJKN	15/11/2017
8	Pameran Humas & Layanan Publik Ekspo	Umum Public	Palembang Sport and Convention Center	21-23/11/2017
9	Pameran Hari Anti Korupsi Sedunia	Umum Public	Hotel Bidakara, Jakarta	11/12/2017

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Legal Affairs and Public Relations



Dokumentasi Kegiatan
Activities Documentation

b. Seminar Nasional

Pada tahun 2017, DJKN berkolaborasi dengan DJPPR dan DJPb menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema **"Sinergi Manajemen Aset, Treasury, dan Pembiayaan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia"**. Seminar yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-71 ini dimoderatori oleh presenter yang juga merupakan pemimpin redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dengan narasumber yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, KPPIP, Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Direktur LMAN, dan Direktur Utama PT. SMI.

b. National Seminar

In collaboration with the DJPPR and DJPb, in 2017, DJKN held a National Seminar with the theme "Synergy of Asset Management, Treasury, and Financing to Accelerate Indonesian Infrastructure Development". The seminar which was also organized to commemorate the 71st Indonesia Banknote Day (Hari Oeang) was moderated by presenters-cum-chief editors of Kompas TV, Rosianna Silalahi. A range of director-generals and officials were present as speakers, namely the Director-General of State Asset Management, Director-General of Treasury, Director-General of Financing and Risk Management, KPPIP, Deputy for Facilities and Infrastructure of Bappenas, Director-General of Construction Development of the Ministry of Public Works and Public Housing, Director of LMAN, and President Director of PT. SMI



Dokumentasi Seminar
Seminar Documentation

7. Layanan Informasi

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*, Humas DJKN melaksanakan layanan informasi melalui 2 saluran yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) serta *Information Desk* dan *Call Center* (IDCC).

1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menuntut pemerintah untuk menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat. PPID adalah bukti keseriusan pemerintah terhadap segala permohonan informasi.

PPID mempunyai kewajiban untuk membalas seluruh permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja yang dapat diperpanjang 7 hari kerja. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak dipenuhi, PPID suatu instansi dapat dikenai sanksi pidana.

7. Information Service

In order to provide excellent service to stakeholders, DJKN maintains information services through two channels, namely Information and Documentation Management Officer (PPID) and Information Desk and Call Center (IDCC).

1) Information and Documentation Management Officer (PPID)

The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure requires that the government follows up on the public's requests for information. And PPID serves as a proof of the government's seriousness in this matter.

PPID is obliged to reply to all information requests within 10 working days which can be extended to 7 more working days. Shall the requests are not fulfilled during the time limit, the PPID of an agency may be subject to criminal sanctions.

Perkembangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

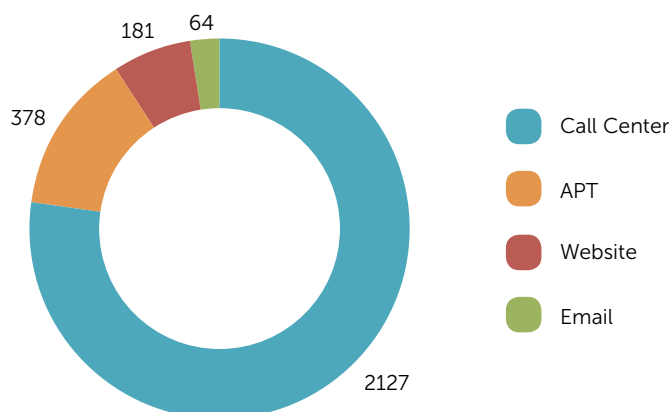
Legal Affairs and Public Relations

PPID DJKN menerima **31 permohonan informasi publik**. Dari permohonan tersebut, 9 (sembilan) permohonan dipenuhi seluruhnya, dan 22 (dua puluh dua) permohonan ditolak dengan rincian 10 (sepuluh) permohonan ditolak karena termasuk informasi yang dikecualikan, 7 (tujuh) permohonan ditolak karena informasi belum dikuasai/selesai, serta 5 (lima) permohonan ditolak karena sebab lainnya.

DJKN's PPID received 31 requests for public information. Of the total requests, 9 requests were granted entirely, and 22 requests were rejected for asking for excluded information (10 requests), incompleteness of the information being requested (7 requests), and other reasons (5 requests).

2) *Information Desk dan Call Center (IDCC) DJKN*
IDCC (*Information Desk and Call Center*) DJKN adalah layanan *one stop service* yg memberikan layanan informasi tentang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang kepada *stakeholder* (internal dan eksternal DJKN), dan sekaligus mendukung proses reformasi birokrasi.

2) DJKN's Information Desk and Call Center (IDCC) Information Desk and Call Center (IDCC) is a one-stop service that provides shareholders (internal and external of DJKN) with information on state asset management, valuation, state claims, and auctions, and simultaneously supports the bureaucratic reform process



Jenis layanan IDCC yang diberikan meliputi: Area Pelayanan Terpadu (APT); call center yang meliputi pemberian informasi melalui telepon 1-500-991; Internet melalui laman <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/idcc/>, dan e-mail berupa pemberian informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan penilaian melalui idcc_djkn@kemenkeu.go.id.

The types of service provided by IDCC include Integrated Service Areas (APT); call center providing information through landline phone 1-500-991; Website, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/idcc/>; information on state assets, state claims, auction, and valuation by replying inquiries sent to idcc_djkn@kemenkeu.go.id.

Pada tahun 2017 IDCC DJKN menerima total **2.750 permohonan layanan informasi**. Adapun rincian jumlah layanan informasi melalui IDCC DJKN selama tahun 2017 dapat dilihat pada diagram di atas.

In 2017 DJKN's IDCC received a total of 2,750 requests for information services. Above is the diagram showing the details of the number of information services provided by DJKN's IDCC in 2017.

8. Layanan Perpustakaan

Humas DJKN juga memberikan layanan kepada pemustaka. Koleksi buku sebanyak **1.547 buku** tertata rapi di lantai 7. Pada tahun 2017, Perpustakaan DJKN bekerja sama dengan PMO pada saat Pekan Transformasi menyelenggarakan **bedah buku** dari salah satu novelis terkenal, yaitu Ika Natassa, yang berjudul ***The Architecture of Love***. Ika Natassa berbagi spirit kepada para hadirin dalam menjalani kehidupan agar senantiasa menerapkan prinsip *work-life balance*.

8. Library Services

A collection of 1,547 books is neatly arranged on the 7th floor of DJKN office building. In 2017, the DJKN Library, collaborated with the PMO, held a book review program during Pekan Transformasi event, inviting a famous novelist, Ika Natassa. Natassa who wrote *The Architecture of Love* shared her spirit and work-life balance principle with the audiences.

Daftar Isi
Table of Content

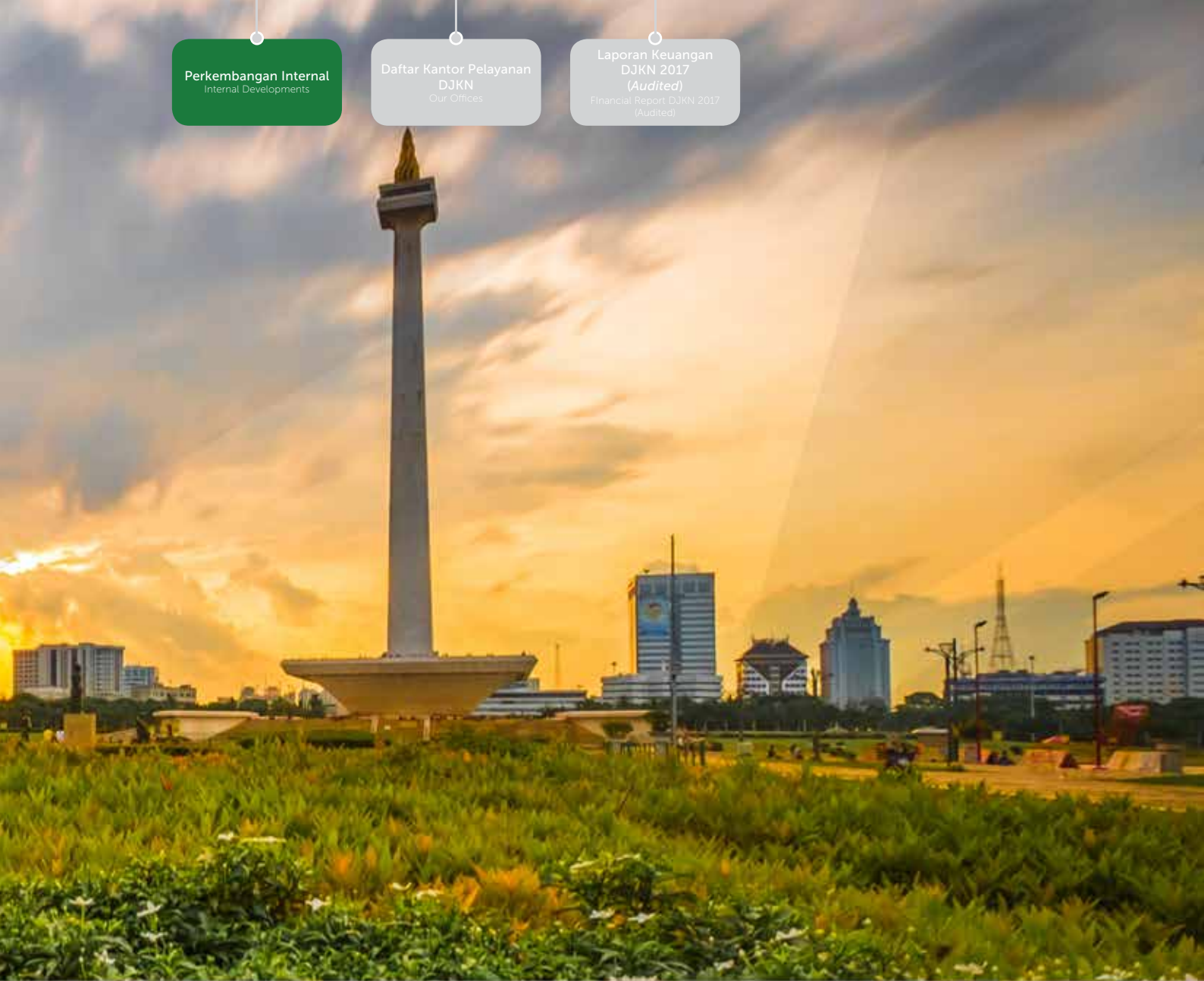
Kilas Kinerja
Performance at A Glance

Profil DJKN
DJKN Profile

Perkembangan
Pengelolaan Kekayaan
Negara
Developments in
State Asset Management

Perkembangan Internal

Internal Developments



Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

Service

We provide services that meet the satisfaction of stakeholders and we do it wholeheartedly, transparently, immediately, accurately and securely.

Perkembangan Internal

Internal Developments

Melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) DJKN, pelaporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan sepanjang tahun 2017 adalah 10 (sepuluh) pelaporandengan jumlah nilai perkiraan sebesar Rp 5,55 juta dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Through the DJKN's UPG (Gratification Control Unit), throughout 2017 ten gratification reports with a total estimated value of Rp 5.55 million were fled, and have been followed up in accordance with applicable provisions



Penyusunan Peta dan Proses Bisnis

Developing Map and Business Process

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN kembali menyempurnakan SOP-SOP yang telah ada dan menyusun SOP-SOP baru sebagai akibat dari penetapan sejumlah peraturan baru dan adanya rekomendasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh aparaturnya fungsional.

Selama tahun 2015-2016, DJKN telah menetapkan 8 SOP Co-location (Kepdirjen No. 328/KN/2015), Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kepdirjen No. 398/KN/2016), Kepdirjen tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kepdirjen No. 273/KN/2016).

Adapun pada tahun 2017, DJKN telah menetapkan sejumlah SOP sebagai upaya perbaikan proses internal dan sebagai penjaminan kualitas atas prosedur yang berlaku. SOP yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2017 adalah:

1. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 243/KN/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan. Keputusan direktur jenderal ini mencabut penetapan sebelumnya pada Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 124/KN/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 379/KN/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 Tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang. Perubahan yang ditetapkan adalah terkait proses bisnis pengelolaan kekayaan negara dan pelayanan penilaian.

With the enactment of Minister of Finance Regulation No. 131/PMK.01/2015 on Guidelines for the Preparation of Business Processes, Decision-Making Frameworks and Standard Operational Procedures within the Ministry of Finance, DJKN again refined the existing SOPs and set out new SOPs following the stipulation of a number of new regulations and the recommendation for Standard Operating Procedures (SOP) formulation by functional supervisory apparatus.

During 2015-2016, DJKN established 8 Co-location SOPs (Kepdirjen No. 328/KN/2015), Business Process Map of Directorate General of State Assets Management (Kepdirjen No. 398/KN/2016), Kepdirjen on Guidance for Standard of Quality Improvement of SOPs Implementation for Service Excellence within the Directorate General of State Assets Management (Kepdirjen No. 273/KN/2016).

In 2017, DJKN has developed a number of SOPs as an effort to improve internal processes and as a quality assurance of applicable procedures. The SOPs established in 2017 were:

1. Decree of the Director-General of State Asset Management No. 243/KN/2017 on Standard Operating Procedures of the Directorate of Separated State Assets. This decree revoked the previous stipulation in the Decree of the Director-General of State Asset Management No. 124/KN/2012 on the Standard Operating Procedures of the Directorate of Separated State Assets.
2. Decree of the Director-General of State Asset Management No. 379/KN/2017 concerning Amendment to Decision of the Director-General of State Asset Management No. 145/KN/2013 concerning Standard Operating Procedures of the State Asset and Auction Service Offices. The new decree altered the previous business process of state asset management and valuation services.

Perkembangan Internal

Internal Developments

- Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 379/KN/2017 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 129/KN/2012 Tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Direktorat Barang Milik Negara. Perubahan yang dilakukan adalah dengan menambahkan proses bisnis terkait perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara.

Selain itu, DJKN juga masih menyusun konsep proses bisnis sebagai turunan dari proses bisnis level 0 yang telah ditetapkan melalui Kepdirjen No. 398/KN/2016. Pembahasan melibatkan seluruh unit teknis DJKN. Sejalan dengan hal tersebut, penyempurnaan SOP juga terus dilaksanakan antara lain SOP terkait pelayanan lelang, pelayanan penilaian, serta SOP pengelolaan administrasi internal DJKN.

Penyusunan proses bisnis yang dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, diarahkan untuk:

- menghasilkan proses bisnis yang akuntabel, transparan, cepat, dan ringkas;
- memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan melalui analisis dan evaluasi jabatan; dan
- memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui analisis beban kerja.

- Decree of the Director-General of State Asset Management No. 379/KN/2017 on Amendment to Decree of Director-General of Asset Management Number 129/KN/2012 concerning Standard Operating Procedures of the Directorate of State-Owned Asset. Changes were made by adding business processes related to the planning of State-Owned Asset Need.

In addition, DJKN has been preparing the concept of a business process as a derivation from business process level 0 established through Kepdirjen No. 398/KN/2016. The discussion involved all DJKN technical units. Along with this, a continuous improvement of SOP was also taken, including SOP related to auction service, valuation service, and the management of DJKN's internal administration.

The preparation of the above-mentioned business process was directed to: a) produce accountable, transparent, quick, and concise business processes; b) obtain a detailed description of the tasks performed by each position through position analysis and evaluation; and c) obtain information, by means of workload analysis, on the time and number of officials required to perform a job.

Analisis Beban Kerja

Workload Analysis

Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan salah satu kegiatan dalam rangka perbaikan proses bisnis yang merupakan salah satu pilar reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. ABK dapat dijadikan suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya yang meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan maupun dari segi pengelolaan sumber daya manusia.

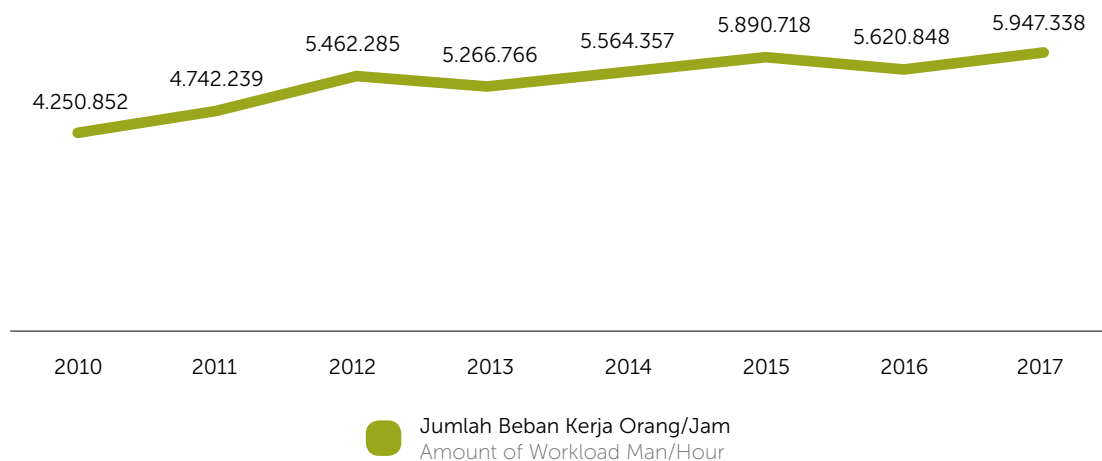
Workload Analysis is one of the business process improvement activities which is one of the pillars of bureaucratic reform within the Ministry of Finance. This analysis can serve as a benchmark for the employees or organizational units to improve their productivity and their measures that enhance the guidance, improvement and empowerment of the state apparatus both in terms of institutional and in terms of human resource management.

Pengukuran beban kerja Kementerian Keuangan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (*Workload Analysis*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Analisis Beban Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal kekayaan Negara telah dilakukan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan adalah data tahun sebelumnya. Jika sebelumnya ABK dilakukan secara sampel pada sebagian unit di lingkungan DJKN, maka sejak tahun 2011 perhitungan Analisis Beban Kerja telah dilakukan secara populasi pada semua unit organisasi di lingkungan DJKN, meliputi 8 unit eselon II Kantor Pusat, 17 Kantor Wilayah (Kanwil) dan 70 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Berdasarkan hasil pengolahan data, beban kerja DJKN secara keseluruhan pada tahun 2017 mengalami peningkatan beban kerja sebesar 5,8%. Grafik perkembangan beban kerja DJKN dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Measurement of workload in the Ministry of Finance is made by referring to the Regulation of the Minister of Finance Number 175/PMK.01/2016 on the Guidelines for Implementation of Workload Analysis in the Ministry of Finance Environment. Workload Analysis within the Directorate General of State assets has been conducted since 2008 until now, using and processing data from the previous year. While the previous analysis was conducted by sampling method in some units within DJKN, since 2011 the measurement of Workload Analysis has been carried using the entire population in all organizational units within DJKN, covering 8 echelon II units at Head Office, 17 Regional Offices and 70 State Asset and Auction Service Offices (KPKNL).

The results of data processing show the overall DJKN workload in 2017 increased by 5.8%. DJKN workload changes can be observed in the following figure.



Perkembangan Internal

Internal Developments

Secara agregat beban kerja DJKN adalah 5.947.338 orang jam, Efisiensi kerja Unit (EU.1) sebesar 1,12 dan Efektivitas kerja Unit (EU.2) sebesar 98,44%. Dengan beban kerja tersebut, DJKN membutuhkan pegawai sebanyak 4.104 orang, sehingga dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 3.598 orang, maka DJKN masih membutuhkan 506 pegawai. Rincian beban kerja dan kebutuhan pejabat/pegawai setiap unit dapat dilihat sebagaimana berikut:

In total, DJKN workload is 5,947,338 person hours, work efficiency unit (EU.1) equal to 1,12 and work effectiveness unit (EU.2) equal to 98,44%. With this workload, DJKN requires 4,104 employees. That is, with existing employees of 3.598, DJKN still needs 506 more employees. Details of workload and the needs of officials/employees of each unit can be seen as follows.

No	Nama Unit Organisasi Unit of Organization	Jml. Beban kerja Unit Unit Workload	Jumlah Kebutuhan Pegawai Employee Need	Jumlah Pegawai yg Ada Existing Employees	+/-	EU.1	EU.2
1	Kantor Pusat Head Office	991.381,68	706	582	-124	1,13	97,0%
2	Kantor Wilayah Regional Offices	1.279.345,97	864	840	-24	1,04	99,0%
3	KPKNL Service Offices	3.676.610,18	2.534	2.176	-358	1,14	99,4%
Jumlah Total		5.947.337,83	4.104	3.598	-506	1,10	98,44%

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Bureaucratic Reform and Institutional Transformation

Reformasi Birokrasi (RB) yang dipelopori Kementerian Keuangan telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk melanjutkan dan memperdalam proses Reformasi Birokrasi melalui program Transformasi Kelembagaan (TK) Kementerian Keuangan. Program tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025. Berdasarkan blueprint Transformasi Kelembagaan, terdapat 9 inisiatif yang terkait dengan DJKN yaitu 6 inisiatif di bidang *Asset Management* dan 3 inisiatif di bidang *Special Mission*.

Bureaucratic Reform (RB) pioneered by the Ministry of Finance has laid a solid foundation for continuing and deepening the process of Bureaucratic Reform through the Institutional Transformation program of the Ministry of Finance. The program was set forth in the Minister of Finance Decree Number 36/KMK.01/2014 on the Institutional Transformation Blueprint of the Ministry of Finance of 2014-2025. Based on this blueprint, there are 9 initiatives related to DJKN, consisting of 6 initiatives in the field of *Asset Management* and 3 *Special Mission* initiatives.

Perkembangan pada Inisiatif Strategis (IS) Program Transformasi Kelembagaan (TK) menjadi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) arahan Menteri Keuangan pada *Steering Committee* dan *Leaders Offsite Meeting* Kementerian Keuangan tahun 2016 adalah dilakukannya reformulasi terhadap 87 Inisiatif Strategis program TK menjadi IS program RBTK. Pengawasan Inisiatif Strategis yang sifatnya operasional/rutin dilakukan oleh *Project Management Office* (PMO) masing-masing unit Eselon I, sedangkan pengawasan IS yang strategis dan lintas unit Eselon I akan dilakukan oleh *Central Transformation Office* (CTO).

Selain itu, Menteri Keuangan juga memberi arahan untuk membuat inisiatif baru yang menampung dua aspirasi utama yakni, bersifat terobosan nasional, berorientasi *outcome* dan akuntabel serta dalam pengawasan Menteri Keuangan hingga 2018. Sehubungan dengan arahan perumusan IS RBTK baru, DJKN yang masih tergabung dalam tema Perbendaharaan memiliki IS baru yakni:

- IS RBTK Nomor 14, "Pemberdayaan Aset Untuk Mendorong Perekonomian Nasional" dengan tujuan melakukan pemberdayaan aset baik BMN maupun aset BUN untuk mendorong perekonomian nasional. *Outcome* yang diharapkan dari inisiatif ini adalah DJKN dapat melakukan optimalisasi aset secara penuh dan menjalankan perannya sebagai manajer aset sekaligus berperan serta dalam membangun perekonomian nasional.
- IS RBTK Nomor 15, "Optimalisasi Aset Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan" dengan tujuan mendorong pembiayaan pembangunan nasional melalui optimalisasi investasi pemerintah. *Outcome* yang hendak dicapai adalah untuk mengurangi *exposure* APBN dalam pembiayaan pembangunan dan meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari investasi pemerintah.

Di tahun 2017, Capaian Inisiatif Strategis 14 "Pemberdayaan Aset Untuk Mendorong Perekonomian Nasional" adalah sebagai berikut.

Along with the developments of the Strategic Initiative (IS) of the Institutional Transformation (TK) Program to the Bureaucratic Reform and Institutional Transformation (RBTK) Program in line with the directives of the Minister of Finance during the Steering Committee and Leadership Offsite Meeting of the Ministry of Finance in 2016, as many as 87 Strategic Initiatives on the TK Program was reformulated into IS of RBTK program. Supervision on Strategic Initiatives that are operational/routine are performed by the Project Management Office (PMO) in each Echelon I unit, while the supervision of strategic and cross-echelon I units will be conducted by the Central Transformation Office (CTO).

In addition, the Minister of Finance also gave directives to create new initiatives that accommodate two main aspirations namely, national breakthrough, outcome oriented and accountable and within the supervision of the Minister of Finance until 2018. In line with the directives of the formulation of the new IS RBTK, DJKN which is grouped in the theme of the Treasury has new initiatives. They are:

- IS RBTK No. 14, "Asset Empowerment to Encourage the National Economy" with the aim of empowering assets, both BMN and BUN, to boost the national economy. The expected outcome of this initiative is that DJKN can fully optimize state asset and perform its role as asset manager while participating in developing the national economy.
- IS RBTK No. 15, "Optimizing Government Assets to Support Sustainable Development" with the aim of advancing the financing of national development through the optimization of government investment. The outcome to be achieved is to reduce State Budget's exposure in development financing and to increase state revenues from government investment.

In 2017, the Achievement of the Strategic Initiative 14 "Asset Empowerment to Encourage the National Economy" is as follows.

Perkembangan Internal

Internal Developments

No	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Capaian Achievements
1	Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Negara. Inventorization and Administration of State Asset.	Pelaksanaan Revaluasi Aset BMN Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan hasil: • Capaian nasional sebesar 102,34% (Realisasi 365.242 NUP dari target 356.888 NUP) • Kenaikan nilai BMN Tahun 2017 sebesar Rp1.821 Triliun atau sebesar 271,3% (dari nilai buku sebesar Rp678 Triliun menjadi nilai wajar sebesar Rp 2.499 triliun) BMN Revaluation in 2017 has been implemented, with results as follows: • National achievement of 102.34% (Realization: 365,242 NUP, target: 356,888 NUP) • The increase in BMN value in 2017 amounted to Rp1,821 trillion or 271.3% (from book value of Rp 678 trillion to fair value of Rp 2,499 trillions)
2	Mekanisme Perencanaan Kebutuhan BMN dan Efisiensi Penganggaran Belanja Modal Mechanism of Planning of State-Owned Asset Need and Efficiency of Capital Expenditure Budgeting	Terbitnya PMK 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L yang disebutkan bahwa untuk pengadaan BMN, berpedoman pada dokumen hasil penelaahan RKBMN K/L dengan DJKN. Issuance of PMK 163/PMK.02/2016 on Guidelines for the Preparation and Review of Work Plan and Budget of Ministries/Agencies which stated that BMN procurement shall be based on document of review of RKBMN K/L with DJKN.
3	IT Based dalam Pengelolaan Aset IT-Based in Asset Management	Penyempurnaan SIMAN dengan mengembangkan modul perencanaan, pengawasan dan pengendalian dan pengembangan analis data belanja modal dan PNBPN berdasarkan interkoneksi data SIMAN dengan SPAN. Improvement of SIMAN by developing planning module, supervision and control and development of data analyst of capital expenditure and PNBPN based on data interconnection between SIMAN and SPAN
4	Optimalisasi aset melalui Capaian IKU Asset Optimization through IKU Achievements	• Utilisasi aset sebesar 81,63% di Q4 2017 (dari target 70%) • Manfaat ekonomi/PNBPN sebesar Rp1.041,35 M di Q4 2017 (dari target Rp. 700 M) • Kontribusi lahan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebanyak 27 ruas tol (Trans Jawa, Trans Sumatera, Tol Jabodetabek dan ruas lainnya) • Asset utilization of 81.63% in Q4 2017 (target: 70%) • Economic benefits/PNBPN of Rp 1,041,35 billion in Q4 2017 (from target Rp 700 billion) • Contribution of lands for National Strategic Project (PSN) of 27 toll roads (Trans Java, Trans Sumatera, Jabodetabek Toll and other segments)

Sedangkan Capaian Inisiatif Strategis 15 “Optimalisasi Investasi Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan” sebagai berikut:

While the achievements of the Strategic Initiative 15 “Optimizing Government Investment to Support Sustainable Development” is as follows:

No	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Capaian Achievements
1	Forum Penyelarasan Pembiayaan Proyek Forum for Project Financing Alignment	Pelaksanaan sinkronisasi dilakukan melalui rapat secara periodik minimal 3 bulanan. Tahun 2017, telah dilakukan penyelarasan pembiayaan proyek untuk proyek LRT PT KAI dan alokasi pengadaan tanah LMAN. Implementation of synchronization is done through periodic meeting, at least quarterly. In 2017, project financing alignment has been carried out for PT KAI's LRT project and LMAN's land acquisition allocation.
2	Kajian Optimalisasi Potensi Pendanaan Pembangunan Study of Optimization of Development Funding Potential	Pelaksanaan evaluasi pendanaan pembangunan dan <i>leveraging</i> BUMN telah dilaporkan kepada Menkeu sebagai paparan dalam Rakor Komisi XI DPR RI. Selanjutnya akan dilakukan monitoring secara triwulan untuk memantau kinerja PMN baik dari sisi realisasi, kemampuan pemanfaatan (<i>leverage</i>) dan kinerja BUMN dalam menjalankan misi pembangunan. Implementation of the development funding evaluation leveraging of SOEs has been reported to the Minister of Finance as a presentation during the Coordinating Meeting of Commission XI of the Legislature. Furthermore, monitors will be conducted on a quarterly basis to oversee the performance of PMN in terms of realization, leverage, and performance of SOEs in carrying out development missions.
3	<i>Interkoneksi Data BUMN</i> Interconnection of SOEs Data	Interkoneksi data keuangan dan non keuangan untuk BUMN di bawah Kemenkeu telah dilaksanakan. The interconnection of financial and nonfinancial data for SOEs under the Minister of Finance has been implemented..
4	Kajian Pembentukan LPPI Study on the Establishment of LPPI	RUU LPPI telah masuk dalam cadangan Prolegnas Tahun 2018 The Bill on LPPI has been kept in reserve for 2018's Prolegnas (National Legislation Program)
5	<i>Holding BUMN</i> Holding SOEs	Terbentuknya <i>holding</i> sektor Pertambangan melalui PP Nomor 47 Tahun 2017 Establishment of holding SOE in Mining sector through Government Regulation Number 47 Of 2017
6	Monitoring Efektivitas Investasi Pemerintah Monitoring of Government Investment Effectiveness	Rapat monitoring realisasi penggunaan dana PMN sebanyak tiga kali pada bulan Maret, Oktober, dan November yang dipimpin oleh Wamenkeu dengan melibatkan Kementerian BUMN dan BUMN penerima PMN. Selanjutnya, rapat dimaksud akan dilaksanakan secara triwulanan. Monitoring meeting on the use of funds for PMN held three times in March, October, and November led by Vice Minister of Finance involving the Ministry of SOEs and SOEs receiving PMN. Subsequent meetings will be held on a quarterly basis..

Perkembangan Internal

Internal Developments

No	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Capaian Achievements
7	Capaian IKU Key Performance Indicator (KPI) Achievements	- Manfaat ekonomi/PNBP dari penerimaan dividen sebesar Rp788.51 M di Q4 2017 (dari target Rp 716 M) - Penurunan persentase dukungan pemerintah terhadap pembiayaan pembangunan 17% pada APBNP 2016 (untuk proyek-proyek di tahun 2017, menjadi 7% pada APBNP 2017 (untuk proyek-proyek di tahun 2018) - Economic benefits/PNBP from dividend receipts of Rp788.51 M in Q4 2017 (from target of Rp 716 million) - Decrease in percentage of government support for development financing, from 17% in APBNP 2016 (for projects in 2017), to 7% in APBNP 2017 (for projects in 2018).

Pengelolaan Kinerja

Performance Management

Kegiatan di bidang pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2017
Penandatanganan kontrak kinerja tahun 2017 di lingkungan DJKN telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017;
 - 2) Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* untuk pejabat eselon II telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2017; dan
 - 3) Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* s.d. Kemenkeu *Five* pada Kantor Pusat, Kanwil, dan KPKNL telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2017.
- b. *Monitoring* dan Evaluasi Capaian Kinerja Kemenkeu-*One* 2017
Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-*One* tahun 2017 dilaksanakan secara rutin setiap triwulan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO). DKO dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan dihadiri oleh seluruh pimpinan unit eselon I, atasan langsung manajer kinerja, dan manajer kinerja unit eselon I. Agenda

The activities in the field of performance management that have been implemented during 2017 are as follows.

- a. Signing of 2017 Performance Contracts
The signing of performance contracts for 2017 in DJKN environments has been implemented as follows:
 - 1) Kemenkeu-*One* Performance Contract, January 27, 2017;
 - 2) Kemenkeu-*Two* Performance Contract for echelon II officials, 31 January 2017; and
 - 3) Kemenkeu-*Three* up to Kemenkeu-*Five*, at the Head Office, Regional Offices, and KPKNLs, January 31, 2017.
- b. Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Kemenkeu-*One* 2017
Implementation of monitoring and evaluation of performance achievement of Kemenkeu-*One* in 2017 was carried out regularly every quarter through the Organizational Performance Dialogue (DKO). The DKO is led by the Minister of Finance in the presence of all heads of echelon I units, direct superior of performance manager,

pembahasan meliputi evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-One, *progress* pencapaian insiatif strategis, dan *current issue*. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan 4 (empat) kali pembahasan, dengan rincian:

- 1) DKO Kemenkeu-One Periode triwulan IV tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017.
- 2) DKO Kemenkeu-One Periode triwulan I tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017.
- 3) DKO Kemenkeu-One Periode triwulan II tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017.
- 4) DKO Kemenkeu-One Periode triwulan III tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2017.

Untuk pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One periode triwulan I tahun 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal mengagendakan pada tanggal 22 Januari 2018. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi capaian sampai dengan 31 Desember 2017 diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJKN sebesar 108,68%.

c. Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Kinerja Tahun 2017

Reviu pengelolaan kinerja merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menilai secara detail kualitas dokumentasi serta substansi implementasi pengelolaan kinerja pada unit eselon I. Proses evaluasi di antaranya dilakukan dengan menguji kelengkapan dokumen, kualitas kontrak kinerja, ketepatan proses *cascading* dan *alignment*, intensitas internalisasi pengelolaan kinerja, serta kualitas *monitoring* dan evaluasi kinerja. Reviu pengelolaan kinerja pada tahun 2017 dilakukan pada Direktorat Penilaian (13 s.d. 14 Juni 2017), Direktorat Lelang (15 s.d. 16 Juni 2017), Kanwil DJKN Jawa Timur (22 s.d. 23 Agustus 2017), KPKNL Sidoarjo (24 s.d. 25 Agustus 2017), dan KPKNL Jambi (10 s.d. 11 Agustus 2017).

and echelon I unit performance managers. The discussions include performance evaluation of Kemenkeu-One, progress on strategic initiatives, and current issues. In 2017, four discussions were held. They are:

- 1) DKO Kemenkeu-One for the fourth quarter of 2016, 27 January 2017.
- 2) DKO Kemenkeu-One for the first quarter of 2017, 27 April 2017.
- 3) DKO Kemenkeu-One for the second quarter of 2017, 31 July 2017.
- 4) DKO Kemenkeu-One for the third quarter of 2017, 26 October 2017.

The discussion on the performance achievements of the Ministry of Finance in the first quarter of 2017 has been scheduled by the Bureau of Planning and Finance, the Secretariat General for January 22, 2018. Based on the results of monitoring and evaluation of performance until December 31, 2017, the DJKN Organization Performance Rating (NKO) was 108.68 %.

c. Review of Performance Management 2017

The review of performance management is an annual agenda undertaken by the Bureau of Planning and Finance to assess in detail the quality of documentation as well as the substance of implementation of performance management in echelon I units. The evaluation process is done by examining document completeness, contract performance quality, cascading and alignment accuracy, performance management, and quality of monitoring and performance evaluation. The review of performance management in 2017 was conducted at the Directorate of Valuation (13 to 14 June 2017), Directorate of Auction (15 to 16 June 2017), DJKN Regional Office East Java (22 to 23 August 2017), KPKNL Sidoarjo (24 to 25 August 2017), and KPKNL Jambi (10 to 11 August 2017).

Perkembangan Internal

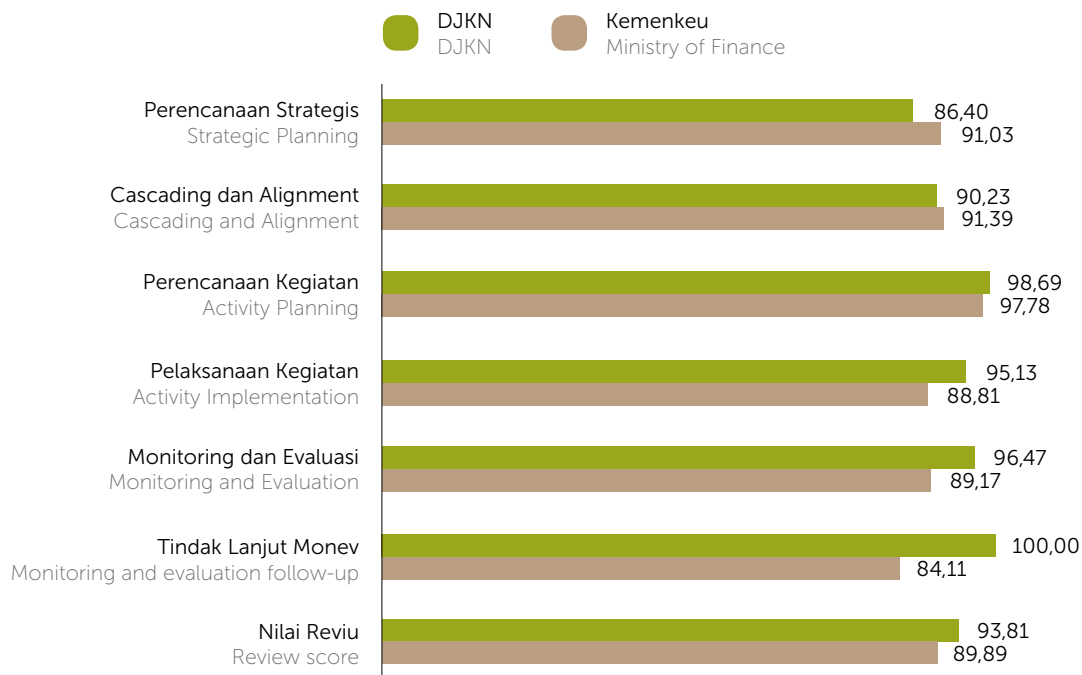
Internal Developments

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan revaluasi pengelolaan kinerja dan survei SFO adalah untuk mengetahui seberapa baik kualitas pengelolaan kinerja yang telah dijalankan serta memberikan umpan balik (*feed back*) yang positif bagi organisasi dalam memperbaiki kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Hasil revaluasi pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN adalah sebagai berikut:

Through these reviews and SFO surveys, it is hoped that the extent of quality of performance management that has been executed can be known, and at the same time, positive feedback for the organization in improving the quality of future performance management can also be obtained. The results of the review of performance management in the DJKN environment are reproduced below.

Perbandingan Nilai Revaluasi Pengelolaan Kinerja DJKN dengan Kemenkeu

Comparison between DJKN's Result of Performance Management Review with that of the Ministry of Finance



Sumber: Laporan Hasil Revaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2017

Source: Review Report on Performance Management 2017

- d. *Refinement* Peta Strategis dan IKU Tahun 2018
Sebagai persiapan untuk penandatanganan kontrak kinerja tahun 2018, proses *refinement* peta strategis dan IKU telah dilakukan sejak bulan November tahun 2017. Pembahasan penyusunan kontrak kinerja Kemenke-*One* dilakukan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, sementara untuk kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* dilakukan melalui *one-on-one meeting* antara Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Direktorat Teknis. Proses pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana kerja tahunan, profil risiko, dokumen inisiatif strategis transformasi kelembagaan, dan arahan-arahan pimpinan (pending matters).

Hasil *refinement* peta strategis dan IKU tahun 2018 yang cukup berbeda dengan tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) penetapan target IKU yang lebih challenging untuk indikator rasio utilisasi aset tetap (85%), nilai PNB (Rp3,5 triliun), dan nilai pokok lelang (Rp 16,5 triliun);
- 2) penetapan IKU baru untuk menjaga efektivitas pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN, kualitas pelayanan DJKN, dan produktivitas pelayanan lelang;
- 3) penetapan IKU untuk mendorong pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani untuk 13 KPNL.

- d. Refinement of Strategic Maps and IKU 2018

In preparation for the signing of performance contracts 2018, the process of strategic map refinement and IKU has been conducted since November 2017. Discussions of the drafting of Kemenke-*One* performance contracts were carried out with the Bureau of Planning and Finance, Secretariat General, while that of the Kemenkeu-*Two* were done through one-on-one meeting between the Secretariat of the Directorate General and the Technical Directorates. The process of refinement was undertaken by taking into account other planning documents, such as annual workplans, risk profiles, strategic documents of strategic transformation, and pending matters.

The results of refinement of strategic maps and IKU 2018 are quite different with that of 2017 in the following terms:

- 1) more challenging IKU target for fixed asset utilization ratio (85%), value of PNB (Rp3.5 trillion), and auction price (Rp 16.5 trillion);
- 2) establishment of new IKU to maintain the effectiveness of supervision and control of BMN management, DJKN service quality, and productivity of auction service;
- 3) determination of IKU to encourage the attainment of the predicate as Corruption-Free Area/Clean Serving Bureaucracy Area for 13 service offices.

Penerapan Pengendalian Internal

Implementation of Internal Control

DJKN terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk mendukung itu, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 152/KMK.09/2011 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 435/KMK.09/2012 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian

DJKN continuously strives to improve the implementation of internal control in every execution of its duties and functions as mandated in Government Regulation Number 60 of 2008 regarding Government Internal Control System. To support it, the Minister of Finance Decree (KMK) Number 152/KMK.09/2011 has been stipulated as amended by KMK Number 435/KMK.09/2012 concerning Enhancement of Implementation of Internal Control in the Ministry of Finance and Ministry

Perkembangan Internal

Internal Developments

Keuangan dan KMK Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2017, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal Sekretariat DJKN telah melakukan kegiatan terkait pengendalian internal sebagai berikut:

- 1) menetapkan Rencana Pemantauan Tahunan DJKN Tahun 2017 sebagai pedoman Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan DJKN dalam melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian intern;
- 2) menyusun perangkat pemantauan pengendalian utama beserta manualnya sebagai pedoman melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian intern di lingkungan DJKN tahun 2016;
- 3) menyusun perangkat evaluasi yang digunakan bagi UKI Kanwil atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang dilakukan UKI KPKNL;
- 4) menyusun perangkat Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR) beserta manualnya sebagai pedoman UKI di lingkungan DJKN dalam melaksanakan kegiatan PEIKR yang pada akhirnya digunakan untuk mengukur efektivitas pengendalian internal yang telah dilakukan;
- 5) mengembangkan aplikasi mini PEIKR berbasis Ms. Excel sebagai alat bantu bagi UKI di lingkungan DJKN dalam melaksanakan kegiatan PEIKR;
- 6) melaksanakan sosialisasi aplikasi mini PEIKR pada 16 s.d. 20 Oktober 2017 dengan mengundang perwakilan UKI Kanwil dan UKI KPKNL. sekaligus menyampaikan hasil evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern di lingkungan DJKN.

of Finance Decree Number 32/KMK.09/2013 on the Implementation Framework of Internal Control and Technical Guidelines for Monitoring Internal Control within the Ministry of Finance.

In 2017, the Division of Organization and Internal Compliance, the Secretariat of the Directorate General has conducted activities related to internal control, as follows:

- 1) establishing DJKN's 2017 Annual Monitoring Plan as the guidance of the Internal Compliance Unit (UKI) within DJKN in carrying out internal control monitoring activities;
- 2) preparing the main control monitoring device and its manual as a guide to carry out internal control monitoring activities in 2016 within DJKN;
- 3) formulating evaluation tools to be used by Regional Offices's UKI for internal control monitoring conducted by Service Offices's UKI;
- 4) preparing the tools for Monitoring of Implementation Effectiveness and Design Adequacy (PEIKR) along with its manual as the guidance of UKI in DJKN environment in carrying out PEIKR activity which is ultimately used to measure the effectiveness of internal control that has been implemented;
- 5) developing Microsoft Excel-based PEIKR mini applications as a tool for UKI within DJKN in conducting PEIKR activities;
- 6) conducting the dissemination of mini PEIKR applications on 16–20 October, 2017 by inviting representatives of Regional Offices's and Service Offices's UKI while delivering the result of evaluation of internal control monitoring activities within DJKN.

Pembangunan Budaya Antikorupsi

Nurturing Anticorruption Culture

1. Pakta Integritas

Pakta Integritas merupakan dokumen yang berisi pernyataan atau janji untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai peraturan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dari dilaksanakannya penandatanganan pakta integritas adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel dan termasuk untuk mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab dan bermartabat. Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-16/MK.1/2012 seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas. Dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

2. Pelaporan Harta Kekayaan

Kewajiban pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi terhadap penyelenggara negara. Media ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara melalui pengawasan kejujuran dan deteksi kemungkinan adanya perbuatan memperkaya diri secara ilegal. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan DJKN saat ini dilakukan kepada beberapa pihak (KPK, Inspektorat Jenderal Kemenkeu, dan KemenpanRB) dengan menggunakan media yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 (tiga) bentuk laporan harta kekayaan:

- 1) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Sesuai Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat

1. Integrity Pact

The Integrity Pact is a document that contains a statement or a pledge to perform tasks, functions, responsibilities, authorities, and roles according to the rules and the ability to avoid corruption, collusion and nepotism. The purpose of the signing of an integrity pact is to strengthen the common commitment in preventing and eradicating corruption; to foster openness and honesty, and to facilitate excellence, effective, and accountable tasks, and also to inspire responsible and dignified personalities. In accordance with Circular Letter of the Minister of Finance No. SE-16/MK.1/2012 all employees within the Directorate General of State Asset Management have signed the Integrity Pact. The document reflects an accountable, transparent and responsible government administration in creating good governance.

2. Wealth Reporting

The obligation to report wealth is for state officials is one of the instruments of corruption prevention. It is expected that this obligation will increase public confidence in the state officials through observance of honesty and detection of possible illegal enrichment. The reports by state officials in the DJKN environment are currently submitted to several parties (KPK, Inspectorate General of Ministry of Finance, and KemenpanRB) using different media. There are at least three wealth reports.

- 1) State Official's Wealth Report (LHKPN)
In accordance with Law No. 28 of 1999 on the Implementation of a Clean and Free State of Corruption, Collusion and Nepotism, every State Official shall be willing to examine his fortunes, whether before serving, during his tenure, or even after taking office. State Officials are also required to report their assets at the time of their first term, mutation, promotion and retirement, the Minister of Finance has issued KMK No. 13/KMK.01/2017

Perkembangan Internal

Internal Developments

pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan KMK No. 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai pengganti KMK No 38/KMK.01/2011.

- 2) Laporan Harta Kekayaan (LHK) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK.09/2017 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi. Pada tahun 2017, sebanyak 3.426 dari 3.502 pejabat/pegawai di lingkungan DJKN telah menyampaikan laporan tepat waktu atau sebesar 97,8%.
- 3) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Wajib LHKASN adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Wajib LHKPN).

3. Pelaporan Penerimaan Gratifikasi

Melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) DJKN, pelaporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan sepanjang tahun 2017 adalah 10 (sepuluh) pelaporan dengan jumlah nilai perkiraan sebesar Rp 5,55 juta dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

(in lieu of KMK No. 38/KMK.01/2011) concerning State Officials in the Ministry of Finance Required to Submit State Official's Wealth Reports.

- 2) Wealth Report (LHK) and Personal Tax Report (LP2P)
In accordance with Minister of Finance Decree no. 277/KMK.09/2017 on Mechanisms for Filing Wealth Report and Personal Tax Report for Officials/Employees in the Ministry of Finance Environments, all officials and employees within the Ministry of Finance shall report their wealth and individual taxes. By 2017, a total of 3,426 out of 3,502 or 97.8% of DJKN officials/employees have timely submitted their reports.
- 3) State Civil Apparatus's Wealth Report (LHKASN)
LHKASN is regulated in a Circular Letter of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform (PAN and RB) Number 1 of 2015 on the Obligation of LHKASN Submission within Government Institution. All state civil apparatus must submit LHKASN unless they are officials designated to submit State Official's Wealth Report.

3. Gratification Receipt Reporting

Through the DJKN's UPG (Gratification Control Unit), throughout 2017 ten gratification reports with a total estimated value of Rp 5.55 million were filed, and have been followed up in accordance with applicable provisions, with details as follows:

No	Bentuk Gratifikasi Forms of Gratification	Nilai Taksiran (Rp) Estimated Value (Rp)	Tindaklanjut/Ketetapan Follow-Up Measures
1.	Makanan Foods	300.000,00	Diserahkan ke Yayasan Sosial Donated to Social Institution
2.	Makanan Foods	500.000,00	Diserahkan ke Yayasan Sosial Donated to Social Institution
3.	Uang Cash	400.000,00	Menjadi BMN Assigned as BMN
4.	Uang Cash	1.700.000,00	Menjadi BMN Assigned as BMN
5.	Uang Cash	200.000,00	Menjadi BMN Assigned as BMN
6.	Uang Cash	1.300.000,00	Menjadi Milik Penerima Held by the receiver
7.	Makanan Foods	500.000,00	Diserahkan ke Yayasan Sosial Donated to Social Institution
8.	Makanan Foods	300.000,00	Diserahkan ke Yayasan Sosial Donated to Social Institution
9.	Makanan Foods	150.000,00	Diserahkan ke Yayasan Sosial Donated to Social Institution
10.	Makanan Foods	200.000,00	Diserahkan ke Yayasan Sosial Donated to Social Institution

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Handling of Public Complaint

Pengaduan masyarakat yang ditangani oleh DJKN sebagian besar berasal dari Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) Kementerian Keuangan dan pengaduan langsung kepada unit kerja DJKN, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) **Aplikasi Whistleblowing System (WiSe)**, yaitu aplikasi yang dijadikan media kepada internal Kementerian Keuangan maupun masyarakat umum untuk mengajukan pengaduan terkait berbagai permasalahan baik pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS) maupun pelanggaran pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di antaranya DJKN. Sepanjang tahun 2017 terdapat satu pengaduan terkait tugas dan fungsi DJKN yang disampaikan melalui aplikasi WiSe dan telah ditindaklanjuti sampai dengan selesai.
- 2) **Pengaduan langsung kepada unit kerja DJKN**, yaitu pengaduan yang langsung disampaikan kepada unit kerja DJKN maupun melalui *Information Desk and Call Center* DJKN (500991). Sepanjang tahun 2017 terdapat 10 (sepuluh) pengaduan terkait tugas dan fungsi DJKN yang disampaikan langsung kepada unit kerja DJKN dan telah ditindaklanjuti.

Public complaints handled by DJKN mostly come from the Ministry of Finance's Whistleblowing System (WiSe) Application and from a direct complaint with the DJKN working units, with details as follows.

- 1) **Whistleblowing System (WiSe) Application** is an application serving as a public and internal medium to file complaints related to various issues, including civil servants discipline violation and service violations within the Ministry of Finance, including DJKN. Throughout 2017 there was only one complaint related to DJKN's duties and functions delivered through the WiSe application, and it has been resolved
- 2) **Direct complaints with the DJKN working units.** This type of complaint comes through a complaint mechanism directly submitted to the DJKN working units or through the Information Desk and Call Center DJKN (500991). Throughout 2017, ten complaints related to DJKN duties and functions submitted directly to the DJKN working units, all of them have been followed-up.

Daftar Kantor Pelayanan DJKN

Our Offices



Kanwil dan
KPKNL Manado



KPKNL Gorontalo



KPKNL Palu



KPKNL Ternate



KPKNL Sorong



Kanwil DJKN
Papua dan Maluku



KPKNL Mamuju



KPKNL Kendari



KPKNL Palopo



KPKNL Mataram



KPKNL Bima



17
KANTOR
WILAYAH
Regional Office

71
KPKNL
State Asset Management
& Auction Service Office

Daftar Kantor Pelayanan DJKN

Our Offices

No	Wilayah Area	Alamat Address
1.	Kanwil DJKN Aceh KPKNL Banda Aceh KPKNL Lhokseumawe	Jl. Tengku Chik Ditiro Gedung C Lt. 2 (GKN), Banda Aceh - 23001 Jl. Tengku Chik Di Tiro GKN Gedung C Lt. 1, Banda Aceh - 23001 Jl. Darussalam No. 3 Kota Lhokseumawe - 24312
2.	Kanwil DJKN Sumatera Utara KPKNL Medan KPKNL Pematang Siantar KPKNL Kisaran KPKNL Padangsidempuan	Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 a Gedung Keuangan Negara Lt. 4, Medan - 20152 Jl. P. Diponegoro No. 30 a Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Medan - 20152 Jl.Sisingamangaraja No 79 Pematang Siantar - 21147 Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 47 Kisaran - 21224 Jl. Kenanga No. 99 Padangsidempuan - 22725
3.	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau KPKNL Padang KPKNL Bukit Tinggi KPKNL Pekanbaru KPKNL Batam KPKNL Dumai	Jl. Pepaya No. 77 (Kantor BPKP Lama) Pekanbaru Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 (Gedung KPPN Lantai 2), Padang Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 3 Bukit Tinggi - 26116 Jalan Jend. Sudirman No. 24 Simpang Tiga Jl. Engku Putri (depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam Center - Batam Jl. Sultan syarif kasim (no 55),Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai - 28824
4.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Jambi KPKNL Palembang KPKNL Lahat KPKNL Pangkal Pinang	Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negara Lt. 3, Palembang - 30135 Jl. Dr.Soetomo No.17 Jambi - 36113 Jl. Kapt. A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negara Lt.1 Blok C Palembang - 30135 Jl. Serma Jamis No. 65 Pasar Baru, Lahat - 31411 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8 Pangkal Pinang

No	Wilayah Area	Alamat Address
5.	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	Jl. Raden Intan No. 121 Bandar Lampung
	KPKNL Bengkulu	Jl. Museum No. 2, Padang Harapan Bengkulu - 38225
	KPKNL Bandar Lampung	Jl. Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung
	KPKNL Metro	Jl. Imam Bonjol No. 26 Kota Metro
6.	Kanwil DJKN Banten	Jl. Diponegoro No. 9 - 11 Serang - 42112
	KPKNL Serang	Jl. Raya Serang - Cilegon Km. 3 Legog, Serang - 42162
	KPKNL Tangerang	Jalan Taman Makam Pahlawan (T.M.P.) Taruna - Kota Tangerang 15111 (alamatnya sama)
	KPKNL Serpong	Jalan Taman Makam Pahlawan (T.M.P.) Taruna - Kota Tangerang 15111 (alamatnya sama)
7.	Kanwil DJKN DKI Jakarta	Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat
	KPKNL Jakarta I	Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat
	KPKNL Jakarta II	Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat
	KPKNL Jakarta III	Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat
	KPKNL Jakarta IV	Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat
	KPKNL Jakarta V	Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat
8.	Kanwil DJKN Jawa Barat	Jl. Asia Afrika No. 114, Gedung Keuangan Negara, Bandung - 40261
	KPKNL Bandung	Jl. Ambon No. 1, Bandung - 40115
	KPKNL Bekasi	Jl. Sersan Aswan No. 8 D, Bekasi - 17113
	KPKNL Bogor	Jl. Veteran No. 45, Bogor - 16113
	KPKNL Purwakarta	Jl. Siliwangi No. 9, Purwakarta - 41119
	KPKNL Tasikmalaya	Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Tasikmalaya - 46125
	KPKNL Cirebon	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48 Cirebon - 451122

Daftar Kantor Pelayanan DJKN

Our Offices

No	Wilayah Area	Alamat Address
9.	Kanwil DJKN Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Jl. Imam Bonjol No. 1 d, Gedung Keuangan Negara, Semarang - 50142
	KPKNL Semarang	Jl. Imam Bonjol No. 1 D Gedung Keuangan Negara II Lt. 3
	KPKNL Surakarta	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 141, Surakarta - 57136
	KPKNL Pekalongan	Jl. Sriwijaya No. 1 , Pekalongan - 51119
	KPKNL Tegal	Jl. KS. Tubun No. 12, Tegal - 52124
	KPKNL Yogyakarta	Jl. Kusuma Negara No. 11 Gedung B, Gedung Keuangan Negara Yogyakarta - 55166
	KPKNL Purwokerto	Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto - 53141
10.	Kanwil DJKN Jawa Timur	Jl. Dinoyo No. 111 Gedung Keuangan Negara II Lt. 8 Surabaya - 60265
	KPKNL Surabaya	Jl. Indrapura No. 5 Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Surabaya - 60175
	KPKNL Sidoarjo	Jl. Erlangga No. 161, Sidoarjo, Jawa Timur - 61214
	KPKNL Malang	Jl. S. Supriyadi No. 157, Malang
	KPKNL Jember	Jl. Slamet Riyadi No. 344 A, Jember - 68117
	KPKNL Pamekasan	Jl. Stadion No. 104, Pamekasan, Jawa Timur - 69323
	KPKNL Madiun	Jl. Serayu Timur No. 141, Madiun - 63133
11.	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	Jl. Letnan Jenderal Sutoyo No. 122 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat - 78121
	KPKNL Pontianak	Jl. Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak - 78116
	KPKNL Singkawang	Jl. Aliyanyang No. 02, Singkawang, Kalimantan Barat - 79123
12.	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	Jl. Ahmad Yani, Km. 29,5 - Banjarbaru Kalimantan Selatan - 70721
	KPKNL Palangkaraya	Jl. G. Obos Km. 1 No. 19, Palangkaraya - 73111
	KPKNL Pangkalan Bun	Jl. Pakunegara No. 32, Pangkalan Bun - 74114
	KPKNL Banjarmasin	Jl. Pramuka No. 7, Banjarmasin - 70249

No	Wilayah Area	Alamat Address
13.	Kanwil DJKN Kalimantan Timur	Jl. M. Yamin No. 4, Samarinda - 75123
	KPKNL Balikpapan	Jl. Ahmad Yani No. 68 Gedung Keuangan Negara Lt. 2 Balikpapan - 76113
	KPKNL Samarinda	Jl. Yos Sudarso No. 157, Samarinda
	KPKNL Tarakan	Jl. Diponegoro No. 188, Tarakan Kalimantan Timur - 77114
	KPKNL Bontang	Jl. MH Thamrin No 43 Bontang, Kalimantan Timur-75311
14.	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	Jl. Dr. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon Lt.3 Denpasar - 80235
	KPKNL Denpasar	Jl. Dr. Kusumaatmaja, Gedung Keuangan Negara I Renon, Denpasar - 80235
	KPKNL Singaraja	Jl. Udayana No. 10, Gedung Keuangan Negara Lt. 2 Singaraja
	KPKNL Mataram	Jl. Pendidikan No. 24, Mataram - 83125
	KPKNL Bima	Jl. Soekarno Hatta No. 177, Kota Bima - 84115
	KPKNL Kupang	Jl. Frans Seda, Gedung Keuangan Negara Lt. 4 NTT - 85228 Kupang -
15.	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	Jl. Jend. Urip Sumohardjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara II Lt. 4 Makassar - 90232
	KPKNL Makassar	Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara I Lt. 2 Makassar - 90232, Kotak Pos 1280
	KPKNL Pare Pare	Jalan Jend. Sudirman No. 93, Parepare
	KPKNL Palopo	Jl. Andi Kambo No. 55 Palopo - 91921
	KPKNL Kendari	Jl. I Made Sabara No. 6 Kendari - 93114

Daftar Kantor Pelayanan DJKN

Our Offices

No	Wilayah Area	Alamat Address
13.	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	Jl. Bethesda No. 6-8 Lt. 4 Manado
	KPKNL Manado	Jl. Bethesda No. 6-8 Gedung Keuangan negara Lt. 3, Manado - 95113
	KPKNL Gorontalo	Jalan Achmad Nadjamudin No. 7
	KPKNL Palu	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55, Palu - Sulawesi Tengah
	KPKNL Ternate	Jl. Yos Sudarso No. 2, Ternate - 97712
14.	Kanwil DJKN Papua dan Maluku	Jl. Pasific Permai Komplek Ruko Dok II Gedung Indoprima Lt. 5, Jayapura - 99111
	KPKNL Ambon	Jl. Raya Patimura No. 18 Gedung Keuangan Negara Lt. 5 Ambon - 97124, Kotak Pos 1023
	KPKNL Jayapura	Gedung Indoprima Lantai 6 Ruko Pasifik Permai, Jayapura - 99111
	KPKNL Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 7, Gedung Keuangan Negara, Sorong - 98414
	KPKNL Biak	Jl. Majapahit No. 1, Biak



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2017 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.605.176.505.506 atau mencapai 316 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp507.604.605.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp672.835.491.545 atau mencapai 82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp833.636.365.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017 .

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp84.575.655.997.531 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.508.774.408.981; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.407.740.976.481; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp99.997.500; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp80.659.040.614.569.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp63.572.700.164.593 dan Rp21.002.955.832.938.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.708.495.081.101, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.109.729.965.055 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp401.234.883.954. Kegiatan Non Operasional mengalami surplus Rp1.787.904.936 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp399.446.979.018.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp967.865.946.748 ditambah Defisit-LO sebesar Rp399.446.979.018 kemudian ditambah koreksi-koreksi senilai Rp(152.541.741.847) serta transaksi antar entitas Rp20.587.078.607.055 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp21.002.955..

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Daftar Isi
Table of Content

Kilas Kinerja
Performance at A Glance

Profil DJKN
DJKN Profile

Perkembangan
Pengelolaan Kekayaan
Negara
Developments in
State Asset Management

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	507,604,605,000	1,605,176,505,506	316.23	468,023,346,206
JUMLAH PENDAPATAN		507,604,605,000	1,605,176,505,506	316.23	468,023,346,206
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	239,092,415,000	225,503,244,648	94.32	228,802,752,351
Belanja Barang	B.4	496,232,420,000	351,273,157,544	70.79	256,257,616,236
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		735,324,835,000	576,776,402,192	78.44	485,060,368,587
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	1,931,561,000	1,482,669,550	76.76	723,412,804
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	61,580,901,000	61,181,998,061	99.35	30,625,606,271
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	20,947,902,000	20,400,321,804	97.39	13,947,994,478
Belanja Jalan Irigasi Jaringan	B.9	-	-	-	89,449,000
Belanja Modal Lainnya	B.10	10,846,746,000	10,219,856,495	94.22	56,894,260
Belanja Modal BLU	B.11	3,004,420,000	2,774,243,443	92.34	3,076,920,888
Jumlah Belanja Modal		98,311,530,000	96,059,089,353	97.71	48,520,277,701
JUMLAH BELANJA		833,636,365,000	672,835,491,545	80.71	533,580,646,288

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Daftar Isi
Table of Content

Kilas Kinerja
Performance at A Glance

Profil DJKN
DJKN Profile

Perkembangan
Pengelolaan Kekayaan
Negara
Developments in
State Asset Management

NERACA

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam satuan rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-17	31-Des-16
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1	360.845.300	194.584.526
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1.2	1.530.997.231	557.248.031
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.3	185.863.216.713	109.429.217.921
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.1.4	1.151.641.793.066	87.490.347.155
Investasi Jangka Pendek BLU	C.1.1.5	87.490.347.155	
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.1.1.6	960.283.125	395.212.090
Uang Muka Belanja	C.1.1.7	78.951.679	
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.1.8	27.037.467.616	13.472.123.570
Piutang PNB (Piutang Bukan Pajak)	C.1.1.9	38.547.410	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PNB (Piutang Bukan Pajak)	C.1.1.10	(192.737)	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		38.354.673	-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.1.11	16.084.290	252.555.330
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar TP/TGR	C.1.1.12	(80.421)	(130.655.500)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR		16.003.869	121.899.830
Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.1.13	48.542.565.452	2.704.270.732
Penyisihan Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		(242.712.828)	(13.521.354)
Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		48.299.852.624	2.690.749.378
Persediaan	C.1.1.10	5.456.295.930	5.297.380.401
Persediaan Badan Layanan Umum			174.524.675
Jumlah Aset Lancar		1.508.774.408.981	222.514.036.955
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.1.2		
Tagihan TP/TGR	C.1.2.1	217.150.097	4.579.050
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.1.2.2	(117.152.597)	(22.895)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Netto		99.997.500	4.556.155
Jumlah Piutang Jangka Panjang		99.997.500	4.556.155
ASET TETAP	C.1.3		
Tanah	C.1.3.1	1.781.835.875.275	411.269.092.036
Peralatan dan Mesin	C.1.3.2	483.149.465.807	426.680.111.659
Peralatan dan Mesin Pada BLU	C.1.3.3	-	2.659.735.598
Gedung dan Bangunan	C.1.3.4	502.163.777.684	500.664.813.799
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.1.3.5	3.634.350.862	5.936.087.054
Aset Tetap Lainnya	C.1.3.6	1.534.065.043	3.121.744.039
Aset Tetap Lainnya pada BLU	C.1.3.7	-	417.185.290
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.3.8	18.651.234.511	10.010.298.607
Akumulasi Penyusutan	C.1.3.9	(383.227.792.701)	(414.106.688.137)
Jumlah Aset Tetap		2.407.740.976.481	946.652.379.945
ASET LAINNYA	C.1.4		
Aset Tak Berwujud	C.1.4.1	33.021.020.371	22.663.421.971
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.1.4.2	37.746.815.725.695	
Aset Lain-Lain	C.1.4.3	54.190.403.878.051	26.643.716.795
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.1.4.4	(11.311.200.009.548)	(47.393.763.160)
Jumlah Aset Lainnya		80.659.040.614.569	1.913.375.606
JUMLAH ASET		84.575.655.997.531	1.171.084.348.661
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.1.1	13.975.446.527.031	110.312.185.486
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan		1.053.991	
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.2	45.508.132.060	89.759.718.377
Uang Muka dari KPPN	C.2.1.3	360.845.300	194.584.526
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.4	823.606.211	261.164.146
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.022.140.164.593	200.527.652.535
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.2.1		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	C.2.1.1	49.550.560.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		49.550.560.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		63.572.700.164.593	-
EKUITAS	C.3		
JUMLAH EKUITAS		21.002.955.832.938	1.171.084.348.661

Daftar Isi
Table of Content

Kilas Kinerja
Performance at A Glance

Profil DJKN
DJKN Profile

Perkembangan
Pengelolaan Kekayaan
Negara
Developments in
State Asset Management

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.708.495.081.101	546.693.130.854
JUMLAH PENDAPATAN		1.708.495.081.101	546.693.130.854
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	233.179.288.150	231.386.768.476
Beban Persediaan	D.3	17.012.344.615	15.350.630.596
Beban Barang dan Jasa	D.4	134.805.383.534	108.642.064.258
Beban Pemeliharaan	D.5	46.789.406.973	42.329.466.288
Beban Perjalanan Dinas	D.6	144.212.546.956	88.621.302.563
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.533.514.896.902	66.071.997.278
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	216.097.925	11.186.544
JUMLAH BEBAN		2.109.729.965.055	552.413.416.003
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(401.234.883.954)	(5.720.285.149)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		909.464.007	(203.011.085)
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya		878.440.929	1.146.405.463
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.787.904.936	943.394.378
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(399.446.979.018)	(4.776.890.771)
SURPLUS/DEFISIT LO		(399.446.979.018)	(4.776.890.771)

Daftar Isi
Table of Content

Kilas Kinerja
Performance at A Glance

Profil DJKN
DJKN Profile

Perkembangan
Pengelolaan Kekayaan
Negara
Developments in
State Asset Management

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-17	31-Des-16
EKUITAS AWAL	E.1	967.865.946.748	946.088.288.201
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(399.446.979.018)	(4.776.890.771)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3		-
Penyesuaian Nilai Kewajiban			-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4		5
SELISIH REVALUASI ASET		1.388.706.710.288	
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	(3.732.911.678)	(24.643.820.802)
KOREKSI NILAI ASET TETAP LAIN-LAIN	E.6	(1.537.515.540.457)	(362.017.933)
JUMLAH KOREKSI KUMULATIF PERUBAHAN		(152.541.741.847)	(25.005.838.730)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	20.587.078.607.055	51.560.388.048
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS		20.035.089.886.190	21.777.658.547
EKUITAS AKHIR	E.8	21.002.955.832.938	967.865.946.748

www.artmosphere-design.com



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT

Gedung Syafrudin Prawiranegara

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Telp. : 021-381 0162

Fax : 021-384 7742

www.djkn.kemenkeu.go.id